



Pemprov Jambi

© 2024

Peraturan Daerah Provinsi Jambi
Nomor 12 Tahun 2024

RPJPD PROV. JAMBI 2025-2045

*Terwujudnya
Jambi Maju,
Sejahtera &
Berkelanjutan*

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045



Transformasi
SOSIAL



Transformasi
EKONOMI



Transformasi
TATA KELOLA
PEMERINTAHAN



SALINAN

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2025-2045**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAMBI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6007);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI

dan

GUBERNUR JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2025-2045

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3. Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jambi.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jambi adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan 2045.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi untuk mencapai tujuan.

Pasal 2

- (1) RPJPD Provinsi Jambi menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJPD Kabupaten/Kota.
- (2) RPJPD Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.

BAB II SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 3

Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
- BAB IV : VISI DAN MISI DAERAH
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
- BAB VI : PENUTUP

Pasal 4

Isi beserta uraian RPJPD Provinsi Jambi tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi Jambi.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD Provinsi Jambi mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.

BAB IV PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Tahapan penyusunan Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara perubahan RPJPD.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

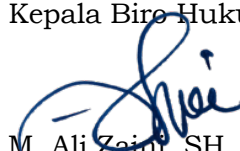
Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 18 Oktober 2024

Pjs. GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. SUDIRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Z. Plt. Kepala Biro Hukum,


M. Ali Zaini, SH, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730729 200012 1 002

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 18 Oktober 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

ARIEF MUNANDAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 12
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI: (12-267/2024)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek, dan dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing masing. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota dan menjadi pedoman dalam menyusun RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun. Berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memuat Visi, Misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup besar bagi penyusunan RPJM Daerah 5 (lima) tahunan dan RKPD (tahunan).

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 adalah untuk:

- a. menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Jambi;
- b. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional;
- c. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/kota;
- d. menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
- f. mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah sesuai bidang dan tugasnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 49

DAFTAR ISI

SALINAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI
JAMBI TAHUN 2025-2045

DAFTAR ISIi

DAFTAR TABELiii

DAFTAR GAMBARv

BAB I PENDAHULUAN..... 1-1

1.1 Latar Belakang 1-1

1.2 Dasar Hukum 1-2

1.3 Hubungan Antar Dokumen..... 1-5

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN 1-6

1.4.1 Maksud..... 1-6

1.4.2 Tujuan..... 1-7

1.5 Sistematika Penulisan 1-7

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2-1

2.1 Aspek Geografi dan Demografi 2-1

2.1.1 Geografi 2-1

2.1.2 Demografi 2-26

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat 2-29

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi 2-29

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya..... 2-37

2.3 Aspek Daya Saing Daerah..... 2-46

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah 2-46

2.3.2 Daya Saing SDM 2-51

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah..... 2-52

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi..... 2-58

2.4 Aspek Pelayanan Umum 2-58

2.4.1 Indeks Pelayanan Publik..... 2-58

2.4.2 Indeks Inovasi Daerah 2-59

2.4.3 Indeks SPBE 2-60

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 2-61

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik . 2-61

2.6.1 Proyeksi Penduduk 2-61

2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana..... 2-65

2.6.3	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	2-74
2.7	Rencana Sistem Jaringan Energi	2-99
2.7.1	Infrastruktur Migas.....	2-99
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH.....	3-1
3.1	Permasalahan Pembangunan.....	3-1
3.1.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal	3-1
3.1.2	Terbatasnya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Perekonomian	3-2
3.1.3	Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia	3-4
3.1.4	Rendahnya Daya Saing Daerah.....	3-7
3.1.5	Degradasi Lingkungan Hidup.....	3-9
3.2	Isu Strategis	3-11
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH	4-1
4.1	VISI.....	4-1
4.2	MISI.....	4-13
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH.....	5-1
5.1	Arah Kebijakan	5-1
5.1.1	Arah Kebijakan Periode 2025 - 2029	5-1
5.1.2	Arah Kebijakan Periode 2030 – 2034.....	5-18
5.1.3	Arah Kebijakan Periode 2035 - 2039	5-33
5.1.4	Arah Kebijakan Periode 2040-2045.....	5-51
5.2	Sasaran Pokok.....	5-70
5.2.1	Arah Pembangunan Daerah	5-70
5.3	Arah Kebijakan Transformasi.....	5-111
5.4	Indikator Utama Pembangunan	5-144
BAB VI	PENUTUP	6-1
6.1	Kaidah Pelaksanaan	6-1
6.1.1	Manajemen Resiko pembangunan.....	6-2
6.1.2	Sistem Insentif.....	6-3
6.1.3	Komunikasi Publik.....	6-4
6.1.4	Mekanisme Perubahan.....	6-4
6.2	Pembiayaan Pembangunan	6-5

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Provinsi Jambi.....	2-1
Tabel 2-2	Luas areal menurut wilayah administrasi di DAS Batanghari	2-6
Tabel 2-3	Nama Sungai yang Melintasi kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota	2-7
Tabel 2-4	Potensi dan Luas Danau di Provinsi Jambi	2-8
Tabel 2-5	Luas wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Jambi menurut kemampuan Pengaturan Iklim	2-11
Tabel 2-6	Tutupan Lahan Provinsi Jambi	2-14
Tabel 2-7	Pola penggunaan lahan di wilayah Provinsi Jambi, tahun 2011-2018	2-15
Tabel 2-8	Kebutuhan dan ketersediaan ruang hidup layak (tidak rawan bencana) bagi penduduk Provinsi Jambi per kabupaten/kota pada tahun 2020.	2-18
Tabel 2-9	Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Jambi.....	2-23
Tabel 2-10	Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi.....	2-25
Tabel 2-11	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018 - 2022	2-27
Tabel 2-12	Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota	2-27
Tabel 2-13	Distribusi Penduduk Menurut Agama tahun 2023.....	2-29
Tabel 2-14	Potensi Bahan Galian Provinsi Jambi.....	2-46
Tabel 2-15	Sumberdaya dan cadangan energi fosil Provinsi Jambi	2-48
Tabel 2-16	Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Provinsi Jambi per Kelompok Pengeluaran Menurut Kabupaten/Kota	2-49
Tabel 2-17	Indeks Pelayanan Publik	2-59
Tabel 2-18	Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jambi.....	2-60
Tabel 2-19	Indeks SPBE Provinsi Jambi	2-60
Tabel 2-20	Proyeksi sebaran penduduk Provinsi Jambi	2-61
Tabel 2-21	Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin	2-62
Tabel 2-22	Parameter dan proyeksi penduduk Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2050	2-63
Tabel 2-23	Proyeksi kebutuhan tempat tinggal	2-66
Tabel 2-24	Proyeksi kebutuhan air minum	2-67
Tabel 2-25	Proyeksi Kebutuhan Listrik	2-68
Tabel 2-26	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit)	2-69
Tabel 2-27	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan	2-69
Tabel 2-28	Arahan Pengembangan TPAS Regional Provinsi Jambi	2-73

Tabel 2-29 Peran dan Fungsi Wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi.....2-74

Tabel 4-1 Target Indikator Sasaran Visi Per Periode Jangka Menengah4-4

Tabel 4-2 Target Sasaran Visi Kabupaten Kerinci4-6

Tabel 4-3 Target Sasaran Visi Kabupaten Merangin.....4-7

Tabel 4-4 Target Sasaran Visi Kabupaten Sarolangun4-7

Tabel 4-5 Target Sasaran Visi Kabupaten Batang Hari.....4-8

Tabel 4-6 Target Sasaran Visi Kabupaten Muaro Jambi.....4-8

Tabel 4-7 Target Sasaran Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur4-9

Tabel 4-8 Target Sasaran Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat4-9

Tabel 4-9 Target Sasaran Visi Kabupaten Kabupaten Tebo.....4-10

Tabel 4-10 Target Sasaran Visi Kabupaten Bungo4-11

Tabel 4-11 Target Sasaran Visi Kota Jambi4-11

Tabel 4-12 Target Sasaran Visi Kota Sungai Penuh4-12

Tabel 5-1 Arah kebijakan transformasi sosial5-112

Tabel 5-2 Arah kebijakan transformasi ekonomi.....5-119

Tabel 5-3 Arah kebijakan transformasi tata kelola pemerintahan5-141

Tabel 5-4 Sasaran pokok dan indikator utama pembangunan.....5-144

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antara RPJPD, RPJPN, RTRW dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya..... 1-6

Gambar 2-1 Peta Administrasi Provinsi Jambi 2-2

Gambar 2-2 Peta administrasi kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam
DAS Batanghari (Sumber: Arbain *et al.* 2015). 2-7

Gambar 2-3 Peta keterdapatan air tanah dan produktivitas akuifer
daerah Provinsi Jambi (Sudadi 2003) 2-10

Gambar 2-4 Peta Daya Tampung Lahan untuk Pengaturan Iklim 2-11

Gambar 2-5 Proporsi luas wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Jambi
menurut kemampuan Pengaturan Iklim 2-12

Gambar 2-6 Peta proyeksi perubahan suhu rata-rata tahunan di
Indonesia 2020-2049 2-13

Gambar 2-7 Peta proyeksi perubahan hari kering di Indonesia 2020-
2049 2-13

Gambar 2-8 Peta proyeksi indeks intensitas presipitasi di Indonesia
2020-2049 2-14

Gambar 2-9 Neraca air wilayah Provinsi Jambi tahun 2020 2-17

Gambar 2-10 Kawasan Strategis Nasional Di Provinsi Jambi 2-20

Gambar 2-11 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jambi..... 2-22

Gambar 2-12 Grafik Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Jambi 2-24

Gambar 2-13 Grafik Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di
Provinsi Jambi 2-26

Gambar 2-14 Piramida penduduk tahun 1990, 2000,2012 dan 2021,
Jambi Dalam Angka, data diolah) 2-28

Gambar 2-15 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2005,
2010,2015,2000, dan 2022 2-31

Gambar 2-16 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha 2-32

Gambar 2-17 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Provinsi
Jambi Tahun 2018 – 2022 (dalam milyar rupiah)..... 2-32

Gambar 2-18 Tingkat Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022..... 2-33

Gambar 2-19 PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Provinsi Jambi Tahun
2018 -2022 (dalam juta rupiah) 2-35

Gambar 2-20 Indeks Gini Provinsi Jambi Tahun 2005,2010,2015,2020
dan 2022..... 2-35

Gambar 2-21 Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun
2018-2022 2-36

Gambar 2-22 Indeks Williamson Provinsi Jambi Tahun 2018-2022..... 2-37

Gambar 2-23 Jumlah Penduduk Miskin,dan Persentase Penduduk
Miskin, Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 2-39

Gambar 2-24	Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2018-2022.....	2-40
Gambar 2-25	IPM Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 dan capaian masing-masing komponen pembentuk IPM	2-41
Gambar 2-26	Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2018-2022	2-43
Gambar 2-27	Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2018-2023	2-44
Gambar 2-28	Angka Putus Sekolah Tahun 2018-2022	2-45
Gambar 2-29	Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan Provinsi Jambi Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2018-2022	2-49
Gambar 2-30	Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi Tahun 2018-2022	2-51
Gambar 2-31	Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Provinsi Jambi Tahun 2018-2022	2-52
Gambar 2-32	Persentase jalan Provinsi Jambi dalam kondisi baik Tahun 2018 – 2022	2-53
Gambar 2-33	Rencana Pola Ruang Provinsi Jambi (RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043)	2-54
Gambar 2-34	Peta Kawasan Industri Provinsi Jambi (RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043).....	2-55
Gambar 2-35	Perkembangan Hotel di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022	2-55
Gambar 2-36	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022	2-56
Gambar 2-37	Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi dibandingkan dengan nasional	2-58
Gambar 2-38	Jumlah kejahatan dan tingkat resiko terkena kejahatan di Provinsi Jambi Tahun 2018-2021	2-58
Gambar 2-39	Rencana sistem pusat permukiman	2-74
Gambar 2-40	Peta Rencana Sistem Prasarana Jaringan Jalan	2-86
Gambar 2-41	Peta rencana sistem jaringan kereta api.....	2-90
Gambar 2-42	Peta Rencana Transportasi Sungai	2-91
Gambar 2-43	Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut.....	2-95
Gambar 2-44	Peta Rencana Transportasi Udara	2-97
Gambar 2-45	Peta Rencana Jaringan Pipa Migas	2-99
Gambar 3-1	Capaian terakhir (2024) terhadap indikator-indikator yang menggambarkan penerapan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	3-1
Gambar 3-2	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2018-2022	3-3
Gambar 3-3	Kesenjangan IPM Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2020 dan 2022 dengan metode baru.....	3-4
Gambar 3-4	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2018-2022	3-5
Gambar 3-5	Usia Harapan Hidup di Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2018-2022	3-6

Gambar 3-6	Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jambi dibanding Provinsi lain dan nasional	3-7
Gambar 3-7	Capaian masing – masing pilar pada Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jambi	3-8
Gambar 3-8	Kontributor emisi sektor energi di Provinsi Jambi selama tahun 2011 – 2017.....	3-9
Gambar 3-9	Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah di Provinsi Jambi.....	3-10
Gambar 3-10	Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi tahun 1990 – 2018 (GGP, 2019).....	3-11
Gambar 3-11	Perkembangan rasio ketergantungan Provinsi Jambi	3-13
Gambar 3-12	perkembangan proporsi penduduk lansia Provinsi Jambi	3-14
Gambar 4-1	Sasaran Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045	4-3
Gambar 4-2	Alur perwujudan transformasi Provinsi Jambi	4-16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing yang dilakukan daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW). RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan berdasarkan prinsip hak asasi.

Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penyusunannya meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas – bawah, bawah – atas, holistik – tematik, integratif dan spasial.

Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan ini dilakukan oleh Bappeda Provinsi Jambi dengan melibatkan narasumber dari akademisi dan praktisi, serta instansi terkait seperti Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi

Jambi, Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri. Pendekatan atas – bawah dan bawah atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam berbagai forum FGD yang dilakukan, Forum Konsultasi Publik, serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Selain itu dilakukan pula penyelarasan dan internalisasi arahan nasional yang tertuang dalam RPJPN kedalam RPJPD Provinsi Jambi, baik melalui pengejawantahan pedoman penyelarasan muatan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 maupun dalam forum penyelarasan. Sedangkan pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi jangka panjang yang dihasilkan dari beberapa pendekatan yang telah dilakukan sebelumnya kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dibahas bersama dengan DPRD.

Sementara itu, pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur dan bagian pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Sedangkan pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah, dan dipertegas melalui pendekatan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

1.2 Dasar Hukum

Landasan idiil dalam penyusunan RPJPD ini adalah Pancasila dan Landasan Konstitusional adalah UUD 1945, sedangkan, landasan operasional meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 161, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6007);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7).

17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
19. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004, RPJPD merupakan satu kesatuan yang utuh dari dokumen perencanaan lainnya. Hubungan antara RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, yaitu:

1. RPJPD Provinsi dan RPJPN

RPJPD Provinsi disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Hal tersebut perlu dilakukan karena rencana pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga dalam rangkai pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka pembangunan daerah harus memedomani rencana pembangunan nasional.

2. RPJPD Provinsi dan RTRW Provinsi

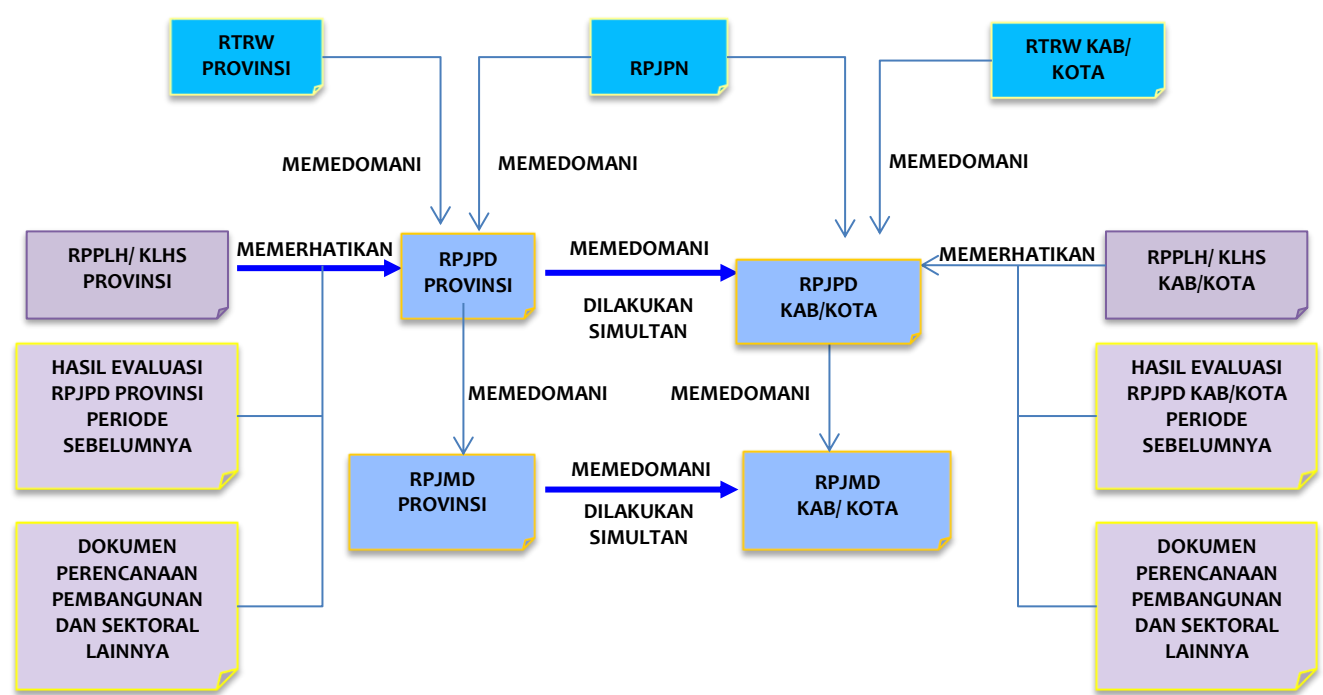
RPJPD Provinsi disusun berpedoman pula pada RTRW Provinsi. Sebagai perencanaan spasial, maka sebagai dasar dalam menetapkan lokasi pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi harus memedomani RTRW Provinsi yang merupakan pedoman perencanaan spasial. Dalam menyeimbangkan kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*) ruang agar mendekati kondisi optimal, maka pendekatan perencanaan dilakukan dengan menyerasikan kegiatan antar sektor dengan kebutuhan ruang dan potensi sumber daya alam

yang berdasarkan kelestarian lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.

3. RPJPD Provinsi dan RPJMD Provinsi

RPJPD mempunyai periode perencanaan selama 20 (dua puluh) tahun, dimana terdapat 4 tahap RPJMD didalamnya. Oleh sebab itu, RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD untuk setiap jangka waktu lima tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD menjadi acuan bagi para calon kepala daerah untuk menyusun visi dan misi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Hubungan antara RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat digambarkan berikut ini.



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024
Gambar 1.1 Hubungan Antara RPJPD, RPJPN, RTRW dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

Penyusunan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan arah kebijakan dan sasaran pokok secara terarah, efektif, efisien dan terpadu dalam mendorong terwujudnya visi dan misi jangka panjang Provinsi Jambi Tahun 2025-2045.

Dokumen RPJPD Provinsi Jambi merupakan acuan dan pedoman resmi bagi Pemerintah Provinsi Jambi dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah setiap tahapan dalam periode 2025-2045. Sejalan dengan itu, Dokumen RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 juga akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RPJPD Kabupaten/Kota sehingga tercipta sinkronisasi dan koordinasi serta keterpaduan dalam pelaksanaan arah kebijakan serta sasaran pokok secara berkesinambungan antar tingkatan pemerintahan, yang pada gilirannya akan tercipta konsistensi antara RTRW, RPJPN dan RPJPD.

1.4.2 Tujuan

Penyusunan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 dilakukan dengan tujuan:

1. Menetapkan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan tahun 2025-2045 bagi Provinsi Jambi secara terarah dan terukur;
2. Menyediakan satu rujukan resmi bagi Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan seluruh *stakeholder* pembangunan di Provinsi Jambi dalam menentukan arah pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2045;
3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah.
4. Menciptakan tata pemerintahan yang baik, sehingga terwujud kondisi yang aman dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
5. Membangun kebersamaan melalui kerjasama dan kemitraan antar tingkatan pemerintahan mulai dari Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya daerah serta pengelolaannya.

1.5 Sistematika Penulisan

RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

1.2 Dasar Hukum

- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan
- GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - Aspek Geografi dan Demografi
 - Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan
 - 2.1 kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim
 - Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi dan sosial budaya
 - 2.2 Aspek Daya Saing
 - Menjelaskan tentang daya saing ekonomi daerah, daya saing SDM, daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah, serta
 - 2.3 daya saing iklim investasi.
 - Aspek Pelayanan Umum
 - Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung
 - 2.4 jawab Pemerintah Daerah provinsi dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - Evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025
 - Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk
 - 2.5 penyusunan RPJPD Tahun 2005-2045
 - Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
 - Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus
 - 2.6 diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh Pemerintah Daerah.
 - Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah
 - Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat
 - 2.7 mempengaruhi perkembangan daerah.
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
 - 3.1 Permasalahan
 - Menguraikan permasalahan utama yang merupakan faktor

penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

3.2 Isu Strategis Daerah

Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung atau tidak langsung secara signifikan di masa datang.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi

Menguraikan kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045

4.2 Misi

Menguraikan upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 Arah Kebijakan

Memuat kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah

5.2 Sasaran Pokok

Memuat rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD Tahun 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

BAB VI PENUTUP

Memuat salah satunya tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Provinsi Jambi 53.435 km² dengan luas daratan seluas 49.026,579 km² dengan panjang garis pantai 228,13 km. Wilayah daratan terluas di Provinsi Jambi berada di Kabupaten Merangin seluas 7.540,12 km² atau sebesar 15,38% dari total luas wilayah Provinsi Jambi, diikuti oleh Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun masing-masing seluas 6.103,74 km² dan 5.935,89 km², sedangkan rincian luas perkabupaten/kota, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Luas (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Kerinci	3.445,20	18	287
2	Merangin	7.540,12	24	215
3	Sarolangun	5.935,89	11	158
4	Bungo	4.760,83	17	153
5	Tebo	6.103,74	12	129
6	Batanghari	5.387,52	8	124
7	Muaro Jambi	5.225,79	11	155
8	Tanjung Jabung Barat	5.546,06	13	134
9	Tanjung Jabung Timur	4.546,62	11	93
10	Kota Sungai Penuh	364,92	8	69
11	Kota Jambi	169,89,43	11	68
Luas Daratan		49.026,58		
Total		53.435	144	1.585

Sumber: Jambi Dalam Angka, 2023 (Berdasarkan Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022)

Jumlah kecamatan di Provinsi Jambi adalah sebanyak 144 kecamatan, dengan kabupaten dengan jumlah kecamatan terbesar adalah kabupaten Merangin yaitu sebanyak 24 kecamatan, diikuti oleh Kabupaten Kerinci pada urutan kedua dengan jumlah kecamatan sebanyak 18 kecamatan. Sementara jumlah desa kelurahan adalah

dengan kawasan pertumbuhan ekonomi IMS-GT (*Indonesia Malaysia Singapura Growth Triangle*).

2.1.1.3 Topografi

Provinsi Jambi memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl di bagian timur sampai pada ketinggian di atas 1.000 m dpl. Morfologi kearah barat lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat, yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat. Berdasarkan RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, secara topografis Provinsi Jambi terbagi atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian, yaitu:

1. Daerah dataran rendah 0-100 m (67%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Merangin;
2. Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (17%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, sebagian Kabupaten Batanghari, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin dan sebagian Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Daerah dataran tinggi >500 m (16%) pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, sebagian Kabupaten Merangin, sebagian Kabupaten Sarolangun dan sebagian Kabupaten Bungo.

Pada dataran rendah didominasi oleh tanah-tanah yang penuh air dan rentan terhadap banjir pasang surut serta banyaknya sungai besar dan kecil yang melewati wilayah ini. Wilayah ini didominasi jenis tanah gley humus rendah dan orgosol yang bergambut. Daya dukung lahan terhadap pengembangan wilayah sangat rendah sehingga membutuhkan masukan teknologi tertentu dalam pengembangannya. Dibagian tengah didominasi jenis tanah podsolik merah kuning yang kesuburannya relatif rendah. Daya dukung lahan cukup baik terutama pada lahan kering dan sangat potensial untuk pengembangan tanaman keras dan perkebunan. Pada bagian barat didominasi dataran tinggi lahan kering yang berbukit-bukit.

Secara geomorfologi wilayah Provinsi Jambi dikelompokkan menjadi tiga satuan morfologi yaitu:

- Perbukitan terjal dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut (dpl) yang mempunyai kelerengan antara (20⁰-40⁰).

Kawasan ini terletak di bagian barat Provinsi Jambi yang membujur dari barat laut-tenggara, dengan puncak tertinggi Gunung Kerinci (3.805 meter). Kawasan ini mencakup sebagian besar wilayah Kabupaten Kerinci dan sebagian kecil Kabupaten Sarolangun dan Merangin.

- Perbukitan bergelombang dengan ketinggian antara 50-500 meter dan kemiringan lereng 10° - 20° . Wilayah ini terletak di bagian tengah Provinsi Jambi, yang sebagian besar merupakan wilayah Kabupaten Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo, dan sebagian kecil Kabupaten Batang Hari.
- Dataran dengan ketinggian antara 0-50 meter, kelerengan antara 0° - 10° . Wilayah ini terletak di bagian timur Provinsi Jambi, yang sebagian besar merupakan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi serta sebagian kecil Kabupaten Batang Hari. Di wilayah ini masih banyak terdapat rawa-rawa, di ujung timur yang menuju barat laut – tenggara merupakan wilayah pantai.

2.1.1.4 Geologi

Susunan batuan di wilayah Provinsi Jambi terdiri dari: endapan permukaan, batuan sedimen, batuan malihan, batuan gunung api dan batuan terobosan.

- a. Endapan permukaan, dikelompokkan dalam satuan endapan alluvium, endapan rawa dan endapan undak. Endapan ini terdiri dari komponen batuan lepas berupa bongkah, kerakal, kerikil, pasir, lanau, lumpur dan lempung yang menandung sisa tumbuhan, berumur kuarter, resen.
- b. Batuan sedimen, berumur permo-karbon hingga Pliosen dengan formasi batuan dari umur tua ke muda adalah sebagai berikut :
 - Formasi Mentulu (Permo-Karbon)
 - Formasi Mengkarang (Perem)
 - Formasi Peneta, Asai, Tabir, Rawan (Jura)
 - Formasi Telangakar (Oligo Miosen)
 - Formasi Seblat, Papanbetupang, Hulu Tumpang (Oligo Miosen)
 - Formasi Kumun, Lanau, Airbenakat, Gumai, Kasiro (Oligo Miosen)
 - Formasi Muaraenim, Lakitan (Mio-Pliosen)
 - Formasi Bintunan, Pengasih (Pliosen)

Formasi ini terdiri dari batupasir, batu lempung, dengan sisipan batubara, batu lanau, serpih, tuf, tuf pasir, batu pasir tufan, batu pasir gamping, batu gamping, konglomerat polemik dan breksi.

- c. Batuan malihan, terbagi atas formasi Pengabuhan, Mentulu, Anggota Condong. Formasi Mentulu, dan formasi Gangsal, berumur Permo-Karbon; terdiri tuf meta, sabak, sabak berbintik, batutanduk, filit, sekis dan batupasir meta.
- d. Batuan gunung api, berumur Perem hingga Kuartar. Satuan batuan ini terdiri dari tuf litik, lava bersusunan andesitik-basaltik, breksi gunungapi, tuf, lava bersusunan riolit, dasit dan andesit, tuf andesit, dan tuf kristal.
- e. Batuan terobosan, yang berlangsung dalam empat periode, pada Jura, Paleo Miosen dan Pliosen. Batuan ini terdiri dari batuan granodiorit, andesit, basal, diorit, dasri, riolit, granit biotit, granit horeblendita dan sienit.

Sejarah struktur daerah Provinsi Jambi meliputi kegiatan tektonik sejak Paleozoikum Akhir sampai resen. Unsur struktur utama dari batuan di daerah ini terdiri dari pelipatan dan pensesaran. Struktur regional yang terdapat di Provinsi Jambi merupakan bagian dari Sesar Besar Sumatera berarah barat laut-tenggara. Disamping itu juga terdapat sesar sekunder yang memotong sesar utama tersebut. Struktur lipatan dan kekar-pun banyak dijumpai. Struktur lipatan terutama terdapat di Kabupaten Kerinci, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo serta Batang Hari. Sedangkan kekar terdapat pada semua jenis batuan yang ada.

Sesar di daerah Kerinci dapat dipisahkan menjadi tiga jalur sesar yaitu: Jalur Sesar Bukit Barisan, Jalur Sesar Sebelah Barat Bukit Barisan dan Jalur Sesar Sebelah Timur Bukit Barisan. Sesar daerah Sarolangun dan Merangin yang utama adalah Sesar Turun Tembesi dan Sesar Naik Tangkui. Sesar di daerah Bungo dan Tebo terlihat di hulu Sungai Pelepat yang merupakan sesar tua bagian dari sesar besar Sumatera.

2.1.1.5 Hidrologi

Dilihat dari pola aliran sungai, daerah hulu pola aliran sungainya berbentuk radial terutama di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci. Sedangkan di daerah pesisir pola alirannya berbentuk paralel. Sungai-sungai di Provinsi Jambi terutama Sungai Batanghari sangat berpengaruh pada musim hujan dan kemarau.

Pada musim hujan kecenderungan air sungai meluap, sebaliknya pada musim kemarau kecenderungan air sungai menjadi dangkal dan fluktuasinya dapat mencapai tujuh meter. Dari kondisi ini sangat berpengaruh pula pada permukiman penduduk yang tinggal di sepanjang

Wilayah Sungai Batang Hari baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat usaha.

Berdasarkan aliran sungai hampir semua wilayah Provinsi Jambi dilalui oleh Sungai Batanghari dengan orde-ordenya sehingga sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi berada dalam DAS (Daerah Aliran Sungai) Batanghari yang mencakup enam sub DAS di dalamnya yaitu:

- a. Sub DAS Batanghari Hulu
- b. Sub DAS Batang Merangin Tembesi
- c. Sub DAS Batang Tabir
- d. Sub DAS Batang Bungo
- e. Sub DAS Batang Tebo
- f. Sub DAS Batanghari Hilir

Tabel dan Gambar di bawah ini menunjukkan luas areal dan lokasi kabupaten/kota di Provinsi Jambi menurut DAS Batanghari.

Tabel 2-2 Luas areal menurut wilayah administrasi di DAS Batanghari

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Jambi	Batanghari	450,295	10.27
		Bungo	463,749	10.58
		Kerinci	260,024	5.93
		Merangin	658,230	15.02
		Muaro Jambi	277,845	6.34
		Sarolangun	558,475	12.74
		Tanjung Jabung Timur	286,656	6.54
		Tebo	616,617	14.07
		Kota Jambi	16,895	0.39
		Kota Sungai Penuh	14,939	0.34
		Luas DAS di Provinsi Jambi	3,603,725	82.23
2.	Sumatera Barat	Dharmasraya	304,274	6.94
		Solok	117,741	2.69
		Solok Selatan	356,973	8.15
		Luas DAS di Prov. Sumatera Barat	778,988	17.77
Luas DAS total			4,382,713	100.00

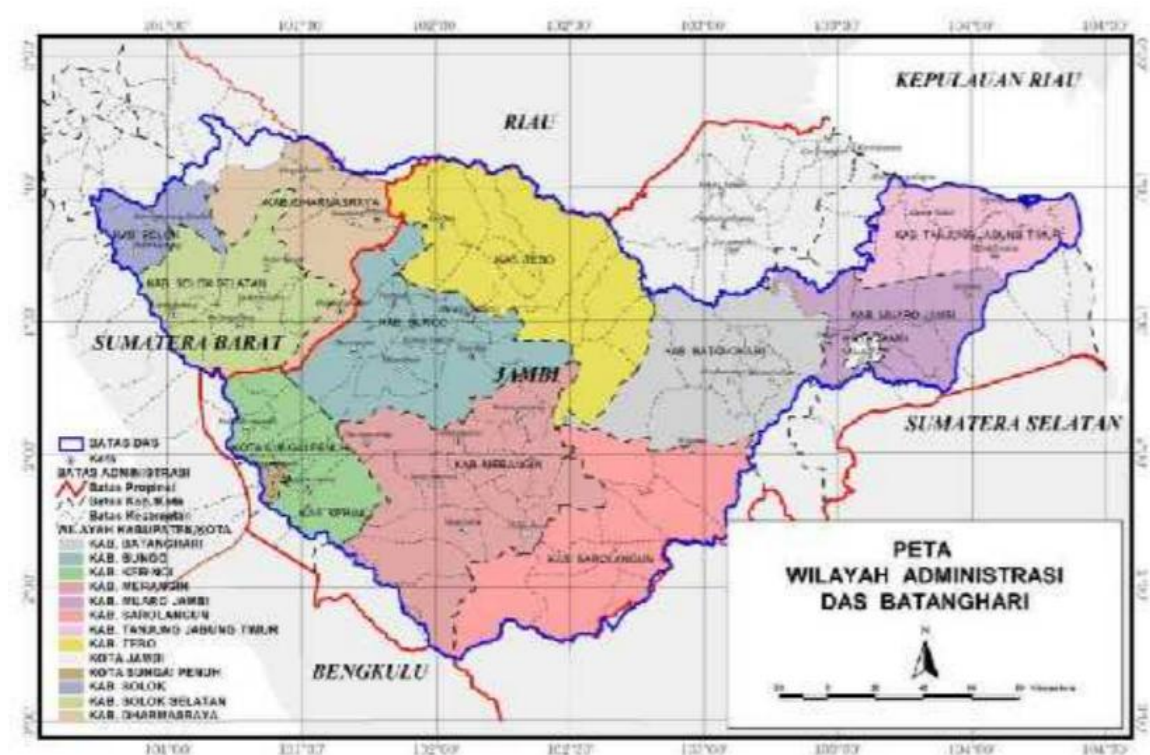
Sumber: Arbain et al. (2015)

Di samping itu terdapat DAS lainnya di wilayah Provinsi Jambi yang persentasenya tidak terlalu besar yaitu :

- a. DAS Betara Pengabuan mencakup tujuh Sub DAS didalamnya.
- b. DAS Mendahara mencakup sembilan Sub DAS didalamnya
- c. DAS Air Hitam Laut mencakup empat Sub DAS didalamnya.

Pola aliran sungai di Provinsi Jambi berbentuk radial terutama di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Kerinci, sedangkan di daerah pesisir pola alirannya berbentuk paralel. Sungai-

sungai di Provinsi Jambi terutama Sungai Batanghari sangat berpengaruh pada musim hujan dan kemarau.



Sumber: Arbain et al. (2015)

Gambar 2-2 Peta administrasi kabupaten/kota di Provinsi Jambi dalam DAS Batanghari (Sumber: Arbain et al. 2015).

Tabel 2-3 Nama Sungai yang Melintasi kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/ Kota	Nama Sungai
Kerinci	Batang Merangin, Sungai Siulak Deras
Merangin	Batang Merangin, Batang Tabir
Sarolangun	Batang Limun, Batang Tembesi, Batang Asai
Batang Hari	Batanghari, Batang Tembesi, Batang Asai
Muaro Jambi	Batanghari, Sungai Kumpeh
Tanjab Timur	Batanghari, Batang Berbak, Batang Mendahara, Batang Lagan, Batang Air Hitam
Tanjab Barat	Sungai Pengabuhan, Sungai Betara, Sungai Tungkal
Tebo	Batang Tebo, Batanghari
Bungo	Batang Bungo, Batang Tebo, Batang Pelepat
Kota Jambi	Batang hari

Sumber : RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2023

Provinsi Jambi memiliki sumber daya air yang melimpah, beberapa potensi kondisi yang mendukung untuk dibangun sarana prasarana

sumber daya air. Berikut merupakan beberapa potensi danau yang ada di Provinsi Jambi yang dapat dikembangkan.

Tabel 2-4 Potensi dan Luas Danau di Provinsi Jambi

No	Nama Danau	Lokasi		Luas (Ha)
		Desa/Kelurahan	Kecamatan	
A.	Kota Jambi			
1	Danau Sipin	Sungai Putri, Legok dan Danau Sipin	Telanaipura	40
2	Danau Teluk Kenali	Teluk Kenali	Telanaipura	15
3	Danau Teluk	Teluk	Telanaipura	50
B.	Kabupaten Merangin			
1	Danau Depati Empat	Rantau Kermas	Jangkat	35
2	Danau Pauh	Pulau Tengah	Jangkat	250
3	Danau Kecil	Pulau Tengah	Jangkat	18
4	Sikumbang	Pulau Tengah	Jangkat	20
C.	Kabupaten Kerinci			
1	Danau Kerinci	Jujun	Keliling Danau	4.200
2	Danau Air Lingkat	Lempur Tengah	Gunung Raya	48
3	Danau Dua	Lempur Tengah	Gunung Raya	12
4	Danau Gunung Tujuh	Pelompek, Lubuk Pauh	Kayu Aro	1.200
5	Danau Belibis	Sido Mulyo	Kayu Aro	25
D.	Kabupaten Sarolangun			
1	Danau Biaro	Lidung	Sarolangun	10
2	Danau Baru	Pulau Pinang	Sarolangun	10
Jumlah				5.933

Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2023

Secara hidrogeologi, produktivitas air tanah daerah Povinsi Jambi yang didasarkan atas sifat fisik batuan penyusun (akuifernya) dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu (Sudadi 2003):

1. Produktivitas air tanah tinggi

Meliputi sepanjang Sungai Batanghari dan Sungai Tembesi. Litologi akuifaer terutama berupa pasir dan kerikil yang merupakan endapan alluvium sungai. Debit sumur berkisar 5 hingga 25 l/detik dan jika ditinjau dari sifat fisik batuan penyusun akuifernya yang merupakan batuan lepas maka aliran air tanah yang terjadi merupakan aliran air tanah melalui ruang antar butir. Muka air tanah bebas mempunyai kedalaman berkisar dari 0.5 – 2.5 m di bawah muka tanah setempat dengan buaian (perbedaan) muka air tanah kecil antara musim hujan dan kemarau. Muka air tanah dalam atau tertekan diperkirakan dapat ditemukan pada kedalaman lebih dari 30 m dari muka tanah setempat.

Pasokan air dari daerah resapan umumnya kecil akan tetapi pasokan air terutama berasal dari Sungai Batang Hari dan Batang Tembesi. Sungai yang bertindak sebagai pemasok air tanah disebut juga sebagai sungai influen (influent stream). Ciri-ciri air tanah seperti

ini umumnya potensi air tanahnya tinggi. Pengukuran harga keterusan air (*transmissivity*) yang dilakukan oleh Direktorat Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan di berbagai tempat di Indonesia yang mempunyai kondisi serupa menunjukkan bahwa harga keterusannya lebih dari 500 m/hari.

2. Produktivitas air tanah sedang

Produktivitas air tanah sedang di daerah Provinsi Jambi terdapat di 3 (tiga) tempat, yaitu:

a) Di bagian timur, meliputi daerah daratan pantai timur.

Walaupun produktivitas tanahnya sedang akan tetapi kendalanya adalah kualitas air tanahnya yang kurang baik, terutama untuk air tanah bebas. Kemungkinan air tanah dengan kualitas baik dapat diperoleh hanya berupa spot-spot, terutama pada lensa-lensa pasir lepas, dengan kedalaman muka air tanah bebas berkisar dari 3 – 10 m dibawah muka tanah setempat. Data air tanah tertekan diperoleh dari hasil pemboran di beberapa tempat menunjukkan 2 (dua) litologi akuifer utama, yaitu: a) Litologi akuifer dari Formasi Kasai yang dijumpai pada interval kedalaman 18 – 44 meter dan 76 – 95 meter dan berkualitas air kurang baik; dan b) Litologi akuifer dari Formasi Muaraenim yang dijumpai pada kedalaman antara 90 – 120 meter dan berkualitas air baik.

b) Di bagian tengah, di sekitar Bangko dan utara Muara Bungo

Debit sumur berkisar antara 1 – 5 l/detik dengan akuifer utama berupa batu pasir kurang padu, tufa dan tufa pasiran. Muka air tanah bebas diperkirakan kurang dari 20 m dari muka tanah setempat, sedangkan air tanah dalam diperkirakan dari 50 m dari muka tanah setempat. Data pemboran air tanah dalam di sekitar Bangko enunjukkan bahwa kedalaman sumur bor mencapai 100 meter dengan debit sekitar 8.5 l/detik.

c) Di bagian barat, di selatan Gunung Kerinci meliputi Sungai Penuh dan Padang Panjang (kaki Gunung Masurai)

Debit sumur diperkirakan sampai 5 l.detik dengan akuifer utama berupa tufa atau breksi volkanik dari endapan volkanik muda. Pada akuifer batuan lepas sistem airan air tanah dapat melalui ruang antar butir, sedangkan pada akuifer pada batuan padu aliran air tanah dapat melalui celahan dan rekahan. Muka

air tanah bebas maupun muka air tanah dalam umumnya dalam. Untuk air tanah bebas, pada daerah tertentu dapat mencapai kurang dari 20 m di bawah muka tanah setempat.

3. Produktivitas air tanah rendah



Gambar 2-3 Peta keterdapatan air tanah dan produktivitas akuifer daerah Provinsi Jambi (Sudadi 2003)

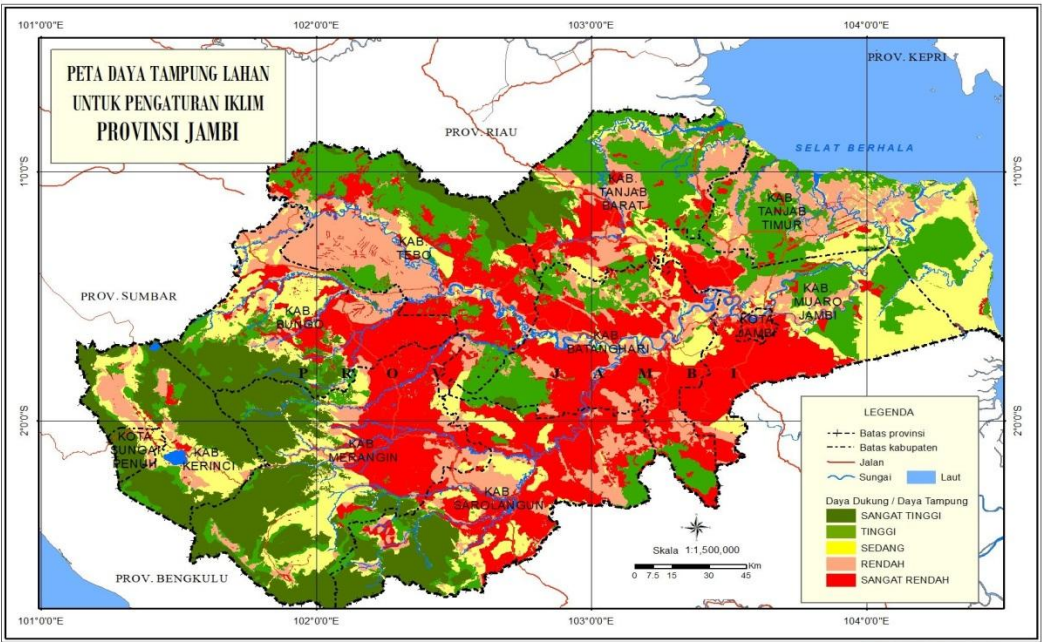
Umumnya terdapat di bagian utara, baratdaya, dan barat wilayah Provinsi Jambi. Batuan penyusunnya adalah berupa batuan sedimen padu, batuan malihan dan batuan beku terobosan. Pada batuan malihan dan sedimen masih dapat diharapkan dijumpai air tanah walaupun secara terbatas, terutama pada zona pelapukan yang tebal atau daerah lembah. Sifat air tanah di daerah pelapukan dan lembah merupakan air tanah bebas yang dipengaruhi oleh musim, pada musim hujan air tanah dapat diperoleh sedangkan pada musim kamarau umumnya sulit diperoleh.

2.1.1.6 **Klimatologi**

Provinsi Jambi sebagai salah satu provinsi dengan iklim tropis dan kaya akan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, namun juga rentan terhadap perubahan iklim. Gejala perubahan iklim seperti kenaikan temperatur, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau, dan kenaikan muka air laut, akan mengancam daya dukung lingkungan dan kegiatan seluruh sektor pembangunan.

Berdasarkan analisis daya tampung lingkungan berdasarkan kemampuan pengaturan iklim yang tertinggi hanya dimiliki oleh 6

kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjab Barat. Hal ini karena terkait dengan keberadaan hutan-hutan konservasi pada wilayah tersebut, yaitu Taman Nasional Kerinci Sebelat, Hutan Lindung Bukit Hulu Landai di Merangin dan Hutan Lindung Bukit Tinjanu Limun di Sarolangun serta Taman Nasional Bukit Tiga Puluh di Tebo dan Tanjab Barat. Sebaran wilayah berdasarkan jasa daya dukung dalam pengaturan pengaturan iklim dapat dilihat pada peta dan tabel di bawah. Sedangkan persentase luas masing masing kabupaten berdasarkan tingkat daya tampung lingkungan dalam pengaturan iklim adalah sebagaimana gambar di bawah ini yaitu pada sebagian kabupaten di dominasi oleh kemampuan sangat rendah yaitu di Kabupaten Batanghari dan Kota Jambi. Sebaliknya Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin dan Kota Sungai Penuh didominasi kemampuan pengaturan iklim yang sangat tinggi.

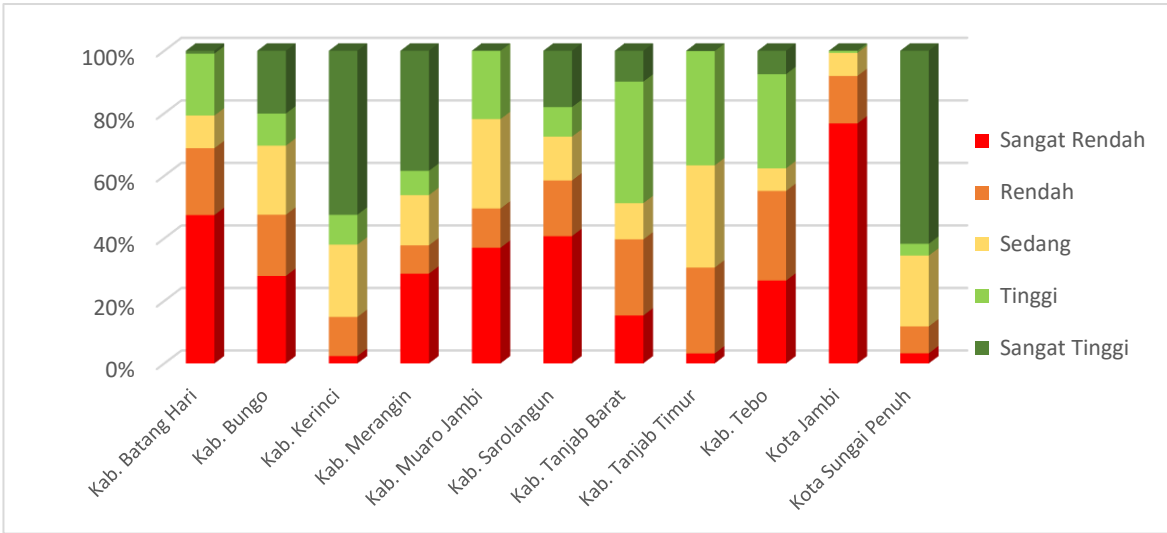


Gambar 2-4 Peta Daya Tampung Lahan untuk Pengaturan Iklim

Tabel 2-5 Luas wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Jambi menurut kemampuan Pengaturan Iklim

No	Kabupaten	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
1	Kab. Batang Hari	258.894	116.781	57.072	108.131	4.900
2	Kab. Bungo	130.754	91.487	103.281	48.005	93.789
3	Kab. Kerinci	7.891	41.692	77.151	31.840	174.925
4	Kab. Merangin	214.953	67.877	120.232	58.136	287.517
5	Kab. Muaro Jambi	199.747	67.750	154.338	118.043	-
6	Kab. Sarolangun	245.627	107.428	84.545	57.147	108.631
7	Kab. Tanjab Barat	76.655	121.563	57.852	194.222	49.272

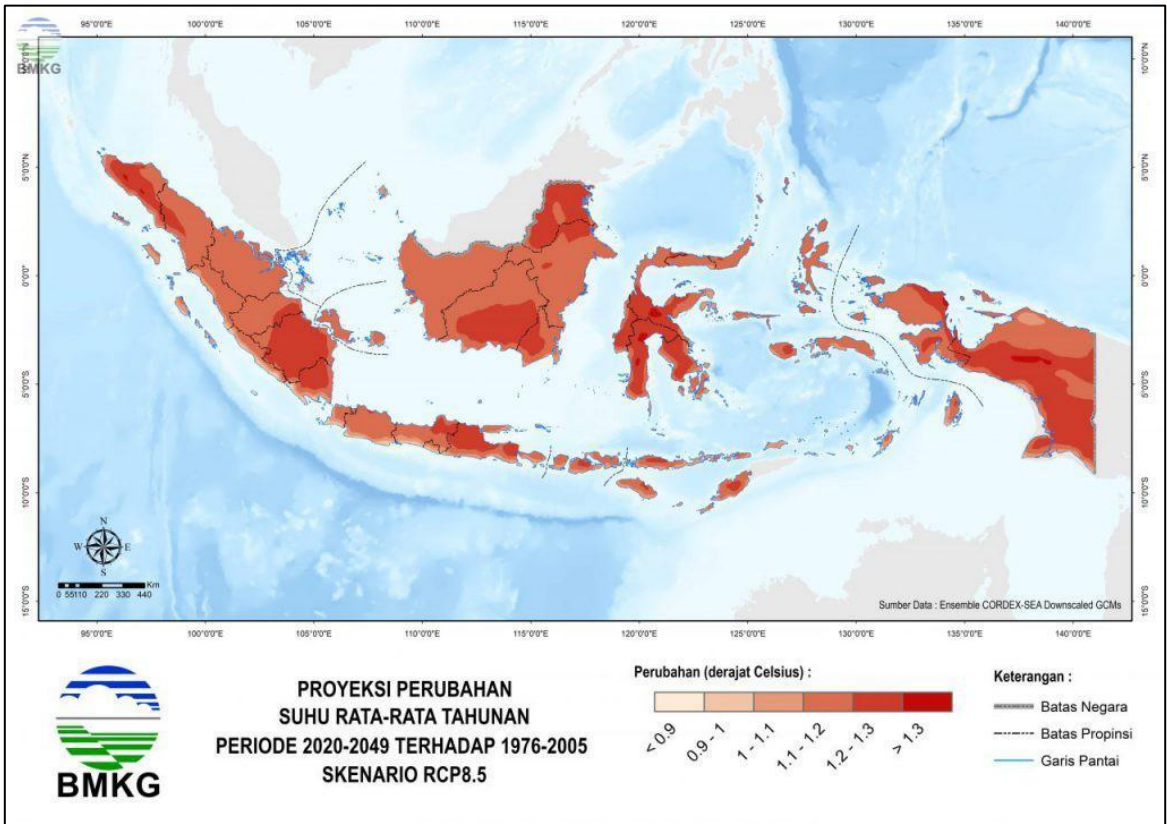
No	Kabupaten	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
8	Kab. Tanjab Timur	15.551	133.216	158.592	177.405	502
9	Kab. Tebo	164.435	177.939	44.868	186.887	46.428
10	Kota Jambi	13.473	2.666	1.291	122	-
11	Kota Sungai Penuh	1.180	3.127	8.225	1.377	22.428
	Jumlah	1.329.159	931.525	867.446	981.316	788.392



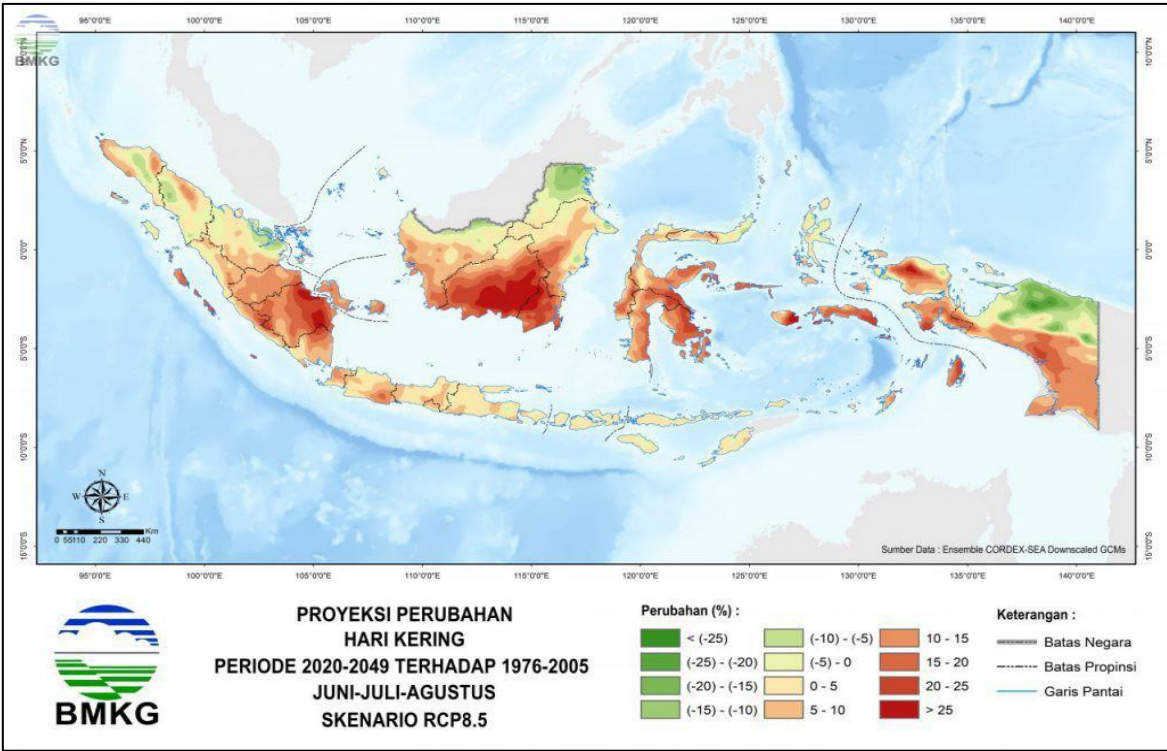
Gambar 2-5 Proporsi luas wilayah kabupaten/ kota di Provinsi Jambi menurut kemampuan Pengaturan Iklim

Gambar-gambar berikut menunjukkan hasil proyeksi perubahan iklim di Indonesia yang dilakukan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk periode tahun 2020 hingga 2049 berdasarkan data pengamatan dari tahun 1976 hingga tahun 2005. Hasil proyeksi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

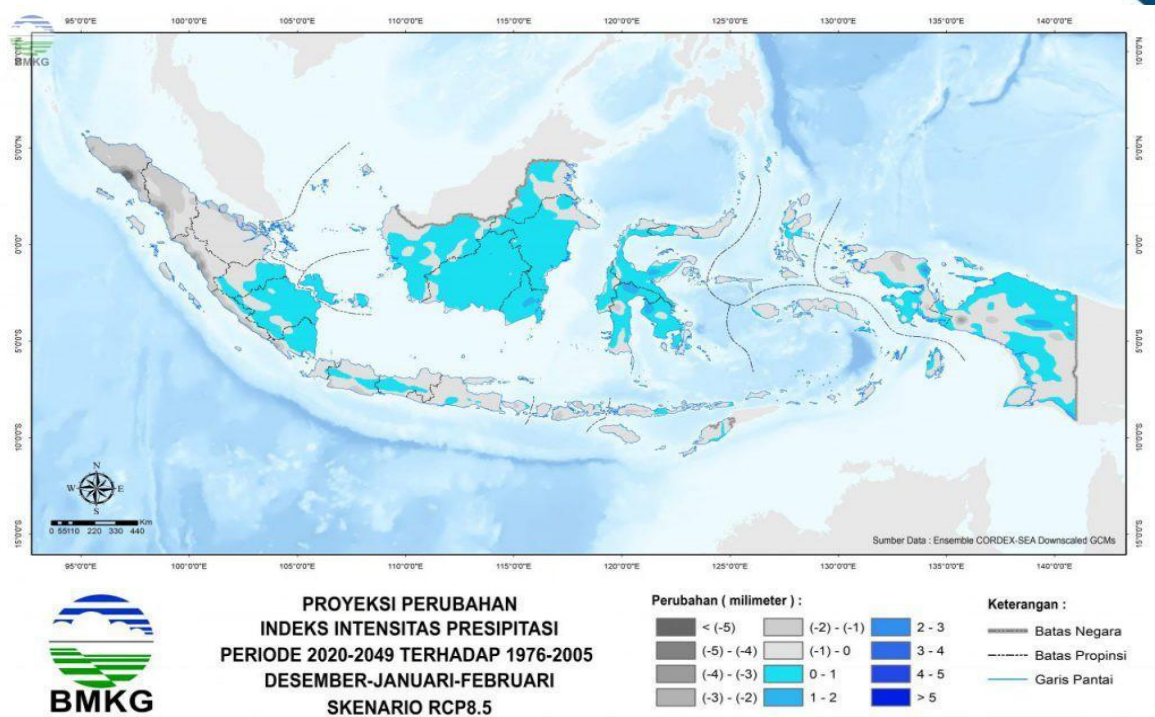
1. Sebagian besar wilayah Jambi akan mengalami peningkatan suhu rata-rata tahun sebesar 1^oC hingga 1.1^oC, dan sebagian kecil wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan sekitar 1.1^oC hingga 1.2^oC dibandingkan saat ini (lihat Gambar 2.6).
2. Sebagian besar wilayah Provinsi Jambi akan mengalami penambahan hari kering sekitar 10 hingga 15%, bahkan ada wilayah di Pantai Timur Sumatera yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan (sebagian wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur) akan mengalami penambahan hari kering sekitar 15 hingga 20% dibandingkan saat ini (lihat Gambar 2.7).
3. Sebagian wilayah Provinsi Jambi (wilayah yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Pantai Timur Sumatera) akan mengalami peningkatan intensitas curah hujan pada musim hujan hingga 1 mm, namun sebagian lainnya (wilayah tengah hingga perbatasan dengan Provinsi Riau) akan mengalami penurunan hingga 1 mm (lihat Gambar 2.8).



Gambar 2-6 Peta proyeksi perubahan suhu rata-rata tahunan di Indonesia 2020-2049



Gambar 2-7 Peta proyeksi perubahan hari kering di Indonesia 2020-2049



Gambar 2-8 Peta proyeksi indeks intensitas presipitasi di Indonesia 2020-2049

2.1.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Jambi menjadi 2 fungsi yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung terdiri dari hutan lindung, kawasan suaka alam. Sedangkan kawasan budidaya terdiri dari kawasan pertanian dan kawasan permukiman. Luas lahan hutan mencapai 1.327.992,55 Ha atau 27,07% dari luas keseluruhan tutupan lahan di Provinsi Jambi. penggunaan lahan kawasan permukiman mencapai 151.542,42 Ha atau sebesar 3,09% dari luas keseluruhan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan Gambar peta penggunaan lahan di Provinsi Jambi.

Tabel 2-6 Tutupan Lahan Provinsi Jambi

Tutupan Lahan	Eksisting (Ha)	Persentase (%)
Air Danau / Situ	10.340,01	0,21
Air Tawar Sungai	33.921,02	0,69
Hutan Rimba	1.327.992,55	27,07
Perkebunan / Kebun	856.202,64	17,45
Permukiman dan Tempat Kegiatan	151.542,42	3,09
Sawah	115.215,79	2,35
Semak Belukar / Alang - Alang	1.102.391,46	22,47
Tegalan / Ladang	1.308.103,11	26,66
Jumlah	4.905.709,00	100

Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2023

Tabel 2-7 Pola penggunaan lahan di wilayah Provinsi Jambi, tahun 2011-2018

2011	Penutupan Lahan Tahun 2018 (ha)																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	576,797.67	25,392.94							17.34	21.24	15,400.38		22,385	12,870.88	5,263.35	92.75	06.47			67.00.00	
2	858.44.00	250,516.32		16,708					0,380	32,478.09	48,276.44	186.61	6,131	28,174.74	67,244.14	6,536.14				26,816	0,924
3			124,381.30	14,200.26					0,101		1,795.57	21,185.37	5,276	5,792	7,772.72	18,577.07					
4			784.04.00	30,238.98		70.93				1,827.57	736.95	3,272.42	6,049	1,449.41	3,397.73	7,542.91					
5					162.76	32,008										3,413				0,147	0,078
6				0,865	2,795	5,348.03			0,063			1,146	3,010	147.81	1,885	297.98					0,055
7							15,011.09		0,000	41.99	0,679	30.66		0,208		512.64	35,888				171.82
8								3,762						0,092							
9		03.14				6,336	0,251		42,256.94	0,853	0,001	0,121	0,801	0,983		2,225	167.75			76.85	2,653
10		68.13.00	315.55.00	4,765.39						163,898.58	3,448.19	3,639.92	7,405	3,158.75	17,598.49	7,008.95				0,545	108.87
11	00.41	1,065.37		0,380		0,675				3,099.41	97,796.17	22,934	7,515	38,378.64	1,052.25	9,966.31	17,774		0,190	530.68	6,562
12				277.67		107.77	0,255		0,366	3,256.88	1,472.40	194,870.28	7,107.30	3,718.91	4,438.19	45,304.57	491.89			0,356	7,956
13		0,767		0,055		3,692			6,598	414.91	2,507.26	927.65	67,088.65	3,474.57	1,841.21	257,305.35	582.64			1,320.52	5,693.69
14	00.56	4,163.87		1,175			498.96		40,690	3,171.89	551,001.75	12,881	6,599.14	1,020,959.30	8,522.76	203,982.69	400.90		0,167	6,772.98	29,362.08
15	00.00	230.53.00		10,924		0,208			0,382	34,707.48	22,405.92	1,364.99	26,190	20,616.11	81,382.79	15,708.78			0,149	14,417	0,135
16		34.48.00				3,354			0,003	2,952.87	2,750.87	2,053.00	11,741.34	9,077.32	2,241.73	408,760.42			4,930.72	11,478	5,777.95
17											1,415			0,797		2,002.66	13,951.73				1,443.46
18						0,226						72.61		42.98		28,694		8,797			
19													0,137						21,826.65		
20											0,177	0,223		1,632		0,997				5,555.97	281.85
21						56.70			0,101	88.33	358.97		4,363.19	11,240		7,522.81	182.75		8,284		44,100.32

- 1 Hutan Lahan Kering Primer

2 Hutan Lahan Kering Sekunder

3 Hutan Rawa Primer

4 Hutan Rawa Sekunder
- 5 Hutan Mangrove Primer

6 Hutan Mangrove Sekunder

7 Rawa

8 Savanna/ Padang rumput
- 9 Badan Air

10 Hutan Tanaman

11 Belukar

12 Belukar Rawa
- 13 Pertanian Lahan Kering

14 Pertanian Lahan Kering Campur

15 Tanah Terbuka

16 Perkebunan
- 17 Sawah

18 Tambak

19 Transmigrasi

20 Pertambangan
- 21 Pemukiman

2.1.1.7.1 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Bagian ini memaparkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Provinsi Jambi berdasarkan beberapa jasa ekosistem yang disediakan.

A. Ketersediaan Pangan

Asumsi ketersediaan lahan yang digunakan dalam perhitungan tersebut adalah:

- Konsumsi beras tahun 2020 sebesar 84,2 kg/kapita/tahun
- Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi sebesar 1,38% per tahunnya
- Standar kebutuhan konsumsi layak (KKL) yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 2018.

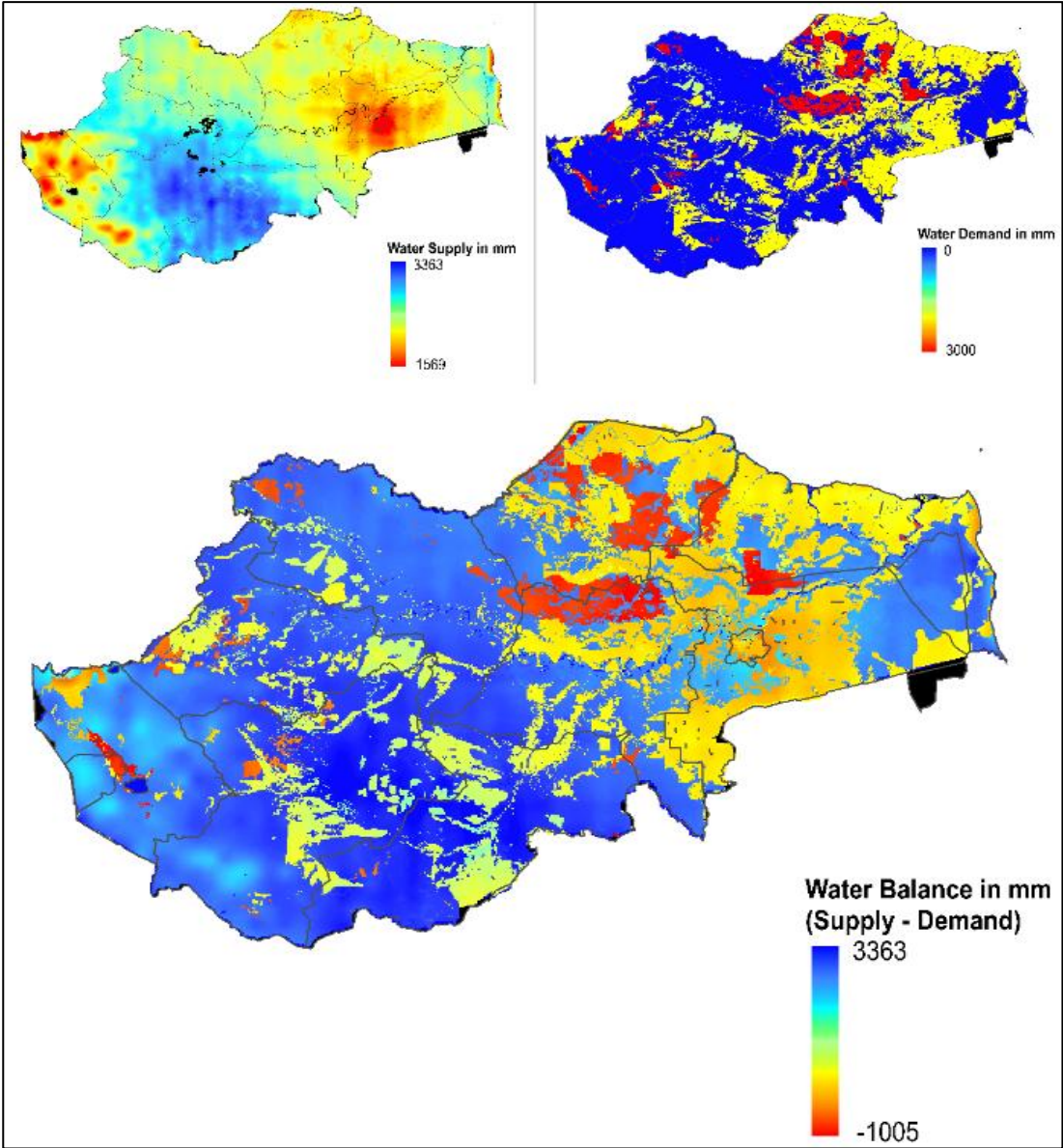
Terdapat dua skenario terhadap ketersediaan lahan untuk penyediaan pangan, yaitu:

1. Jika dilakukan revitalisasi terhadap lahan pertanian pangan kering yang tidak/belum dimanfaatkan serta dengan asumsi tidak ada peningkatan produktivitas lahan pertanian pangan dan pengolahan pasca panen (pada tahun 2020 tercatat produktivitas lahan sawah hanya dapat menghasilkan 2,28 ton beras/ha/tahun) dan alih fungsi lahan pertanian pangan maka ketersediaan lahan pangan dapat mencukupi kebutuhan penduduk di wilayah Jambi hingga 88 tahun ke depan;
2. Jika tidak dilakukan revitalisasi lahan pertanian pangan kering yang tidak/belum dimanfaatkan dan asumsi lainnya sama dengan skenario pertama maka ketersediaan lahan pangan hanya dapat mencukupi kebutuhan penduduk di wilayah Jambi hingga 18 tahun ke depan.

B. Ketersediaan Air

Hasil olahan terhadap data curah hujan dan geohidrologi dikatehui bahwa ingga kini ketersediaan air untuk penduduk di wilayah bagian barat dan sebagian besar wilayah bagian tengah Provinsi Jambi masih melimpah. Wilayah yang perlu mendapat perhatian terkait potensi ketersediaan air dibandingkan dengan kebutuhannya adalah terutama beberapa daerah yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Tanjung

Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan perbatasan antar kedua kabupaten tersebut dengan Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi. Pada daerah-daerah ini neraca air sudah cukup membutuhkan perhatian karena mulai terjadi defisit (kebutuhan lebih besar daripada ketersediaan).



Sumber: data diolah, 2021(data termutakhir)
Gambar 2-9 Neraca air wilayah Provinsi Jambi tahun 2020

C. Ketersediaan Lahan Tempat Tinggal/Berusaha Rendah Risiko Bencana

Dengan menggunakan indeks rawan bencana yang ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional (rawan bencana banjir, longsor, letusan gunung berapi, dan kebakaran hutan dan lahan) serta standar luas ruang hidup layak yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR (11 m2/orang) dan Koefisien Dasar Hijau wilayah perkotaan dan perdesaan,

maka dapat diketahui masih cukup ruang yang layak untuk penduduk di wilayah Provinsi Jambi tinggal dan berusaha, kecuali di wilayah perkotaan yaitu Kota Jambi dan terutama Kota Sungai Penuh yang mulai terbatas. Kondisi ini perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) dengan penataan ruang untuk kawasan pemukiman atau desa tangguh bencana serta bangunan layak ramah lingkungan di kawasan-kawasan pemukiman yang teridentifikasi berada di daerah rawan bencana untuk memitigasi dan mengantisipasi terjadinya kejadian bencana.

Tabel 2-8 Kebutuhan dan ketersediaan ruang hidup layak (tidak rawan bencana) bagi penduduk Provinsi Jambi per kabupaten/kota pada tahun 2020.

Kabupaten/Kota	Kebutuhan Ruang Layak (Ha)*	Ruang Layak** (Ha)	Surplus/(Defisit) (Ha)
Kerinci	826	3.304	2.478
Merangin	1.169	4.674	3.506
Sarolangun	957	3.829	2.872
Bungo	1.595	6.378	4.784
Batang Hari	1.327	5.310	3.982
Tebo	1.486	5.944	4.458
Muaro Jambi	1.327	5.306	3.980
Tanjung Jabung Barat	1.397	5.588	4.191
Tanjung Jabung Timur	1.011	4.044	3.033
Kota Jambi	1.000	1.500	500
Kota Sungai Penuh	159	239	80
Total	6.380	22.622	16.242

Sumber: Data diolah (2021) (*data termutakhir*)

2.1.1.8 **Potensi Pengembangan Wilayah**

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebaga warisan dunia.

Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria:

- 1. Merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati;
- 2. Merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna

yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan;

3. Memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara;
4. Memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro;
5. Menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup;
6. Rawan bencana alam nasional;
7. Sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Kawasan strategis nasional untuk kepentingan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

1. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat;
2. Kawasan Taman Nasional Berbak dan Bukit Tigapuluh; dan
3. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas.

Kawasan strategis nasional untuk kepentingan sosial budaya adalah Kawasan Percandian Muara Jambi seluas kurang lebih 21.288 hektar (3.355 Ha). Kawasan Cagar Budaya Muara Jambi merupakan kawasan percandian agama Buddha yang telah tumbuh dan berkembang pada abad ke 7-13 M. Kawasan ini berada di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi yang menempati 8 (Delapan) Desa dalam 2 (Dua) Kecamatan, yaitu Desa Danau Lamo, Desa Muaro Jambi, Desa Baru, dan Desa Kemingking Luar di Kecamatan Maro Sebo, serta Desa Tebat Patah, Desa Kemingking Dalam, Desa Dusun Mudo, dan Desa Teluk Jambu di Kecamatan Taman Rajo.

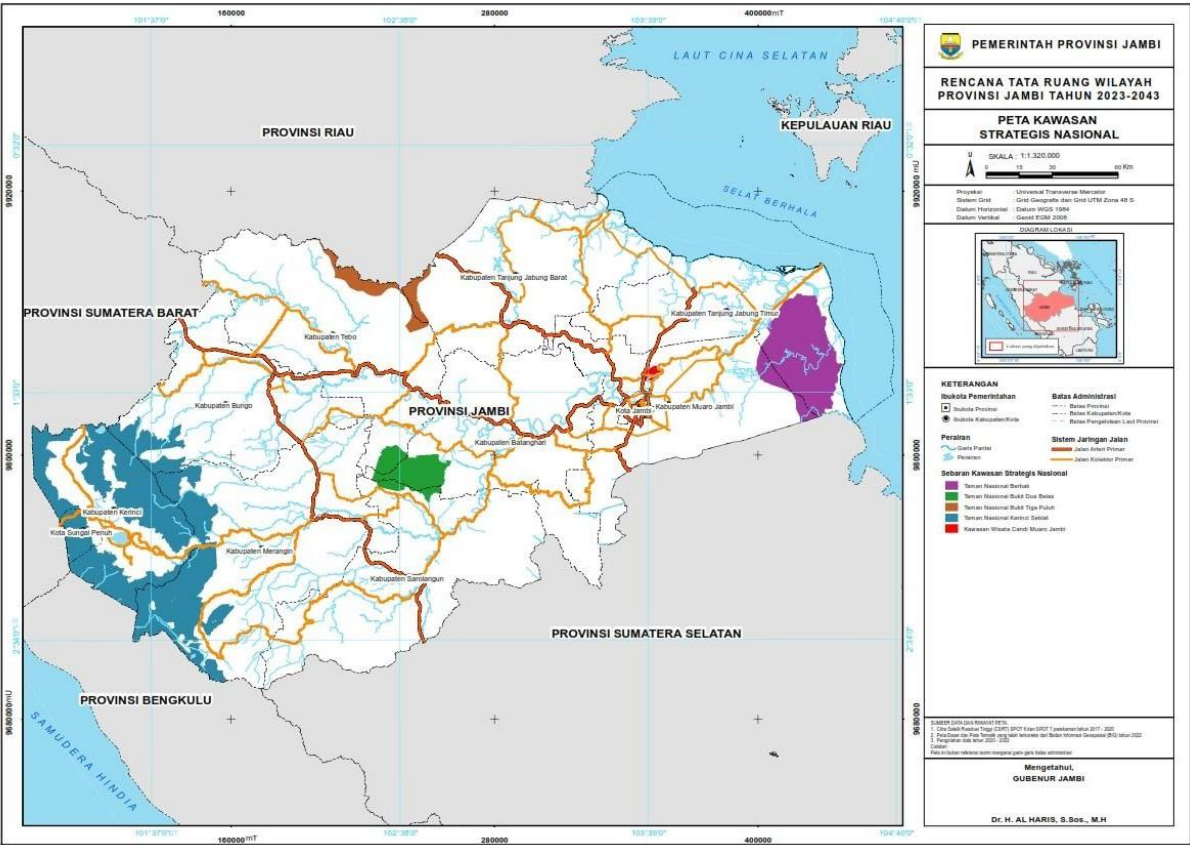
Kawasan Cagar Budaya Muara Jambi telah ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.259/M/2013 tentang Penetapan Satuan Ruang Geografis Muara Jambi sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional dengan luas 3.981 hektar. Bahkan telah masuk dalam daftar tentatif (*Tentative List*) UNESCO untuk nominasi warisan dunia dengan No. 5465 Tahun 2009.

Berdasarkan letak astronomis, kawasan ini berada pada zona 48 M 346839 mT- 356779 mT dan 9833468 mU-9840765 mU. Batas-batas kawasan ini adalah:

Sebelah Utara : Sungai Berembang dan Desa Danau Lamo

Sebelah Selatan : Desa Kemingking Dalam dan Desa Tebat Patah
Sebelah Barat : Desa Danau Lamo dan Desa Baru
Sebelah Timur : Desa Teluk Jambu dan Desa Dusun Mudo

Kawasan ini dibelah oleh sebuah sungai besar, yakni Sungai Batanghari yang membagi 2 kawasan ini menjadi sisi utara dan sisi selatan. Adapun tinggalan purbakala tersebut menempati tanggul alam kuno yang ada di sepanjang tepi Sungai Batanghari, baik di sisi utara maupun di sisi selatan. Tanggul alam merupakan bentukan lahan di sepanjang tebing sungai yang relatif lebih tinggi dari daerah sekitarnya yang terbentuk dari proses pengendapan oleh limpahan banjir. Umumnya daerah pedesaan yang terdapat di sepanjang Sungai Batanghari terletak pada tanggul alam, contohnya Desa Muaro Jambi. Proses pembentukan tanggul alam terus berlangsung hingga saat ini yang ditunjukkan oleh seringnya terjadi genangan air di daerah rendah di belakang tanggul alam ketika terjadi banjir. Di belakang tanggul alam terdapat rawa belakang (*backswamp*) yang sering tergenang air.



Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2023

Gambar 2-10 Kawasan Strategis Nasional Di Provinsi Jambi

Sistem sungai di satuan ruang geografis Muara Jambi terdiri dari Sungai Batanghari sebagai sungai induk dan beberapa anak sungainya, seperti Sungai Amburan Jalo, Sungai Terusan, Sungai Jambi, Parit Sekampung, Parit Johor, Sungai Melayu, Sungai Selat, dan Sungai Berembang. Berdasarkan analisis arah aliran, pola aliran, dan morfometri saluran diketahui bahwa sistem sungai di daerah ini dipengaruhi oleh kegiatan manusia. Hal tersebut diketahui dari adanya dugaan bahwa beberapa sungai di daerah ini merupakan sungai buatan, seperti Sungai Terusan, Parit Sekampung, Parit Johor, dan lain-lain.

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Kawasan strategis di Provinsi Jambi meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi.

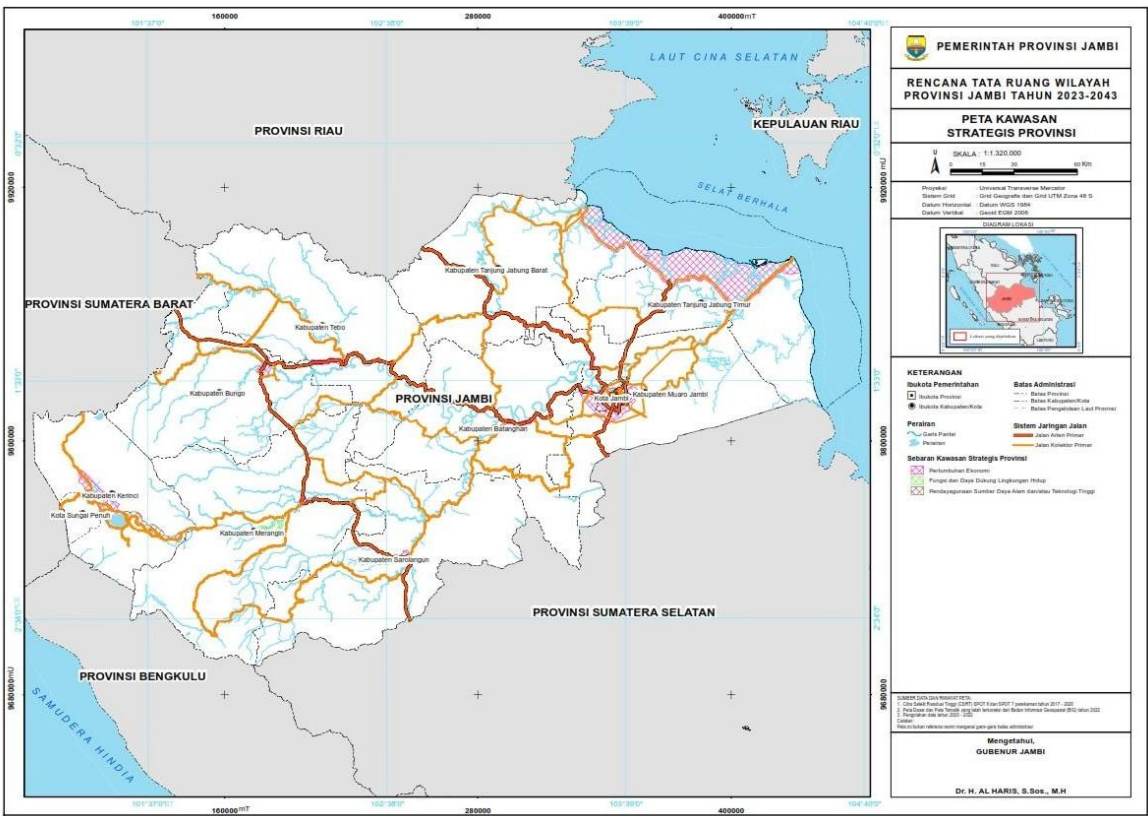
Penetapan Kawasan Strategis Provinsi Jambi untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi dirumuskan dengan pertimbangan tipologi kawasan yang berbentuk kawasan perkotaan, kawasan berkarakter koridor, kawasan perdesaan, dan kawasan cepat tumbuh karena ada trigger ekonomi yang sedang dan akan dikembangkan. Kawasan Strategis Provinsi dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi:

- a. Perkotaan Jambi di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Perkotaan Muara Bulian-Muara Tembesi di Kabupaten Batanghari;
- c. Perkotaan Muara Bungo di Kabupaten Bungo;
- d. Perkotaan Muara Tebo di Kabupaten Tebo;
- e. Perkotaan Bangko di Kabupaten Merangin;
- f. Perkotaan Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
- g. Perkotaan Sungai Penuh-Kerinci di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh;
- h. Perkotaan Sengeti di Kabupaten Muaro Jambi; dan
- i. Kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Arah pengembangannya yaitu penyediaan dan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur regional untuk mendukung kegiatan ekonomi kawasan, penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan permukiman perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, aman, dan berkelanjutan.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Kawasan strategis provinsi teknologi tinggi di Kabupaten Kerinci. Dengan arah pengembangan pengembangan pemanfaatan sumber energi non fosil dan pengembangan teknologi pemanfaatan sumber energi berbasis hitech dan berwawasan lingkungan.

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berada pada Kawasan Geopark Merangin di Kabupaten Merangin.



Sumber: RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043, 2023

Gambar 2-11 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Jambi

2.1.1.9 Wilayah Rawan Bencana

Di Provinsi Jambi terdapat beberapa daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana.

A. Bencana Geologi

Bencana geologi di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai penuh dan Kabupaten Merangin yang berupa amblasan, longsoran, gempa dan ancaman letusan gunung berapi. Berdasarkan data yang berasal dari penelitian-penelitian, batas-batas daerah bahaya sementara pada Gunung Kerinci, yaitu:

1. Daerah Bahaya

Daerah bahaya Gunung Kerinci adalah suatu daerah di sekitar lereng gunung ini, bilamana kegiatannya meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa awan panas letusan, bom volkanik yang membara. Jika kegiatan gunung ini meningkat, seluruh wilayah daerah bahaya harus dikosongkan. Daerah bahaya ini di peta berwarna merah, berbentuk lingkaran dengan jari-jari enam kilometer berpusatkan tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lembah kalinya diperluas mengikuti lembah tersebut.

2. Daerah Waspada

Daerah waspada Gunung Kerinci adalah suatu daerah disekitar lereng gunung ini bilamana kegiatan gunung meningkat (terjadi letusan) akan tertimpa lapili (kerikil volkanik) dan abu, ataupun jika di puncak gunung terjadi hujan setelah adanya kegiatan (letusan) daerah ini akan terserang lahar hujan. Daerah waspada di peta berwarna hijau, berbentuk lingkaran dengan jari-jari sembilan kilometer berpusatkan tengah-tengah kawah, sedangkan pada lembah-lembah kalinya daerah ini diperluas mengikuti lembah-lembah tersebut.

B. Bencana Banjir

Berdasarkan hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya banjir diperoleh potensi luas dan kelas bahaya banjir di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebagai berikut:

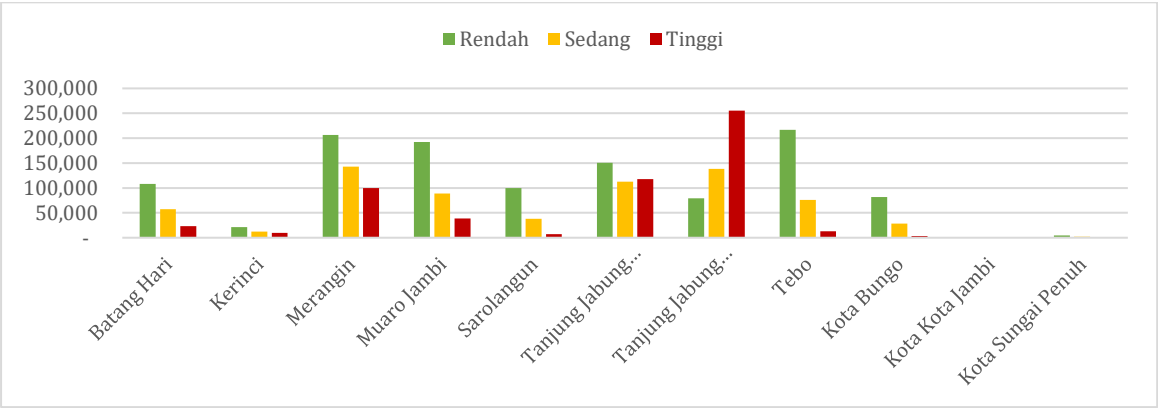
Tabel 2-9 Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	Batang Hari	108.254	57.040	23.100	188.394	Tinggi
2	Kerinci	21.489	12.472	9.603	43.564	Tinggi
3	Merangin	206.376	142.623	99.615	448.614	Tinggi
4	Muaro Jambi	192.240	88.624	38.629	319.493	Tinggi
5	Sarolangun	99.693	38.149	6.913	144.755	Sedang

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
6	Tanjung Jabung Barat	150.552	112.454	118.029	381.035	Tinggi
7	Tanj. Jabung Timur	79.462	138.352	255.060	472.874	Tinggi
8	Tebo	217.016	76.251	13.045	306.312	Sedang
9	Bungo	81.806	28.134	3.611	113.551	Tinggi
B	Kota					
1	Kota Jambi	39	19	-	58	Sedang
2	Kota Sungai Penuh	4.588	1.826	818	7.232	Tinggi
	Provinsi Jambi	1.161.515	695.944	568.423	2.425.882	Tinggi

Sumber : BPBD Prov. Jambi, 2023(data termutakhir)

Potensi bahaya banjir pada tabel di atas memperlihatkan jumlah luas wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana banjir berdasarkan kajian bahaya. Luas bahaya Provinsi Jambi ditentukan berdasarkan total luas bahaya banjir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang terdampak bahaya banjir. Kelas bahaya banjir Provinsi Jambi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum seluruh Provinsi Jambi yang terdampak banjir. Total luas bahaya banjir di Provinsi Jambi secara keseluruhan adalah 2.425.882,00 Ha dan berada pada kelas Tinggi. Luas bahaya banjir tersebut dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu luas bahaya dengan kelas rendah adalah 1.161.515,00 Ha, kelas sedang seluas 695.944,00 Ha, sedangkan daerah yang terdampak bahaya banjir pada kelas tinggi adalah seluas 568.423,00 Ha.



Sumber : BPBD Provinsi Jambi, 2023(data termutakhir)

Gambar 2-12 Grafik Potensi Bahaya Banjir di Provinsi Jambi

Kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir pada kelas rendah adalah Kabupaten Tebo dengan luas 217.016,00 Ha. Pada kelas sedang, kabupaten yang memiliki luas tertinggi bahaya banjir adalah Kabupaten Merangin dengan luas 142.623,00 Ha. Sedangkan untuk kelas

tinggi, kabupaten yang memiliki luas bahaya banjir tertinggi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan luas 255.060,00 Ha.

C. Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan hasil kajian potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan diperoleh potensi luas dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi sebagai berikut:

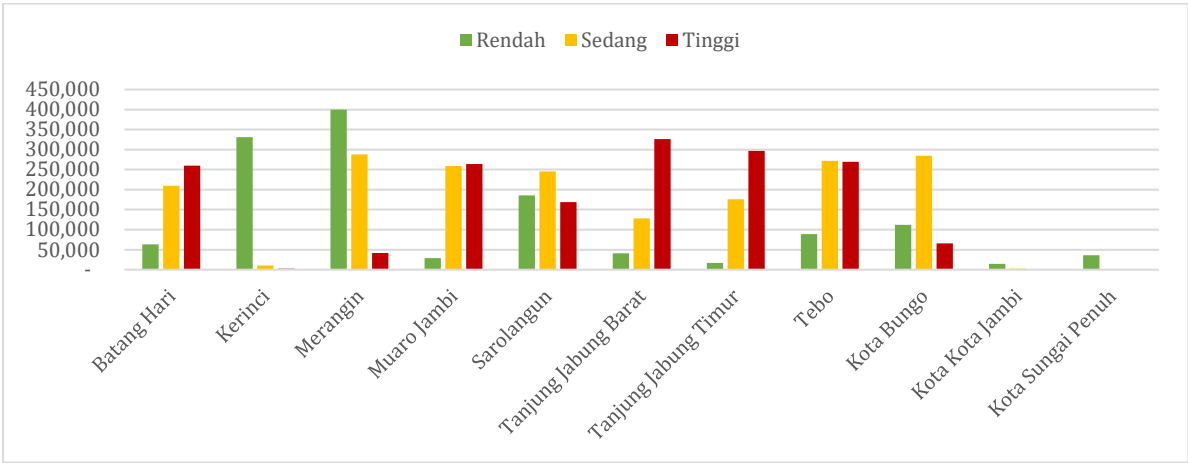
Tabel 2-10 Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi

No.	Kabupaten/Kota	Bahaya				
		Luas (Ha)				Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
A	Kabupaten					
1	Batang Hari	63.456	209.625	260.103	533.184	Tinggi
2	Kerinci	330.854	10.743	2.197	343.794	Tinggi
3	Merangin	399.518	288.100	41.958	729.576	Tinggi
4	Muaro Jambi	28.670	258.686	264.193	551.549	Tinggi
5	Sarolangun	185.256	245.441	168.473	599.170	Tinggi
6	Tanjung Jabung Barat	41.247	127.735	325.886	494.868	Tinggi
7	Tanjung Jabung Timur	16.711	176.116	296.549	489.376	Tinggi
8	Tebo	88.565	271.693	269.181	629.439	Tinggi
9	Bungo	111.731	284.776	65.700	462.207	Tinggi
B	Kota					
1	Kota Jambi	14.117	2.414	510	17.041	Tinggi
2	Kota Sungai Penuh	35.960	-	-	35.960	Rendah
	Provinsi Jambi	1.316.085	1.875.329	1.694.750	4.886.164	Tinggi

Sumber : BPBD Provinsi Jambi, 2023 (data termutakhir)

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dari tabel di atas merupakan luasan wilayah yang memiliki kondisi rentan terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan berdasarkan kajian bahaya kebakaran hutan dan lahan. Total luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi ditentukan berdasarkan rekapitulasi total luas bahaya seluruh kabupaten terdampak kebakaran hutan dan lahan, sedangkan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan Provinsi Jambi ditentukan dengan melihat kelas bahaya maksimum dari setiap kabupaten/ kota di Provinsi Jambi yang terdampak bencana kebakaran hutan dan lahan. Potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar 4.886.164,00 Ha dan

berada pada kelas Tinggi, yang meliputi luas bahaya dengan kelas rendah seluas 1.316.085,00 Ha, kelas sedang 1.875.329,00 Ha, dan kelas tinggi dengan luas 1.694.750,00 Ha.



Sumber : BPBD Provinsi Jambi, 2023(data termutakhir)

Gambar 2-13 Grafik Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi

Pada grafik di atas, dapat terlihat sebaran luas bahaya kebakaran hutan dan lahan masing-masing kabupaten/kota. Luas tertinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan pada kelas rendah adalah 399.518,00 Ha, yaitu Kabupaten Merangin, sedangkan pada kelas sedang, luas tertinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan terdapat di Kabupaten Merangin dengan luas 288.100,00 Ha. Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah wilayah yang memiliki potensi bahaya bencana kebakaran hutan dan lahan yang tertinggi untuk kelas tinggi, yaitu 325.886,00 Ha.

2.1.2 Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Jambi berdasarkan Jambi Dalam Angka Tahun 2023 yang dirilis oleh BPS adalah sebanyak 3.631.100 jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata sebesar 74 jiwa/km². Kepadatan tertinggi berada di Kota Jambi sebesar 3.647 jiwa/km² dan Kota Sungai Penuh sebesar 272 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi tahun 2020-2022 adalah sebesar 1,33 persen dengan pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Batang Hari sebesar 2,16 persen dan terendah di Kabupaten Merangin sebesar 0,57 persen.

Tabel 2-11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2018 - 2022

No	Kabupaten / Kota	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kerinci	237.791	238.700	250.300	251.900	253.900
2	Merangin	383.480	388.900	354.100	355.700	357.600
3	Sarolangun	295.985	301.900	290.100	293.600	298.100
4	Batang Hari	269.966	272.900	301.700	306.700	313.200
5	Muaro Jambi	432.305	443.400	402.000	406.800	412.800
6	Tanjab Timur	218.413	220.000	229.800	231.800	234.200
7	Tanjab Barat	328.343	333.900	317.500	320.600	324.500
8	Tebo	348.760	354.500	337.700	340.900	344.800
9	Bungo	367.182	374.800	362.400	367.200	373.300
10	Kota Jambi	598.103	604.700	606.200	612.200	619.600
11	Sungai Penuh	89.944	90.900	96.600	97.800	99.200
Provinsi Jambi		3,402,052	3.570.272	3.624.600	3.548.200	3.631.100

Sumber: Jambi Dalam Angka 2023, 2023 (data termutakhir)

Dilihat dari posisi kewilayahan barat dan timur, maka persentase distribusi penduduk di kedua wilayah tersebut terlihat relatif seimbang, yaitu 52,44 persen untuk wilayah timur (Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Kota Jambi), dan 47,56 persen untuk wilayah barat (Kerinci, Sungai Penuh, Merangin, Sarolangun, Bungo dan Tebo). Bila dilihat dari komposisi penduduk Provinsi Jambi menurut jenis kelamin Secara umum penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, dengan rasio 103,8.

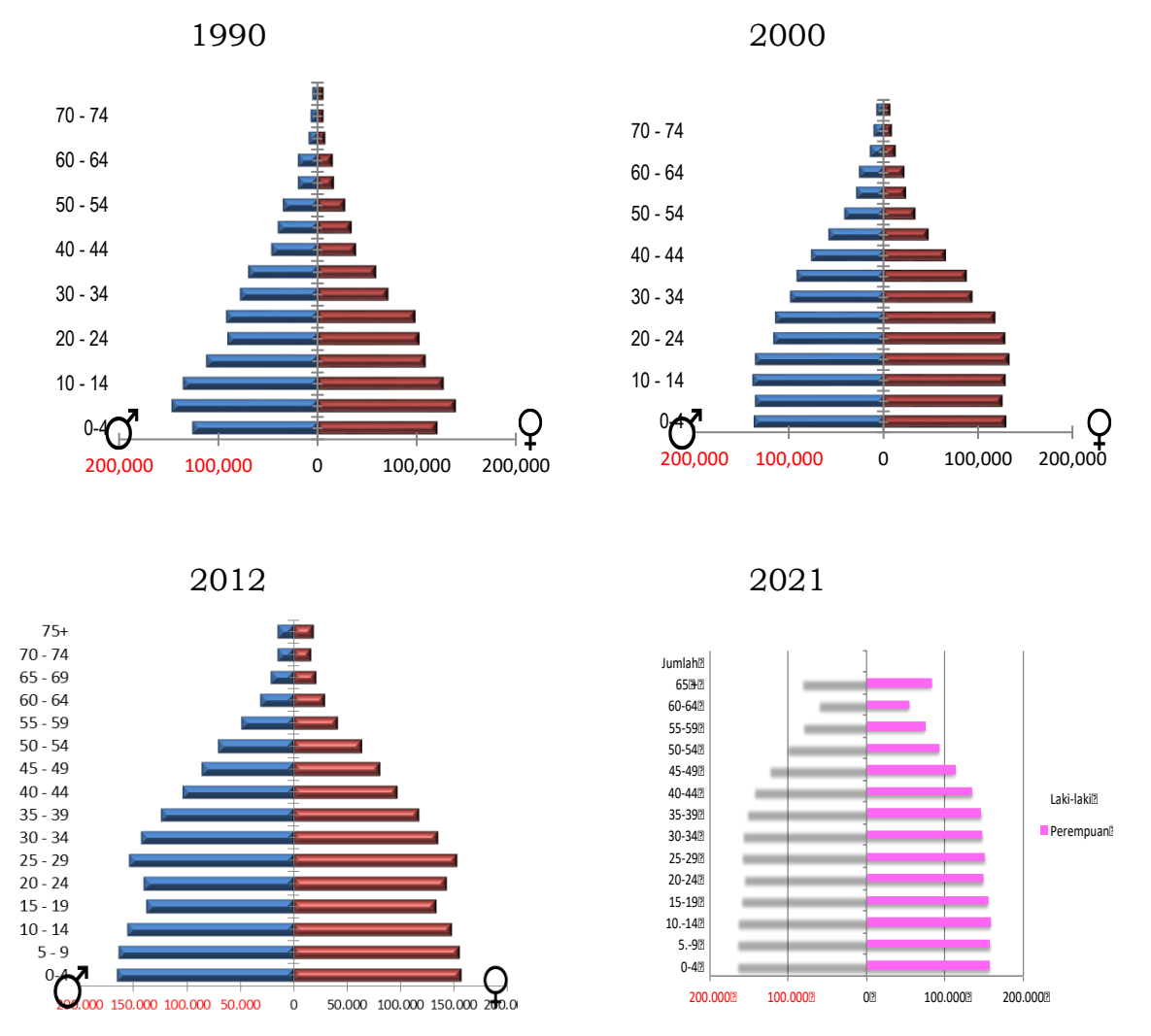
Tabel 2-12 Kepadatan Penduduk di Provinsi Jambi Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Kepadatan Penduduk(jiwa/km ²)
1	Kerinci	74
2	Merangin	47
3	Sarolangun	50
4	Batang Hari	58
5	Muaro Jambi	79
6	Tanjab Timur	52
7	Tanjab Barat	59
8	Tebo	56
9	Bungo	78
10	Kota Jambi	3.647
11	Sungai Penuh	272
Jumlah		74

Sumber: Jambi Dalam Angka 2023, 2023(data termutakhir)

Kondisi demografi Provinsi Jambi lebih jelas dapat dilihat dalam piramida penduduk selama empat dekade yakni tahun 1990, 2000, 2012

dan 2021 di atas. Pada tahun 1990 jumlah penduduk didominasi oleh kelompok usia sekolah dasar dan pada tahun 2000, jumlah penduduk didominasi oleh kelompok usia sekolah dasar (7-12 tahun), sekolah menengah pertama/wajib belajar 9 tahun (13-15 tahun) hingga kelompok usia sekolah menengah atas (16 – 18 tahun) sampai usia masuk Perguruan Tinggi (15-19 tahun). Sedangkan fakta yang dapat terlihat pada Piramida Penduduk Provinsi Jambi tahun 2012 menunjukkan bahwa jumlah balita cenderung tinggi, mengimbangi kelompok usia produktif, kelompok usia Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama cenderung tinggi. Kelompok usia Sekolah Menengah Atas hingga lulusan Perguruan Tinggi memperlihatkan bahwa pada usia tersebut banyak penduduk meninggalkan Jambi untuk bersekolah. Ini dapat diasumsikan sebagai indikasi untuk tuntutan terhadap infrastruktur dan pelayanan pendidikan dengan kualitas yang baik.



Gambar 2-14 Piramida penduduk tahun 1990, 2000,2012 dan 2021, Jambi Dalam Angka, data diolah)

Hal menarik lainnya dapat dilihat pada piramida penduduk tahun 2021, dimana dalam kurun waktu sembilan tahun, telah terjadi perubahan dalam struktur penduduk yaitu kelompok penduduk usia sekolah yang hampir seimbang dengan kelompok usia produktif dan usia lanjut yang semakin besar. Hal ini mengindikasikan adanya migrasi penduduk masuk ke Provinsi Jambi pada kelompok usia produktif. Terkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan, apabila tidak diantisipasi maka angka pengangguran di Provinsi Jambi akan terus meningkat. Peningkatan jumlah lansia di satu sisi memperlihatkan perbaikan di bidang kesehatan, namun di sisi lain menyebabkan tingginya angka ketergantungan dan kebutuhan perbaikan layanan kesehatan lansia.

Tabel 2-13 Distribusi Penduduk Menurut Agama tahun 2023

Kab/Kota	Agama yang Dianut (%)						
	Islam	Protestan	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu	Lainnya
Kerinci	99,77	0,18	0,04	0,0004	0,0008	0,00	0,005
Merangin	98,02	1,61	0,24	0,01	0,04	0,001	0,08
Sarolangun	96,36	2,96	0,42	0,01	0,10	0,004	0,16
Batang Hari	97,17	2,33	0,29	0,00	0,09	0,003	0,12
Muaro Jambi	94,36	4,73	0,49	0,04	0,35	0,01	0,002
Tanjab Timur	98,60	1,14	0,18	0,02	0,07	0,002	0,00
Tanjab Barat	93,43	5,55	0,56	0,00	0,41	0,03	0,02
Tebo	96,42	2,87	0,46	0,01	0,01	0,00	0,23
Bungo	96,90	2,21	0,48	0,003	0,34	0,003	0,06
Kota Jambi	87,32	6,26	1,62	0,03	4,68	0,09	0,001
Sungai Penuh	99,11	0,61	0,17	0,001	0,10	0,00	0,00

Sumber: Jambi Dalam Angka 2023, 2023.

Distribusi penduduk menurut agama memperlihatkan bahwa mayoritas penduduk di seluruh kabupaten/kota beragama Islam dengan jumlah terbesar kedua dan ketiga adalah penduduk beragama Kristen Protestan dan Budha. Sedangkan untuk tiga agama lainnya menunjukkan variasi komposisi pada masing-masing kabupaten/ kota. Keragaman komposisi ini membutuhkan pembinaan untuk penumbuhan tenggang rasa antar pemeluk umat beragama agar tidak muncul konflik yang berpotensi mengganggu keamanan di Provinsi Jambi.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

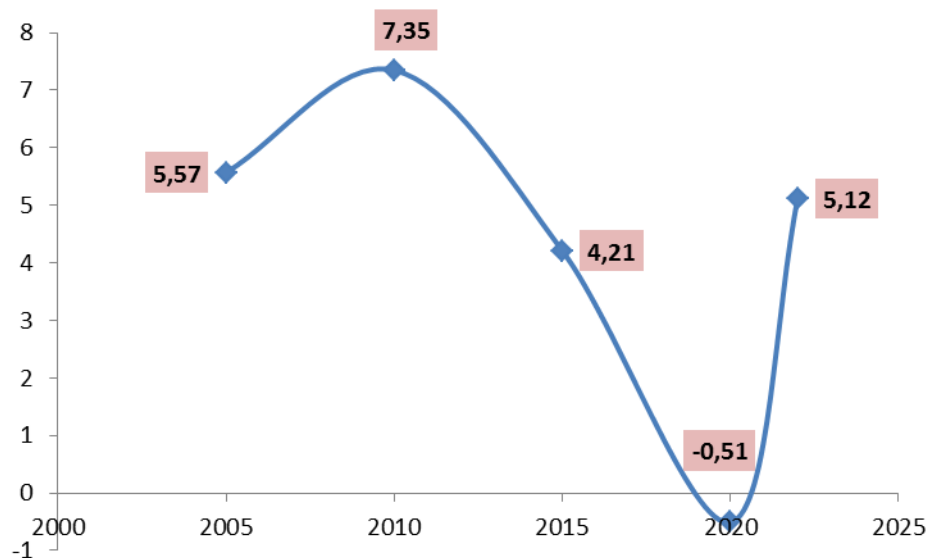
2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Pembangunan Provinsi Jambi tidak bisa dipisahkan dari pertumbuhan ekonomi, keduanya bersinergi dan saling terkait.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi 20 tahun terakhir berfluktuatif dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011, yaitu sebesar 7,86 persen. Pada Tahun 2019 terjadi perlambatan dari 4,74 persen pada tahun 2018 menjadi 4,40 persen. Kondisi ini disebabkan oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dunia yang lesu, kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan, menurunnya harga minyak dunia) dan juga disebabkan oleh peristiwa kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap yang berlangsung.

Selanjutnya, akibat pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia, sehingga berpengaruh terhadap Ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2020 mengalami kontraksi sedalam 0,46 persen. Kontraksi dialami oleh sebagian besar lapangan usaha, terutama yang dialami oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan serta Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Sementara Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi mengalami pertumbuhan tertinggi. Pandemi covid-19 yang terjadi di sepanjang tahun 2020 menyebabkan pembatasan kegiatan seperti sekolah dan bekerja. Kegiatan yang dilakukan dari rumah saja dan dilakukan secara daring, meningkatkan aktivitas Informasi dan Komunikasi. Demikian juga sebaliknya, pembatasan kegiatan dan mobilitas mengakibatkan turunnya aktivitas transportasi terutama angkutan udara. Bahkan bandara Depati Parbo di Kerinci dan bandara Muaro Bungo beberapa bulan di tahun 2020 sempat tidak ada aktivitas penerbangan komersial sama sekali.

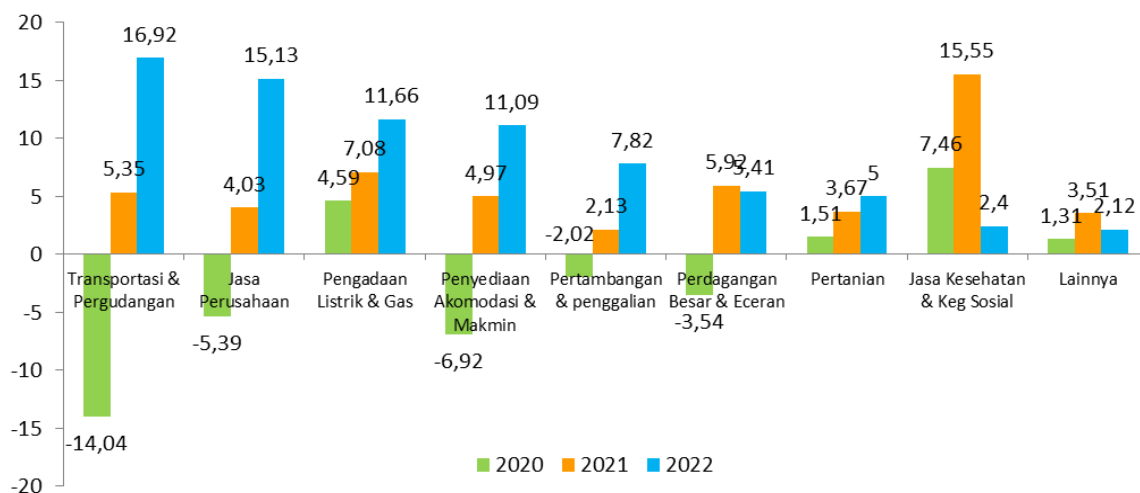
Namun pada tahun 2021 ekonomi Provinsi Jambi mengalami pemulihan dengan menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 3,66 persen. Seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, terutama Lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 14,33 persen. Tingginya pertumbuhan lapangan usaha tersebut didorong oleh penanggulangan pandemi serta pelaksanaan vaksinasi covid-19. Selanjutnya, diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi yang tumbuh tinggi sebesar 8,01 persen, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,08 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,92 persen.



Sumber: Data diolah. BPS, 2024

Gambar 2-15 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2005, 2010,2015,2000, dan 2022

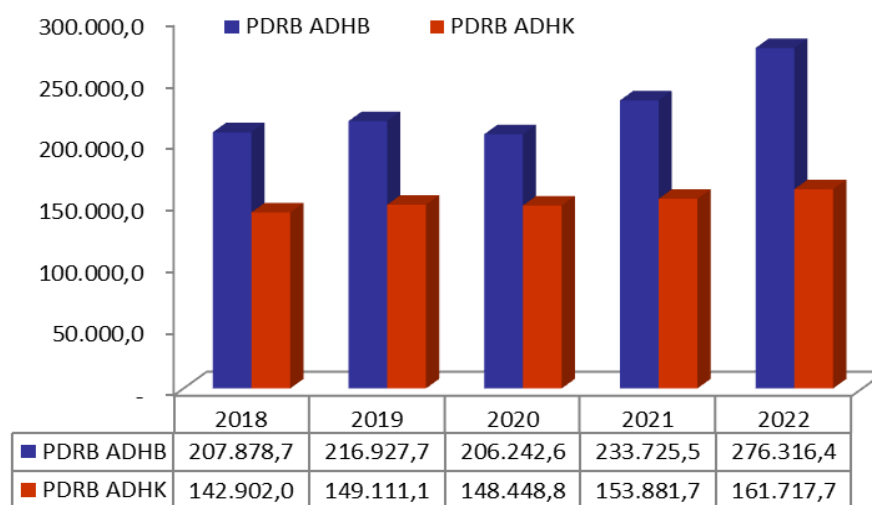
Selanjutnya, pada tahun 2022 seiring dengan makin pulihnya aktivitas masyarakat, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang mencapai 5,13 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Transportasi dan Pergudangan 16,92 persen. Tingginya pertumbuhan lapangan usaha tersebut didorong oleh kenaikan aktivitas transportasi angkutan barang dan penumpang. Selain itu, penghapusan aturan PPKM mendorong masyarakat Jambi melakukan perjalanan terutama melalui udara. Lapangan usaha berikutnya yang tumbuh tinggi adalah Jasa Perusahaan sebesar 15,13 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 11,66 persen; Pertambangan dan Penggalan sebesar 7,82 persen. Sedangkan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh 5,41 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,00 persen. Di samping itu, beberapa lapangan usaha berkontraksi. Jasa kesehatan yang terdalam yaitu sebesar 2,40 persen.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

Gambar 2-16 Pertumbuhan PDRB Beberapa Lapangan Usaha

Laju pertumbuhan PDRB ADHB Provinsi Jambi pada periode 2018–2022 adalah rata-rata sebesar 7,11 persen per tahun, sementara laju pertumbuhan PDRB ADHK rata-rata sebesar 3,09 persen per tahun.



Sumber: BPS Provinsi Jambi, 2023

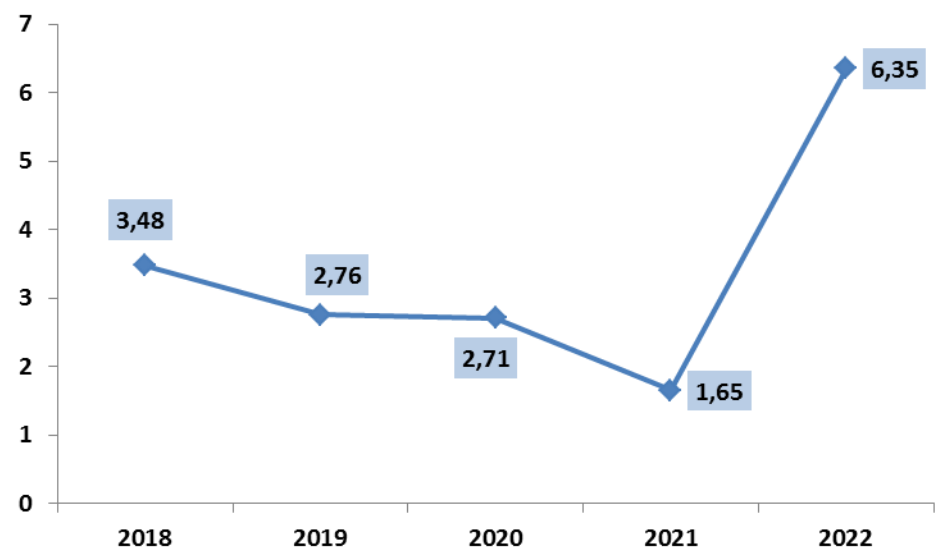
Gambar 2-17 Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 (dalam milyar rupiah)

Setelah dua tahun lebih pandemi Covid-19 melanda Indonesia, perbaikan perekonomian mulai terjadi di semua provinsi dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda, termasuk di Sumatera. Pada tahun 2022, Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 5,23 persen, diikuti oleh Provinsi Jambi sebesar 5,13 persen, serta Provinsi Kepulauan Riau tumbuh sebesar 5,09 persen. Sementara Provinsi Aceh berada pada pertumbuhan yang paling rendah dibanding provinsi lainnya yaitu sebesar 4,21 persen.

Jika dilihat sektor-sektor yang memberi kontribusi PDRB Provinsi Jambi selama 5 tahun terakhir (2018-2022), maka sektor pertanian masih memberi kontribusi terbesar dan terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2022 kontribusinya mencapai 30,25 persen dengan laju pertumbuhan sebesar 5 persen, lebih besar dibanding tahun 2021 yang mencapai 3,67. Sektor pertambangan dan penggalan merupakan kontributor terbesar kedua, dan semakin mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dari 14,21 persen menjadi 19,29 persen di tahun 2022. Kontributor terbesar ketiga adalah lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yang mencapai 12,16 persen.

2.2.1.2 Inflasi

Inflasi menjadi indikator ekonomi yang penting terutama untuk fokus kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai indikator baik yang bersifat eksternal maupun internal, terutama disebabkan oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. Terkait hal ini, inflasi perlu dipertahankan untuk tetap rendah dan stabil untuk menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terhadap guncangan kenaikan harga. Laju inflasi yang terlalu rendah juga mengindikasikan adanya kelesuan ekonomi. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa harga-harga yang tidak bergerak ke atas menandakan adanya kelemahan pada sisi permintaan. Tidak jarang terlalu rendahnya tingkat inflasi merupakan indikator lemahnya daya beli masyarakat yang pada gilirannya akan menekan laju pertumbuhan ekonomi.



Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-18 Tingkat Inflasi Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022

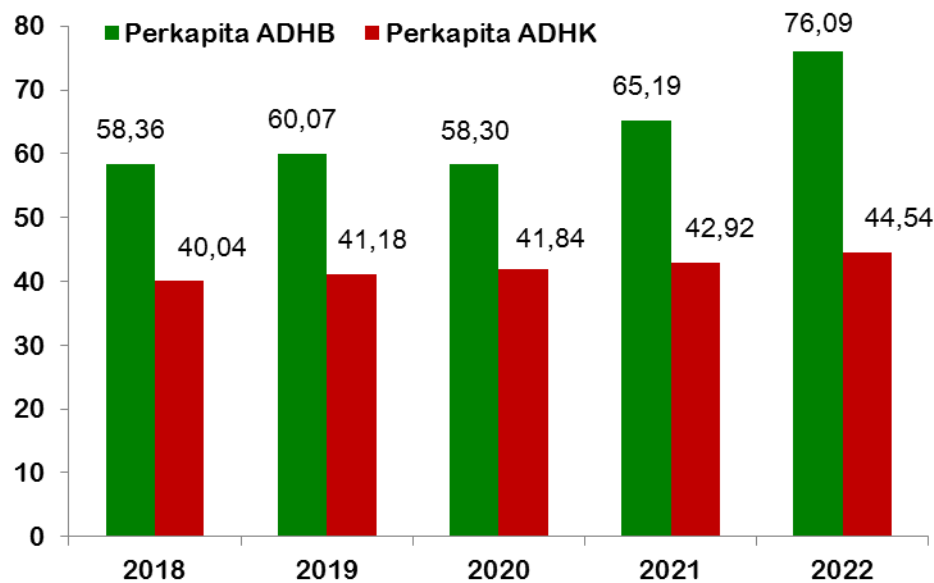
Laju inflasi gabungan kabupaten/kota di provinsi Jambi merupakan komposit dari inflasi di Kota Jambi dan Kabupaten Bungo, berdasarkan tahun kalender 2022 tercatat sebesar 6,35 (ytd). Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, tingkat inflasi ini merupakan yang tertinggi setelah tahun 2013 dan 2014 yang mencapai 8,74 dan 8,72 persen.

Tingginya inflasi di Provinsi Jambi pada tahun 2022 tersebut, utamanya didorong oleh inflasi pada sub kelompok jasa angkutan penumpang dan pengoperasian peralatan transportasi pribadi, yaitu pada komoditas bensin, angkutan udara solar, dan cuci kendaraan. Kenaikan harga tarif angkutan udara tersebut diakibatkan kenaikan harga avtur serta kenaikan harga bensin dan solar yang ditetapkan sejak September 2022, dimana harga pertalite pada Desember 2022 tercatat sebesar Rp10.000/liter.

Di samping itu, kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau juga memberikan andil besar dalam meningkatnya inflasi di tahun 2022, terutama yang didorong oleh kenaikan harga komoditas daging ayam ras dan cabai merah, komoditas beras, rokok kretek filter, rokok kretek, rokok putih, telur ayam ras, dan ikan nila. Kenaikan inflasi dari sub-kelompok Rokok dan Tembakau dikarenakan dampak keberlanjutan dari transmisi kenaikan cukai hasil tembakau di tahun 2022 yang mendorong peningkatan harga komoditas rokok. Kenaikan harga komoditas telur ayam didorong oleh peningkatan biaya produksi yang mencakup biaya pakan dan DOC, peningkatan permintaan untuk bansos dan sektor HORECA, serta adanya gangguan produksi di beberapa sentra produksi seiring dengan perubahan cuaca.

2.2.1.3 PDRB Perkapita

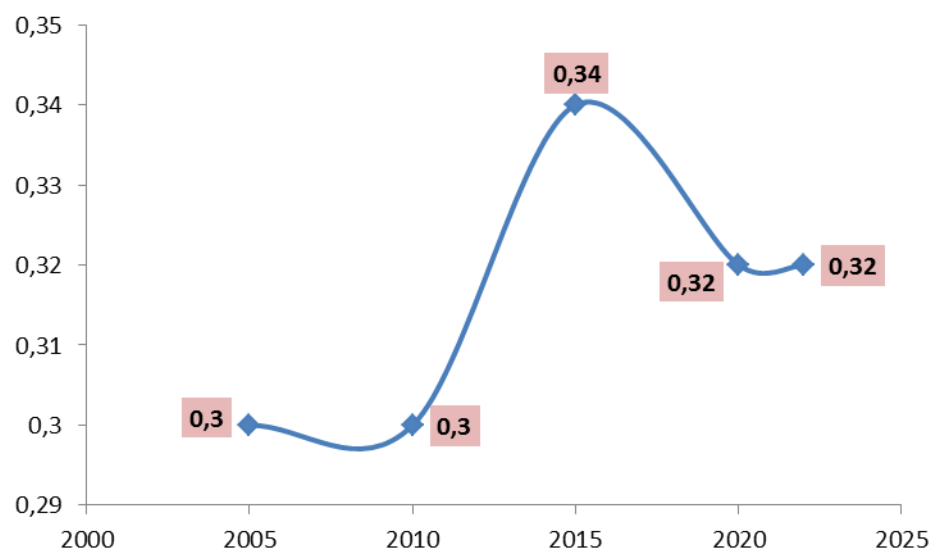
PDRB per kapita Provinsi Jambi ADHK selama periode 2018-2022 menunjukkan kenaikan setiap tahunnya dengan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 2,74 persen per tahun. Sedangkan PDRB per kapita ADHB mengalami fluktuasi, terutama di tahun 2020 akibat pandemi covid-19, namun masih memiliki kecenderungan meningkat hingga tahun 2022 dengan rata-rata laju pertumbuhan per tahun sebesar 5,65 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa kesejahteraan masyarakat Provinsi Jambi meningkat namun masih dikategorikan pendapatan rendah-menengah (*lower-middle income*). Terkait dengan hal tersebut maka perlu dibuat kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.



Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-19 PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Provinsi Jambi Tahun 2018 -2022 (dalam juta rupiah)

2.2.1.3.1 Indeks Gini

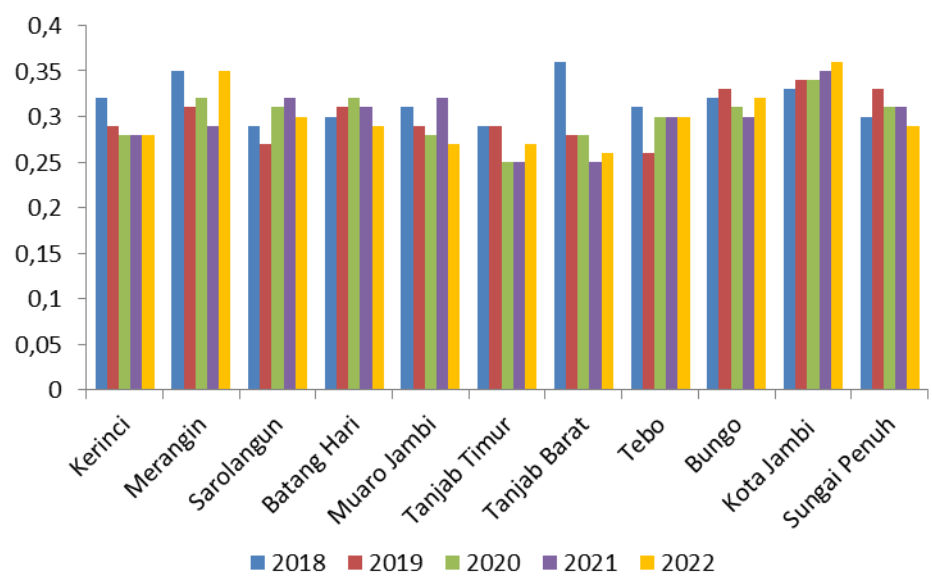


Sumber : BPS 2023

Gambar 2-20 Indeks Gini Provinsi Jambi Tahun 2005,2010,2015,2020 dan 2022

Fenomena ketimpangan pendapatan wilayah memang sudah menjadi hal yang biasa dalam perkembangan suatu wilayah dan berpotensi menimbulkan konflik finansial, sosial, atau hubungan yang saling memperlemah antar wilayah. Salah satu indikator yang digunakan melihat ketimpangan pendapatan adalah indeks Gini dengan kisaran angka antara 0 sampai 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna. Selama 20 tahun terakhir, Koefisien Gini

Provinsi Jambi relatif rendah di bawah nasional. Berdasarkan daerah tinggal, Koefisien Gini Tahun 2022 di daerah perkotaan lebih tinggi daripada perdesaan dengan indeks masing-masing sebesar 0,376 dan 0,302. Jika dilihat per kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, secara umum indeks gini pada masing-masing kabupaten/kota memperlihatkan indeks yang berfluktuatif namun memperlihatkan ketimpangan yang cenderung menyempit. Hanya beberapa Kabupaten/kota yang memperlihatkan kecenderungan peningkatan ketimpangan, namun masih dalam kategori ketimpangan sedang.



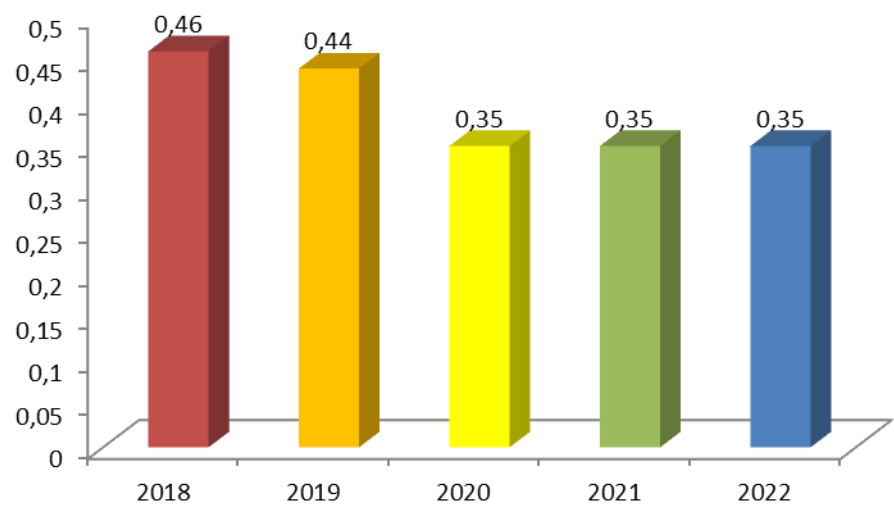
Sumber : BPS 2023. data diolah
 Gambar 2-21 Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

2.2.1.4 Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah yang disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan ekonomi juga menjadi berbeda. Terjadinya ketimpangan antar wilayah ini membawa implikasi terhadap kesejahteraan masyarakat antar wilayah dan berimplikasi juga terhadap formulasi kebijakan pembangunan wilayah yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Besaran Indeks Williamson antara nol sampai satu dengan kriteria jika indeks < 0,35 dikategorikan rendah, 0,35 – 0,5 dikategorikan sedang dan > 0,5 dikategorikan tinggi. Indeks Williamson Provinsi Jambi mulai dari tahun 2017-2020 memperlihatkan kecenderungan menurun, namun masih dikategorikan sedang. Pada tahun 2018, indeks Williamson Provinsi

Jambi sebesar 0,46 mengalami penurunan pada Tahun 2022 menjadi 0,35.



Sumber : BPS 2023. data diolah
Gambar 2-22 Indeks Williamson Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Ketimpangan atau kesenjangan pembangunan antarwilayah masih merupakan tantangan yang harus diselesai dalam pembangunan ke depan. Kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam jangka panjang bisa memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota maupun antara kota-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan. Kesenjangan tersebut berkaitan dengan sebaran demografi yang tidak seimbang, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai. Upaya-upaya pembangunan yang lebih berpihak kepada kawasan tertinggal menjadi suatu keharusan untuk menangani tantangan ketimpangan dan kesenjangan pembangunan.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1 Kemiskinan

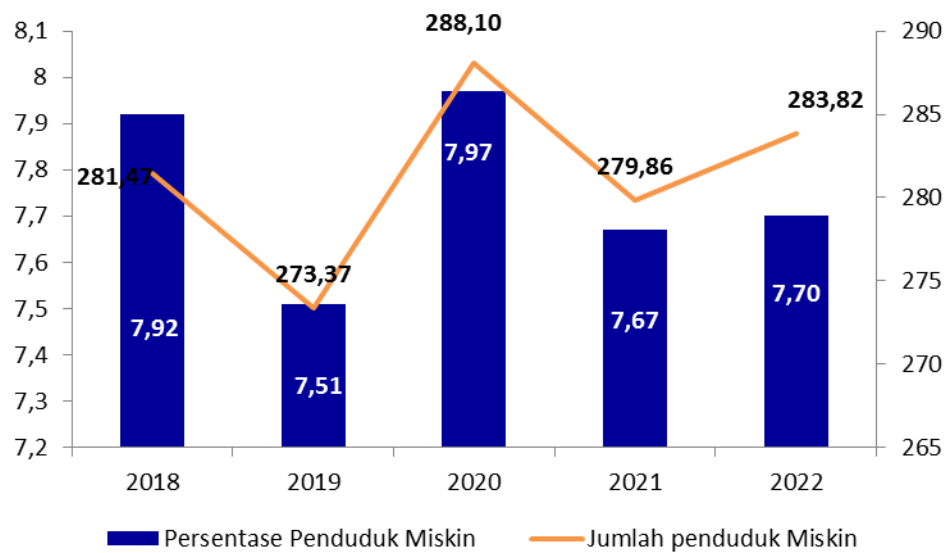
Masalah kemiskinan banyak dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Namun dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi terkadang kurang memperhatikan keadaan untuk jangka panjang. Mengatasi hal tersebut, pembangunan berkelanjutan dapat menjadi suatu bentuk rancangan yang dapat digunakan. Pembangunan berkelanjutan merupakan suatu pembangunan yang memperhatikan keberlanjutan

untuk jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan menjadi model pembangunan yang memperhatikan segi sumber daya dan juga lingkungan.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang telah lama menjadi isu sentral. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Faktor utama penyebab kemiskinan meliputi antara lain kelebihan penduduk, tidak meratanya distribusi sumber daya ekonomi, ketidakmampuan untuk memenuhi biaya hidup dan standar hidup yang tinggi, pendidikan dan kesempatan kerja yang tidak memadai, dan degradasi lingkungan. Pada banyak kasus, penyebab dan dampak kemiskinan saling berinteraksi, jadi apa yang membuat penduduk miskin juga menciptakan kondisi yang membuat mereka tetap miskin. Kemiskinan bisa menjadi penghambat pembangunan di masa mendatang yang akan berpengaruh terhadap pembangunan berkelanjutan. Pemberantasan kemiskinan merupakan tantangan global terbesar yang dihadapi dunia saat ini.

Persentase penduduk miskin di Provinsi Jambi dari tahun 2018 sampai tahun 2022 mengalami fluktuasi, terutama di tahun 2020 akibat pandemi covid-19 yang mengakibatkan banyak aktivitas perekonomian yang mengalami stagnasi, sehingga berdampak terhadap peningkatan persentase penduduk miskin. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan persentase penduduk miskin seiring dengan pemulihan ekonomi akibat pandemi covid-19.

Persentase penduduk miskin Provinsi Jambi mengalami penurunan dari 7,92 persen di tahun 2018 menjadi 7,70 persen di tahun 2022. walaupun terjadi peningkatan garis kemiskinan sebesar 6,68 persen, yaitu dari Rp426.251 per kapita per bulan pada 2018 menjadi Rp585.950 per kapita per bulan pada 2022. Pada September 2018, jumlah penduduk miskin Provinsi Jambi adalah sebanyak 281,47 ribu orang, meningkat menjadi 283,82 ribu orang pada tahun 2022.

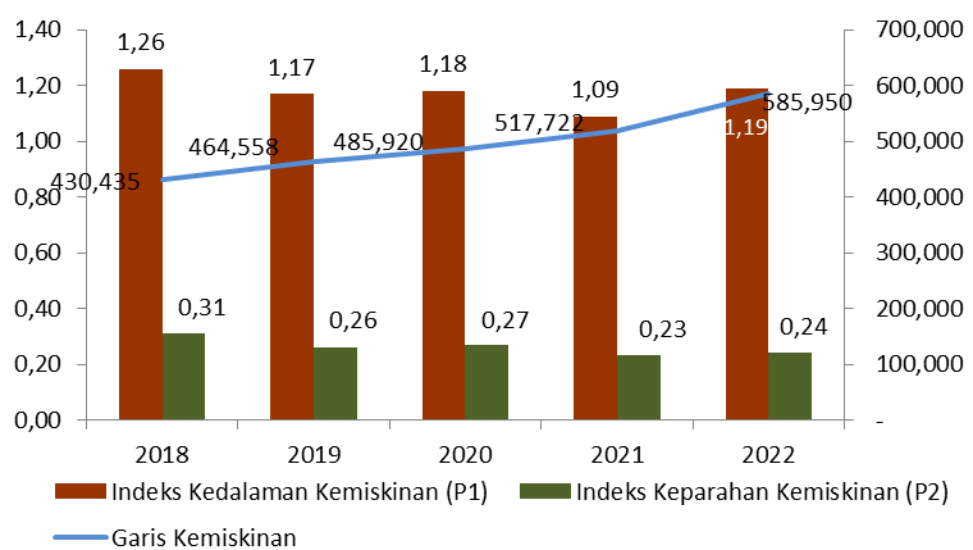


Sumber: BRS, 2023

Gambar 2-23 Jumlah Penduduk Miskin,dan Persentase Penduduk Miskin, Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari tingkat kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan atau *Poverty Gap Index* (P1) yang dirumuskan oleh *Foster-Greer-Thorbec* (FGT). P1 merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, angka P1 yang semakin mendekati 0 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Pada periode September 2018 - September 2022, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jambi mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, yaitu pada September 2017 nilai P1 sebesar 0,99 meningkat menjadi 1,09 pada September tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauhi garis kemiskinan. Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, untuk P1 Provinsi Jambi selama periode yang sama, maka daerah perkotaan memiliki nilai P1 selalu lebih besar dibandingkan daerah perdesaan. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk miskin di perdesaan rata-rata pengeluaran memiliki kecenderungan semakin mendekati Garis Kemiskinan dibandingkan di daerah perkotaan.

Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keparahan kemiskinan adalah Indeks Keparahkan Kemiskinan atau *Distributionally Sensitive Index* (P2) yang dirumuskan oleh *Foster-Greer-Thorbec* (FGT). P2 memberikan gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angka P2 yang semakin mendekati 0 menunjukkan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin secara umum semakin kecil. Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2), meningkat dari 0,19 pada September 2017 menjadi 0,23 pada September 2021. Kenyataan ini mengindikasikan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin meningkat. Apabila dibandingkan antara daerah perkotaan dan perdesaan, untuk P2 Provinsi Jambi, maka daerah perkotaan memiliki kecenderungan nilai P2 yang lebih besar dari perdesaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perkotaan semakin melebar dan lebih besar dibandingkan dengan perdesaan.



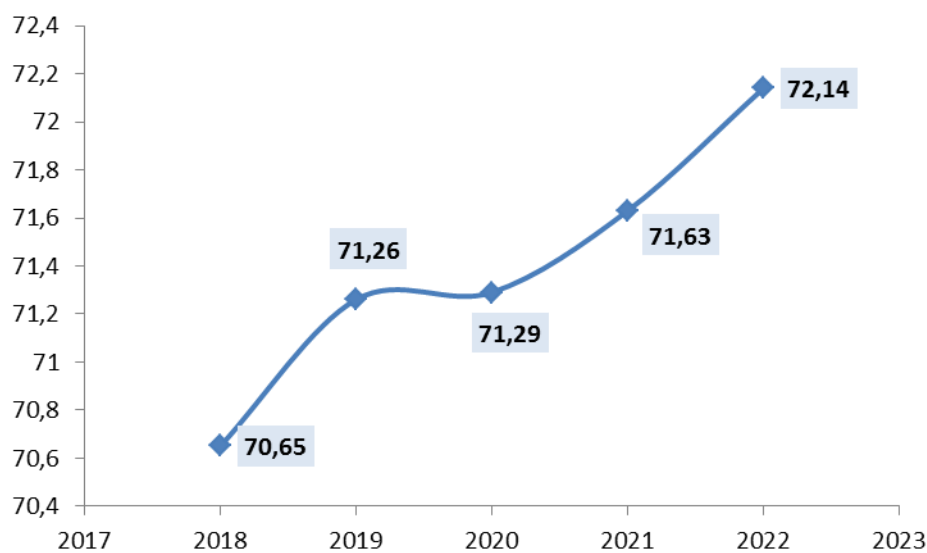
Sumber: BPS, data diolah, 2023
Gambar 2-24 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahkan Kemiskinan Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

2.2.2.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru

United Nation Development Programe (UNDP) menyempurnakan metode IPM dengan Metode Baru pada tahun 2010. Adapun alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM metode baru adalah : 1) Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat

pendidikan antar daerah dengan baik. PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; 2) penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

IPM dengan Metode Baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif) : a) Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi; b) PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.



Sumber: BPS, data diolah, 2023

Gambar 2-25 IPM Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 dan capaian masing-masing komponen pembentuk IPM

Capaian IPM Provinsi Jambi menunjukkan perbaikan setiap tahun, bahkan mulai tahun 2018 sudah masuk dalam kategori tinggi. Seluruh komponen menunjukkan tren peningkatan walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2020 dimana Pandemi Covid-19 melanda dunia, hampir seluruh komponen tetap menunjukkan perbaikan, kecuali komponen pengeluaran perkapita. Hal ini dipengaruhi oleh kontraksi ekonomi yang terjadi di Provinsi Jambi, sebagai akibat kontraksi perekonomian secara global

maupun nasional dan regional. Bila dilihat per kabupaten/ kota, IPM seluruh kabupaten/kota juga terus bergerak hampir menuju IPM tinggi, hanya dua kabupaten yang masih jauh untuk mencapai IPM kategori tinggi, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan kabupaten Tanjung Jabung Barat. Capaian yang masih timpang antar wilayah dalam Provinsi Jambi ini perlu disikapi untuk mewujudkan pemerataan IPM di Provinsi Jambi.

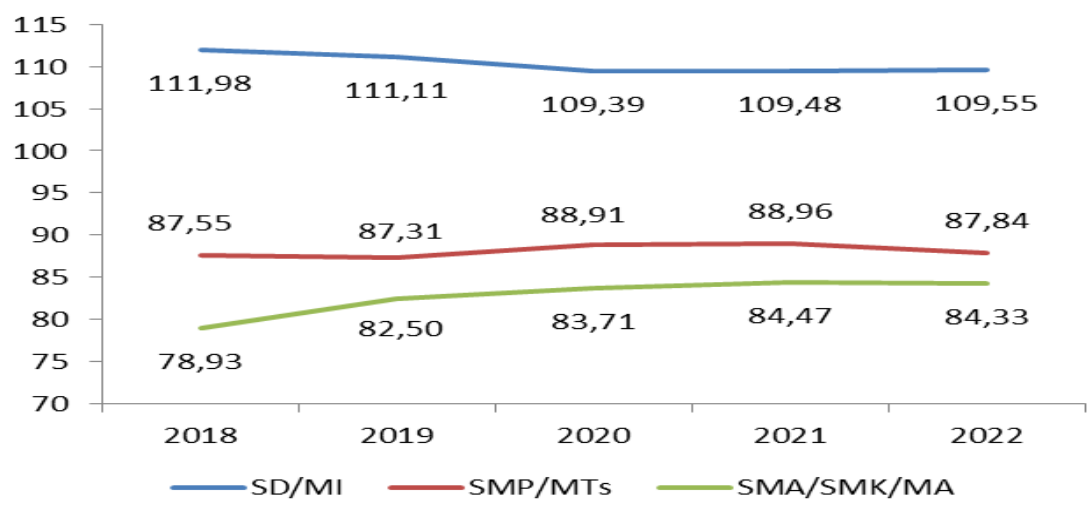
2.2.2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan program pembangunan pendidikan, khususnya menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan atau pemerataan dalam layanan pendidikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, adalah melalui APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM (Angka Partisipasi Murni) pada jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, dan PT/ sederajat di tingkat nasional, provinsi, serta kabupaten/kota.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Sesuai dengan konsep tersebut, APK untuk SD merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7–12 tahun. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mendapatkan pendidikan.

Pada tahun 2022, APK pada tingkat SD mencapai 109,55, atau mengalami peningkatan dari tahun 2021 yang mencapai 109,48. Hal ini berarti terdapat 109,55 persen anak yang bersekolah di SD berusia kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun. APK kelompok usia ini menempati urutan tertinggi dibandingkan dengan APK pada kelompok usia lain. Untuk APK SMP Provinsi Jambi sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2018, APK SMP sederajat sebesar 87,55 persen menjadi 87,34 persen pada tahun 2022. Sementara, APK SMA Provinsi

Jambi mengalami peningkatan pada periode tahun 2018-2022, dimana pada tahun 2018, APK SMA sebesar 78,93 persen, meningkat menjadi 84,33 persen pada tahun 2022.

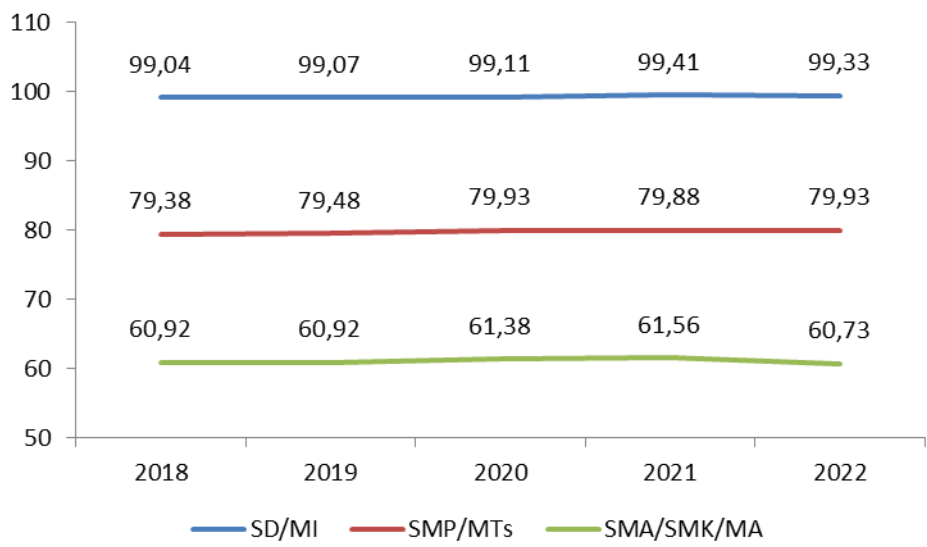


Sumber : BPS, Tahun 2023
 Gambar 2-26 Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Selanjutnya, Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran dalam hal ini adalah APM untuk tingkat SD yang merupakan proporsi jumlah murid SD yang berusia 7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 12 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) pada umumnya digunakan untuk melihat penduduk khususnya penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Dalam hal seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan mencapai 100 persen. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan lebih kecil dari 100 persen. Sejalan dengan itu, nilai APM akan selalu lebih kecil dari 100 atau sama dengan 100. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari nilai APK dan APS, karena APK dan APS menyangkut anak diluar usia sekolah dan beberapa jenjang pendidikan.

Untuk Angka Partisipasi Murni SD terjadi peningkatan dari 99,04 persen pada tahun 2018 menjadi 99,33 persen pada tahun 2022. Demikian juga APM SMP yang meningkat dari 79,38 persen di tahun 2018 menjadi 79,93 persen di tahun 2022. Untuk APM SMA, pada tahun 2018-2022 cenderung mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2018, APM SMA sebesar 60,92 persen, menurun menjadi 60,73 persen pada

tahun 2022. Persentase ini tentunya masih jauh dari yang diharapkan sehingga perlu usaha khusus untuk mendekati angka 100 persen.



Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-27 Angka Partisipasi Murni untuk jenjang SD, SMP dan SMA Provinsi Jambi Tahun 2018-2023

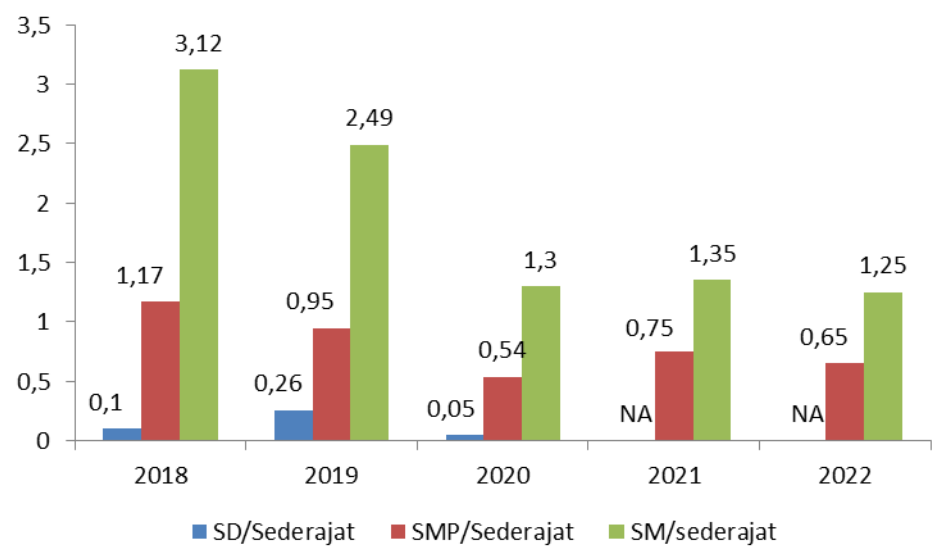
Meskipun angka partisipasi baik Angka Partisipasi Kasar maupun Angka Partisipasi Murni sudah cukup baik, namun hal ini belum cukup untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Jambi, karena masih terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan pendidikan ke depan, yakni :

1. Program wajib belajar 12 tahun untuk Provinsi Jambi sampai tahun 2022 belum sepenuhnya berhasil mengingat angka partisipasi sekolah penduduk usia SD dan SMP belum mencapai angka 100 persen.
2. Tingkat partisipasi pendidikan yang masih relatif rendah pada jenjang pendidikan SLTA menjadi tantangan kedepan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di Provinsi Jambi, terutama sejak terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan pengelolaan pendidikan menengah merupakan kewenangan provinsi
3. Masih terdapat disparitas tingkat pendidikan antar daerah perkotaan dan perdesaan; antar penduduk kaya dan miskin, dan disparitas gender.
4. Rendahnya kualitas lulusan dan rendahnya daya saing lulusan, dan pendidikan yang dilakukan selama ini belum berorientasi pada keunggulan komparatif daerah.

2.2.2.4 **Angka Putus Sekolah**

Angka Putus Sekolah merupakan perbandingan jumlah putus sekolah pada tingkat dan jenjang tertentu dengan jumlah siswa pada tingkat dan jenjang yang sesuai pada tahun ajaran sebelumnya dan dinyatakan dalam persentase. Perkembangan Angka Putus Sekolah Provinsi Jambi dari tahun 2018-2022 untuk masing-masing jenjang pendidikan menunjukkan angka yang fluktuatif, namun menunjukkan kecenderungan menurun. Namun demikian tingginya angka putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah masih menjadi kendala yang harus segera terselesaikan dengan baik. Gambar di bawah menunjukkan pola bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar angka putus sekolah. Pada tahun 2018, terdapat 31 orang dari 1000 siswa SM/ sederajat yang putus sekolah, namun di tahun 2022 sudah semakin baik dimana terdapat 12 orang dari 1000 siswa SM/ sederajat yang putus sekolah.

Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sudah cukup baik. Namun ke depan, juga diperlukan upaya-upaya inovatif terutama dalam menghadapi kondisi pasca pandemi covid-19, serta menghadapi era Revolusi 4.0.



Sumber : BPS, Tahun 2023
Gambar 2-28 Angka Putus Sekolah Tahun 2018-2022

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Provinsi Jambi memiliki beragam potensi unggulan yang menjadi pendorong perekonomian daerah saat ini dan berpotensi untuk terus dikembangkan dalam jangka panjang. Sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan mendominasi aktivitas perekonomian masyarakat Jambi, dan jika dilihat dari distribusi sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Provinsi Jambi selain sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah sektor pertambangan dan penggalian. Potensi masing-masing sektor unggulan tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2-14 Potensi Bahan Galian Provinsi Jambi

NO	KABUPATEN	LOKASI	KETERANGAN
1	Bungo	Mumpun Pandan, Kec. Rantau Pandan	Cadangan terukur 40 juta ton. Nilai kalori 6.160 kal/g
2	Bungo	Daerah Jujuhan, Kec. Jujuhan	Hipotetik 157 juta ton. Bekas wilayah PT. NTC yang sudah dikembalikan
3	Bungo	Daerah Sungai Serdang/ Sungai Beringin Kec. Pelepat	Cadangan terukur 9,75 juta ton. Nilai kalori antara 5.205 – 6.075 kal/g.
4	Tebo	Daerah Lubuk Mandarasah, Kec. Tengah Ilir	Cadangan S Buluh seluas 25 ha : 210.356 ton. Nilai kalori 4.915 – 4.957 kal/g
5	Tebo	Daerah Mangupeh, Kec. Tengah Ilir	Indikasi batubara berupa singkapan
6	Sarolangun	Daerah Mengkua, Kec. Limun	Cadangan tereka 58 juta ton. Nilai kalori 4.685 – 5.630 kal/g
7	Sarolangun	Daerah Mensao, Kec. Limun	Cadangan terukur 1,5 juta ton dan tereka 34 juta ton. Nilai kalori 4.980 – 6.885 kal/g
8	Sarolangun	Daerah Air Meruap, Kec. Sarolangun	Cadangan terukur 32,4 juta ton. Nilai kalori 5.250 – 5.640 kal/g
9	Sarolangun	Daerah Guruh Baru, Kec. Mandiingin	Nilai kalori 4.820 – 5.455 kal/g
10	sarolangun	Daerah Lubuk Resam, Kec Limun	Indikasi batubara berupa singkapan
11	Sarolangun	Daerah Sungai Telisa, Kec. Pauh	Indikasi batubara berupa singkapan
12	Sarolangun	Daerah Lubuk Kepayang, Kec. Pauh	Indikasi batubara berupa singkapan
13	Sarolangun	Daerah Suka Damai, Kec. Mestong	Indikasi batubara berupa singkapan

NO	KABUPATEN	LOKASI	KETERANGAN
14	Sarolangun	Daerah Lubuk Napal, Kec. Pauh	Indikasi batubara berupa singkapan
15	Sarolangun	Daerah Sungai Dingin, Kec. Limun	Ketebalan 1 – 7. Nilai Kalori 3.318 – 6.359 kal/g
16	Sarolangun	Daerah Sekeladi, Kec. Batang Asai	Indikasi batubara berupa singkapan
17	Merangin	Daerah Sungai Gedang, Kec. Pamenang	Cadangan terukur 2,25 juta ton. Niai kalori 4.171 – 5.750 kal/g
18	Merangin	Daerah Lubuk Gaung, Kec. Bangko	Indikasi batubara berupa singkapan
19	Merangin	Daerah Bedeng Rejo, Kec. Bangko	Indikasi batubara berupa singkapan
20	Merangin	Daerah Tanjung Putus, Kec. Tabir Ulu	Indikasi batubara berupa singkapan
21	Merangin	Daerah Tanjung Putus, Kec. Tabir Barat	Indikasi batubara berupa singkapan
22	Merangin	Desa Muara Jernh, Kec. Tabir Barat	Indikasi batubara berupa singkapan
23	Merangin	Desa Bedeng Rejo, Kec. Tiang Pumpung	Indikasi batubara berupa singkapan
24	Merangin	Desa Tanjung Benuang, Kec. Renah Pamenang	Indikasi batubara berupa singkapan
25	Batanghari	Daerah Jangga, Kec. Bathin XXIV	Indikasi batubara berupa singkapan

Sumber: Fakta dan Analisa RTRW Provinsi Jambi

Potensi batubara di Provinsi Jambi masih sangat tinggi. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, potensi sumber daya batubara di Provinsi Jambi mencapai 1,52 miliar Metrik Ton (M/T). Potensi batubara sendiri ada di tujuh kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Ada empat kabupaten/kota yang tak punya potensi batubara. Yakni, Kerinci, Sungaipenuh, Tanjung Jabung Timur, dan Kota Jambi. Selebihnya yakni di Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo, Merangin dan Sarolangun memiliki potensi batubara yang cukup banyak. Dari tujuh kabupaten yang punya potensi ini, hanya Kabupaten Merangin yang belum berproduksi.

Dari tujuh kabupaten/kota yang memiliki potensi batubara itu, Sarolangun memiliki cadangan terbanyak. Kemudian dilanjutkan dengan Kabupaten Baranghari, Tebo, kemudian Muara Bungo. Secara kronologis, batubara terbentuk di daerah cekungan. Kalau di daerah pegunungan lebih cenderung banyak potensi mineral, seperti arah ke Merangin. Kalau logam terbentuk dari aktivitas gunung api. Dari total sumber daya batubara yang ada, yang sudah diproduksi baru 90 juta metrik ton.

Artinya, sumber daya ataupun cadangan batubara di Jambi masih banyak dan masih potensial. Cadangan ini, seharusnya bisa dimanfaatkan lebih maksimal. Tentu dengan izin-izin penambangan yang lengkap.

Tabel 2-15 Sumberdaya dan cadangan energi fosil Provinsi Jambi

No	Jenis Energi	Satuan	Sumberdaya	Cadangan	Produksi/tahun	Umur (tahun)
1	Minyak Bumi	Juta barrel		228	6,31	36
2	Gas Bumi	BCF		5.517,80	89,00	62
3	Batubara	Juta ton	2.224,90	94,30	6,78	20

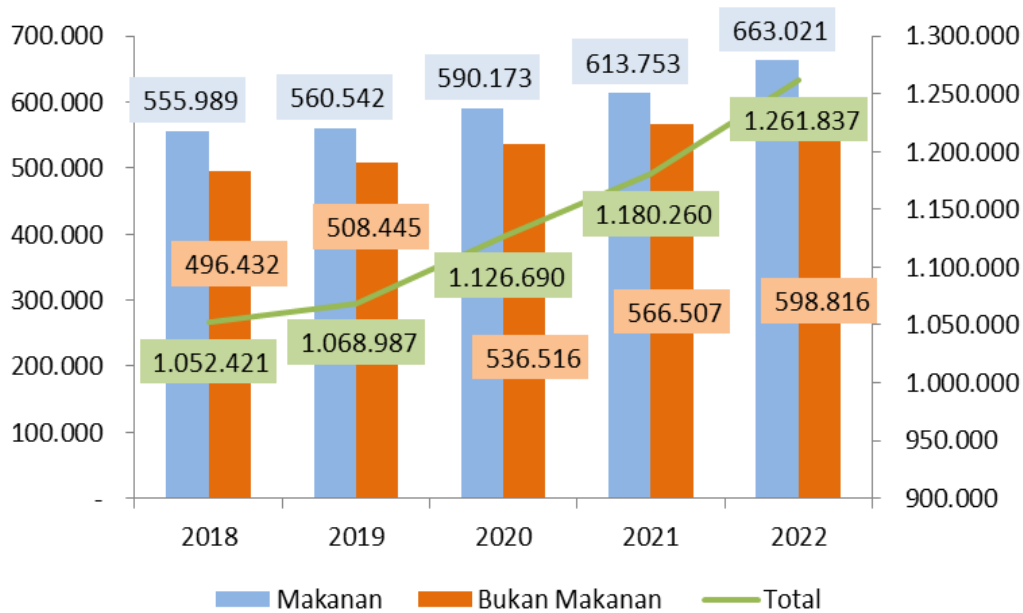
Sumber: Fakta dan Analisa RTRWP

Tabel di atas memperlihatkan bahwa masih terdapat cadangan minyak dan gas bumi yang terkandung di Provinsi Jambi. Namun penyelenggaraan minyak dan gas bumi, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tidak ada kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan minyak dan gas bumi.

2.3.1.1 **Pengeluaran Per Kapita**

Perkembangan kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat pendapatan. Secara umum, selama periode 2018-2022 tingkat kesejahteraan penduduk Provinsi Jambi mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan dengan semakin tingginya tingkat pengeluaran rumah tangga sebagai *proxy* pendapatan, baik secara nominal maupun riil, sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Rata-rata Pengeluaran nominal per kapita sebulan untuk makanan Provinsi Jambi meningkat dari Rp.555.989/bulan pada tahun 2018 menjadi Rp.663.021/bulan pada tahun 2022. Sementara untuk pengeluaran bukan makanan yang antara lain terdiri dari pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga, pakaian, pajak, aneka barang dan jasa, lebih rendah dibanding pengeluaran untuk makanan, yaitu dari Rp496.432 menjadi 598.816/bulan.



Sumber : BPS, 2023

Gambar 2-29 Rata-rata Pengeluaran Perkapita sebulan Provinsi Jambi Menurut Kelompok Komoditas Tahun 2018-2022

Bila dilihat per kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi, terlihat bahwa pengeluaran terbesar masih pada kelompok makanan, kecuali Kota Jambi yang telah bergeser komposisi konsumsi masyarakatnya dari dominan kelompok makanan menjadi dominan kelompok bukan makanan, terutama yang didominasi untuk pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga dan aneka barang dan jasa.

Tabel 2-16 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Provinsi Jambi per Kelompok Pengeluaran Menurut Kabupaten/Kota

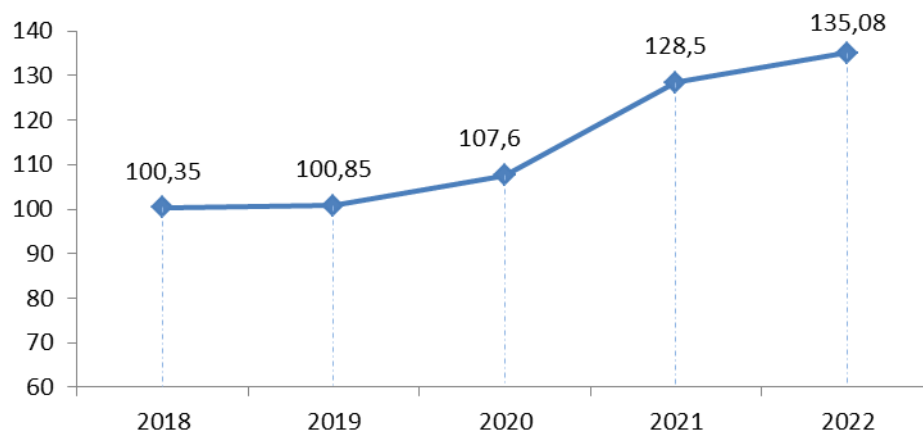
Wilayah	Persentase Pengeluaran per Kapita Makanan dan Bukan Makanan di Daerah Perkotaan dan Perdesaan (%)			
	Makanan		Bukan Makanan	
	2021	2022	2021	2022
PROVINSI JAMBI	52,00	52,54	48,00	47,46
KERINCI	54,35	56,28	45,65	43,72
MERANGIN	56,08	52,23	43,92	47,77
SAROLANGUN	52,03	50,30	47,97	49,70
BATANGHARI	52,29	56,45	47,71	43,55
MUARO JAMBI	54,20	59,32	45,80	40,68
TANJUNG JABUNG TIMUR	59,42	59,15	40,58	40,85
TANJUNG JABUNG BARAT	56,94	56,80	43,06	43,20
TEBO	54,35	54,15	45,65	45,85
BUNGO	52,71	51,73	47,29	48,27
KOTA JAMBI	43,99	44,64	56,01	55,36
KOTA SUNGAI PENUH	52,55	51,03	47,45	48,97

Sumber : BPS, 2023

2.3.1.2 Nilai Tukar Petani.

Untuk melihat keberhasilan pembangunan pertanian, selain melihat kontribusi dan pertumbuhan sektor tersebut juga diperlukan tingkat kesejahteraan petani. Salah satu indikator pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan/rasio antara Indeks Harga Yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib). Hubungan Nilai Tukar Petani (NTP) dengan tingkat kesejahteraan petani sebagai produsen secara nyata terlihat dari posisi It yang berada pada pembilang (enumerator) dari angka NTP. Apabila harga barang/produk pertanian naik, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka penerimaan/pendapatan petani dari hasil panennya juga akan bertambah. Perkembangan harga yang ditunjukkan It, merupakan sebuah indikator tingkat kesejahteraan petani produsen dari sisi pendapatan.

Selanjutnya, dari sisi perkembangan jumlah pengeluaran atau pembelanjaan petani baik untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk produksi, dalam hal ini petani sebagai produsen dan juga konsumen dihadapkan kepada pilihan dalam mengalokasikan pendapatannya yaitu: Pertama, untuk memenuhi kebutuhan pokok (konsumsi) demi kelangsungan hidup petani beserta keluarganya. Kedua, pengeluaran untuk produksi/budidaya pertanian yang merupakan ladang penghidupannya yang mencakup biaya operasional produksi dan investasi atau pembentukan barang modal. Unsur kedua ini hanya mungkin dilakukan apabila kebutuhan pokok petani telah terpenuhi; dengan demikian investasi dan pembentukan barang modal merupakan faktor penentu bagi tingkat kesejahteraan petani. Dengan membandingkan kedua perkembangan harga tersebut dalam NTP, maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan petani dapat dikompensasi dengan pertambahan pendapatan petani dari hasil produksinya. Atau sebaliknya apakah kenaikan harga panen dapat menambah pendapatan petani yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan petani. Disamping itu, NTP juga merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pertanian.



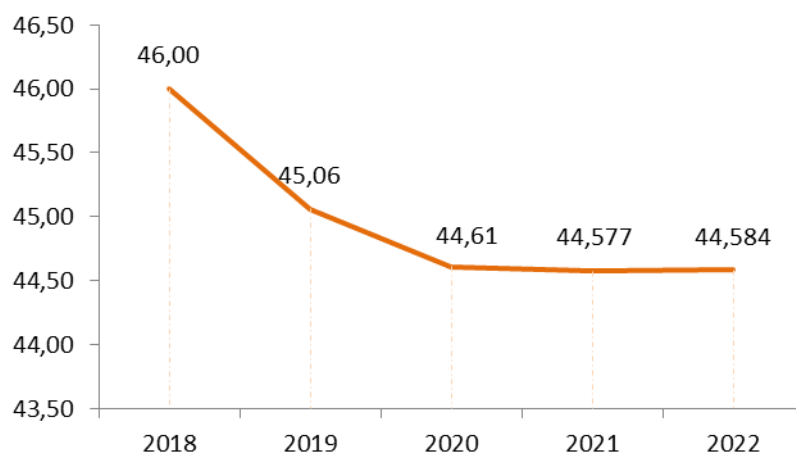
Sumber BPS, 2023
Gambar 2-30 Nilai Tukar Petani Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Nilai tukar petani (NTP) Provinsi Jambi pada tahun 2018-2022 memperlihatkan kecenderungan meningkat. NTP Provinsi Jambi terdiri dari NTP untuk subsektor tanaman pangan, subsektor perkebunan, dan subsektor peternakan. Peningkatan tersebut terjadi pada hampir seluruh subsektor, terutama pada subsektor tanaman perkebunan dan perikanan, yang disebabkan karena adanya perbaikan harga komoditas TBS dan harga bokar, serta adanya inflasi pada beberapa komoditas ikan. Perbaikan NTP ini mengindikasikan bahwa kebijakan pertanian yang selama ini dilaksanakan cukup mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Oleh karena itu ke depan kebijakan pembangunan pertanian tersebut hendaknya terus diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kestabilan harga dan diiringi dengan pemberdayaan petani.

2.3.2 Daya Saing SDM

2.3.2.1 Rasio Ketergantungan

Untuk melihat seberapa besar penduduk usia produktif menanggung hidup (konsumsi) penduduk usia produktif di Provinsi Jambi dapat dilihat dari Angka Ketergantungan (Dependency Ratio) sebagaimana tersaji pada Gambar di bawah ini.



Sumber: BPS, 2023 dan Data diolah

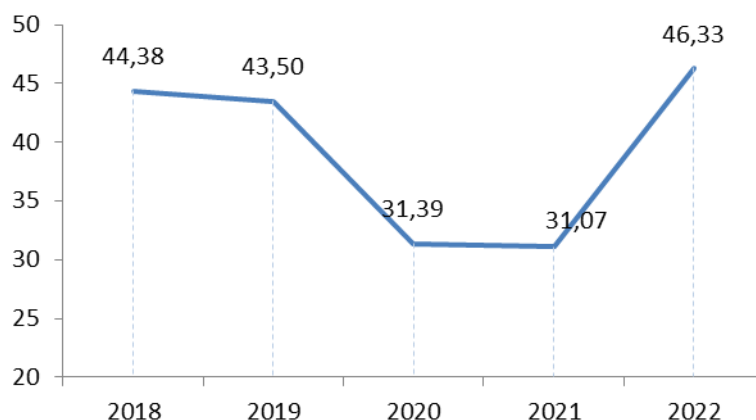
Gambar 2-31 Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Rasio Ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (0 – 14 tahun dan 65+ tahun) dibandingkan dengan penduduk usia produktif (15 – 64 tahun). Rasio Ketergantungan Provinsi Jambi pada kurun waktu tahun 2016-2020 berfluktuatif dengan kecenderungan menurun. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh kelompok usia produktif semakin berkurang.

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

2.3.3.1 Proporsi Jalan Kondisi baik

Proporsi jalan dalam kondisi baik di Provinsi Jambi tahun 2018 – 2021 berfluktuatif, namun menunjukkan kecenderungan menurun, sebagaimana terlihat pada gambar di bawah. Penurunan tersebut terjadi karena jalan dalam kondisi baik tersebut menurun kondisinya dan masuk dalam kategori jalan sedang. Namun pada tahun 2022, terjadi peningkatan persentase jalan dalam kondisi baik menjadi 46,33 persen.



Sumber: Dinas PU Provinsi Jambi, 2023

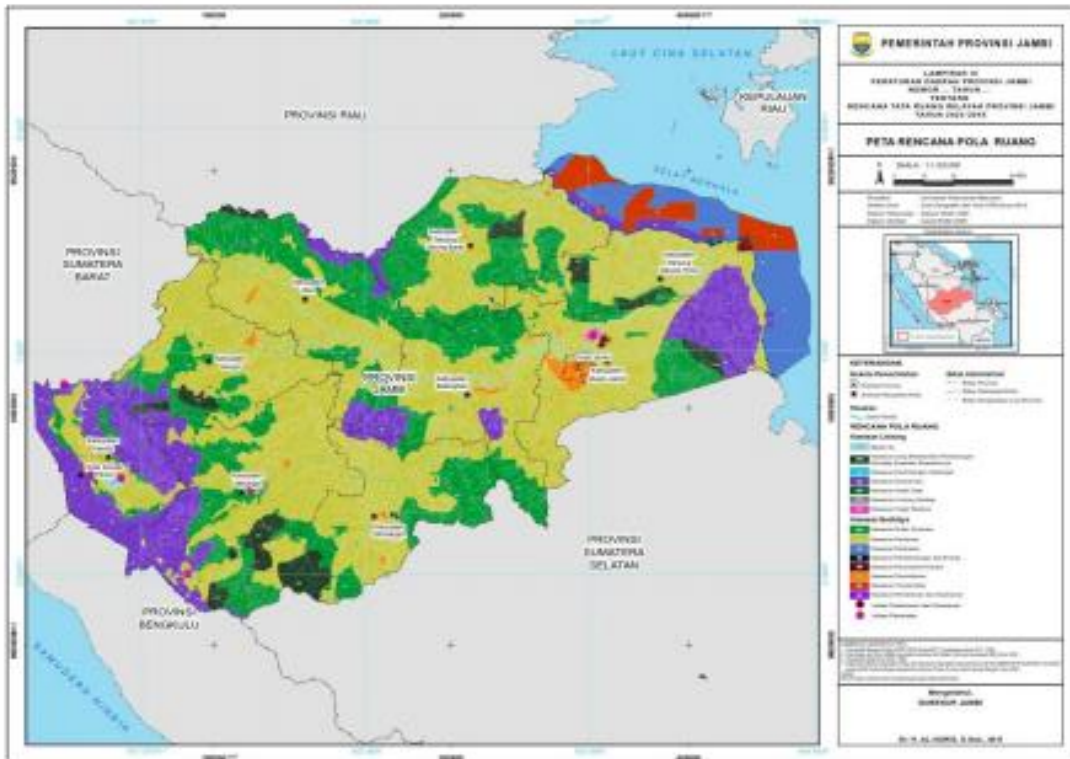
Gambar 2-32 Persentase jalan Provinsi Jambi dalam kondisi baik Tahun 2018 – 2022

2.3.3.2 Penataan Ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023 – 2043 telah mengatur pola ruang Provinsi Jambi baik peruntukan kawasan lindung maupun kawasan budidaya. Kawasan budi daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya merupakan kawasan diluar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumberdaya alamnya dapat dan perlu dimanfaatkan baik kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan permukiman.

Berdasarkan fungsinya kawasan budidaya terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian. Kawasan budidayapertanian terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, tanaman pangan, tanaman perkebunan, perikanan dan peternakan sedangkan kawasan budidaya non-pertanian terdiri dari kawasan permukiman, kawasan pertambangan, kawasan wisata dan kawasan industri.

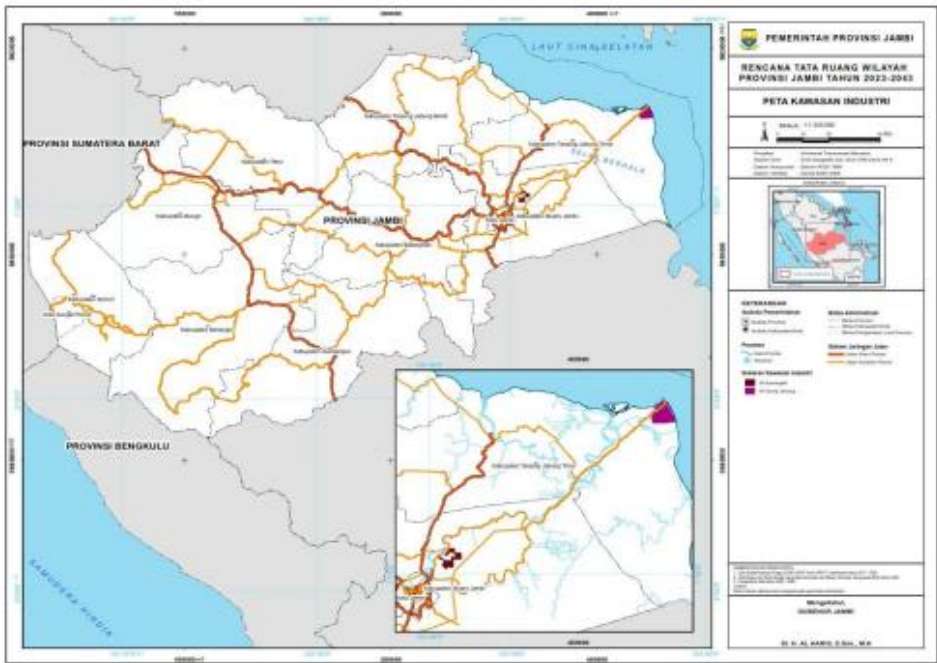
Dalam kawasan budidaya terdapat pula kawasan andalan yang merupakan keterpaduan dan keterkaitan berbagai kegiatan produksi dan kawasan fungsional yang mempunyai dampak terhadap perkembangan perekonomian daerah. Arah pola ruang untuk kegiatan budi daya mencakup arahan pemanfaatan kawasan pertanian, serta kawasan non-pertanian.



Gambar 2-33 Rencana Pola Ruang Provinsi Jambi (RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043)

Penetapan Kawasan industri di Provinsi Jambi dilakukan sebagai upaya mempercepat pertumbuhan industri, memberikan kemudahan bagi industri, mendorong kegiatan industri agar berlokasi di kawasan industri, serta menyediakan fasilitas lahan industri yang berwawasan lingkungan. Luas rencana pengembangan kawasan industri di Provinsi Jambi berdasarkan RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 adalah sebagai berikut:

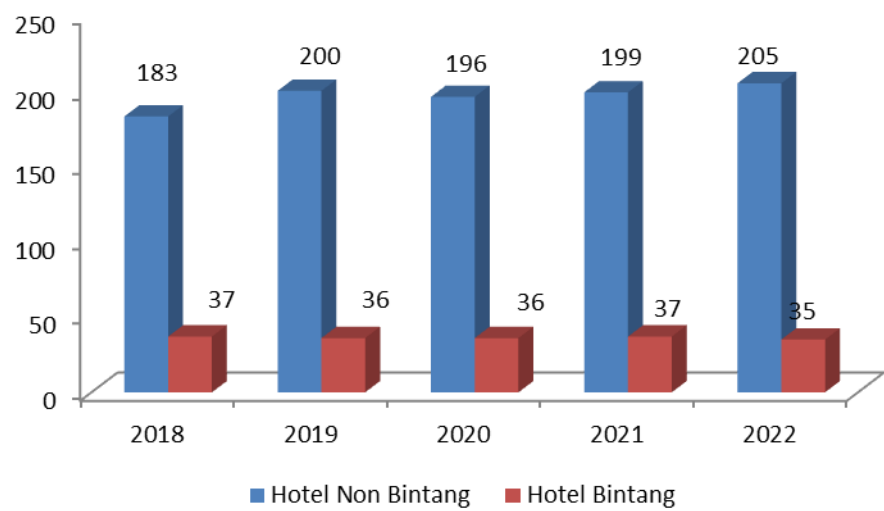
- a. Kawasan industri seluas kurang lebih 7.139 hektar yang terdapat di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- b. Kawasan peruntukan industri tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota dan diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota.



Gambar 2-34 Peta Kawasan Industri Provinsi Jambi (RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023-2043)

2.3.3.3 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel

Perkembangan hotel di Provinsi Jambi, dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Jumlah hotel kelas bintang cenderung menurun yaitu dari 37 hotel di tahun 2018 menjadi 35 hotel di tahun 2022, namun untuk kelas non bintang mengalami kecenderungan meningkat sampai dengan tahun 2019, namun jumlah tersebut kembali menurun pada tahun 2020, seiring dengan pandemi covid-19 yang merupakan salah satu variabel yang signifikan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat hunian hotel. Meskipun demikian di tahun 2021 dan 2022 jumlahnya kembali meningkat.



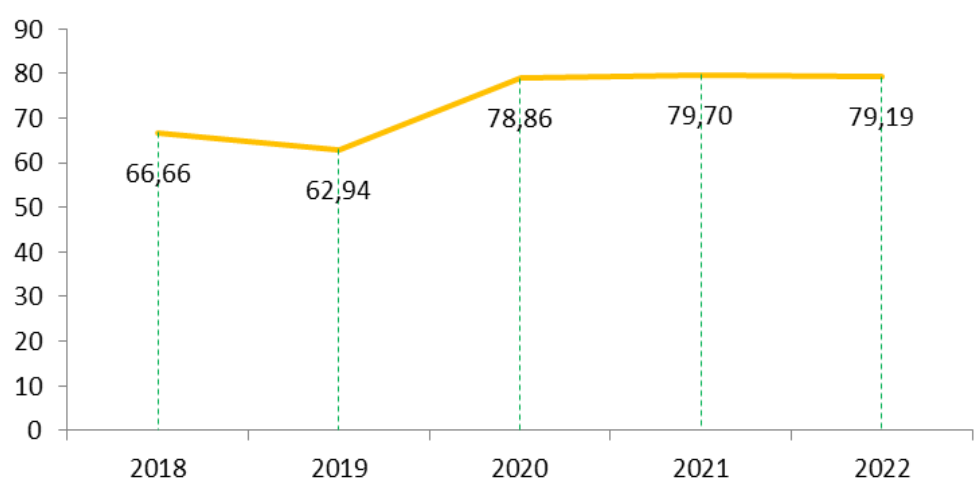
Sumber: BPS, 2022

Gambar 2-35 Perkembangan Hotel di Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

2.3.3.4 **Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih**

Air minum merupakan kebutuhan mendasar bagi kehidupan makhluk hidup. Air minum berperan agar makhluk hidup khususnya manusia dapat bertahan hidup. Kualitas air minum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kesehatan. Pasokan air yang memadai sangat penting untuk mengurangi risiko penyakit dan untuk menjamin hak atas pangan, kesehatan dan perumahan. Keamanan dan aksesibilitas terhadap air bersih menjadi perhatian besar di seluruh dunia. Mudahnya akses terhadap air bersih dan sanitasi dapat meningkatkan kesehatan individu, sehingga dapat meningkatkan kehadiran di sekolah dan meningkatkan produktifitas. Oleh karena itu sumber daya air perlu dikelola dengan baik untuk pemenuhan hak asasi manusia mendapatkan air minum dan sanitasi yang aman dan bersih.

Berdasarkan data BPS, proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan di Provinsi Jambi sampai dengan tahun 2022 adalah 79,19 persen. Perkembangan proporsi air minum layak Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Beberapa hambatan yang dihadapi terkait cakupan pembangunan yang besar sementara sumber pendanaan terbatas, kemampuan pelayanan operator air minum serta permasalahan kemiskinan yang membatasi kemampuan masyarakat dalam mengakses air minum layak.



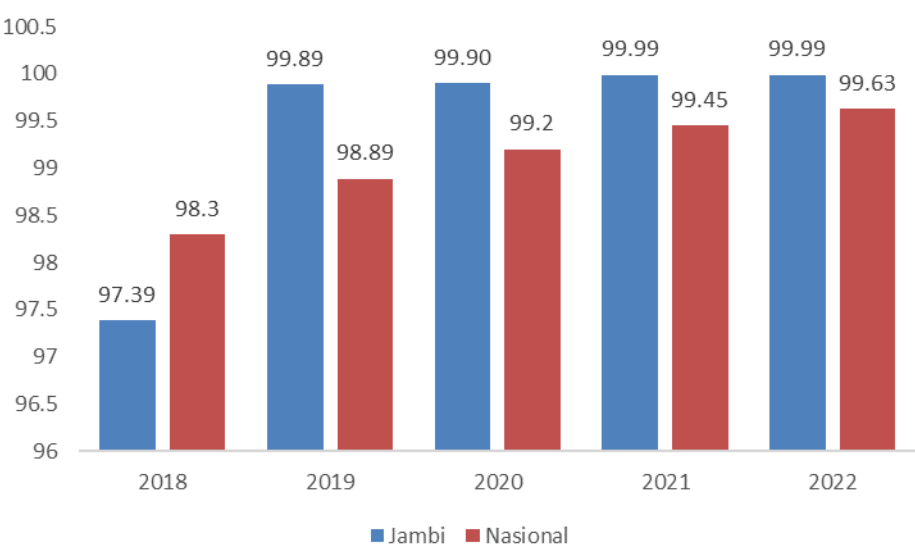
Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-36 Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan Provinsi Jambi Tahun 2018 – 2022

Pada dasarnya Pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan banyak hal dalam rangka pemenuhan target indikator ini, seperti perluasan/pemasangan jaringan pipa distribusi pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun bila dibandingkan dengan nasional, terlihat bahwa capaian Provinsi Jambi atas indikator ini selalu berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa percepatan yang dilakukan oleh Provinsi Jambi belum mampu mengimbangi laju pemenuhan kebutuhan air bersih secara nasional.

2.3.3.5 Rasio ketersediaan daya listrik,

Listrik digunakan untuk kegiatan-kegiatan dasar manusia seperti penerangan, menjalankan peralatan rumah tangga dan mengoperasikan peralatan-peralatan industri. Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah keseluruhan rumah tangga. Rasio elektrifikasi adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang berlistrik dengan jumlah keseluruhan rumah tangga. Rasio elektrifikasi di Provinsi Jambi terus meningkat setiap tahun, dan pada tahun 2021 dan 2022 telah mencapai 99,99 persen. Adapun perkembangan capaian indikator rasio elektrifikasi dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



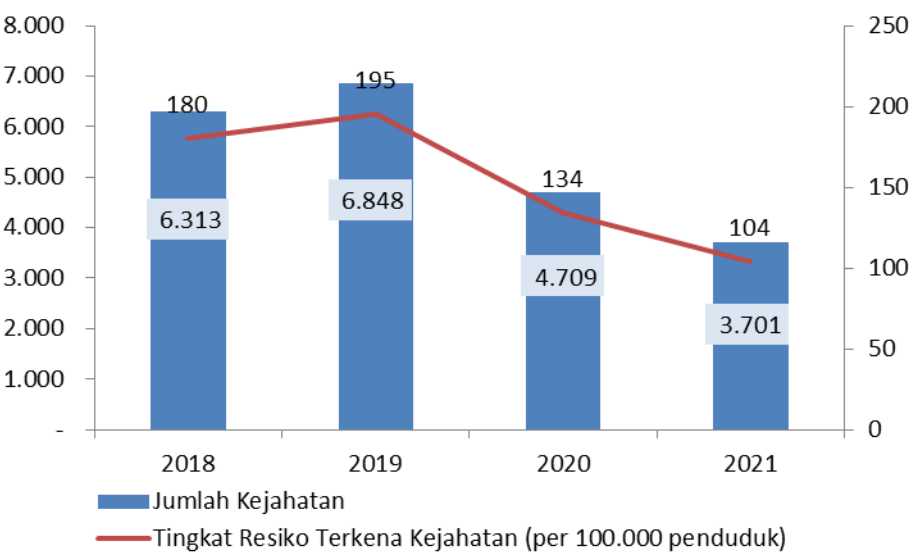
Sumber: BPS, 2023

Gambar 2-37 Rasio Elektrifikasi Provinsi Jambi dibandingkan dengan nasional

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1 Kriminalitas

Selama selang waktu tahun 2018-2021 (data termutakhir), jumlah kejahatan di Provinsi Jambi terlihat berfluktuatif, namun memperlihatkan tren penurunan. Hal yang sama terlihat pada jumlah orang yang beresiko terkena tindak kejahatan, walaupun penurunannya tidak signifikan. Salah satu pemicu tindak kejahatan adalah faktor ekonomi, untuk itu program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat harus terus ditingkatkan untuk mengurangi angka kejahatan di Provinsi Jambi, seiring dengan upaya perwujudan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.



Sumber: BPS, 2023
Gambar 2-38 Jumlah kejahatan dan tingkat resiko terkena kejahatan di Provinsi Jambi Tahun 2018-2021

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Indeks Pelayanan Publik

Perubahan lingkungan global yang penuh ketidakpastian menuntut seluruh sektor termasuk birokrasi dapat bekerja secara *agile*, adaptif dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Hal ini juga sesuai dengan tuntutan masyarakat akan kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak terlepas dari hasil pengukuran indeks pelayanan publik sebagai alat evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan, dimana ada 6 aspek yang digunakan dalam pengukuran indeks yaitu pemenuhan

Kebijakan Pelayanan (standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat), peningkatan Profesionalisme SDM, peningkatan kualitas Sarana dan Prasarana, pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), pengelolaan konsultasi dan pengaduan (termasuk penerapan LAPOR!), serta penyelenggaraan inovasi dalam pelayanan publik.

Tabel 2-17 Indeks Pelayanan Publik

Tahun	2019	2020	2021	2022
Indeks Pelayanan Publik	3,65 (B)	3,78 (B)	4,02 (A-)	4,04 (A-)

Sumber: Kementerian PANRB (data awal tahun 2019 dan termutakhir 2022)

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, dimana data awal pada tahun 2019 dan termutakhir tahun 2022, Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jambi terus mengalami perbaikan. Perbaikan pada setiap aspek pelayanan publik harus tetap didorong dengan menerapkan berbagai inovasi yang adaptif dengan perkembangan IPTEK.

2.4.2 Indeks Inovasi Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan pada era desentralisasi telah memberikan harapan besar terhadap upaya peningkatan kemandirian daerah yang berimplikasi pada pelaksanaan pelayanan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Tuntutan agar Pemerintah Daerah dapat mandiri dan menyejahterakan masyarakatnya, serta profesional dalam pengelolaan seluruh sumber daya yang dimilikinya, memerlukan kebijakan-kebijakan yang kreatif dan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik, kemampuan serta kearifan lokal di daerahnya masing-masing. Inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sejalan itu, semakin baiknya inovasi di daerah juga akan semakin meningkatkan daya saing daerah.

Indeks Inovasi Daerah ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya, dan ketersediaan data adalah antara tahun 2019-2023. Terdapat perubahan dalam skor indeks sejak tahun 2021 sehingga tidak dapat diperbandingkan, namun dapat dilihat dari predikat bahwa capaian indeks inovasi daerah Provinsi Jambi

memperlihatkan penurunan setiap tahunnya dari predikat sangat inovatif menjadi inovatif. Guna mendorong daya saing daerah, kedepan perlu didorong kebijakan yang inovatif agar indeks ini meningkat sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2-18 Indeks Inovasi Daerah Provinsi Jambi

Tahun	Skor Indeks	Predikat
2018	NA	-
2019	9.580	sangat inovatif
2020	5.244	sangat inovatif
2021	61,03	sangat inovatif
2022	50,44	sangat inovatif
2023	37,91	inovatif

Sumber: *Keptendagri tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota*

2.4.3 Indeks SPBE

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Jambi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jambi. Berbagai aplikasi telah dibangun untuk pelayanan SPBE yang diarahkan pada aplikasi yang terintegrasi. Layanan SPBE terdiri dari layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan pelayanan publik berbasis elektronik.

Komitmen Pemerintah Provinsi Jambi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Perbaikan demi perbaikan terus dilakukan, sehingga Indeks SPBE Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan. Saat ini terdapat aplikasi berbasis web atau android yang ada pada seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Era digitalisasi menuntut indeks ini harus terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang.

Tabel 2-19 Indeks SPBE Provinsi Jambi

Tahun	Indeks SPBE	Kategori
2020	-	-
2021	2,21	Cukup
2022	2,19	Cukup
2023	3,31	Baik

Sumber: *Kementerian PANRB (data awal tahun 2021 dan termutakhir 2023)*

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Hasil evaluasi RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2005 – 2025 menunjukkan perbaikan terhadap capaian indikator pembangunan, kecuali indikator indeks williamson yang mengalami sedikit peningkatan. Untuk itu pada RPJPD Tahun 2025 – 2045 perlu beberapa kebijakan khusus dalam hal pengurangan ketimpangan, sehingga indeks ini dapat diturunkan. Pemerataan akses pelayanan dasar pada seluruh wilayah menjadi salah satu kebijakan yang harus dilakukan, selain melakukan beberapa transformasi sebagai langkah percepatan mendukung terwujudnya Indonesia emas.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Proyeksi Penduduk

Data kependudukan memiliki peran yang sangat penting untuk pembangunan. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi penduduk oleh BPS, jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2045 adalah sebanyak 4,42 juta jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin yang selama ini didominasi laki-laki, pada tahun 2045 mengalami perubahan dimana jumlah penduduk perempuan menjadi lebih banyak dibandingkan laki-laki. Berdasarkan usia, dominasi usia produktif masih lebih banyak daripada usia tidak produktif hingga tahun 2041. Hal ini terlihat pula dari angka ketergantungan yang mulai di atas 50 persen pada tahun tersebut.

Tabel 2-20 Proyeksi sebaran penduduk Provinsi Jambi

No	Kabupaten	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	KAB. TEBO	359.638	379.614	396.677	411.148	423.022
2	KAB. KERINCI	258.208	264.596	269.325	272.672	274.561
3	KAB. MERANGIN	378.357	401.646	422.433	440.484	455.592
4	KAB. SAROLANGUN	310.679	329.777	346.253	360.483	372.491
5	KAB. BATANGHARI	320.281	337.520	352.350	364.822	374.879
6	KAB. MUARO JAMBI	430.246	456.596	479.624	499.509	516.156
7	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	339.625	361.350	380.786	397.538	411.509
8	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	241.154	250.909	259.001	265.568	270.381
9	KAB. BUNGO	386.114	408.831	429.083	446.673	461.335
10	KOTA JAMBI	642.264	675.117	702.677	724.844	741.758
11	KOTA SUNGAI PENUH	101.916	106.912	111.316	115.149	118.311

Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan sebaran penduduk, jumlah penduduk terbesar berada di Kota Jambi dan diikuti oleh Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Merangin pada urutan dua dan tiga. Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk terkecil berada pada Kota Sungai Penuh.

Tabel 2-21 Proyeksi Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2024 (Orang)	Jumlah Penduduk (Orang) Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-4	322.220	324.320	317.900	311.710	307.620	305.900
5-9	311.940	311.430	323.040	316.710	310.610	306.570
10-14	309.300	310.470	310.540	322.110	315.850	309.790
15-19	301.580	302.330	309.140	309.230	320.790	314.570
20-24	300.430	299.680	300.270	307.090	307.210	318.700
25-29	301.880	301.860	297.690	298.310	305.140	305.310
30-34	297.410	297.540	299.980	295.880	296.560	303.380
35-39	291.940	293.690	294.800	297.290	293.290	294.010
40-44	275.370	277.680	290.190	291.370	293.930	290.020
45-49	256.270	260.530	273.360	285.800	287.090	289.700
50-54	221.450	227.940	254.530	267.300	279.700	281.090
55-59	180.470	186.810	219.710	245.680	258.390	270.600
60-64	140.620	146.780	175.990	207.500	232.570	244.950
65-69	99.930	104.920	133.440	160.680	190.250	213.700
70-74	63.470	68.570	89.590	114.810	139.250	165.570
>75	50.030	53.920	82.740	118.060	160.630	206.140

Tabel 2-22 Parameter dan proyeksi penduduk Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2050

Parameter	2025	2030	2035	2040	2045	2050
1	3	4	5	6	7	8
PENDUDUK						
Laki-Laki (000)	1 914,25	2 008,50	2 087,26	2 151,48	2 201,41	2 237,45
Perempuan (000)	1 854,23	1 964,37	2 062,26	2 147,41	2 218,59	2 274,69
Total (000)	3 768,48	3 972,87	4 149,53	4 298,89	4 420,00	4 512,14
Komposisi Umur (%)						
0-14	25,11	23,95	22,91	21,73	20,87	20,29
15-64	68,86	68,35	67,61	66,87	65,89	64,96
65+	6,03	7,7	9,48	11,4	13,24	14,75
Dependency Ratio (%)	45,23	46,3	47,91	49,54	51,77	53,94
FERTILITAS						
Total Fertility Rate (TFR)	2,23	2,17	2,13	2,08	2,05	2,01
Crude Birth Rate (CBR)	17,34	16,06	15,11	14,42	14,01	13,63
Jumlah Kelahiran (000)	65,35	63,79	62,71	61,97	61,9	61,49
MORTALITAS						
E0 Laki-Laki	71,63	71,82	72,47	72,87	73,06	73,15
E0 Perempuan	76,34	77	77,94	78,53	78,84	79
E0 Laki-Laki + Perempuan	73,94	74,36	75,15	75,64	75,89	76,02
IMR Laki-Laki	16,92	14,95	12,07	10,81	10,17	9,84
IMR Perempuan	12,09	10,74	8,82	8,02	7,61	7,4
IMR Laki-Laki + Perempuan	14,57	12,9	10,48	9,45	8,92	8,65

Parameter	2025	2030	2035	2040	2045	2050
1	3	4	5	6	7	8
Crude Death Rate (CDR)	5,26	6,05	6,76	7,67	8,7	9,74
Jumlah Kematian (000)	19,82	24,04	28,05	32,97	38,46	43,93
MIGRASI						
Net Migration Rate	-0,52	-0,51	-0,5	-0,49	-0,49	-0,48

Sumber: Proyeksi penduduk Indonesia 2020 - 2050

2.6.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan sarana dan prasarana tentu juga akan semakin meningkat. Adapun proyeksi kebutuhan sarana – prasarana tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2-23 Proyeksi kebutuhan tempat tinggal

No	Kabupaten	Tahun Proyeksi									
		2025		2030		2035		2040		2045	
		Penduduk (Orang)	Kebutuhan Tempat Tinggal (unit)	Penduduk (Orang)	Kebutuhan Tempat Tinggal (unit)	Penduduk (Orang)	Kebutuhan Tempat Tinggal (unit)	Penduduk (Orang)	Kebutuhan Tempat Tinggal (unit)	Penduduk (Orang)	Kebutuhan Tempat Tinggal (unit)
1	KAB. TEBO	359.638	89.909,50	379.614	94.903,50	396.677	99.169,25	411.148	102.787,00	423.022	105.755,50
2	KAB. KERINCI	258.208	64.552,00	264.596	66.149,00	269.325	67.331,25	272.672	68.168,00	274.561	68.640,25
3	KAB. MERANGIN	378.357	94.589,25	401.646	100.411,50	422.433	105.608,25	440.484	110.121,00	455.592	113.898,00
4	KAB. SAROLANGUN	310.679	77.669,75	329.777	82.444,25	346.253	86.563,25	360.483	90.120,75	372.491	93.122,75
5	KAB. BATANGHARI	320.281	80.070,25	337.520	84.380,00	352.350	88.087,50	364.822	91.205,50	374.879	93.719,75
6	KAB. MUARO JAMBI	430.246	107.561,50	456.596	114.149,00	479.624	119.906,00	499.509	124.877,25	516.156	129.039,00
7	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	339.625	84.906,25	361.350	90.337,50	380.786	95.196,50	397.538	99.384,50	411.509	102.877,25
8	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	241.154	60.288,50	250.909	62.727,25	259.001	64.750,25	265.568	66.392,00	270.381	67.595,25
9	KAB. BUNGO	386.114	96.528,50	408.831	102.207,75	429.083	107.270,75	446.673	111.668,25	461.335	115.333,75
10	KOTA JAMBI	642.264	160.566,00	675.117	168.779,25	702.677	175.669,25	724.844	181.211,00	741.758	185.439,50
11	KOTA SUNGAI PENUH	101.916	25.479,00	106.912	26.728,00	111.316	27.829,00	115.149	28.787,25	118.311	29.577,75

Tabel 2-24 Proyeksi kebutuhan air minum

No	Kabupaten	Tahun Proyeksi									
		2025		2030		2035		2040		2045	
		Penduduk (Orang)	Kebutuhan Air Minum (Satuan)	Penduduk (Orang)	Kebutuhan Air Minum (Satuan)	Penduduk (Orang)	Kebutuhan Air Minum (Satuan)	Penduduk (Orang)	Kebutuhan Air Minum (Satuan)	Penduduk (Orang)	Kebutuhan Air Minum (Satuan)
1	KAB. TEBO	359.638	39.560	379.614	41.758	396.677	43.634	411.148	45.226	423.022	46.532
2	KAB. KERINCI	258.208	28.403	264.596	29.106	269.325	29.626	272.672	29.994	274.561	30.202
3	KAB. MERANGIN	378.357	41.619	401.646	44.181	422.433	46.468	440.484	48.453	455.592	50.115
4	KAB. SAROLANGUN	310.679	34.175	329.777	36.275	346.253	38.088	360.483	39.653	372.491	40.974
5	KAB. BATANGHARI	320.281	35.231	337.520	37.127	352.350	38.759	364.822	40.130	374.879	41.237
6	KAB. MUARO JAMBI	430.246	47.327	456.596	50.226	479.624	52.759	499.509	54.946	516.156	64.520
7	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	339.625	37.359	361.350	39.749	380.786	41.886	397.538	43.729	411.509	45.266
8	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	241.154	26.527	250.909	27.600	259.001	28.490	265.568	29.212	270.381	29.742
9	KAB. BUNGO	386.114	42.473	408.831	44.971	429.083	47.199	446.673	49.134	461.335	50.747
10	KOTA JAMBI	642.264	80.283	675.117	84.390	702.677	87.835	724.844	90.606	741.758	92.720
11	KOTA SUNGAI PENUH	101.916	11.211	106.912	11.760	111.316	12.245	115.149	12.666	118.311	13.014

Tabel 2-25 Proyeksi Kebutuhan Listrik

No	Kabupaten	Tahun Proyeksi									
		2025		2030		2035		2040		2045	
		Penduduk (Orang)	Kebutuhan Listrik TWh	Penduduk (Orang)	Kebutuhan Listrik TWh	Penduduk (Orang)	Kebutuhan Listrik TWh	Penduduk (Orang)	Kebutuhan Listrik TWh	Penduduk (Orang)	Kebutuhan Listrik TWh
1	KAB. TEBO	359.638	0,50	379.614	0,53146	396.677	0,55535	411.148	0,57561	423.022	0,59223
2	KAB. KERINCI	258.208	0,36	264.596	0,37043	269.325	0,37706	272.672	0,38174	274.561	0,38439
3	KAB. MERANGIN	378.357	0,53	401.646	0,56230	422.433	0,59141	440.484	0,61668	455.592	0,63783
4	KAB. SAROLANGUN	310.679	0,43	329.777	0,46169	346.253	0,48475	360.483	0,50468	372.491	0,52149
5	KAB. BATANGHARI	320.281	0,45	337.520	0,47253	352.350	0,49329	364.822	0,51075	374.879	0,52483
6	KAB. MUARO JAMBI	430.246	0,60	456.596	0,63923	479.624	0,67147	499.509	0,69931	516.156	0,72262
7	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	339.625	0,48	361.350	0,50589	380.786	0,53310	397.538	0,55655	411.509	0,57611
8	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	241.154	0,34	250.909	0,35127	259.001	0,36260	265.568	0,37180	270.381	0,37853
9	KAB. BUNGO	386.114	0,54	408.831	0,57236	429.083	0,60072	446.673	0,62534	461.335	0,64587
10	KOTA JAMBI	642.264	0,90	675.117	0,94516	702.677	0,98375	724.844	1,01478	741.758	1,03846
11	KOTA SUNGAI PENUH	101.916	0,14	106.912	0,14968	111.316	0,15584	115.149	0,16121	118.311	0,16564

Tabel 2-26 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Rumah Sakit)

Uraian	Kondisi Tahun 2024	Tahun Proyeksi				
		2025	2030	2035	2040	2045
	Penduduk (Orang)	Penduduk (Orang)	Penduduk (Orang)	Penduduk (Orang)	Penduduk (Orang)	Penduduk (Orang)
Jumlah Penduduk	3.631.100.000	3.768.480.000	3.972.870.000	4.149.530.000	4.298.890.000	4.420.000.000
Proyeksi kebutuhan Rumah Sakit	42	44	50	54	57	60

Tabel 2-27 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

No	Kabupaten	Kondisi Tahun 2024	Tahun Proyeksi									
			2025		2030		2035		2040		2045	
		Jumlah Sekolah (Unit)	Anak Usia Sekolah (Orang)	Jumlah Sekolah (Unit)	Anak Usia Sekolah (Orang)	Jumlah Sekolah (Unit)	Anak Usia Sekolah (Orang)	Jumlah Sekolah (Unit)	Anak Usia Sekolah (Orang)	Jumlah Sekolah (Unit)	Anak Usia Sekolah (Orang)	Jumlah Sekolah (Unit)
		SMA / MA/ SMK	SMA / MA/ SMK	SMA / MA/ SMK	SMA / MA/ SMK	SMA / MA/ SMK	SMA / MA/ SMK	SMA / MA/ SMK	SMA / MA/ SMK	SMA / MA/ SMK	SMA / MA/ SMK	SMA / MA/ SMK
1	KAB. TEBO	77	28.691	77	30.714	77	31.209	78	32.144	78	31.056	78
2	KAB. KERINCI	33	18.968	33	19.952	35	19.668	35	19.845	35	19.064	35
3	KAB. MERANGIN	69	31.651	69	32.155	70	31.449	70	32.713	70	32.614	70
4	KAB. SAROLANGUN	71	25.521	71	27.768	72	28.832	72	29.979	72	28.921	72

No	Kabupaten	Kondisi Tahun 2024	Tahun Proyeksi									
			2025		2030		2035		2040		2045	
		Jumlah Sekolah (Unit)	Anak Usia Sekolah (Orang)	Jumlah Sekolah (Unit)	Anak Usia Sekolah (Orang)	Jumlah Sekolah (Unit)	Anak Usia Sekolah (Orang)	Jumlah Sekolah (Unit)	Anak Usia Sekolah (Orang)	Jumlah Sekolah (Unit)	Anak Usia Sekolah (Orang)	Jumlah Sekolah (Unit)
		SMA / MA/ SMK	SMA / MA/ SMK	SMA / MA/ SMK	SMA / MA/ SMK	SMA / MA/ SMK	SMA / MA/ SMK	SMA / MA/ SMK	SMA / MA/ SMK	SMA / MA/ SMK	SMA / MA/ SMK	SMA / MA/ SMK
5	KAB. BATANGHARI	52	26.399	52	26.851	52	26.596	52	27.620	53	27.261	53
6	KAB. MUARO JAMBI	72	34.119	72	35.568	72	35.399	73	36.722	73	36.152	73
7	KAB. TANJUNG JABUNG BARAT	62	27.306	62	27.183	62	27.350	63	28.886	63	28.876	63
8	KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR	55	18.387	55	19.456	55	19.505	55	19.864	55	18.866	55
9	KAB. BUNGO	62	32.534	62	32.854	63	32.117	63	33.384	64	33.004	64
10	KOTA JAMBI	100	51.045	100	48.734	100	49.279	100	51.502	100	50.753	100
11	KOTA SUNGAI PENUH	14	7.706	14	7.905	16	7.824	16	8.126	16	8.004	16

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH_4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pemerintah dan

pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Kegiatan penanganan sampah di Provinsi Jambi sampai tahun 2033 meliputi:

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;

Melihat angka timbunan sampah yang besar tersebut maka diarahkan adanya rencana pengelolaan persampahan di Provinsi Jambi sampai tahun 2031 melalui penyediaan 9 lokasi tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah sebagai TPA sampah regional terpadu di setiap kabupaten.

Sementara untuk Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh yang tidak memiliki lahan untuk lokasi TPAS diarahkan untuk bekerjasama dengan kabupaten terdekat dalam bentuk pengembangan TPAS terpadu kabupaten-kota bersangkutan. Pengembangan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah terpadu di arahkan sebagai berikut :

Tabel 2-28 Arahan Pengembangan TPAS Regional Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Kebutuhan TPAS Regional/Unit	Keterangan
1	Kerinci	1	TPAS terpadu dengan Kota Sungai Penuh
2	Merangin		
3	Sarolangun	1	
4	Batang Hari		
5	Muaro Jambi	1	TPAS terpadu dengan Kota Jambi
6	Tanjab Timur	1	
7	Tanjab Barat		
8	Tebo		
9	Bungo	1	TPAS terpadu dengan Tebo dan Merangin
10	Kota Jambi		
11	Kota Sungai Penuh		
Jumlah		5	

Sumber: RTRWP Jambi Tahun 2023 - 2043

Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional meliputi:

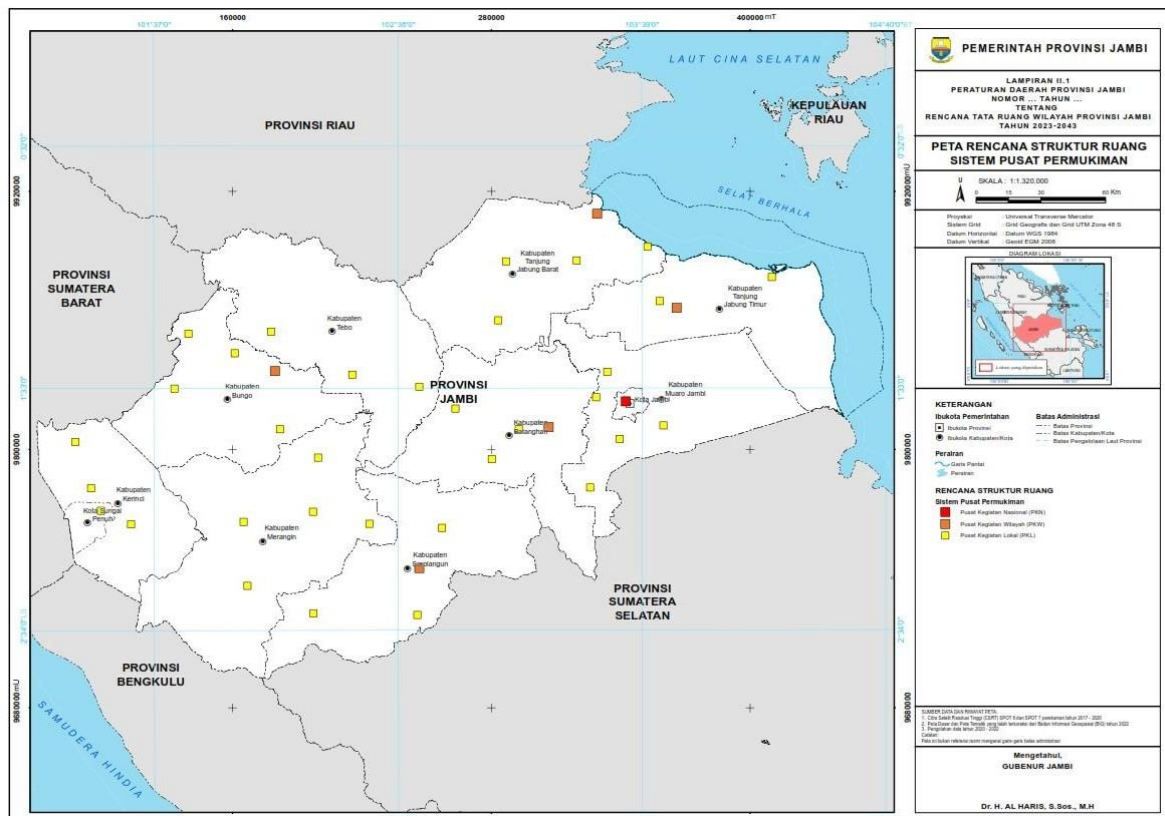
- a) Kabupaten Kerinci;
- b) Kabupaten Muaro Jambi;
- c) Kabupaten Sarolangun;
- d) Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
- e) Kabupaten Bungo.

Pengembangan Tempat Penampungan Sementara Terpadu (TPST) terdapat di Kota Jambi dan Kota Kota Sungai Penuh.

2.6.3 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.6.3.1 Rencana Sistem Pusat Permukiman

Rencana sistem pusat-pusat permukiman ditetapkan secara hierarki sebagai arahan pengembangan berdasarkan skala pelayanan dan mewujudkan simpul pertumbuhan wilayah.



Gambar 2-39 Rencana sistem pusat permukiman

Tabel 2-29 Peran dan Fungsi Wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi

No	Kabupaten/Kota	Peranan dan Fungsi	Keterangan
1	Kerinci	1. Perkebunan 2. Peternakan dan perikanan 3. Pertanian 4. Pariwisata 5. Pertambangan 6. Kawasan konservasi	
2	Merangin	1. Perkebunan 2. Peternakan dan perikanan 3. Pertanian 4. Pariwisata 5. Pertambangan 6. Kawasan konservasi	

No	Kabupaten/Kota	Peranan dan Fungsi	Keterangan
3	Sarolangun	1. Perkebunan 2. Peternakan dan perikanan 3. Pertanian 4. Pariwisata 5. Pertambangan 6. Kawasan konservasi	
4	Bungo	1. Perkebunan 2. Peternakan dan perikanan 3. Pertanian 4. Pariwisata 5. Pertambangan 6. Kawasan konservasi	
5	Tebo	1. Perkebunan 2. Peternakan dan perikanan 3. Pertanian 4. Pariwisata 5. Pertambangan 6. Kawasan konservasi	
6	Batanghari	1. Perdagangan dan jasa regional 2. Industri pengolahan 3. Perkebunan 4. Peternakan dan perikanan 5. Pertanian 6. Pariwisata 7. Pertambangan 8. Kawasan konservasi	
7	Muaro Jambi	1. Penyangga Ibukota Provinsi 2. Perdagangan dan jasa regional 3. Industri pengolahan 4. Perkebunan 5. Peternakan dan perikanan 6. Pertambangan 7. Pariwisata 8. Perumahan skala besar	Termasuk ke dalam Wilayah Metropolitan Jambi
8	Tanjung Jabung Barat	1. Perdagangan dan jasa regional 2. Industri pengolahan 3. Perkebunan 4. Peternakan dan perikanan 5. Pertanian 6. Pertambangan 7. Pelabuhan laut	

2.6.3.2 Rencana Jaringan Transportasi

Pengembangan transportasi sangat penting artinya dalam menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan. Selain berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan

ekonomi dan pengembangan wilayah, transportasi juga memiliki fungsi strategis dalam merekat integritas antar wilayah.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) strategi penataan ruang yang diejawantahkan dalam rencana sistem transportasi, yaitu :

- a) mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan arteri primer, kereta api dan sarana pendukungnya dengan tidak mengganggu kawasan lindung dan fungsi lingkungan;
- b) meningkatkan akses kawasan budidaya (sektor unggulan) ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer;
- c) meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat pelayanan berupa pengembangan fasilitas bongkar muat dan sarana pelabuhan perikanan di PKN, PKW, dan PKL;

Jika dilihat dari aspek kepentingan publik, sistem transportasi yang meliputi transportasi darat, laut dan udara mengemban fungsi sebagai pelayan publik, baik skala domestik maupun internasional. Oleh karena itu, selain harus efektif memenuhi kebutuhan pembangunan, pengembangan transportasi mestinya juga didasarkan pada pengembangan yang berkelanjutan (*sustainability*), yaitu melihat jauh kedepan, berdasar perencanaan jangka panjang yang komprehensif dan berwawasan lingkungan.

2.6.3.3 Rencana Sistem Jaringan Jalan

A. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Jalan.

Jaringan Jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri atas sistem jaringan primer dan sistem jaringan Jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.

Sistem perhubungan diarahkan kepada pengembangan jaringan perhubungan darat, laut dan udara. Sistem jaringan jalan untuk pengembangan wilayah di Provinsi Jambi, diarahkan pada :

1. Jaringan Jalan Arteri

Jaringan jalan yang berfungsi sebagai arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien. Jaringan jalan arteri di Provinsi Jambi adalah jalan yang menghubungkan Ibukota Provinsi ke setiap Ibukota Kabupaten dan ke wilayah Provinsi lainnya.

Jaringan Jalan Arteri Primer sebagai jalur utama lintas regional yang menghubungkan Ibukota provinsi ke-setiap Ibukota Kabupaten dan ke wilayah Provinsi lain. Ruas jalan ini meliputi 3 (tiga) jalur utama yakni:

- 1) Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera, yang menghubungkan Provinsi Sumatera Selatan dan Riau, yang terdiri dari ruas jalan :
 - a. Merlung – Bts Provinsi Riau;
 - b. Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjabbar - Merlung;
 - c. Sp. Tuan - Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Tanjabbar;
 - d. Bts. Kota Jambi - Sp. Tuan;
 - e. Sp. Mendalo Darat (Lingkar Barat) - Bts. Kota Jambi;
 - f. Bts. Kota Jambi - Tempino; dan
 - g. Tempino - Bts. Prov. Sumsel.
- 2) Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) Sumatera, meliputi:
 - a. Bts. Kota Muara Bungo - Bts. Prov. Sumbar;
 - b. Jln. Lintas Sumatera II Muara Bungo (Sp. Jambi - Bts. Kota Muara Bungo);

- c. Bts. Kota Muara Bungo - Bts. Kab. Bungo/Kab. Merangin;
 - d. Jln. Lintas Sumatera I Muara Bungo (Sp. Jambi - Bts. Kota Muara Bungo);
 - e. Bts. Kab. Bungo/Kab. Merangin - Bts. Kota Bangko;
 - f. Jln. Lintas Sumatera II Bangko (Bts. Kota Bangko - SP. Bukit Indah Bangko);
 - g. Bts. Kab. Sarolangun/Kab. Merangin - Bts. Kota Bangko;
 - h. Jln. Lintas Sumatera I Bangko (Bts. Kota Bangko - Sp. Bukit Indah Bangko);
 - i. Sarolangun - Bts. Kab. Sarolangun/Kab. Merangin; dan
 - j. Sarolangun - Bts. Prov. Sumsel.
- 3) Lintas penghubung (*Feeder Road*) I Jambi, menghubungkan wilayah- wilayah dalam Provinsi Jambi. Jalur ini terdiri dari:
- a. Bts. Kab. Tebo/Kab. Bungo - Bts. Kota Muara Bungo;
 - b. Jln. Pattimura Muara Bungo (Bts. Kota Muara Bungo - Sp. Jambi);
 - c. Muara Tebo - Bts. Kab. Tebo/Kab. Bungo;
 - d. Sei Bengkal – Muara Tebo;
 - e. Bts. Kab. Batanghari/Kab. Tebo – Sei Bengkal;
 - f. Muara Tembesi - Bts. Kab. Batanghari/Kab. Tebo;
 - g. Bts. Kota Muara Bulian - Muara Tembesi;
 - h. Jln. Muara Tembesi (Muara Bulian);
 - i. Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Batang Hari – Bts. Kota Ma. Bulian;
 - j. Jln. Gajah Mada (Muara Bulian);
 - k. Sp. Mandalo Darat - Bts. Kab. Muaro Jambi/Kab. Batanghari; dan
 - l. Bts. Kota Jambi/Sp. Rimbo (Lingkar Barat) - Sp. Mendalo Darat.

- 4) Jalan Lingkar Dalam Perkotaan Jambi yang terdiri dari ruas jalan:
- Sp. Pal Sepuluh (Lingkar Barat) - Bts. Kota Jambi/Sp Rimbo;
 - Sp. Pal Sepuluh - Sp. Pal Merah - Lingkar Timur I (Sp. Gado-Gado);
 - Sp. Gado-Gado - Sp. Sijenjang (Lingkar Timur II); dan
 - Sp. Sijenjang - Bts. Kota Jambi/Kab. Muaro Jambi.
- 5) Jalan Perkotaan Jambi:
- Jln. Surya Darma (Sp. Kenali Asam Bawah - Sp. Pal Sepuluh - Bts. Kota Jambi/Kab. Muaro Jambi);
 - Jln. Mayor Marzuki (Sp. Kota Baru - Sp. Kenali Asam Bawah);
 - Jln. Pangeran Hidayat (Sp. Kawat - Sp. Kota baru);
 - Jln. M. Yamin (Sp. Pulai – Sp. Kawat);
 - Jln. Sultan Thaha (Jambi) (Sp. 3 Jl. Fatmawati – Sp. Museum Perjuangan);
 - Jln. Sultan Agung (Jambi) (Sp. Museum Perjuangan - Sp. Pulai);
 - Jln. R. Pamuk (Jambi) (Sp. 3 Jl. Fatmawati - Sp. Duren);
 - Jln. Yos Sudarso (Jambi) (Sp. Duren - Sp. Sijenjang - Bts. Kota Jambi/Kab. Muaro Jambi);
 - Jln. Husni Thamrin (Jambi) (Sp. Bata - Sp. Tugu Pers);
 - Jln. Gatot Subroto (Jambi) (Sp. Bata - Sp. Jelutung);
 - Jln. Jend. Sudirman (Jambi) (Sp. Jelutung - Sp. Sudirman/Kol. Pol. M. Thaher); dan
 - Jln. Kol. Pol. M. Thaher (Jambi).
- 6) Jalan Akses Bandara yang terdiri dari ruas jalan:

- a. Jln. Rb. Siagian - Sp. Tanjung lumut/Jln. Lingkar Selatan (Jambi); dan
 - b. Jln. Sp. Alkal - Bandara Sultan Thaha (Jambi).
- 7) Jalan Akses Pelabuhan yang terdiri dari ruas jalan:
- a. Bts. Kota Jambi - Sp. Candi Muaro Jambi;
 - b. Sp. Candi Muaro Jambi - Bts. Kab. Muaro Jambi/ Kab. Tanjabtim;
 - c. Bts. Kab. Muaro Jambi/ Kab. Tanjabtim – Sp. Zona V;
 - d. Sp. Zona V - Pel. Muara Sabak; dan
 - e. Bts. Kota Jambi - Talang Duku.

2. Jaringan Jalan Kolektor

Jaringan jalan kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/ pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Jaringan jalan kolektor di Provinsi Jambi adalah jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pemasaran (pelabuhan), yang menghubungkan daerah pedalaman, daerah transmigrasi, menghubungkan kota-kota dalam kabupaten dan jalan-jalan dimana sungai tidak dapat dilayari.

- 1) Jalan Kolektor Primer 1 (JKP-1), meliputi:
 - a) Ruas Jalan Penghubung (Feeder Road) Muaro Jambi-Kuala Tungkal, terdiri dari:
 - 1. Sp. Tuan - Bts. Kab. Muaro Jambi / Kab. Tanjabtim;
 - 2. Bts. Kab. Muaro Jambi/ Kab. Tanjabtim - Bts. Kab. Tanjabtim / Kab. Tanjabbar;
 - 3. Bts. Kab. Tanjabtim / Kab. Tanjabbar - SP. Tiga Batara Gas Plant (P. Lumut); dan

4. Sp. Tiga Batara Gas Plant (P. Lumut) - Bts. Kota Kuala Tungkal.
- b) Ruas Jalan Penghubung (Feeder Road) Muara Tembesi-Sarolangun, terdiri dari:
 1. Muara Tembesi - Bts. Kab.Batanghari/Kab.Sarolangun;
 2. Bts. Kab. Batanghari/Kab. Sarolangun – Pauh; dan
 3. Pauh – Sarolangun.
- c) Ruas Jalan Penghubung (Feeder Road) Bangko-Sungai Penuh-Bts Sumatera Barat terdiri dari:
 1. Jln. Makalam (Bangko) (Sp. Bukit Indah Bangko - Sp. Pasar Bawah);
 2. Jln. M. Yamin (Bangko) (Sp. Pasar bawah - Bts. Kota Bangko);
 3. Bts. Kota Bangko - Sei Manau;
 4. Sei Manau - Bts Kab. Merangin/Kab. Kerinci;
 5. Bts. Kab. Merangin/Kab. Kerinci - Sanggaran Agung;
 6. Sanggaran Agung - Sei Penuh (Sp. 4 Martadinata);
 7. Bts. Kota Sei. Penuh - Bts. Prov. Sumbar (Tapan);
 8. Sungai Penuh – Siulak Deras/Letter W; dan
 9. Siulak Deras/Letter W – Bts. Sumbar.
- d) Ruas Jalan Penghubung (Feeder Road) Kabupaten Tebo-Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdiri dari:
 1. Sp. Niam - Bts. Kab. Tebo/Kab. Tanjabbar;
 2. Bts. Kab. Tebo/Kab. Tanjabbar - Lubuk Kambing; dan
 3. Lubuk Kambing – Merlung.
- e) Sp. Candi Muaro Jambi - Candi Muaro Jambi;
- f) Ruas Jalan Perkotaan, terdiri dari:

1. Jln. Martadinata (Sungai Penuh) (Sp.4 Martadinata - Sp. Tugu PKK);
 2. Jln. Diponegoro (Sungai Penuh) (Sp. Tugu PKK - Sp. Ahmad Yani);
 3. Jln. A. Yani (Sungai Penuh) (Sp. Ahmad Yani - Bundaran Sungai Penuh);
 4. Jln. Soekarno-Hatta (Sungai Penuh) (Bundaran Sungai Penuh - Bts. Kota Sungai Penuh);
 5. Jln. Sultan Thaha (Kuala Tungkal) (Sp. 3 Sudirman - Sp. 3 Sultan Thaha);
 6. Jln. Sudirman (Kuala Tungkal) (Sp. Sudirman/Sri Sudewi - Sp. Sudirman/Sultan Thaha); dan
 7. Jln. Sri Sudewi (Kuala Tungkal) (Bts. Kota Kuala Tungkal - Sp. Sudirman/Sri Sudewi).
- 2) Jalan Kolektor Primer 2 (JKP-2), meliputi:
- a) Jalan Penghubung antar pusat kegiatan, terdiri atas:
 1. Simpang Talang Duku – Suak Kandis;
 2. Suak Kandis – Desa Simpang/Berbak;
 3. Desa Simpang/Berbak – Simp. Jembatan Muara Sabak;
 4. Muara Tebo – Simp. Logpon;
 5. Simp. Logpon – Tanjung/Bts. Sumbar;
 6. Simp. Saumil – Simp. Longpon;
 7. Simp. Lagan – Simp. Pelabi/Zona V;
 8. Sungai Duren - Sungai Buluh;
 9. Bts. Kab. Ma. Jambi/Kab. Batang Hari – Bts. Kota Muara Bulian;
 10. Tempino – Bts. Kab. Ma. Jambi/Kab. Batang Hari;
 11. Muara Bungo - Peninjauan – Junction;
 12. Bukit paku – Merlung;

13. Sanggaran Agung – Jujun;
14. Jujun – Lempur;
15. Jujun – Bts. Kab. Kerinci/Bts. Kota Sungai Penuh;
16. Simpang Tugu Macan (KM 14) – Batas Sungai Penuh/Kerinci (Batu Kurik);
17. Sekungkung – Batas Kerinci/Sungai Penuh (Batu Kurik);
18. Simp. Pelawan – Sei Salak;
19. Sei. Salak – Pekan Gedang/Batang Asai;
20. Pekan Gedang/Batang Asai – Ma. Talang – Jangkat;
21. Simp. Pulau Rengas – Muara Siau;
22. Muara Siau – Dusun Tuo;
23. Dusun Tuo – Jangkat;
24. Simp. Jelantang - Air Hitam/Simp. Mentawak;
25. Jalan Akses Bandara Muara Bungo;
26. Jalan Lingkar Muara Bungo (Sei. Mengkuang – Simp. Sei. Buluh – Simp. Tanjung – Menanti – Simp. Terminal/PTP – Sei. Binjai);
27. Jalan Penghubung KI Kemingking (Kabupaten Muaro Jambi) –Berbak (Kabupaten Tanjung Jabung Timur);
28. Jalan Berbak – Ujung Jabung;
29. Jalan akses kuala tungkal – Pelabuhan Muara Sabak;
30. Simpang Kotoboyo – Pintas Tuo Muara Tabir;
31. Jalan Lingkar Perkotaan Jambi (Simpang Muhajirin – Sungai Bertam);
32. Jalan Lingkar Perkotaan Jambi (Jalan penghubung KI Kemingking – Simpul Tol Pondok Meja);
33. Jalan Lingkar Perkotaan Jambi (Lingkar Utara);

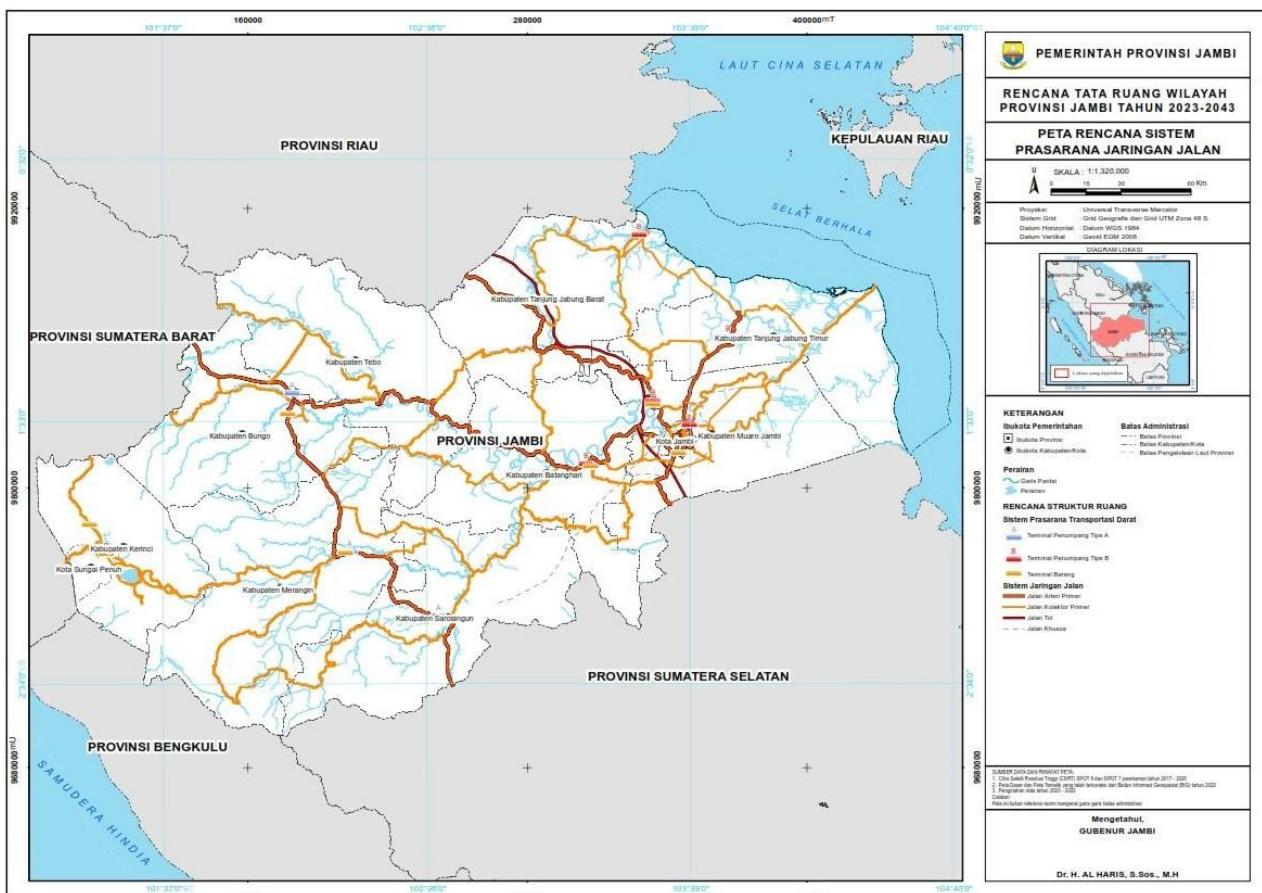
34. Parit IV Sei. Saren – Simp. Teluk Sialang – Dermaga Roro;
 35. Sungai Bahar – Durian Luncuk;
 36. Talang Duku – Manis Mato – Sogo;
 37. Jalan akses Bandara Depati Parbo;
 38. Jalan Depati Parbo (Sungai Penuh);
 39. Sei. Saren – Teluk Nilau – Parit 10/Senyerang;
 40. Parit 10/Senyerang – Mekar Jati – Batas Riau; dan
 41. Parit 10 Senyerang – Simp. 3 Tebing Tinggi – Simp. Kuala Dasal.
- b) Jalan akses Percandian Muaro Jambi, terdiri dari:
1. Simpang Berembang – Simpang Jambi Kecil;
 2. Simpang Jambi Kecil – Simpang Candi Muaro Jambi/Desa Baru;
- 3) Jalan Kolektor Primer 3 (JKP-3), meliputi ruas jalan:
- a) Jalan Kolektor Primer 3 (JKP-3) antar pusat kegiatan meliputi :
1. Simp. Penerokan – Simp. Suka Makmur/Sungai Bahar;
 2. Simp. Ahok (Kota Jambi) – Simp. Pasar Buper – Bumi Pekemahan Pramuka;
 3. Bts. Kab. Tebo/Bts. Kab. Bungo - Kuamang Kuning – Simp. Kuamang(Merangin);
 4. Simp. Betung Berdarah – Simp. Pintas – Bts. Kab. Tebo/Bts. Kab. Bungo
 5. Kelok Sago - Sanggaran Agung;
 6. Peninjauan – Lbk. Mengkuang – TKA (Bts. Sumbar);
 7. Simp. Pauh – Air Hitam/Simp. Mentawak;
 8. Simp. Margoyoso – Sumber Agung – Air Hitam/Simp. Mentawak; dan
 9. Simp. Debai – Dusun Baru Batas Kota Sungai Penuh – Simp. 4 Sekubar.

- b) JKP 3 dalam Perkotaan Jambi, terdiri dari :
1. Jl. Raden Mattaher – Jln. M. Husni Thamrin;
 2. Jln. Rangkayo Hitam – Jln. Abdul Kartawirana – Jln. Rangkayo Pingai– Jln. Sentot Alibasa;
 3. Jln. Dr. Sutomo;
 4. Jalan Dr. Setia Budi – Jln. KH. Hasyim Ashari – Jln. Pangeran Diponegoro;
 5. Jln. Gajah Mada – Jln. Hayam Wuruk;
 6. Jalan Kol. Polisi M. Taher – Jln. GR. Djamin Dt. Bagindo – Jln. Kol. Pol. Ahmad Bastari – Jln. Brigjend Katamso;
 7. Jln. Hos Cokro Aminoto;
 8. Jln. Slamet Riyadi – Jln. Urip Sumorhajo;
 9. Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi, MS – Jln. Yusuf Singedekane – Jln. H. A. Manap – Jln. Arief Rahman Hakim;
 10. Jalan RE. Martadinata – Jln. Jend. A. Yani – Jln. Jend. MT. Haryono;
 11. Jln. Ade Irma Suryani – Jln. Dr. Siwabesi – Jln. KH. Abdul Malik Jambi;
 12. Jln. Jend. Basuki Rahmat – Jln. H. Agus Salim – Jln. H. Adam Malik;
 13. Jalan Jend. Sudirman (Jambi) – Jln. Abdul Rahman Saleh;
 14. Jln. Abdul Rahman Saleh;
 15. Jln. Kapten Pattimura – Jln. Kapten Bakarudin;
 16. Jln. Kol. Abunjani – Jln. Sumantri Brojonegoro; dan
 17. Jalan Soekarno Hatta.
- c) JKP 3 dalam Perkotaan Muara Bulian yaitu : Jln. Sudirman (Muara Bulian);

3. Jalan Lokal

Jalan lokal Adalah jalan yang berfungsi menghubungkan pusat-pusat pelayanan dengan kota-kota kecil atau pusat-pusat pedesaan untuk daerah-daerah terisolir di pedesaan. Dengan ciri-ciri perjalanan jarak pendek, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Jaringan jalan lokal Provinsi Jambi umumnya merupakan jalan Kabupaten. Jalan lokal dalam peranannya tidak kalah pentingnya dengan kedua jenis jalan diatas karena ini menyerap aliran orang, barang dan jasa pada kantong-kantong produksi di daerah-daerah permukiman di pedalaman wilayah Provinsi Jambi.



Gambar 2-40 Peta Rencana Sistem Prasarana Jaringan Jalan

4. Jaringan Tol

Adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar Tol. Jalan Tol, meliputi :

- a) Jalan Tol Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi (bagian Trans Sumatera); dan
- b) Jalan Tol Jambi – Rengat (bagian dari Trans Sumatera).

5. Jalan Khusus

Adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Jalan khusus di Provinsi Jambi meliputi ruas jalan Kabupaten Sarolangun – Kabupaten Batanghari – Kabupaten Muaro Jambi – Ujung Jabung.

B. Sistem Terminal

Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ke tujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang, disamping juga berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang.

Untuk terminal penumpang, skala pelayanan dibagi atas 3 (tiga) tipe, meliputi:

1. Terminal penumpang Tipe A, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota antar propinsi (AKAP), dan angkutan lintas batas antar negara, angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES).
2. Terminal penumpang Tipe B, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antar kota

dalam propinsi (AKDP), angkutan kota (AK) serta angkutan pedesaan (ADES).

3. Terminal penumpang Tipe C, yaitu yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan pedesaan (ADES).

Rencana pengembangan Terminal penumpang berdasarkan tipe terminal di Provinsi Jambi, meliputi:

- a. pengembangan terminal tipe A di Provinsi Jambi, meliputi :
 1. Terminal Alam Barajo di Kota Jambi;
 2. Terminal Sribulan di Kabupaten Sarolangun;
 3. Terminal Muara Bungo di Kabupaten Bungo; dan
 4. Terminal Bangko di Kabupaten Merangin.
- b. pengembangan terminal penumpang tipe B, meliputi :
 1. Terminal Sungai Penuh di Kota Sungai Penuh;
 2. Terminal Muara Bulian di Kabupaten Batanghari;
 3. Terminal Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 4. Terminal Muara Sabak Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 5. Terminal Sengeti di Kabupaten Muaro Jambi; dan
 6. Terminal Sijenjang di Kota Jambi.

Untuk mendukung pergerakan barang, juga dibutuhkan penyediaan simpul transportasi darat berupa terminal barang, yang dikembangkan pada wilayah sebagai berikut :

- a. Kota Jambi;
- b. Kabupaten Muaro Jambi;
- c. Kabupaten Merangin;
- d. Kabupaten Bungo;
- e. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- f. Kabupaten Batanghari; dan
- g. Kabupaten Tebo;
- h. Kabupaten Kerinci; dan

- i. Kota Sungai Penuh.

2.6.3.4 Rencana Jaringan Kereta Api

Pembangunan jaringan kereta api di Provinsi Jambi dimaksudkan untuk melayani angkutan barang dan manusia antara Provinsi di Sumatera yakni yang menghubungkan Lampung – Palembang Jambi, Pekanbaru – Medan dan Banda Aceh, serta menghubungkan Wilayah Barat Sumatera (Sumatera Barat) menuju pelabuhan Muara Sabak.

Rencana pembangunan jaringan angkutan Kereta Api Provinsi Jambi merupakan bagian dari Rencana pembangunan jaringan Kereta Api Sumatera (*Sumatera Railway*) yang menghubungkan Ruas Rengat – Jambi dan Ruas Jambi – Betung.

Sejalan yang sudah tertuang dalam RTRW Provinsi Jambi terdahulu, dimana pembangunan jaringan angkutan kereta api provinsi menghubungkan:

1. Rengat – Jambi; dan
2. Jambi – Betung.

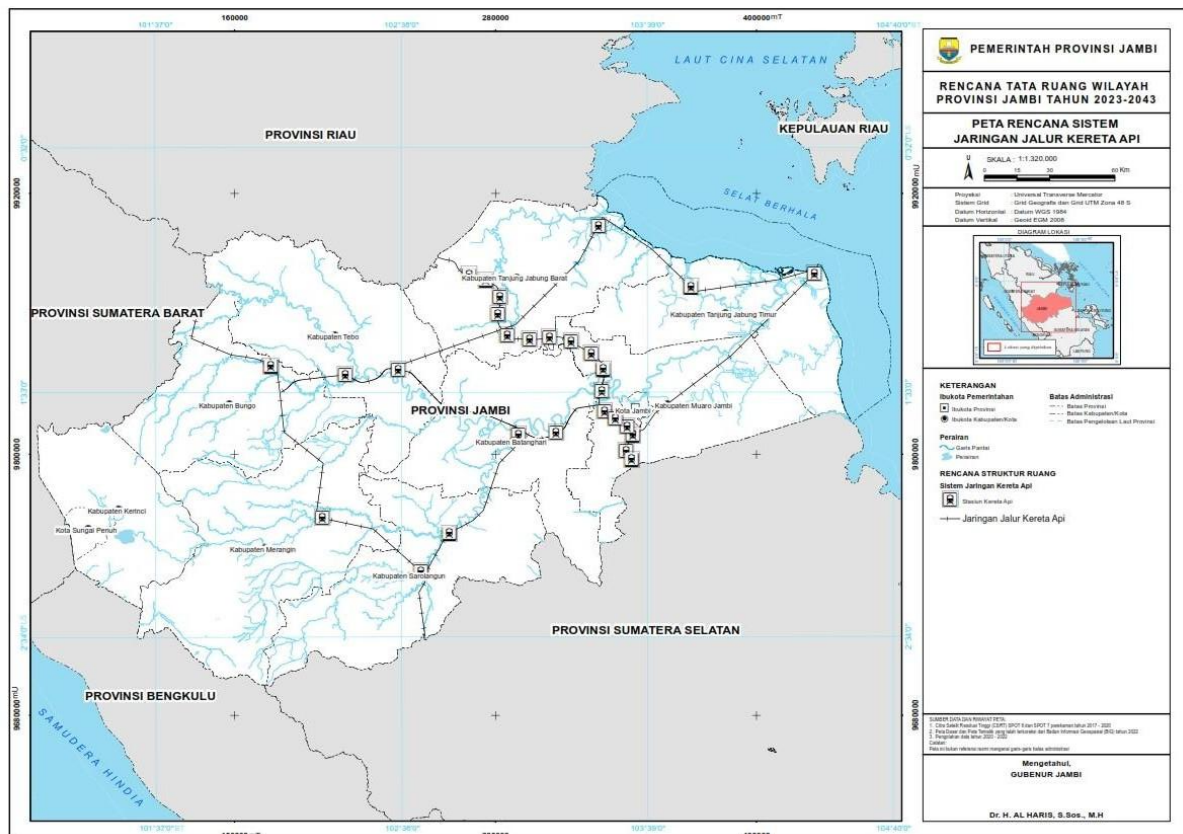
Jalur kereta api khusus yang ada dalam wilayah Provinsi Jambi meliputi:

1. Batas Provinsi Sumatera Barat – Kabupaten Bungo – Kabupaten Tebo – Kabupaten Batanghari – Kabupaten Muaro Jambi – Kota Jambi – Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Batas Provinsi Sumatera Selatan – Kabupaten Sarolangun – Kabupaten Merangin – Kabupaten Bungo;
3. Kabupaten Batanghari – Kabupaten Sarolangun; dan
4. Kabupaten Muara Tebo – Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Untuk mendukung sistem perkerataapian, simpul yang direncanakan untuk diwujudkan, terdapat di :

1. Kabupaten Bungo;
2. Kabupaten Tebo;
3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
5. Kabupaten Muaro Jambi;
6. Kabupaten Batanghari;
7. Kabupaten Sarolangun; dan
8. Kabupaten Merangin

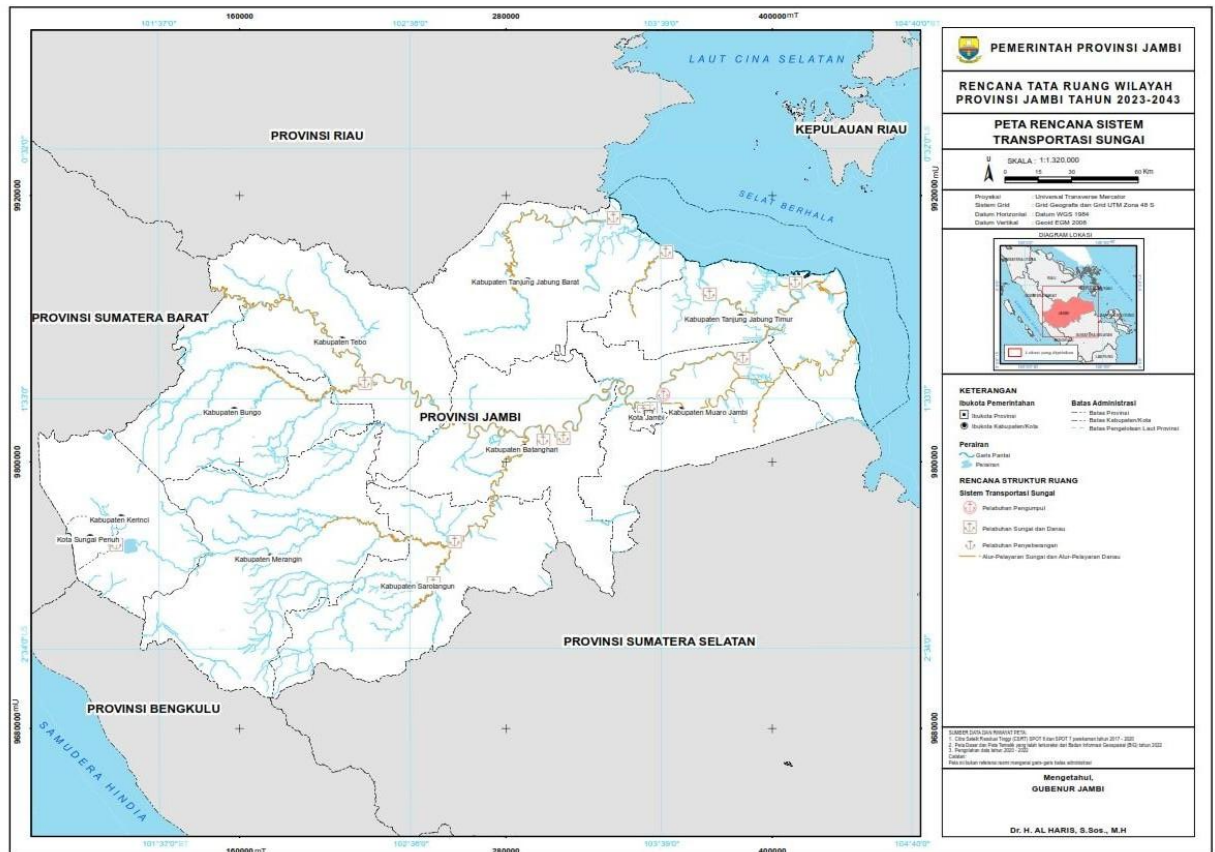


Gambar 2-41 Peta rencana sistem jaringan kereta api

2.6.3.5 Rencana Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Alur Pelayaran

Sungai telah menjadi salah satu urat nadi bagi kehidupan masyarakat Provinsi Jambi, karena menjadi menjadi salah satu jalur alternatif yang dilalui moda transportasi untuk mengangkut barang dan orang hingga saat ini. Sebagai transportasi pengangkutan barang, masyarakat menggunakan moda transportasi ini untuk mengangkut potensi alam berupa hasil perkebunan, pertanian, dan hasil perikanan. Sebagai alat mengangkut manusia, moda transportasi ini melayani

kegiatan mobilitas penduduk antar daerah utamanya yang berada di daerah pesisir ataupun daerah yang secara geografis terpisah oleh sungai. Sehingga boleh dikatakan bahwa moda transportasi sungai bisa menjadi generator baru pembangkit wilayah dimana terbentuk lapangan kerja baru untuk masyarakat sekitar.



Gambar 2-42 Peta Rencana Transportasi Sungai

Jaringan angkutan sungai dan danau sejalan dengan yang telah ditetapkan berupa pelabuhan penyeberangan, pelabuhan sungai dan danau serta alur pelayaran sungai dan alur pelayaran danau, sebagai berikut :

A. Pelabuhan Sungai dan Danau, meliputi :

1. Pelabuhan Muara Tembesi di Kabupaten Batanghari;
2. Pelabuhan Muara Bulian di Kabupaten Batanghari;
3. Pelabuhan Pauh di Kabupaten Sarolangun;
4. Pelabuhan Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;

5. Pelabuhan Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 6. Pelabuhan Muara Sabak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 7. Pelabuhan Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 8. Pelabuhan Mendahara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 9. Pelabuhan Tanjung di Kabupaten Muaro Jambi;
 10. Pelabuhan Muara Tebo di Kabupaten Tebo;
 11. Dermaga Pasar Angso Duo di Kota Jambi; dan
 12. Dermaga Danau Sipin di Kota Jambi.
- B. Pelabuhan Penyebrangan, yaitu Pelabuhan Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Alur Pelayaran sungai dan alur pelayaran danau yang melintasi Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batanghari, Kota Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Alur Sarolangun – Pauh – Mandiangin – Tembesi – Angso Duo – Nipah Panjang; dan
2. Alur Muara Bungo – Muara Tebo – Tembesi – Angso Duo – Nipah Panjang.

2.6.3.6 Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut

Sistem transportasi laut terdiri dari Tatanan Kepelabuhan dan Alur Pelayaran. Tatanan Kepelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.

Perbedaan hasil produksi atau komoditi barang dari satu daerah dengan daerah lainnya memicu terjadinya perpindahan atau pergerakan barang untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia. Sementara adanya perpindahan atau pergerakan (*movement*) dari penumpang dan barang merupakan dasar terjadinya perdagangan.

Adannya bisnis perdagangan baik didalam maupun luar negeri (*Export & Import*) mempengaruhi permintaan jasa angkutan laut karena angkutan laut menjadi pilihan sebagian besar masyarakat Indonesia dalam melakukan aktivitas pengiriman barang.

Posisi geografis Provinsi Jambi yang berbatasan langsung dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia menjadikan pertimbangan Pemerintah Provinsi untuk mendorong konsep wilayah bagian timur sebagai *outlet* pergerakan komoditi menuju pasar eksternal bahkan keluar negeri. Skenario ini yang dijadikan dasar untuk menetapkan rencana pembangunan pelabuhan utama dikawasan pantai timur. Selain itu, jaringan perhubungan laut di Provinsi Jambi juga diarahkan sebagai perhubungan antar wilayah sepanjang pantai terutama bagi angkutan barang/ orang, sebagai kolektor dan distributor bagi sistem angkutan jalan raya dan atau sungai pedalaman.

Berdasarkan pertimbangan tujuan tersebut, berdasarkan hirarkinya tatanan kepelabuhan di Provinsi Jambi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pelabuhan Utama terdiri, yaitu peningkatan Pelabuhan Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari fungsi pelabuhan pengumpul menjadi pelabuhan utama.
- b. Pelabuhan Pengumpul terdiri dari Pelabuhan Muara Sabak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Pelabuhan dan Terminal Peti Kemas Talang Duku di Kabupaten Muaro Jambi.
- c. Pelabuhan pengumpan regional terdiri dari:
 1. Pelabuhan Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 2. Pelabuhan Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 3. Pelabuhan Kuala Mendahara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- d. Pelabuhan pengumpan lokal terdiri dari:
 1. Pelabuhan Betara di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 2. Pelabuhan Muara Deli di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 3. Pelabuhan Air Hitam Laut di Kabupaten Tanjung Jabung

- Timur;
4. Pelabuhan Kuala Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 5. Pelabuhan Lambur Luar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 6. Pelabuhan Pemusiran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 7. Pelabuhan Pangkal Duri di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 8. Pelabuhan Simbur Naik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 9. Pelabuhan Sungai Jambat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 10. Pelabuhan Sungai Lokan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- e. Terminal khusus di Pangkalan TNI AL (LANAL) di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- f. Pelabuhan perikanan, meliputi:
1. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 2. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Teluk Majelis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 3. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

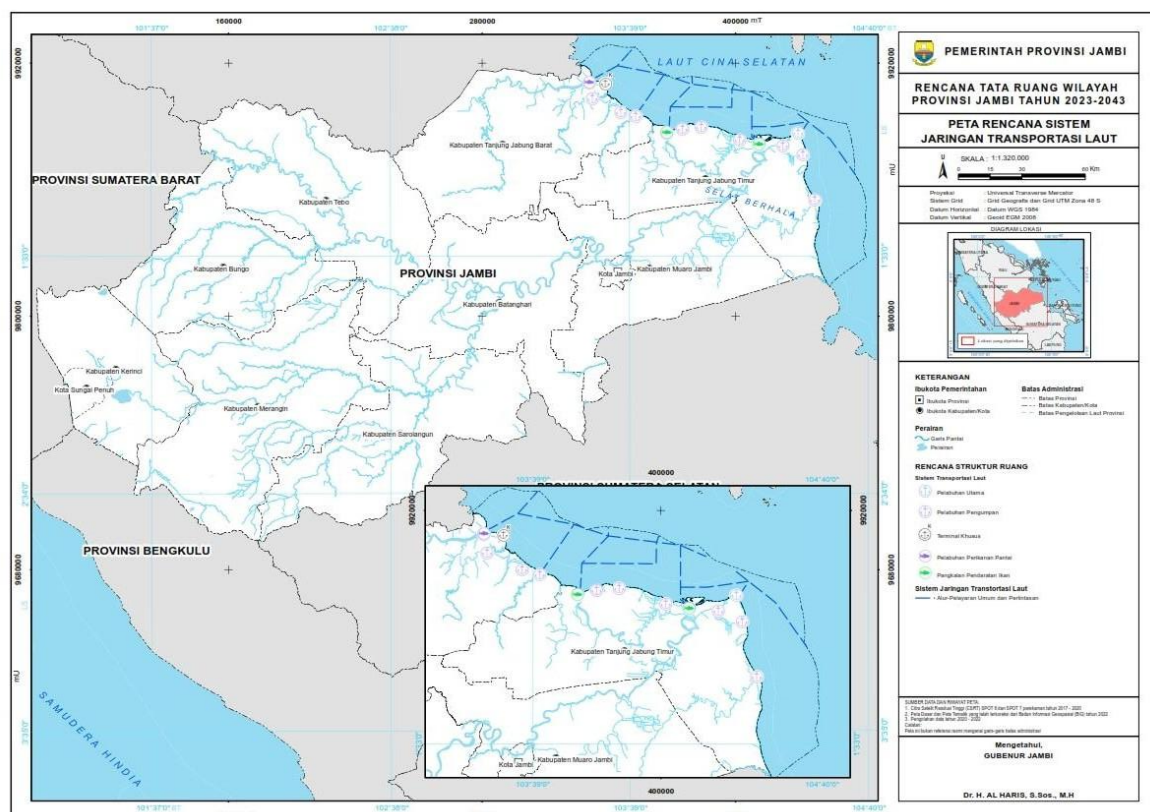
Alur pelayaran dan/ atau perlintasan mengacu pada kondisi alur pelayaran yang sering digunakan di Provinsi Jambi. Alur pelayaran dan/ atau perlintasan tersebut merupakan alur pelayaran kapal kargo, kapal tongkang dan kapal tangker yang melayani rute pelayaran regional, nasional maupun internasional. Arah pemanfaatan alur pelayaran dan/ atau perlintasan dilakukan dengan cara:

- a. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang disekitar alur pelayaran; dan
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan ruang disekitar alur pelayaran.

Alur pelayaran di laut merupakan alur pelayaran umum dan perlintasan yang terdapat di Perairan Selat Berhala. Alur

Pelayaran di laut ditetapkan berdasarkan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- a. Kecamatan Tungkal Ilir (Tungkal Ilir-Kep.Riau);
- b. Kecamatan Tungkal Ilir (Antar Pelabuhan di Provinsi Jambi);
- c. Kecamatan Mendahara (Mendahara-Kep. Riau);
- d. Kecamatan Kuala Jambi (Kuala Jambi-Kep. Riau);
- e. Kecamatan Kuala Jambi (Platform Migas-Kep. Riau);
- f. Kecamatan Nipah Panjang (Nipah Panjang-Kep.Riau);
- g. Perairan Selat Berhala (Nipah Panjang-UjungJabung);
- h. Kecamatan Sadu (Ujung Jabung-Kep. Riau); dan
- i. Perairan Selat Berhala (Kep. Riau-Bangka Belitung).



Gambar 2-43 Peta Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut

2.6.3.7 Rencana Sistem Kebandarudaraan

Transportasi udara sebagai salah satu moda transportasi memiliki karakteristik yang dapat melayani angkutan penumpang dan barang relatif terbatas khususnya barang bernilai tinggi dan membutuhkan waktu cepat, dan dapat melakukan penetrasi sampai keseluruhan wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh moda transportasi lain.

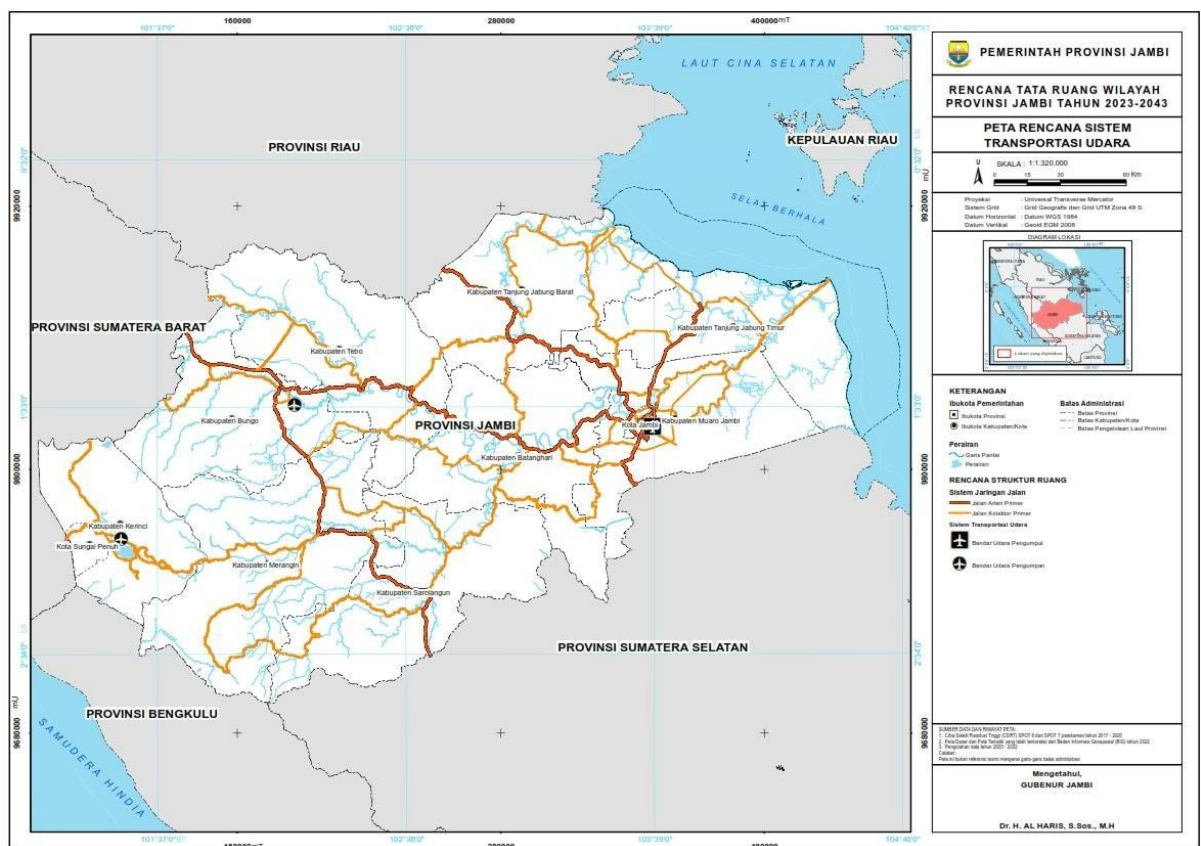
Jaringan prasarana transportasi udara yang bersifat nasional terdiri dari simpul yang berwujud Bandar Udara dan ruang lalu lintas yang berwujud ruang lalu lintas udara. Bandar udara dibedakan berdasarkan fungsi, penggunaan, klasifikasi, status dan penyelenggaraannya dan kegiatannya. Berdasarkan hirarki fungsinya Bandar udara dikelompokkan menjadi Bandar udara pusat penyeberangan yang terdiri atas Bandar Udara Pusat penyeberangan primer, sekunder, dan tersier serta Bandar udara bukan penyeberangan.

1. Pusat penyeberangan primer berperan melayani penumpang dalam jumlah besar dengan lingkup pelayanan atau daerah cakupan besar;
2. Pusat penyeberangan sekunder berperan melayani penumpang dalam jumlah sedang dengan lingkungan pelayanan atau daerah cakupan sedang;
3. Pusat penyeberangan tersier berperan melayani penumpang dalam jumlah kecil dengan lingkup pelayanan atau daerah cakupan kecil;
4. Bukan pusat penyeberangan melayani penumpang dalam jumlah kecil dan tidak mempunyai daerah cakupan atau layanan.

Pada saat ini terdapat tiga Bandar Udara yaitu Bandar Udara Sultan Thaha, Bandar Udara Depati Parbo dan

Bandar Udara Bungo. Bandar Udara Sultan Thaha melayani jalur penerbangan Jambi – Jakarta, Jambi Batam dan Jambi – Singapura, dan Jambi – Kerinci serta Bandar Udara Bungo.

Sesuai dengan fungsinya Bandar Udara terdiri dari Bandar Udara Sultan Thaha Jambi di Kota Jambi sebagai Bandar Udara Pengumpul Sekunder serta Bandar Udara Depati Parbo di Kabupaten Kerinci dan Bandara Bungo di Kabupaten Bungo sebagai Bandar Udara Pengumpan.



Gambar 2-44 Peta Rencana Transportasi Udara

Bandara Sultan Thaha yang akan datang dapat dilakukan peningkatan, perluasan dan relokasi sehingga memiliki jalur penerbangan alternatif yang menghubungkan Jambi dengan pusat-pusat pertumbuhan di Sumatera khususnya ibukota Provinsi serta daerah lainnya di Indonesia dan menghubungkan pula Provinsi Jambi

dengan wilayah yang tergabung dengan IMT/GT (Indonesia – Malaysia – Thailand/ *Growth Triangle*).

2.7 Rencana Sistem Jaringan Energi

2.7.1 Infrastruktur Migas

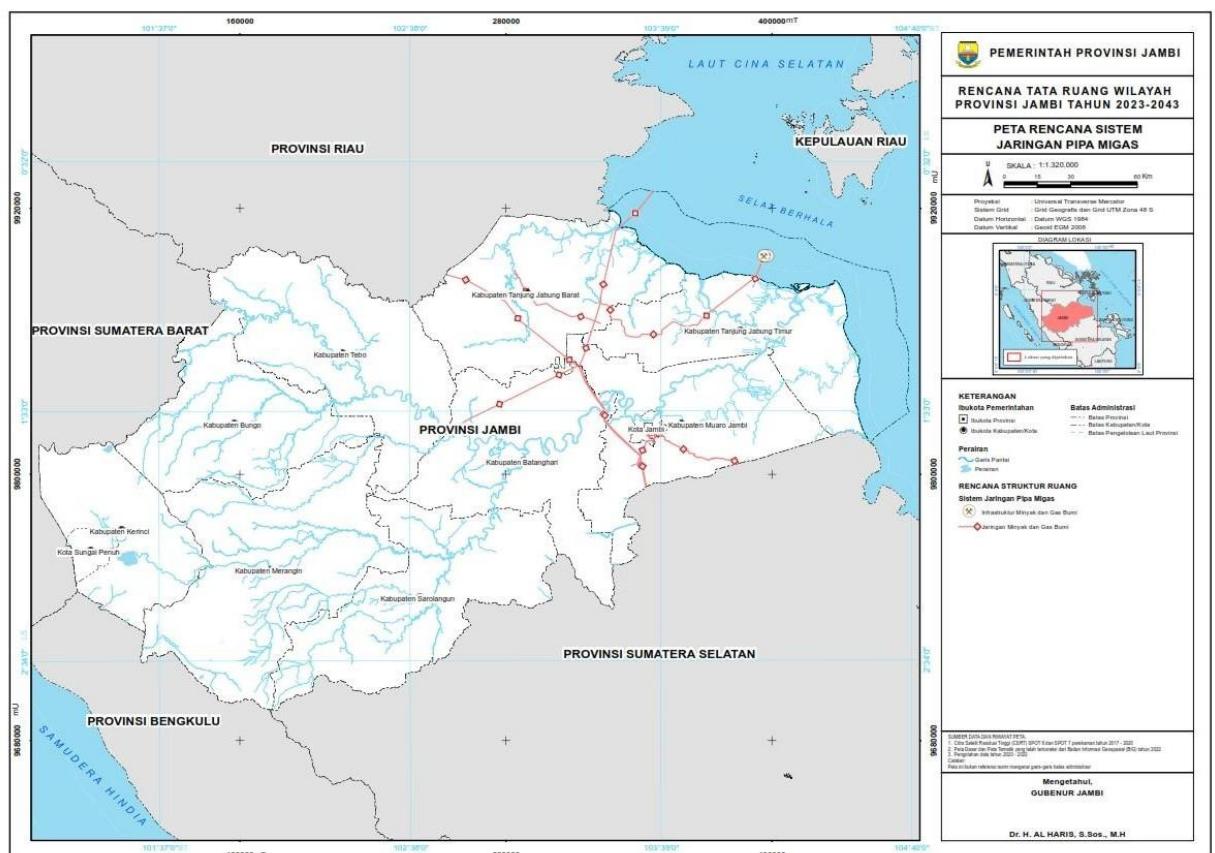
Provinsi Jambi memiliki potensi kekayaan energi yang cukup besar, salah satunya adalah potensi sumber energi fosil seperti minyak bumi, gas bumi dan batu bara. Minyak bumi adalah hasil dari peruraian (dekomposisi) materi tumbuhan dan hewan di suatu daerah yang subsidence (turun) secara perlahan, minyak bumi sebagian besar digunakan untuk memproduksi bensin dan minyak bakar, keduanya merupakan sumber "energi primer" utama. Karena mempunyai kepadatan energi yang tinggi, pengangkutan yang mudah, dan cadangan yang banyak, minyak bumi telah menjadi sumber energi paling utama di dunia sejak pertengahan tahun 1950-an. Sementara gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari hasil penambangan minyak dan gas bumi. Gas bumi dapat diolah menjadi gas pipa, LNG, LPG dan CNG.

Untuk memaksimalkan potensi dan pemanfaatan mendukung pemenuhan kebutuhan energi, rencana jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi:

- a. Jaringan pipa transmisi minyak bumi yang melintasi Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk lebih jelasnya sebagai berikut :
 - 1) Kota Jambi-Kabupaten Muaro Jambi- Batas Jambi/Sumatera Selatan;
 - 2) Kabupaten Muaro Jambi-Kabupaten Tanjang Jabung Barat-Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - 3) Pipa laut penghubung *Floating Production Unit* (FPU) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- b. Jaringan pipa transmisi gas bumi yang melintasi Kota

Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

1. Bagian jaringan pipa transmisi gas bumi Grissik-Singapura yang melintasi Kabupaten Muaro Jambi-Kabupaten Batanghari-Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. bagian jaringan pipa transmisi gas bumi Grissik-Duri yang melintasi Kabupaten Muaro Jambi-Kabupaten Batanghari-Kabupaten Tanjung Jabung Barat;



Gambar 2-45 Peta Rencana Jaringan Pipa Migas

3. jaringan pipa transmisi gas bumi Simpang Abadi-LPPPI-Purwodadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
4. jaringan pipa transmisi gas bumi Tempino Kecil (Kabupaten Muaro Jambi)-Payo Selincah (Kota Jambi);

2.7.1.1 Infrastruktur Ketenagalistrikan

Perkembangan rasio elektrifikasi secara di Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya akan tetapi jika dilihat lebih jauh dilevel kabupaten/kota maka akan terlihat ketimpangan dari rasio elektrifikasi dilevel kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. Kabupaten dengan Rasio Elektrifikasi terendah di Provinsi Jambi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan nilai 74,63 persen dan yang tertinggi adalah Kota Jambi yang sudah mencapai angka 100 persen.

Rasio elektrifikasi sangat bergantung pada pembangunan pembangkit listrik dan infrastruktur distribusi listrik. Dalam upaya peningkatan rasio elektrifikasi di beberapa kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi kondisi geografis yang heterogen dan banyak memiliki Daerah Aliran Sungai menjadi hambatan dan kendala.

Jaringan transmisi tenaga listrik ditetapkan dengan kriteria:

- a) Mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan hingga perdesaan;
- b) Mendukung pengembangan kawasan perdesaan, dan kawasan terisolasi;
- c) Melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, laut, hutan, persawahan, perkebunan, dan jalur transportasi;
- d) Berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan persyaratan ruang bebas dan jarak aman;
- e) Merupakan media penyaluran tenaga listrik adalah kawat saluran udara, kabel bawah tanah; dan
- f) Menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan tegangan nominal lebih dari 35 (tiga puluh lima) kilo Volt.

Jaringan transmisi tenaga listrik dikembangkan untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem yang menggunakan kawat saluran udara atau kabel bawah tanah.

Sistem jaringan kelistrikan di Provinsi Jambi diarahkan untuk:

- a. Mendorong percepatan penyelesaian pengembangan dan pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi

- (SUTET) interkoneksi jaringan listrik Jambi – Bayung Lincir (Sumsel) untuk transmisi SUTET;
- b. Pengembangan dan pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan kabupaten Sumatera Selatan – Kota Jambi – Peranap (Riau);
 - c. Pengembangan dan pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan kabupaten Sumatera Barat – Bungo – Bangko – Sarolangun - Sumsel;
 - d. Pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Kota Jambi – Sarolangun (PLTUMT Jambi 2);
 - e. Pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Bangko – Sarolangun (PLTUMT Jambi 1) - Sumsel;
 - f. Pengamanan jalur transmisi SUTT, SUTET, dan SUTM; .
 - g. Pengembangan jaringan distribusi dengan memperhatikan perkembangan dan penyebaran permukiman dan kawasan budi daya; dan
 - h. Mendorong rencana pembangunan fasilitas produksi, pengolahan dan/atau penyimpanan sebagai pendukung ketersediaan energi listrik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Rencana pengembangan jaringan energi kelistrikan di Provinsi Jambi terdiri dari rencana pengembangan pembangkit tenaga listrik dan pengembangan jaringan transmisi, dengan uraian sebagai berikut:

- (1) Pembangkit tenaga listrik, meliputi:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), terdapat di Kota Jambi:
 - 1. Payo Selincih; dan
 - 2. Batang Hari.
 - b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), terdapat di:
 - 1. Batang Merangin di Kabupaten Kerinci;
 - 2. Bendungan Merangin di Kabupaten Merangin;

3. Hidro Sumatera tersebar di wilayah Provinsi Jambi; dan
4. Minihidro tersebar di wilayah Provinsi Jambi.
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulu t Tambang Jambi 1 dan Mulu t Tambang Jambi 2, terdapat di Kabupaten Sarolangun;
- d. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Kota Sungai Penuh di Kabupaten Kerinci.
- e. Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm):
 1. PLTBm Lontar Papyrus di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 2. PLTBm Rimba Palma di Kota Jambi.
- f. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTM) Napal Melintang di Kabupaten Kerinci;
- g. Pembangkit Listrik energi baru terbarukan konservasi energi (EBTKE) tersebar diseluruh wilayah Provinsi Jambi, terdiri dari:
 1. Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg);
 2. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);
 3. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); dan
 4. PLTbio (Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa).
- h. Pembangkit Listrik Tenaga Mini Gas (PLTMG), terdapat di:
 1. PLTMG Pelabuhan Dagang/Purwodadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 2. PLTMG Pseko Kabupaten Sarolangun;
 3. PLTMG Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi;
 4. PLTMG Sungai Gelam (CNG) Kabupaten Muaro Jambi;
 5. PLTMG Sw Payo Selincah Kota Jambi; dan
 6. PLTMG TJP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- i. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)

1. PLTD Payo Selincah
 2. PLTD Koto Lolo
- (2) Gardu Listrik, terdiri atas :
- a. Gardu listrik, terdiri atas :
 1. GI New Aurduri di Kabupaten Muaro Jambi;
 2. GI Sungai Penuh di Kota Sungai Penuh ;
 3. GI Tebo di Kabupaten Tebo;
 4. GI Muara Bulian di Kabupaten Batanghari;
 5. GI Aur Duri di Kabupaten Muaro Jambi;
 6. GI Payo Selincah di Kota Jambi;
 7. GI Sabak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 8. GI Sungai Gelam di Kabupaten Muaro Jambi;
 9. GI Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
 10. GI PLTA Merangin di Kabupaten Kerinci;
 11. GI Bendungan Merangin di Kabupaten Merangin ;
 12. GI Pelabuhan Dagang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 13. GI Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 14. GI Seko di Kabupaten Muaro Jambi;
 15. GI Jambi Integrated City di Muaro Jambi;
 16. GIS Kota Jambi di Kota Jambi;
 17. GI Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 18. GITET Bangko di Kabupaten Merangin;
 19. GITET Muaro Bungo di Kabupaten Bungo;
 20. GITET New Aur Duri di Kabupaten Muaro Jambi;
 21. GITET Jambi I di Kabupaten Sarolangun; dan
 22. GITET Jambi II di Kabupaten Sarolangun.
 - b. Jaringan transmisi, terdiri atas:
 1. Jaringan transmisi antar pembangkit, meliputi :
 - a) New Aurduri/Jambi 2 – Peranap;
 - b) New Aurduri – PLTU Jambi 1;
 - c) PLTU Jambi 1 – PLTU Jambi 2;
 - d) PLTU Jambi 1 – Interkoneksi (New Aurduri – PLTU

- Jambi 2);
- e) Bangko - PLTU Jambi 1;
 - f) Muara Sabak – Kuala Tungkal;
 - g) GI/GIS Kota Jambi – Payoselincah;
 - h) Kuala Tungkal – Pelabuhan Dagang;
 - i) PLTA Merangin - Interkoneksi Arah Bangko;
 - j) PLTA Merangin - Interkoneksi Arah Sungai Penuh;
 - k) Seko – Interkoneksi (Aurduri-Payoselincah);
 - l) Seko – Tx Muara Sabak;
 - m) PLTU Jambi 1 – Interkoneksi (Muara Bulian-Sarolangun);
 - n) Bangko – PLTA Bendungan Merangin;
 - o) PLTP Sungai Penuh – Sungai Penuh; dan
 - p) Jambi *Integrated City* – Payoselincah.
2. Jaringan transmisi antar sistem, meliputi :
- a) GI Aurduri - GI Muara Bulian;
 - b) GI Sungai Gelam - GI Aurduri;
 - c) GI Tebo - GI Muara Bulian;
 - d) GITET Bangko- GITET Lubuk Linggau (Sumsel);
 - e) GITET Bangko - GITET Muaro Bungo;
 - f) GITET Bungo - GITET Sungai Rumbai (Sumbar);
 - g) GITET Muaro Bungo - GI Tebo;
 - h) GITET New Aurduri - GITET Sungai Lilin;
 - i) Muara Bulian - Sarolangun;
 - j) New Aurduri - GITET Muara Enim;
 - k) Sarolangun - Muara Rupit;
 - l) SUTT Ulubelu - PLTP 3 dan 4; dan
 - m) Tx Muara Sabak - GI Ujung Jabung.

2.7.1.2 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Berdasarkan hasil perhitungan diperkirakan jumlah kebutuhan sambungan telepon di Provinsi Jambi tahun 2041 adalah 363.117

sambungan, Rencana sistem jaringan telekomunikasi di Provinsi Jambi:

(1) Jaringan tetap meliputi:

a. jaringan mikro digital, melintasi wilayah sebagai berikut:

1. Kota Jambi;
2. Kabupaten Muaro Jambi;
3. Kabupaten Batanghari;
4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
5. Kabupaten Kerinci.

b. jaringan mikro analog, melintasi wilayah sebagai berikut:

1. Kota Jambi;
2. Kota Sungai Penuh;
3. Kabupaten Muaro Jambi;
4. Kabupaten Batanghari;
5. Kabupaten Kerinci; dan
6. Kabupaten Merangin.

c. jaringan serat optik, di seluruh wilayah kabupaten/kota.

(2) Jaringan bergerak dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan telekomunikasi provinsi melalui satelit komunikasi. Jaringan bergerak yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

2.7.1.3 Rencana Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pengelolaan sumberdaya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air, dan pengendalian daya rusak air. adapun visi dan misi pengelolaan sumberdaya air adalah mewujudkan kemanfaatan sumberdaya air bagi kesejahteraan seluruh rakyat dan konservasi sumberdaya air yang adil untuk berbagai kebutuhan masyarakat. salah satu tujuan pengelolaan sumberdaya air adalah mendukung pembangunan regional dan nasional yang berkelanjutan dengan mewujudkan keberlanjutan sumberdaya air. sementara sistem jaringan sumber daya air

merupakan sistem sumber daya air pada setiap wilayah sungai dan cekungan air tanah. arahan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional memperhatikan pola pengelolaan sumber daya air.

Setidaknya, Provinsi Jambi menghadapi beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan sumberdaya air, yaitu:

- a. Degradasi DAS;
- b. Penurunan pelayanan sarana dan prasarana jaringan irigasi;
- c. Peningkatan frekuensi banjir; dan
- d. Penurunan kualitas air permukaan yang juga disebabkan oleh tekanan yang berasal dari kegiatan pertambangan dan perkebunan;

Permasalahan-permasalahan tersebut pada dasarnya tidak dapat lepas dari peran pengendalian pada sektor lainnya. Diperlukan dukungan dari berbagai sektor dan diperlukan langkah yang fokus terhadap masing-masing komponen- komponen sumberdaya air.

2.7.1.4 Sistem Jaringan Irigasi

Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian pemberian dan penggunaannya, sementara Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

Jaringan Irigasi nasional yang ada di wilayah Provinsi Jambi, meliputi:

1. jaringan irigasi Batanghari pada Daerah Irigasi Batanghari di Kabupaten Tebo dan Kabupaten Bungo;
2. jaringan irigasi Sungai Siulak Deras pada Daerah Irigasi Sei Siulak Deras di Kabupaten Kerinci;

3. jaringan irigasi Sungai Batang Sangkir pada Daerah Irigasi Sei Batang Sangkir di Kabupaten Kerinci;
4. jaringan irigasi Batang Asai pada Daerah Irigasi Batang Asai di Kabupaten Sarolangun;
5. jaringan irigasi rawa Parit Pudir pada Daerah Irigasi rawa Parit Pudir di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
6. jaringan irigasi rawa Pematang Lumut pada Daerah Irigasi rawa Pematang Lumut di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sementara daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi, meliputi:

1. jaringan irigasi Batang Uleh berada pada Daerah Irigasi Sei Batang Uleh di Kabupaten Bungo;
2. jaringan irigasi Suban berada pada Daerah Irigasi Sei Suban di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. jaringan irigasi Limun Singkut berada pada Daerah Irigasi Sei Batang Limun Singkut di Kabupaten Sarolangun;
4. jaringan irigasi Sei Tanduk berada pada Daerah Irigasi Sei Tanduk di Kabupaten Kerinci;
5. jaringan irigasi Sungai Ayam berada pada Daerah Irigasi Rawa Sei Ayam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. jaringan irigasi Senyerang berada pada Daerah Irigasi Rawa Senyerang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. jaringan irigasi Teluk Ketapang berada pada Daerah Irigasi Rawa Teluk Ketapang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

8. jaringan irigasi Teluk Nilau berada pada Daerah Irigasi Rawa Teluk Nilau di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
9. jaringan irigasi Koto Kandis berada pada Daerah Irigasi Rawa Koto Kandis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
10. jaringan irigasi Nipah Panjang I-II berada pada Daerah Irigasi Rawa Nipah Panjang I-II di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
11. jaringan irigasi Rantau Rasau berada pada Daerah Irigasi Rawa Rantau Rasau di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
12. jaringan irigasi Simpang Datuk berada pada Daerah Irigasi Rawa Simpang Datuk di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
13. jaringan irigasi Simpang Puding berada pada Daerah Irigasi Rawa Simpang puding di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
14. jaringan Irigasi Sei Raya berada pada Daerah Irigasi Rawa Sungai Raya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

2.7.1.5 Sistem Jaringan Air Baku Untuk Air Bersih

Perlindungan Sumber Air Baku merupakan bagian dari strategi pelaksanaan pengelolaan air berwawasan lingkungan, yang perlu dilakukan secara benar dengan meningkatkan koordinasi berbagai tingkatan instansi, serta dengan meningkatkan pemanfaatan data dan informasi air tanah secara terpadu.

Sumber air baku untuk air bersih secara garis besar dapat digolongkan menjadi empat bagian yaitu air laut, air atmosfer atau air hujan, air permukaan dan air tanah masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda-beda ditinjau dari segi kualitas dan

kuantitasnya. Sebagian besar sumber air baku di Provinsi Jambi adalah air yang bersumber dari sungai dan sebagiannya lagi bersumber dari danau. Penyelenggaraan air baku paling tidak harus memenuhi aspek kualitas dan kuantitas.

Rencana pengembangan Jaringan air baku untuk air bersih di Provinsi Jambi, meliputi:

- a. sungai batang merangin yang terdapat di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Kerinci;
- b. sungai batang tabir yang terdapat di Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Kerinci;
- c. sungai batang tembesi yang terdapat di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun;
- d. sungai batang hari yang terdapat di Kabupaten Tebo, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
- e. sungai pengabuan yang terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pengembangan dan pengolahan sumber mata air meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

2.7.1.6 Rencana Sistem Prasarana Lainnya

2.7.1.6.1 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)

Pemenuhan kebutuhan air minum rumah tangga masyarakat daerah kabupaten/kota yang terus semakin meningkat seiring dengan pertambahan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM). Kewajiban untuk mengembangkan SPAM tersebut pada dasarnya adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota (pemkab/kota). Namun, mengingat masih sangat terdaerah tingkat dua (kabupaten/kota), maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah tingkat satu (provinsi) harus dapat memberikan dukungan dan bantuan teknis pembinaan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan

dari daerah. Penyelenggaraan SPAM secara optimal menyeluruh, berkelanjutan dan dilakukan secara terpadu dengan prasarana dan sarana sanitasi pada setiap tahapan penyelenggaraannya.

Pemenuhan kebutuhan air minum rumah tangga masyarakat daerah kabupaten/kota yang terus semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi penduduk, dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM). Kewajiban untuk mengembangkan SPAM tersebut pada dasarnya adalah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten/kota. Namun, mengingat masih sangat terbatasnya sumber daya manusia yang ada di daerah tingkat dua (kabupaten/kota), maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah tingkat satu (provinsi) harus dapat memberikan dukungan dan bantuan teknis pembinaan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dari daerah tersebut dalam upayanya melaksanakan penyelenggaraan SPAM secara optimal menyeluruh, berkelanjutan dan dilakukan secara terpadu dengan prasarana dan sarana sanitasi pada setiap tahapan penyelenggaraannya.

Sejalan dengan besarnya kebutuhan air bersih dan kondisi wilayah yang ada maka sampai tahun 2041 arahan pengembangan cakupan pelayanan air bersih masih diupayakan untuk dapat memenuhi skenario sebagai berikut:

1. Untuk lima tahun pertama (2022 – 2026) diarahkan tingkat pelayanan air bersih di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi adalah 30 % dari total wilayah permukiman perkotaan yang ada.
2. Untuk lima tahun kedua (2027 – 2031) diarahkan tingkat pelayanan air bersih di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi adalah 35 % dari total wilayah permukiman perkotaan yang ada.
3. Untuk lima tahun ketiga (2032 – 2036) diarahkan tingkat pelayanan air bersih di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi adalah 40% dari total wilayah permukiman perkotaan yang ada.

4. Untuk lima tahun ketiga (2032 – 2036) diarahkan tingkat pelayanan air bersih di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi adalah 45% dari total wilayah permukiman perkotaan yang ada.

Arahan perwujudan target diatas berdasarkan rencana terdahulu adalah berupa pelayanan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan/atau Badan Pengelola Air Minum (BPAM) terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota dengan bentuk Kerjasama antar daerah. Arahan ini dipertajam dengan arahan rencana pengembangan berupa:

- a. Pembangunan dan pengembangan jaringan distribusi IPA yang telah dibangun ataupun telah *Upgrading* oleh pemerintah pusat; dan
- b. Pembangunan dan pengembangan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) terutama untuk kawasan rawan air dan kawasan perdesaan lainnya.

2.7.1.7 Sistem Penyediaan Air Limbah (SPAL)

Pengembangan pengelolaan air limbah domestik di Provinsi Jambi masih mengalami beberapa kendala terhadap masing-masing jenis pengelolaan atau sistem pengelolaan. Oleh karena itu dibutuhkan rencana pentahapan pengembangan pengelolaan sistem air limbah domestik, agar upaya pengembangan terhadap masing-masing jenis ataupun permasalahan yang ada dapat lebih terstruktur. Terdapat tiga kondisi dalam pengelolaan sistem pengelolaan air limbah domestic, yaitu:

1. Kondisi 1 : Pengelolaan dengan Akses Dasar
2. Kondisi 2 : Pengelolaan dengan SPALD Setempat
3. Kondisi 3 : Pengelolaan dengan SPALD Terpusat

Pengelolaan dengan akses dasar adalah pengelolaan dengan praktik dasar sederhana yang layak untuk kawasan kepadatan rendah dan daerah dengan tingkat kerawanan sanitasi rendah. Contoh infrastruktur yang termasuk kedalam kategori akses dasar adalah cubluk dan plengsengan. Akses dasar hanya boleh diterapkan di

kawasan perdesaan dengan kepadatan penduduk yang rendah. Penerapan akses dasar di perkotaan sudah tidak boleh lagi dilakukan dan masuk dalam kategori tidak layak. Pengelolaan dengan akses dasar ditujukan untuk mengakomodir 15% pemenuhan akses dasar pada target universal.

SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Berdasarkan kapasitas pengolahannya SPALD-S terdiri atas:

1. Skala individual diperuntukkan: 1 unit rumah tinggal, Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan bidang resapan, jamban bersama, biofilter dan unit pengolahan air limbah pabrikasi.
2. Skala komunal diperuntukkan : Dua sampai dengan sepuluh unit rumah tinggal dan/atau bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)

SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Berdasarkan cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:

1. Skala perkotaan, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimallayanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
2. Skala permukiman, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (limapuluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
3. Skala kawasan tertentu, untuk kawasan komersial dan kawasan rumahsusun.

Skenario pencapaian target pelayanan sampai tahun 2033 diarahkan adanya pengembangan cakupan pelayanan limbah secara komunal untuk wilayah perkotaan sebagai berikut :

1. Untuk lima tahun ketiga (2022 – 2026) diarahkan tingkat pelayanan limbah di Provinsi Jambi adalah 50 % dari total wilayah permukiman perkotaan yang ada.
2. Untuk lima tahun ketiga (2027 – 2031) diarahkan tingkat pelayanan limbah di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi adalah 60 % dari total wilayah permukiman perkotaan yang ada.
3. Untuk lima tahun ketiga (2032 – 2036) diarahkan tingkat pelayanan limbah di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi adalah 70 % dari total wilayah permukiman perkotaan yang ada.
4. Untuk lima tahun ketiga (2037 – 2041) diarahkan tingkat pelayanan limbah di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jambi adalah 70 % dari total wilayah permukiman perkotaan yang ada.

Skenario ini pada dasarnya belum memperlihatkan arah yang jelas apakah target tersebut terhadap sanitasi dasar atau sanitasi layak. Skenario tersebut dilaksanakan dengan konsep langkah berupa perwujudan sistem pengelolaan air limbah: rehabilitasi dan peningkatan pelayanan instalasi pengolahan limbah yang arahnya dipertajam menjadi:

1. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik Regional Perkotaan Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
2. Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) Domestik Regional Perkotaan Jambi di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.
3. Pengelolaan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) berada di:
 - a. Kabupaten Bungo;
 - b. Kabupaten Muaro Jambi;
 - c. Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 - d. Kabupaten Sarolangun.

2.7.1.8 Sistem Jaringan Persampahan

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (end-of-pipe), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH_4) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta

menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pengelolaan persampahan dilakukan dengan pentahapan. Tahapan pengelolaan persampahan ini dimaksudkan untuk menentukan titik target yang ingin dicapai terhadap masing-masing sektor pengelolaan ataupun permasalahan pengelolaan yang terjadi saat ini. Sama halnya dengan pengembangan sistem air limbah domestik, pentahapan distrukturkan kedalam pengelompokan. yaitu:

1. Kondisi 1 : Penanganan sampah mandiri
2. Kondisi 2 : Penanganan sampah terangkut ke TPA
3. Kondisi 3 : Penanganan sampah terangkut ke TPA dengan upaya pengurangan

Penanganan mandiri adalah sistem penanganan sampah yang dikelola mandiri oleh masyarakat di wilayah perdesaan. Penangan ini hanya dapat diaplikasikan pada wilayah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Klasifikasi wilayah perdesaan
2. Kepadatan penduduk kurang dari 20 jiwa/hektar
3. Lokasi tidak berdekatan atau terjangkau dengan wilayah pelayanan persampahan

Adapun wilayah dengan kriteria selain yang disebutkan diatas, maka akan dilakukan penanganan persampahan dengan pengangkutan ke TPA. Sementara itu mengingat adanya target pengurangan volume sampah sebanyak 20% di wilayah perkotaan, maka akan dilaksanakan upaya pengurangan dengan pendekatan infrastruktur TPS 3R dan/atau TPST 3R. Penerapan upaya pengurangan tersebut diterapkan pada wilayah klasifikasi perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi. Berangkat dari pembagian urusan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dimana pengelolaan persampahan lebih menjadi

kewenangan kabupaten/kota, sementara peran pemerintah provinsi lebih merujuk kepada sistem yang bersifat regional atau lintas kabupaten/kota. Oleh karena itu, pada rencana terdahulu diarahkan pembangunan TPA regional sebanyak 6 unit yang tersebar di wilayah Provinsi Jambi, yaitu :

1. Kabupaten Kerinci; dan
2. Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam perjalanannya, tidak satupun TPA regional yang terealisasi, sementara masing-masing kabupaten/kota kecuali Kabupaten Kerinci sudah melakukan pembangunan TPA Sanitary Landfill. Mempertimbangkan dinamika tersebut serta kondisi geografis dan administratif daerah, maka arahan rencana direvisi menjadi:

1. pembangunan TPA Regional difokuskan pada daerah Kabupaten Kerinci untuk pelayanan Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Muaro Jambi untuk Pelayanan Kawasan Perkotaan Jambi;
2. mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah, pemerintah provinsi wajib mendorong kerjasama antar daerah kabupaten/kota berbatasan termasuk dalam penanganan persampahan yang menimbulkan dampak eksternalitas lintas daerah.

Hirarki dari masing-masing pusat-pusat kegiatan dalam struktur ruang di Provinsi Jambi diwujudkan dalam skala pelayanan berikut ini:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu yang melayani wilayah Provinsi Jambi serta wilayah nasional serta mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan-kawasan internasional. Pusat Kegiatan Nasional ini adalah Kota Jambi, dengan arahan pusat aktivitas sekunder dan tersier. Selanjutnya dilakukan pemantapan keterkaitan PKN dengan kota-kota utama

di Sumatera dan Jawa, bahkan dengan Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur melalui prasarana transportasi darat, laut dan udara; Penyediaan prasarana perkotaan sesuai dengan fungsi perkotaan; Peningkatan peranan swasta dalam pembangunan sarana prasarana perkotaan; dan Pengembangan ekonomi kota yang bertumpu pada industri dan jasa untuk memacu pertumbuhan daerah serta memperluas kesempatan kerja; serta Penataan ruang kota melalui perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota.

2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

PKW merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Pusat perkotaan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Meliputi : Perkotaan Muara Bungo di Kabupaten Bungo, Perkotaan Sarolangun di Kabupaten Sarolangun, Perkotaan Muara Bulian di Kabupaten Batanghari, Perkotaan Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan Perkotaan Muara Sabak Barat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Perkotaan Muara Bungo dan Perkotaan Sarolangun dikembangkan dengan arahan kegiatan-kegiatan yang memiliki skala pelayanan sampai dengan wilayah dalam provinsi yang berbatasan.

Perkotaan Muara Bulian dikembangkan pada kegiatan produksi berbasis sektor primer dan sekunder dengan intensitas yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.

Perkotaan Kuala Tungkal dan Perkotaan Muara Sabak dikembangkan sebagai kawasan strategis Provinsi yang

diarahkan sebagai pintu gerbang utama distribusi barang ekspor Provinsi terhadap wilayah pertumbuhan sub regional ASEAN.

3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan di kecamatan tersebut

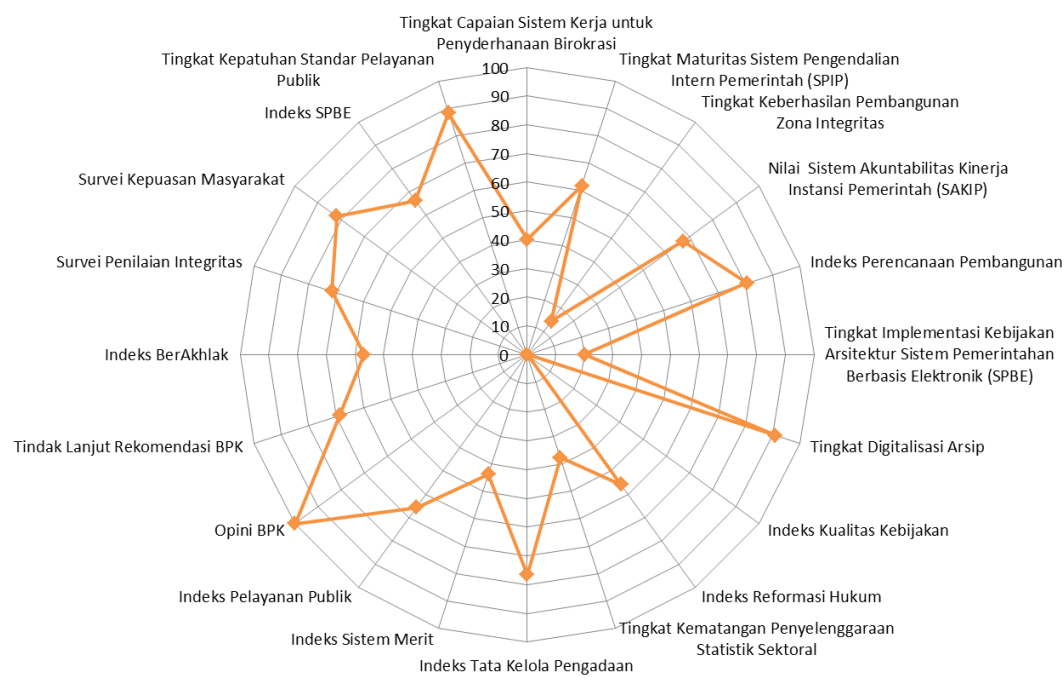
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1 Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan analisis gambaran umum kondisi Provinsi Jambi yang disajikan di Bab 2 dokumen ini, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan yang masih dihadapi oleh Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

3.1.1 Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Optimal



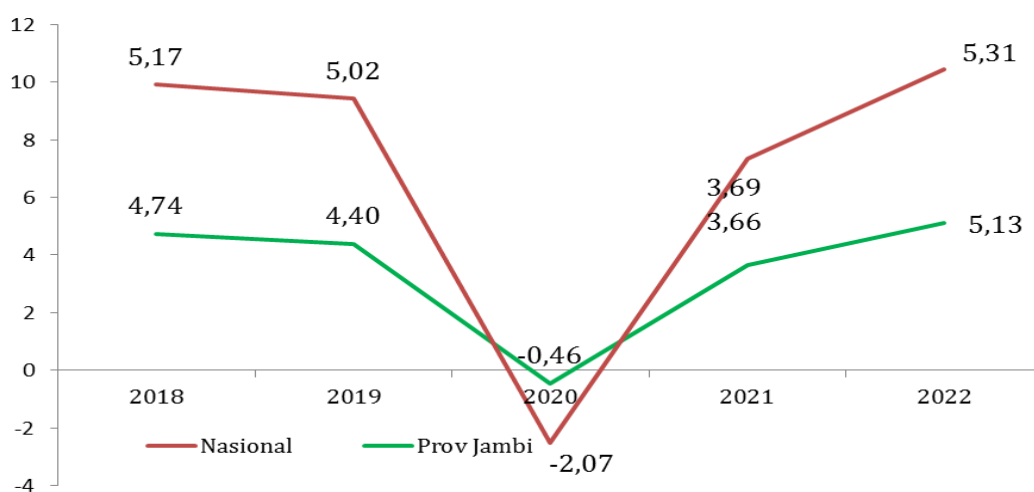
Sumber: Kemenpan RB, 2024
Gambar 3-1 Capaian terakhir (2024) terhadap indikator-indikator yang menggambarkan penerapan Reformasi Birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Merujuk pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan melihat capaian terhadap indikator-indikator yang menggambarkan keberhasilan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Jambi, terlihat bahwa Provinsi Jambi masih belum optimal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dari 20 indikator yang

dihitung capaiannya dalam implementasi Reformasi Birokrasi sebagaimana pada gambar 3-1, separuhnya masih membutuhkan upaya yang keras untuk mengoptimalkan capaian. Adapun indikator yang masih dibawah 60 persen adalah tingkat capaian sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi, tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas, tingkat implementasi kebijakan arsitektur Sistem pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE), Indeks kualitas kebijakan, Indeks reformasi hukum, tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral, indeks sistem merit, dan indeks berahlak. Untuk itu kedepan pencapaian indikator-indikator ini harus menjadi perhatian, disamping terus meningkatkan capaian indikator lainnya.

3.1.2 Terbatasnya Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Perekonomian

Kontraksi ekonomi akibat Pandemi Covid-19 yang dialami oleh Provinsi Jambi pada tahun 2020 telah menunjukkan pemulihan pada tahun 2021 dan 2022. Namun pertumbuhan ekonomi pasca Covid-19 tersebut masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional. Jika dilihat lebih dalam, permasalahan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi berkaitan dengan terbatasnya infrastruktur pelayanan dasar dan perekonomian. Infrastruktur dapat diartikan sebagai sistem struktur fisik dan sosial yang diperlukan untuk jaminan sosial-ekonomi sektor publik dan sektor privat sebagai layanan dan fasilitas yang diperlukan agar aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat berfungsi dengan baik. Infrastruktur tersebut dapat dibagi kedalam infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur perekonomian. Provinsi Jambi saat ini masih menghadapi masalah keterbatasan infrastruktur pelayanan dasar. Pada bidang pendidikan, belum tercapainya target akreditasi minimal B oleh penyelenggara pendidikan membuktikan masih diperlukannya peningkatan infrastruktur pelayanan dasar ini bagi masyarakat. Pada bidang kesehatan, masih dibutuhkan penambahan dokter, pemerataan penempatan tenaga medis lainnya (perawat dan bidan) serta penambahan puskesmas dan puskesmas pembantu. Pada bidang permukiman dan perumahan, akses ke air minum dan sanitasi yang layak juga masih terbatas, dan kondisi ini bisa berdampak pada masalah kesehatan masyarakat.



Sumber: Data diolah. BPS, 2023

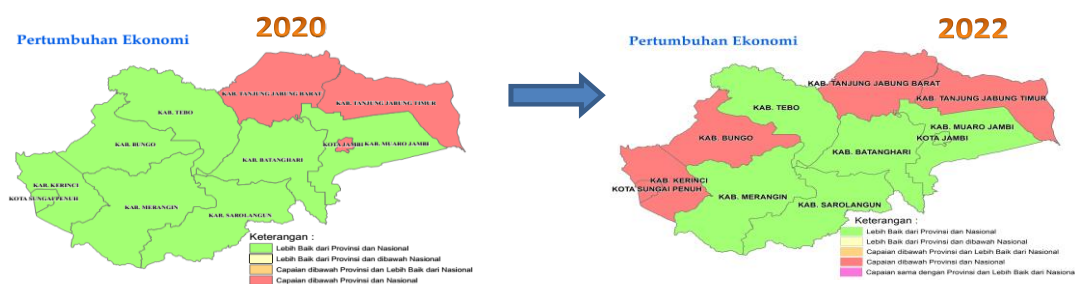
Gambar 3-2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi Tahun 2018-2022

Permasalahan infrastruktur dasar lainnya yang masih terbatas adalah penataan ruang berdasarkan daya dukung lingkungan hidup dan penegakan aturan pemanfaatan ruang. Khusus terkait pelayanan dasar, dibutuhkan tata ruang kawasan permukiman penduduk dalam rangka mitigasi bencana, khususnya bencana banjir dan longsor terkait karakter topografi dan hidrologi Provinsi Jambi. Ketersediaan infrastruktur pengelolaan sumber daya air sebagai pendorong bergerakaknya sektor pertanian pangan dan pengendalian banjir juga masih terbatas, disamping peningkatan konektivitas antar daerah sebagai pembangkit aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat. Penatagunaan lahan untuk kepastian hak pemilikan dan/atau pengelolaan lahan masih menjadi faktor yang mendorong terjadinya masalah ketentraman dan ketertiban di masyarakat. Konflik perebutan hak atas pengelolaan sumber daya lahan, yang merupakan basis perekonomian wilayah, menjadi sumber konflik paling tinggi di wilayah Provinsi Jambi hingga kini.

Terkait dengan infrastruktur perekonomian, keterbatasan infrastruktur perhubungan yang mendukung lancarnya aktivitas rantai pasok industri serta keterbatasan industri manufaktur berbasis bahan baku komoditas yang dihasilkan dari pengelolaan sumber daya lahan, khususnya perkebunan, juga masih merupakan masalah bagi pembangunan Provinsi Jambi. Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informasi juga menjadi masalah terkait dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan fungsi infrastruktur tersebut di saat pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan manusia di dalam maupun antar wilayah.

Infrastruktur pembiayaan usaha, khususnya bagi masyarakat pelaku usaha skala mikro dan kecil juga masih menjadi permasalahan didalam memacu laju pembangunan di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini terkait dengan masalah keterbatasan infrastruktur ekonomi yang berbasis sistem sosial masyarakat, dalam bentuk kelembagaan koperasi, baik dari sisi kualitas maupun jangkauan dan cakupan pelayanannya.

3.1.3 Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia



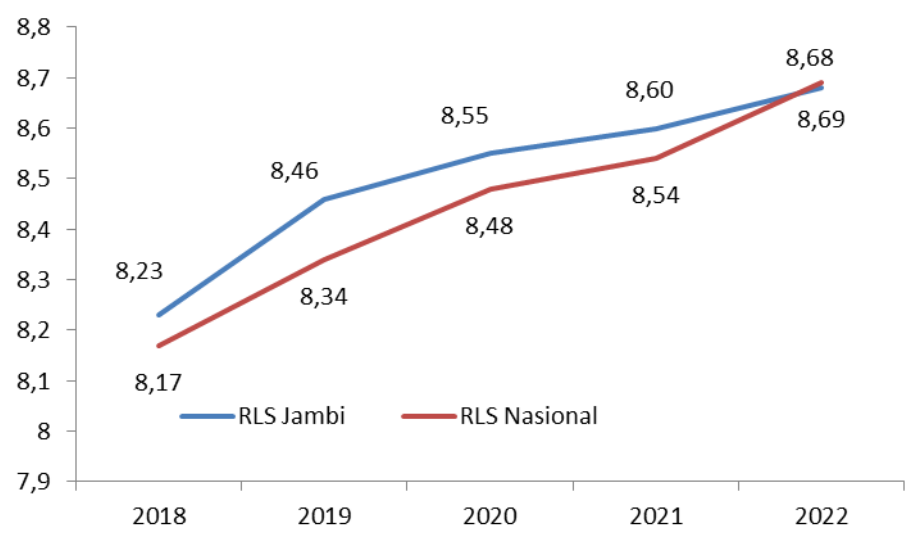
Sumber: Data diolah. BPS, 2023
Gambar 3-3 Kesenjangan IPM Nasional, Provinsi Jambi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi Tahun 2020 dan 2022 dengan metode baru

Meskipun nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat selama periode pembangunan lima tahun terakhir, namun capaian tersebut masih dibawah nasional dan Provinsi Jambi masih menghadapi masalah rendahnya kualitas SDM. Selain itu capaian IPM juga belum merata antar kabupaten/kota se-Provinsi Jambi sehingga kesenjangan masih cukup tinggi.

Pada aspek pendidikan, indikator rata-rata lama sekolah (RLS) menunjukkan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua pendidikan formal yang pernah atau sedang dijalani. RLS hingga tahun 2022 di Provinsi Jambi adalah 8,68 tahun, ini berarti rata-rata penduduk Provinsi Jambi hanya mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau kelas 2 SMP. Capaian indikator ini lebih baik dari nasional hingga tahun 2021, namun pada tahun 2022 capaian nasional telah melebihi Provinsi Jambi. Hal ini berarti perbaikan pada indikator ini di Provinsi Jambi lebih lambat daripada rata-rata nasional.

Kondisi ini berimbas pada aspek ketenagakerjaan, yaitu menyebabkan rendahnya akses masyarakat Provinsi Jambi ke lapangan usaha formal yang memiliki tingkat pendapatan yang relatif tinggi

dibandingkan lapangan usaha informal. Hingga kini, masyarakat Provinsi Jambi masih dominan bekerja sebagai pekerja informal di sektor pertanian dan jasa, dan bahkan terjadi pengangguran semu (false unemployment) karena berstatus sebagai tenaga kerja tidak dibayar (unpaid labor) pada usaha yang dimiliki oleh keluarga atau kerabat di lapangan usaha pertanian dan jasa skala mikro-kecil.



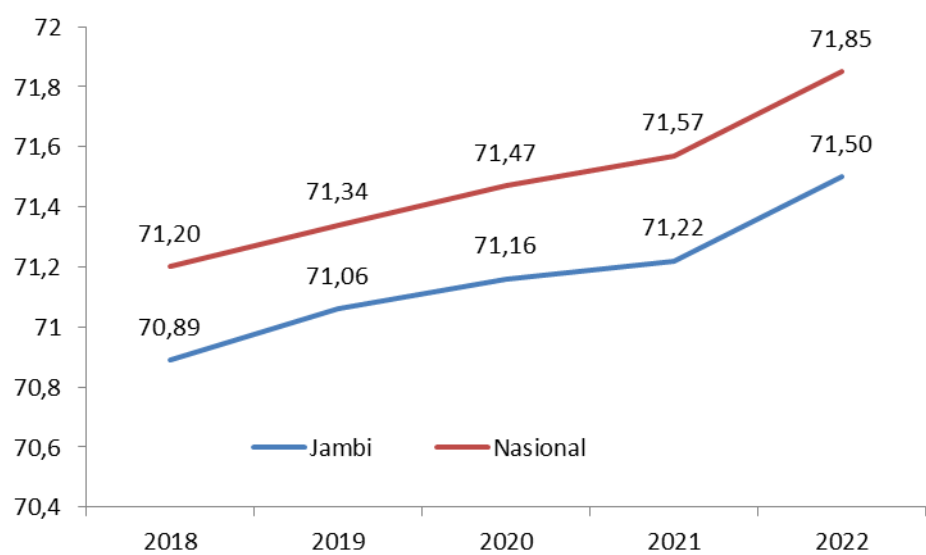
Sumber : BPS, 2023

Gambar 3-4 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jambi dibanding nasional tahun 2018-2022

Hal ini juga berhubungan dengan isu revitalisasi SMK, dimana Provinsi Jambi masih kekurangan guru produktif dan keterbatasan peralatan praktek serta guru yang memahami penggunaan peralatan praktek. Selain itu jurusan dan peluang kerja yang belum link match serta pembelajaran yang lebih banyak teori dibandingkan praktek menambah permasalahan keterampilan pada lulusannya, sehingga kurang terserap di dunia kerja.

Rendahnya tingkat pendidikan yang berakibat pada rendahnya akses ke lapangan usaha formal dan berpendapatan relatif tinggi, pada akhirnya menjadi salah satu faktor utama yang berpengaruh terhadap rendahnya keberdayaan masyarakat untuk mengakses aspek pendukung kesejahteraan lainnya dan semakin menurunkan tingkat kualitas SDM masyarakat Provinsi Jambi itu sendiri, salah satunya adalah akses kepada kesehatan. Pada usia harapan hidup, dalam 5 tahun terakhir, capaian Provinsi Jambi terlihat meningkat, namun masih dibawah nasional. Usia harapan hidup penduduk Provinsi Jambi dari tahun 2018-2022 terus menunjukkan peningkatan dari 70,89 tahun pada 2018 meningkat menjadi

71,50 tahun pada 2022. Hal tersebut mengindikasikan bahwa secara rata-rata anak yang dilahirkan dapat bertahan hidup hingga usia 71 – 72 tahun. Perkembangan Usia Harapan Hidup Provinsi Jambi dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.



Sumber : BPS, Tahun 2021
Gambar 3-5 Usia Harapan Hidup di Provinsi Jambi dibanding Nasional Tahun 2018-2022

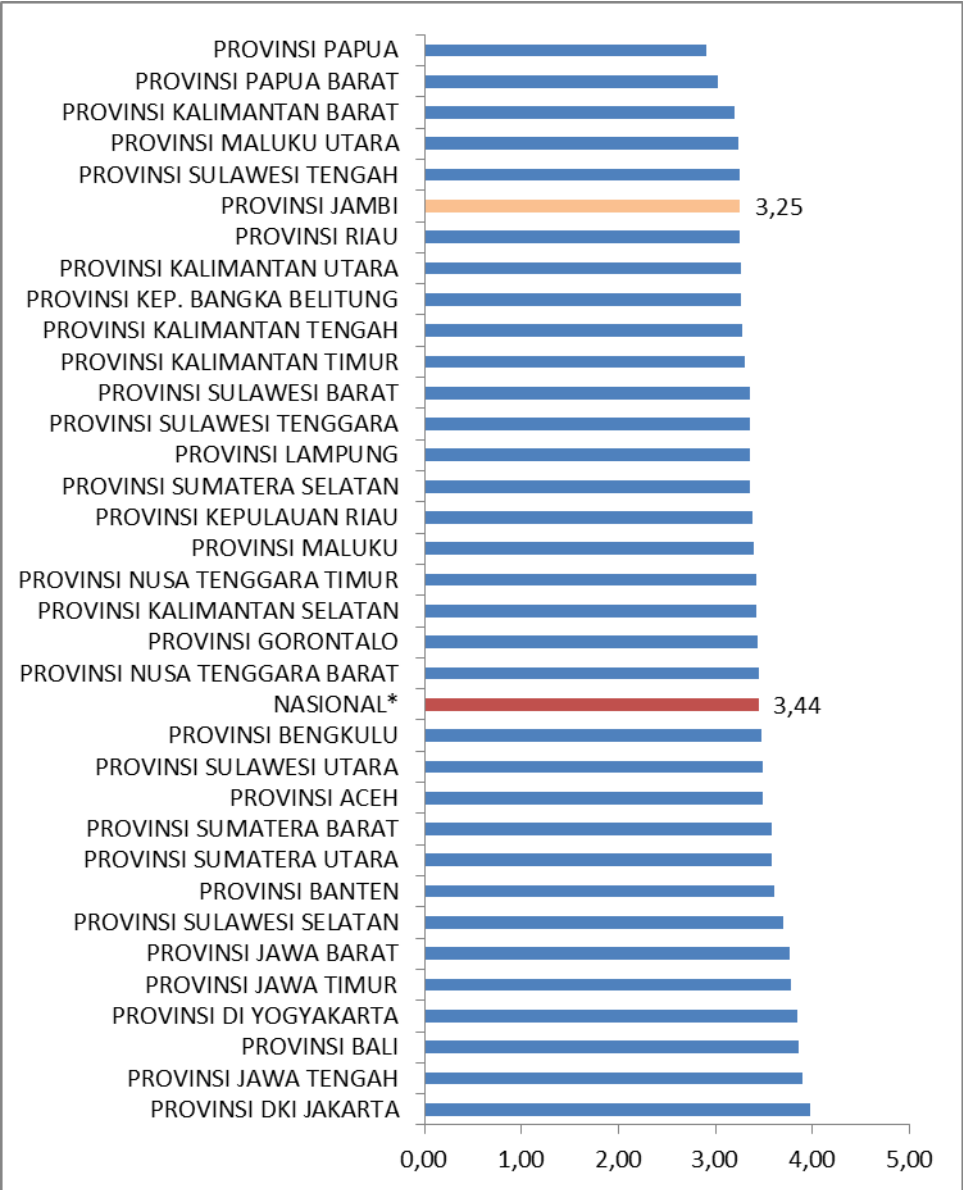
Hingga kini, Provinsi Jambi masih menghadapi masalah kesehatan bagi masyarakatnya. Masih belum tercapainya target angka kematian ibu, bayi dan balita yang disebabkan rendahnya akses ke pelayanan kesehatan serta masih tingginya persentase merokok pada masyarakat umur lebih dari 15 tahun merupakan masalah-masalah kesehatan yang perlu diatasi dalam rangka peningkatan kualitas SDM.

Di sisi ketenagakerjaan, tingkat pengangguran di Provinsi Jambi didominasi oleh penganggur dengan pendidikan SMK, meskipun setiap tahun semakin menurun, sementara yang paling sedikit adalah penganggur dengan pendidikan SD kebawah. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja Provinsi Jambi baru mampu mengisi lapangan pekerjaan yang tidak membutuhkan kemampuan khusus.

3.1.4 Rendahnya Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merefleksikan secara komprehensif tentang kondisi produktivitas daerah. Hal tersebut terlihat dari komponen IDSD yang terdiri dari komponen lingkungan pendukung (pilar institusi, infrastruktur, adopsi TIK dan stabilitas ekonomi makro), komponen pasar (pilar pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar),

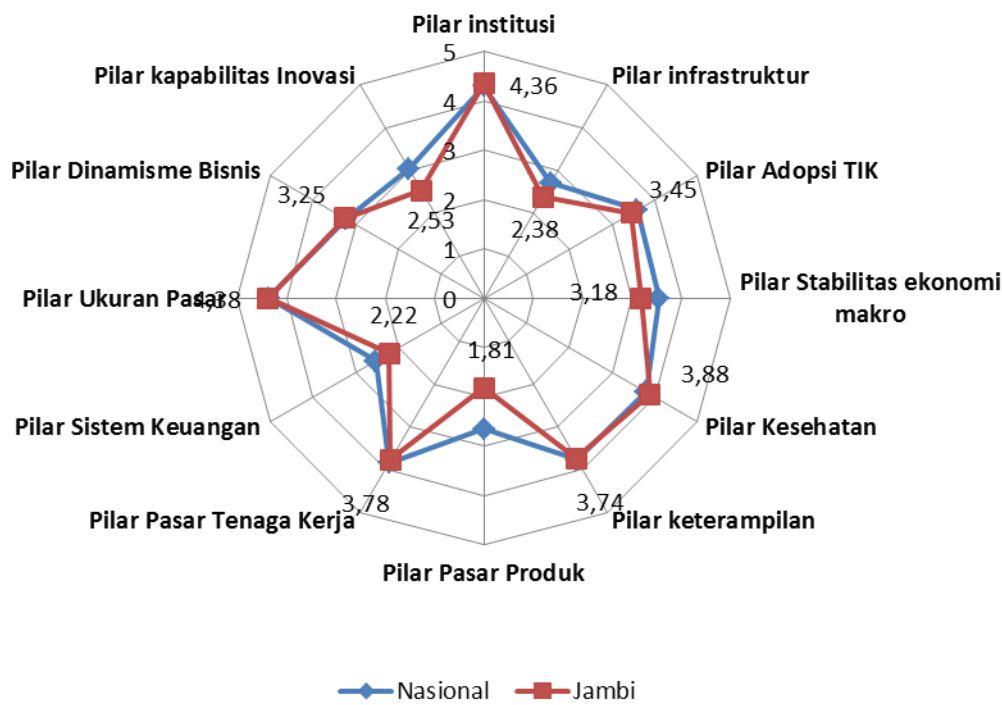
komponen sumber daya manusia (pilar kesehatan dan keterampilan), serta komponen ekosistem inovasi (pilar dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi).



Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2023, BRIN, 2024
Gambar 3-6 Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jambi dibanding Provinsi lain dan nasional

Capaian IDSD Provinsi Jambi menempati posisi ke 31 dari 34 Provinsi di Indonesia dengan nilai 2,99 pada tahun 2022 dan sedikit mengalami perbaikan pada tahun 2023 menjadi posisi 29 dari 34 Provinsi di Indonesia dengan nilai 3,25. Indeks yang cukup rendah berada pada pilar pasar produk, pilar sistem keuangan, pilar kapabilitas inovasi, pilar kestabilan ekonomi makro dan pilar infrastruktur. Pasar produk unggulan Provinsi Jambi yang masih terbatas membuat nilai tambah yang diterima belum memadai untuk meningkatkan capaian indeks pada pilar ukuran pasar. Pasar yang masih didominasi oleh kelompok bermodal besar

menjadi penyebab rendahnya capaian pilar pasar produk di Provinsi Jambi. Pemberdayaan UMKM yang terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi belum optimal meningkatkan kemampuan UMKM untuk bersaing dengan pengusaha bermodal besar.



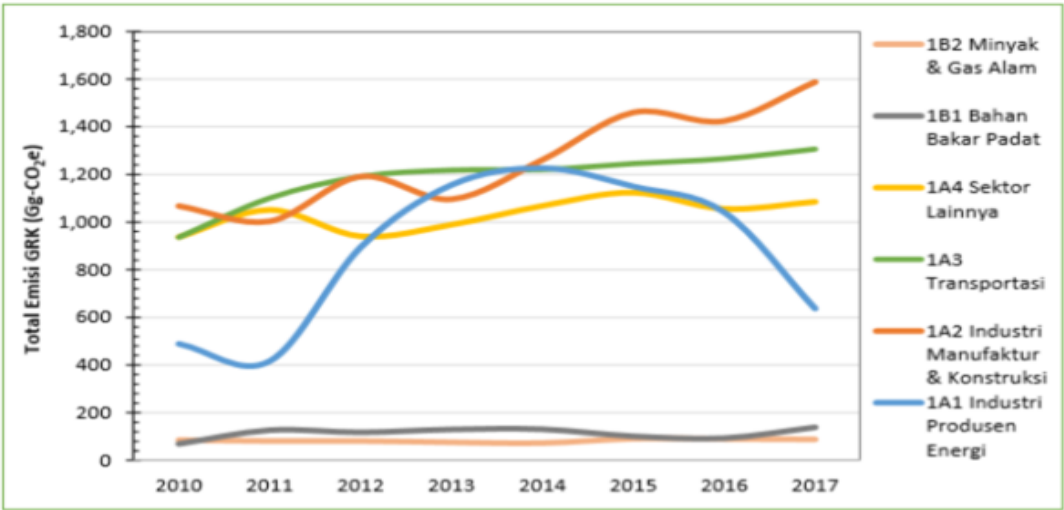
Sumber: Indeks Daya Saing Daerah 2023, BRIN, 2024
 Gambar 3-7 Capaian masing – masing pilar pada Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jambi

Kapasitas fiskal daerah yang masuk dalam kategori rendah dan inflasi yang sulit dikendalikan sebagai dampak inflasi global akhir – akhir ini menjadi penyebab pilar kestabilan ekonomi makro Provinsi Jambi menjadi rendah.Walaupun Pemerintah Daerah bersama TPID telah melaksanakan solusi – solusi jangka pendek dalam hal pengendalian inflasi ini, perlu dipersiapkan solusi jangka panjang yang lebih baik sehingga situasi inflasi global yang tidak menentu tidak terlalu berpengaruh bagi perekonomian Provinsi Jambi. Salah satunya berkaitan dengan infrastruktur konektivitas. Pada pilar infrastruktur, permasalahan konektivitas jalan terkait kondisinya saat ini menjadi penyebab capaian indeks pilar infrastruktur Provinsi Jambi menjadi rendah, sekaligus secara tidak langsung berdampak terhadap pilar kestabilan ekonomi makro.

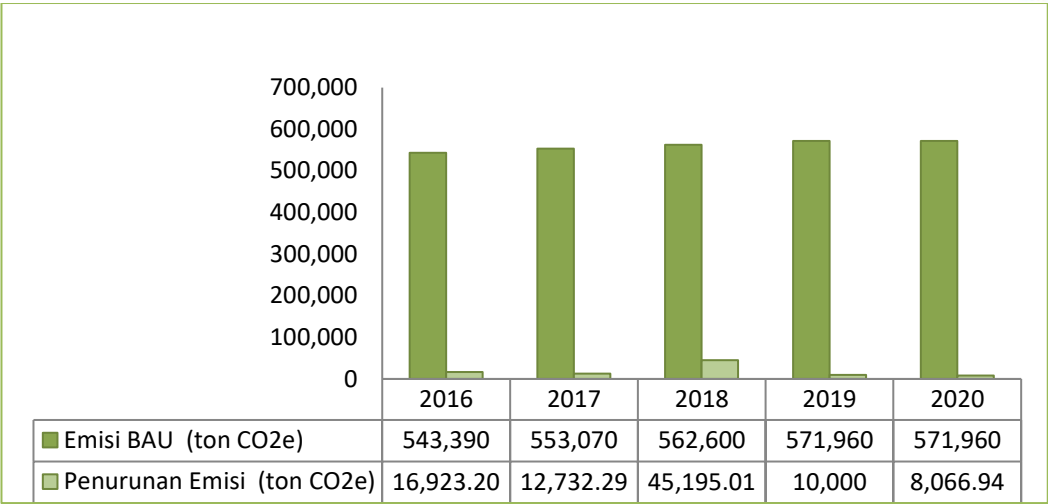
3.1.5 Degradasi Lingkungan Hidup

Provinsi Jambi juga masih menghadapi permasalahan di bidang lingkungan hidup. Kondisi ini nampak dari indeks kualitas lingkungan hidup wilayah Provinsi Jambi saat ini yang menunjukkan indeks kualitas air masih relatif rendah. Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup ini mencerminkan akumulasi dari belum baiknya pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Jambi. Dalam hal ini, badan air menjadi media tampung berbagai bahan pencemar yang bersumber dari aktivitas perekonomian yang tidak ramah lingkungan, seperti tingginya tingkat sedimentasi akibat dibukanya lahan-lahan di areal penangkapan air di sekitar badan air (*water catchment area*) serta belum adanya pengolahan limbah cair sawit sehingga langsung masuk ke badan air dan akibatnya mencemari perairan.

Masih terbatasnya infrastruktur perekonomian yaitu jalan pengangkutan/kargo komoditas serta pelabuhan untuk distribusi hasil produksi dari wilayah Provinsi Jambi juga berakibat pada terjadinya peningkatan emisi gas rumah kaca dan pemborosan bahan bakar fosil, baik langsung maupun tidak langsung, disamping menyebabkan rendahnya daya saing Provinsi Jambi dibandingkan provinsi lainnya. Berdasarkan KLHS sektor energi Provinsi Jambi, kontributor emisi selama 2011-2017 dari pemanfaatan energi didominasi oleh kegiatan-kegiatan pada bidang industri (33%), bidang transportasi (26%) dan bidang energi (penyediaan energi dan pemanfaatan energi) sebesar 13%.



Sumber: KLHS Energi RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026, UNDP, 2021
Gambar 3-8 Kontributor emisi sektor energi di Provinsi Jambi selama tahun 2011 – 2017

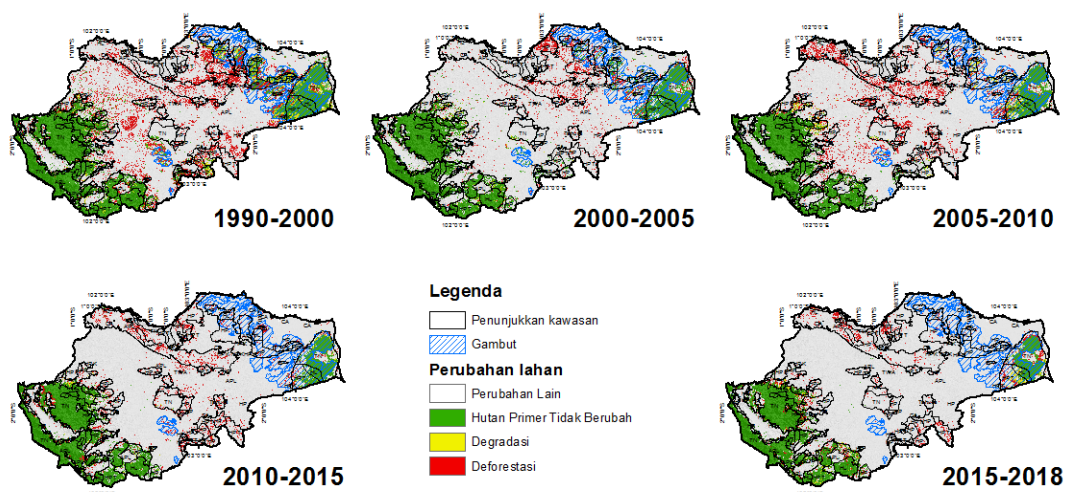


Sumber: Dinas LH Provinsi Jambi, 2021
Gambar 3-9 Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah di Provinsi Jambi

Sementara emisi gas rumah kaca pada sektor limbah tahun 2020 sebesar 8.066,94 ton CO2e, (1,41%). Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan penurunan emisi gas rumah kaca tahun 2018 sebesar 10.000 ton CO2e (1,75%). Persentase penurunan emisi GRK tahun 2020 hanya 80,57% dibandingkan tahun 2019. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat emisi gas rumah kaca ini antara lain timbunan sampah domestik/industri, serta masih minimnya perusahaan yang menerapkan sistem manajemen lingkungan.

Menurunnya kualitas wilayah pesisir, khususnya pada areal ekosistem mangrove juga merupakan permasalahan lingkungan lainnya. Menurunnya luasan, kepadatan vegetasi serta keanekaragaman hayati didalam ekosistem alam tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap rantai makanan dan keseimbangan ekosistem alam yang sesungguhnya menopang keberlanjutan sumber penghidupan berbagai kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, salah satunya adalah kelompok masyarakat nelayan yang berdasarkan tingkat kesejahteraannya sebagian masih termasuk ke dalam kelompok masyarakat miskin.

Masih adaya kejadian kebakaran hutan dan lahan, khususnya di ekosistem gambut juga merupakan permasalahan lingkungan hidup lainnya di wilayah Provinsi Jambi. Selain berdampak terhadap memburuknya kualitas udara, akibat dari pasca kebakaran hutan dan lahan tersebut adalah kesuburan lahan menjadi marginal akibat tergerusnya unsur-unsur hara yang terkandung di tanah serta meningkatnya emisi gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global.



Gambar 3-10 Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi tahun 1990 – 2018 (GGP, 2019)

Pengelolaan kawasan lindung dan budidaya yang masih belum seimbang, dimana masih banyak area kawasan lindung yang mengalami berbagai intervensi kegiatan. Hal tersebut mengakibatkan adanya penurunan kualitas jasa lingkungan yang dapat diberikan, sementara pada area kawasan budidaya masih banyak sekali area yang belum dioptimalkan fungsinya untuk berbagai penggunaan.

3.2 Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang masih dihadapi dan hasil telaah terhadap berbagai dokumen perencanaan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jambi pada periode tahun 2025-2045 melalui berbagai pertimbangan diantaranya memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung, memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah dan kemudahan untuk dikelola, serta memiliki konsekuensi jauh kedepan yang berpotensi menimbulkan kerusakan an biaya yang makin besar. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat yang belum baik dan merata

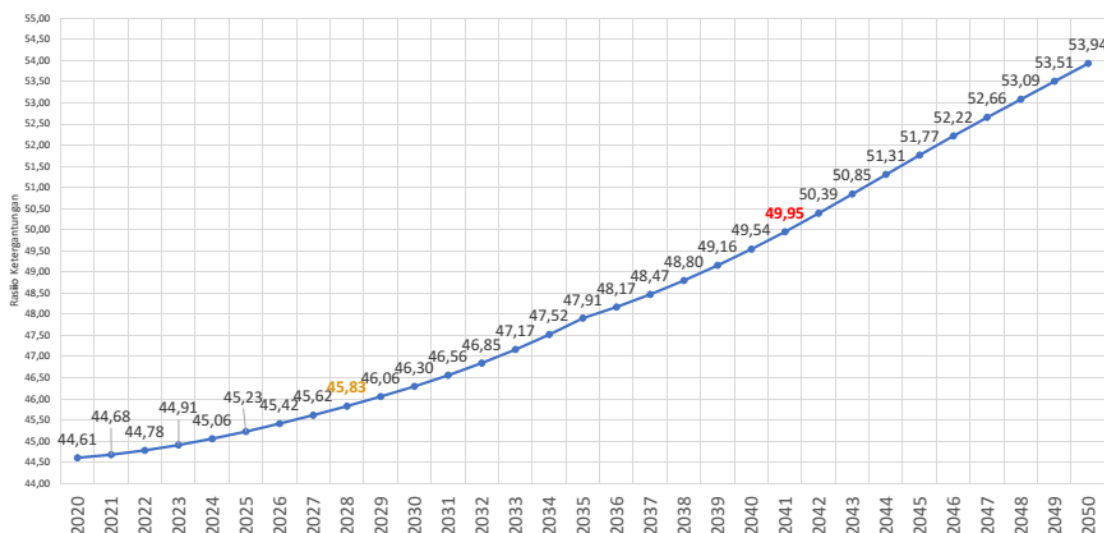
Rendahnya kualitas SDM hingga kini menjadi penyebab pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan sebagian penduduk di wilayah Provinsi Jambi. Pada bidang pendidikan, angka rata-rata lama sekolah yang rendah mengindikasikan tidak mampunya sebagian masyarakat untuk mengakses pendidikan, dan pada akhirnya memilih untuk menjadi tenaga kerja pada sektor informal dan/atau usaha-usaha yang dimiliki keluarga atau kerabat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, termasuk memperbanyak dan memperkuat institusi-institusi pendidikan menengah kejuruan yang menciptakan manusia berdaya saing untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, yang saat ini mulai bergeser dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian seperti sektor perdagangan dan jasa.

Penyelenggaraan pendidikan yang dimaksud difokuskan melalui inovasi kebijakan dan program pemerintah di bidang pendidikan, sehingga terjadi pembangunan yang inklusif di bidang pendidikan, yaitu berupa peningkatan kerjasama dengan para pelaku usaha maupun stakeholder lainnya, sehingga lulusannya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan dapat bekerja pada sektor-sektor formal yang mendukung terwujudnya industri hilir berbasis penguatan ekonomi kerakyatan.

Peningkatan pelayanan kesehatan terutama difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dapat menekan angka kematian ibu, stunting, kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk merokok bagi kesehatan dan vaksinasi COVID-19 sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi. Fasilitas-fasilitas kesehatan berupa puskesmas dan puskesmas pembantu beserta tenaga medisnya difokuskan pada hal-hal tersebut.

2. Bonus demografi dan Aging Population yang belum terkelola dengan baik

PERKEMBANGAN RASIO KETERGANTUNGAN PROVINSI JAMBI 2020-2050

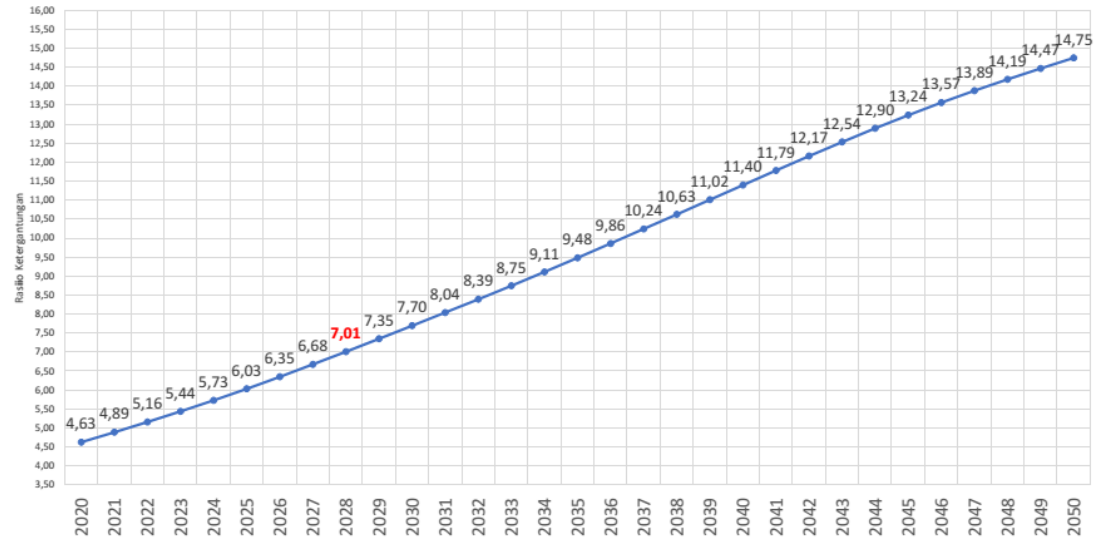


Gambar 3-11 Perkembangan rasio ketergantungan Provinsi Jambi

Saat ini Provinsi Jambi berada pada fase bonus demografi, dimana jumlah penduduk berusia produktif lebih mendominasi keseluruhan penduduk. Namun demikian, jika dilihat dari sisi ketenagakerjaan, belum optimalnya penurunan tingkat pengangguran dan serapan tenaga kerja yang didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah, maka terlihat bahwa bonus demografi tersebut belum termanfaatkan/terkelola dengan baik.

Sementara itu, proyeksi penduduk Provinsi Jambi memperlihatkan bahwa mulai tahun 2028 Provinsi Jambi mulai memasuki aging population atau penuaan, dimana proporsi penduduk lansia berada di atas 7 persen. Bonus demografi yang tidak terkelola dengan baik dengan jumlah lansia yang meningkat jika tidak segera ditangani akan menjadi beban Provinsi Jambi kedepan.

PERKEMBANGAN PROPORSI PENDUDUK LANSIA USIA 65 TAHUN KEATAS
PROVINSI JAMBI 2020-2050



Gambar 3-12 perkembangan proporsi penduduk lansia Provinsi Jambi

3. Degradasi lingkungan dan adaptasi perubahan iklim yang belum optimal

Kebutuhan kejelasan alokasi lahan produktif untuk komoditas strategi yang lebih baik melalui pengelolaan satu data – satu peta. Perencanaan tata guna lahan tampak belum cukup mengatur alokasi lahan produktif. Rencana induk perkebunan hanya dimiliki komoditas tertentu sementara masih banyak komoditas strategis lainnya. Perluasan perkebunan yang berlebihan perlu dikendalikan sehingga tidak merusak dan mengganggu lahan yang seharusnya dilindungi. Pengaturan yang minim pada lahan mengakibatkan konflik pada areal hutan lindung gambut. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum telah membuka peluang pelanggaran terhadap penguasaan lahan. Persoalan pemetaan ini juga terjadi pada lahan pertanian yang belum dilengkapi dengan peta kesesuaian lahan pertanian. Budidaya padi merupakan sektor yang masih perlu untuk didorong mengingat produktivitasnya masih dibawah rata-rata nasional. Perluasan lahan pertanian, meskipun sudah didorong oleh pemerintah daerah melalui penegasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), masih membutuhkan perbaikan dalam perencanaan dan implementasi. Hal ini perlu didukung oleh pengelolaan data yang lebih baik mulai dari pengumpulan data, data cleaning, penyebarluasan data dan pemanfaatan data untuk perencanaan yang lebih baik.

Provinsi Jambi menjadi lokasi berbagai ekosistem penting secara internasional, nasional, dan lokal, yang menjadikannya bagian dari isu-isu strategis seperti perubahan iklim terkait upaya mitigasi dan

adaptasi, kebakaran hutan dan lahan serta isu-isu berkaitan seperti kualitas udara/asap lintas negara Asia Tenggara, kenakeragaman hayati terrestrial dan below water, dan kualitas perairan yang penting terkait mikroplastik dan sampah-sampah di lautan. Terkait perubahan iklim Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang memiliki peranan dalam upaya mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK)

4. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) belum optimal

Reformasi Birokrasi diperlukan untuk menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan Sumber Daya Manusia yang kompeten. Dengan demikian maka akan tercipta pelayanan publik yang memuaskan dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Terkait dengan permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh Provinsi Jambi, maka upaya reformasi birokrasi di Provinsi Jambi difokuskan untuk pencapaian beberapa hal sebagai berikut:

- a. Peningkatan pelayanan pendidikan
- b. Peningkatan pelayanan kesehatan
- c. Penanganan permukiman kumuh dan pengembangan kawasan permukiman tangguh bencana,
- d. Penataan ruang yang berdasarkan potensi lokal dan daya dukung lingkungan hidup
- e. Penatagunaan lahan dan penertiban kawasan dan lahan terlantar
- f. Penguatan iklim investasi infrastruktur yang mendukung penguatan sistem ekonomi kerakyatan dan pertumbuhan ekonomi hijau
- g. Penertiban aktivitas yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- h. Peningkatan kemandirian keuangan daerah.
- i. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara
- j. Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1 VISI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Salah satu kaidah penuntun pembangunan jangka panjang Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2045 adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045, disamping Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043. Visi abadi Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Visi abadi tersebut diterjemahkan dalam RPJPN 2025-2045 dengan sebutan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Selanjutnya, dengan mengelaborasi Visi Indonesia Emas 2045 tersebut dengan situasi dan kondisi Provinsi Jambi pada masa lalu dan saat ini serta tantangan yang dihadapi dimasa mendatang sebagaimana termuat dalam isu - isu strategis, serta memperhitungkan modal dasar yang dimiliki dan amanat pembangunan daerah yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Visi daerah untuk Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 adalah :

“TERWUJUDNYA JAMBI MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”

Maju :

Jambi yang maju pada Tahun 2045 dilihat dari kondisi masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi yang dinamis, produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing, didukung oleh keterampilan, keunggulan dan ketangguhan

Sumber Daya Manusia, infrastruktur maju dan modern, tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif dan responsif serta berorientasi pada pencapaian hasil kinerja yang lebih baik. Mobilitas penduduk yang meningkat dipermudah oleh ketersediaan infrastruktur hijau dengan konektivitas terpadu, nyaman, aman dan terjangkau.

Sejahtera :

Jambi yang sejahtera pada Tahun 2045 dapat dilihat dari pembangunan yang merata sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses sumber daya dan layanan publik dengan baik, yang berdampak pada ketimpangan antar wilayah dan pendapatan yang semakin mengecil. Ketenteraman dan ketertiban umum dalam masyarakat Provinsi Jambi terus terpelihara baik, sehingga masyarakat dapat menjalankan berbagai aktivitas dan kegiatan produktif, meningkatnya iklim investasi, terwujudnya lingkungan ramah wisata, tersedianya tempat tinggal yang berkualitas dan terjangkau serta tersedianya lapangan dan kesempatan kerja. Kondisi penuh harmoni yang didukung oleh ketahanan terhadap pangan, energi dan air, serta bencana, tentu saja memberikan kontribusi positif pada penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi.

Berkelanjutan

Provinsi Jambi terus berkomitmen untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mengedepankan pertumbuhan hijau dan biru. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diupayakan seimbang dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta tata kelola yang baik.

Terwujudnya **Jambi Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan**, tercermin dalam lima sasaran visi yaitu peningkatan pendapatan perkapita, kemiskinan menuju nol, menurunnya ketimpangan, meningkatnya daya saing daerah, serta menurunnya intensitas Emisi GRK menuju *Nett Zero Emission*.

Sasaran VISI	Indikator	Kondisi Awal (2022)	Baseline (2025)	Sasaran (2045)
1. Peningkatan Pendapatan Per Kapita	1. PDRB Per kapita (Rp. Juta) 2. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) 3. Kontribusi PDRB sektor industri (%)	76,09 NA 9,77	86,18 – 86,65 15,26 9,98 – 10,12	555,68 – 652,01 42,44 13,22 – 13,35
2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	1. Tingkat kemiskinan (%) 2. Rasio Gini (Indeks) 3. Kontribusi PDRB Provinsi (%) 4. Pertumbuhan Ekonomi	7,7 0,335 1,41 5,12	6,3 – 6,8 0,337 – 0,341 1,42 4,81 – 5,11	0,07 – 0,57 0,275 – 0,326 1,70 5,55 – 7,0
3. Peningkatan Daya Saing Daerah	Peringkat daya saing daerah secara nasional	31	30	15
4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia	NA	0,55*	0,71*
5. Penurunan Emisi GRK menuju Net Zero Emmission	1. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) 2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	NA 70,32	78,5 73,71	97,88 80,88

Gambar 4-1 Sasaran Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045

Tabel 4-1 Target Indikator Sasaran Visi Per Periode Jangka Menengah

Indikator Sasaran Visi	Baseline (2025)	Target Akhir Periode RPJMD			
		I	II	III	IV
PDRB Perkapita (Rp.Juta)	86,18-86,65	286,19 - 286,50	335,22 - 337, 12	486,50 - 500,34	555,68 - 652,01
Indeks ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	15,26	21,85	29,11	37,65	42,44
Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	9,98 - 10,12	10,71	11,56	12,41	13,22 - 13,35
Tingkat Kemiskinan (%)	6,3 - 6,8	4,52 -5,48	3,31 - 4,49	1,5 - 3,2	0,07-0,57
Rasio Gini (Indeks)	0,337 - 0,341	0,332 - 0,339	0,32 - 0,335	0,315 - 0,33	0,275 - 0,326
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,42	1,46	1,51	1,6	1,7
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,81 - 5,11	4,95 - 5,55	5,01 - 5,8	5,23 - 6,12	5,55 - 7,0
Peringkat Daya Saing Daerah secara nasional	30	27	23	19	15
Indeks Modal Manusia	0,55	0,58	0,61	0,66	0,71
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	78,5	86,55	92,11	96,07	97,88
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	73,71	74,56	76,22	78,04	80,88

Sumber: SE Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam RPJPD tahun 2025-2045

Sasaran pertama, PDRB Per kapita Provinsi Jambi berdasarkan harga berlaku ditargetkan sebesar Rp555,68 juta – Rp652,01 juta. Hal ini didorong oleh peningkatan kontribusi PDRB sektor industri sebesar 13,22 - 13,35 persen, dimana industri yang didorong adalah industri hijau yang berbasis inovasi dan inklusif serta berkelanjutan. Selain itu, melalui peningkatan pengelolaan potensi sumberdaya kelautan Provinsi Jambi yang lebih baik dan berkelanjutan, diharapkan terjadi peningkatan signifikan Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) Provinsi Jambi menjadi 42,44. Pertumbuhan sektor industri dan sumberdaya kelautan ini akan menciptakan lapangan pekerjaan yang layak (decent job), sehingga dapat meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah.

Sasaran kedua, sejalan dengan peningkatan ekonomi yang ditargetkan tumbuh sebesar 5,55 – 7,0 persen di tahun 2045 diharapkan perekonomian Provinsi Jambi dapat berkontribusi sebesar 1,7 persen terhadap PDB. Peningkatan ekonomi tersebut juga akan berimplikasi pada perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan kelas menengah ke bawah, sehingga tingkat kemiskinan akan semakin mengecil pada kisaran 0,07 – 0,57 persen, yang diikuti oleh penurunan jumlah penduduk rentan miskin dan penurunan ketimpangan pendapatan antar penduduk dengan rasio gini berkisar 0,275 – 0,326. Peningkatan industri yang alokasi ruangnya ditempatkan pada pantai timur Provinsi Jambi berdasarkan arahan ruang pada RTRW Provinsi Jambi, tentu akan mendorong pembangunan dan pengembangan wilayah pada kawasan tersebut. Sehingga ketimpangan antarwilayah yang selama ini terjadi akan semakin menurun.

Sasaran ketiga, sejalan dengan pembangunan dan pengembangan wilayah yang diiringi dengan pembangunan sumberdaya manusia, dan peningkatan inovasi daerah, perluasan pasar produk unggulan, peningkatan kualitas infrastruktur dan lain-lain sebagainya, maka daya saing daerah Provinsi Jambi yang selama ini tertinggal pada peringkat 31 dari seluruh Provinsi di Indonesia, akan mampu bersaing dengan daerah lain di Indonesia dan menempati peringkat 15 besar secara nasional.

Sasaran keempat adalah meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja,

penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini terlihat dari Indeks Modal Manusia yang mencapai 0,71 pada tahun 2045.

Sasaran kelima, sebagai wujud komitmen Provinsi Jambi dalam hal pembangunan hijau atau pembangunan berkelanjutan, maka penurunan intensitas Gas Rumah kaca pada Tahun 2045 ditargetkan sebesar 97,88 persen dengan perbaikan kualitas lingkungan yang ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 80,88.

Dalam rangka membangun hubungan integral antara perencanaan pusat, Provinsi Jambi dan kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, maka target sasaran visi kabupaten/kota se-Provinsi Jambi disepakati dan diarahkan sebagaimana tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 4-2 Target Sasaran Visi Kabupaten Kerinci

Sasaran Utama Visi			
No	Indikator	Sasaran	
		2025	2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita		
	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	54,16	369,0 – 451,0
	b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	2,71	7,38
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan		
	a. Tingkat kemiskinan (%)	6,92	0,58
	b. Rasio Gini	0,28	0,253
	c. Kontribusi PDRB kabupaten terhadap provinsi (%)	4,53	4,54
	d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,79	5,90
3	Daya Saing Daerah		
	a. Indeks Inovasi Daerah	51,57	76,96
	b. Indeks Daya Saing Daerah	2,98	3,04
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia		
	Indeks Pembangunan Manusia	74,27	83,75
5	Penurunan Emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>		
	a. Intensitas Emisi GRK (ton CO2eq)	723.248,99	1.958.200,55
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,59	84,76

Tabel 4-3 Target Sasaran Visi Kabupaten Merangin

Sasaran Utama Visi			
No	Indikator	Sasaran	
		2025	2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita		
	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	66,2	455-520,36
	b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	7,92	9,85-10,05
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan		
	a. Tingkat kemiskinan (%)	8,00-8,30	0,57-0,87
	b. Rasio Gini (Indeks)	0,30-0.345	0,260-0,285
	c. Kontribusi PDRB Kabupaten Merangin terhadap Provinsi (%)	7,70	8,77-9,87
	d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,28-5,50	6,1-6,7
3	Peningkatan Daya Saing Daerah		
	a. Indeks Daya Saing Daerah	3,09-3,16	4,14-4,56
	b. Indeks Inovasi Daerah	47,8	60,09
4	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
	Indeks Pembangunan Manusia	71,90-72	82-83
5	Penurunan Emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>		
	c. Intensitas Emisi GRK (ton CO2eq)	746.300,56	2.408.451,17
	d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	74,63	81,81

Tabel 4-4 Target Sasaran Visi Kabupaten Sarolangun

Sasaran Utama Visi			
No	Indikator	Sasaran	
		2025	2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita		
	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	73,50 - 73,58	540,23 - 636,56
	b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	4,05 - 4,10	7,41 - 7,50
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan		
	a. Tingkat kemiskinan (%)	7,98 - 8,03	0,268 - 0,289
	b. Rasio Gini	0,35-0,36	0,290-0,294
	c. Kontribusi PDRB kabupaten terhadap provinsi (%)	7,36	7,71
	d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,85-5,01	5,45-6,5
3	Peningkatan Daya Saing Daerah		
	a. Indeks Daya Saing Daerah	3,02	3,27
	b. Indeks Inovasi Daerah	35,8	60,1
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia		
	Indeks Pembangunan Manusia	74,5	78-79
5	Penurunan Emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>		
	a. Intensitas Emisi GRK (ton CO2eq)	769.526,49	2.404.216,22
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	75,23	82,41

Tabel 4-5 Target Sasaran Visi Kabupaten Batang Hari

Sasaran Utama Visi			
No	Indikator	Sasaran	
		2025	2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita/Meningkatnya Produktivitas Daerah		
	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	82,43	453-500
	b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	9,45	10,83
	c. Nilai Tukar Petani	141,5	145,5
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan		
	a. Tingkat kemiskinan (%)	6,8	0,5
	b. Rasio Gini	0,34	0,25
	c. Kontribusi PDRB kabupaten terhadap provinsi (%)	8,61	8,71
	d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,85-5,01	5,55-7,0
3	Peningkatan Daya Saing Daerah		
	a. Indeks Daya Saing Daerah	3,35	3,77
	b. Indeks Inovasi Daerah	45,27	75,2
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia		
	Indeks Pembangunan Manusia	73,71	78,4
5	Penurunan Emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>		
	a. Intensitas Emisi GRK (ton CO2eq)	690.922,88	2.138.164,56
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	71,83	79,00

Tabel 4-6 Target Sasaran Visi Kabupaten Muaro Jambi

Sasaran Utama Visi			
No	Indikator Makro	Sasaran	
		2025	2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita		
	a.PDRB per kapita (Rp Juta)	88,00	600,32
	b.Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	15	22
2	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang		
	a. Tingkat kemiskinan (%)	3,5	0,50-0,56
	b. Rasio Gini	0,322	0,26
	c. Kontribusi PDRB kabupaten terhadap provinsi (%)	23-25	23-25
	d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,4-6,6	6,5-6,8
3	Peningkatan Daya Saing Daerah		
	a. Indeks Daya Saing Daerah	3,1	4
	b. Indeks Inovasi Daerah	35,01	50-60,1
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia		
	Indeks Pembangunan Manusia	73,5	85
5	Penurunan Emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>		
	a. Intensitas Emisi GRK (ton CO2eq)	1.758.777,57	8.910.131,39
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	71,41	80,88

Tabel 4-7 Target Sasaran Visi Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Sasaran Utama Visi			
No	Indikator	Sasaran	
		2025	2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita		
	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	116,25	350-450
	b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	15,26*	42,44*
	c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	9,02	12,06-13,22
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan		
	a. Tingkat kemiskinan (%)	10,85	0,58
	b. Rasio Gini	0,31	0,27
	c. Kontribusi PDRB kabupaten terhadap provinsi (%)	8,85	10,01
	d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,17	4,5-5,0
3	Peningkatan Daya Saing Daerah		
	a. Indeks Daya Saing Daerah	2,83	3,5
	b. Indeks Inovasi Daerah	49,17	55,95
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia		
	Indeks Pembangunan Manusia	67,2	71,4
5	Penurunan Emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>		
	a. Intensitas Emisi GRK (ton CO2eq)	1.538.744,06	7.588.981,82
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	72,54	76,48

Tabel 4-8 Target Sasaran Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Sasaran Utama Visi			
No	Indikator	Sasaran	
		2025	2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita/Mencapai Pendapatan Per Kapita Setara Dengan Kabupaten/Kota Maju		
	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	154,57	520,50 - 570,80
	b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	15,26	42,44
	c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	19	25
	d. Kontribusi sektor Transportasi dan Pergudangan terhadap PDRB Kabupaten Tanjung Jabung Barat	0.96	2,0 – 3,0
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan/Menurunnya Kemiskinan dan Ketimpangan		
	a. Tingkat kemiskinan (%)	9,0	0,565
	b. Rasio Gini	0,300	0,200 – 0,220
	c. Kontribusi PDRB kabupaten terhadap provinsi (%)	17,35	17
	d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,36- 4,5	5,3 - 6,07
3	Peningkatan Daya Saing Daerah/ Meningkatkan Daya Saing Daerah		
	a. Indeks Daya Saing Daerah	3,01	4,5

Sasaran Utama Visi			
No	Indikator	Sasaran	
		2025	2045
	b. Indeks Inovasi Daerah	52,00	70,00
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia/ Meningkatkan Daya Saing Manusia		
	Indeks Pembangunan Manusia	72,8	82,78
5	Penurunan Emisi GRK menuju <i>net zero emission</i> / Menurunnya Intensitas Emisi GRK Menuju <i>Net Zero Emission</i>		
	a. Intensitas Emisi GRK (ton CO2eq)	1.450.034,51	6.473.840,08
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	73,05	80,5

Tabel 4-9 Target Sasaran Visi Kabupaten Kabupaten Tebo

Sasaran Utama Visi			
No	Indikator	Sasaran	
		2025	2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita		
	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	60,39-63,46	250,69-305,71
	b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	5,85 - 6,12	10,34 - 10,59
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan/Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang		
	a. Tingkat kemiskinan (%)	6,21- 6,87	0,04 - 0,58
	b. Rasio Gini	0,3	0,27
	c. Kontribusi PDRB kabupaten terhadap provinsi (%)	7,21 - 7,54	8,36 - 8,77
	d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,29-4,76	5,35-5,59
3	Peningkatan Daya Saing Daerah/Meningkatnya Daya Saing Daerah		
	a. Indeks Daya Saing Daerah	2,77	3,07
	b. Indeks Inovasi Daerah	47,76 (inovatif)	
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia		
	Indeks Pembangunan Manusia	72,33	90,19
5	Penurunan Emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>		
	a. Intensitas Emisi GRK (ton CO2eq)	825.559,78	2.547.818,17
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	73,13	80,30

Tabel 4-10 Target Sasaran Visi Kabupaten Bungo

Sasaran Utama Visi			
No	Indikator	Sasaran	
		2025	2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita		
	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	80,00-81,43	540,00 - 560,00
	b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	5,50 - 6,06	10,50 - 11,69
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan		
	a. Tingkat kemiskinan (%)	5,00 - 5,20	0,50 - 0,57
	b. Rasio Gini	0,27 - 0,28	0,25 - 0,27
	c. Kontribusi PDRB kabupaten terhadap provinsi (%)	8,69	8,87 - 9,00
	d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,68 - 4,78	5,50 - 6,50
3	Peningkatan Daya Saing Daerah		
	a. Indeks Daya Saing Daerah	2,98	4,00 - 4,50
	b. Indeks Inovasi Daerah	48,30 (Inovatif)	"60,10 (Sangat Inovatif)"
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia		
	Indeks Pembangunan Manusia	71,50 - 71,96	78,00 - 80,00
5	Penurunan Emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>		
	c. Intensitas Emisi GRK (ton CO2eq)	463.747,96	1.426.309,40
	d. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	74,75	81,92

Tabel 4-11 Target Sasaran Visi Kota Jambi

Sasaran Utama Visi			
No	Indikator	Sasaran	
		2025	2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita		
	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	75,73	455 - 470
	b. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	10,25	10,25-10,50
	c. Kontribusi PDRB Sektor Tersier (%)	78,64	79-80
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan		
	a. Tingkat kemiskinan (%)	7,5-7,25	0,565
	b. Rasio Gini	0,33	0,26 – 0,28
	c. Kontribusi PDRB Kota Jambi terhadap provinsi (%)	13,89	14,89 – 15
	d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,65-6,70	7,1-7,2
3	Peningkatan Daya Saing Daerah		
	a. Indeks Daya Saing Daerah	3,9	4,62-4,93
	b. Indeks Inovasi Daerah	64,16	70,12-75,20
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia		
	Indeks Pembangunan Manusia	80,93	85,00-86,50
5	Penurunan Emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>		
	a. Intensitas Emisi GRK (ton CO2eq)	31.274,90	619.707,55
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	58,78	65,96

Tabel 4-12 Target Sasaran Visi Kota Sungai Penuh

Sasaran Utama Visi			
No	Indikator	Sasaran	
		2025	2045
1	Peningkatan pendapatan per kapita		
	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	96,96-98,93	451,37-500,24
	b. Kontribusi PDRB Sektor Tersier (%)	83,07	85,67
	c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	0,58	0,60
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan		
	a. Tingkat kemiskinan (%)	2,87-2,93	0,58-0,75
	b. Rasio Gini	0,30-0,31	0,29-0,30
	c. Kontribusi PDRB Kota Sungai Penuh terhadap provinsi (%)	3,37	3,57
	d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,04-5,13	5,53-6,68
3	Peningkatan Daya Saing Daerah/ Daya saing Daerah Meningkat		
	a. Indeks Daya Saing Daerah	3,57	4,01
	b. Indeks Inovasi Daerah	45,96	65,01
4	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia/ SDM yang Berdaya Saing, Bertakwa dan Berkelanjutan Mencapai Generasi Emas		
	Indeks Pembangunan Manusia	77,53-77,84	85,50-86,22
5	Penurunan Emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>		
	a. Intensitas Emisi GRK (ton CO2eq)	226.371,73	592928,69
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	80,68	87,85

4.2 MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi dalam rangka pencapaian Visi jangka panjang daerah Tahun 2025 – 2045 adalah:

1. **Mewujudkan transformasi sosial**, dengan membentuk sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, produktif, sejahtera, unggul dan berdaya saing. Perubahan struktur penduduk dengan dominasi usia produktif yang akan dinikmati oleh Provinsi Jambi hingga awal periode akhir jangka menengah nanti perlu diiringi dengan transformasi sosial salah satunya melalui penyiapan sumber daya manusia yang memiliki daya saing, terutama kemampuan dalam memanfaatkan kemajuan

teknologi. Demikian pula isu *aging population* yang akan mulai dirasakan oleh Provinsi Jambi mulai Tahun 2028, perlu pula diiringi oleh suatu transformasi sosial dalam hal perlindungan sosial yang lebih adaptif, terintegrasi dan inklusif. Transformasi sosial juga menjadi titik awal dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera.

2. **Mewujudkan transformasi ekonomi**, melalui peningkatan produktivitas dengan melakukan inovasi, penggunaan iptek, ekonomi produktif (termasuk industri pengolahan, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja dan BUMD), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi daerah dengan regional, nasional dan global, pembangunan perkotaan dan kawasan strategis provinsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Transformasi ekonomi sekaligus memberikan peluang lebih besar dalam mengoptimalkan bonus demografi di Provinsi Jambi.
3. **Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintah**, diwujudkan melalui tata kelola pemerintahan daerah yang berintegritas dan adaptif. Transformasi ini antara lain melalui penyederhanaan birokrasi, penegakan Peraturan Daerah yang adil, adopsi TIK dalam pemerintahan, aparatur yang berintegritas dan kapabel, serta pemanfaatan satu data Indonesia pada seluruh kebijakan.
4. **Memantapkan Ketenteraman dan ketertiban Umum, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah**. Ketenteraman dan ketertiban umum dimantapkan dengan menjaga dan meningkatkan kerukunan hidup masyarakat dan budaya toleransi masyarakat. Sementara demokrasi substansial dimantapkan dengan menginternalisasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Sedangkan stabilitas ekonomi makro diwujudkan antara lain melalui peningkatan kualitas belanja daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (*well-being budget*) dan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*).
5. **Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**, dengan memperkuat ketangguhan individu melalui pembangunan karakter, membentuk keluarga, komunitas, masyarakat yang berkualitas dan inklusif. Selain itu juga akan diciptakan lingkungan yang mampu

menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk memiliki daya tahan terhadap berbagai bencana, serta kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan iklim.

6. **Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan**, dengan mengurangi ketimpangan antar wilayah dan pendapatan melalui agenda transformasi yang dilakukan serta pemantapan beberapa kondisi yang diperlukan, mencakup ketenteraman dan ketertiban umum, ketahanan sosial budaya dan ketahanan ekologi.
7. **Mewujudkan Transformasi Penyediaan Sarana Prasarana Daerah yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**, menjadi salah satu faktor kunci dalam peningkatan daya saing daerah. Penyediaan sarana prasarana tidak hanya didorong untuk lebih berkualitas, namun juga diarahkan pada sarana prasarana yang ramah lingkungan atau infrastruktur hijau. Prinsip efektif dan efisien dalam pengembangan jaringan konektivitas yang menghubungkan simpul-simpul logistik antar wilayah dalam daerah maupun secara regional maupun nasional bahkan global menjadi salah satu kunci dalam transformasi penyediaan sarana prasarana daerah. Transformasi ini sekaligus sebagai pilar pendukung agenda utama transformasi.
8. **Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan**, dilakukan dengan menjaga konsistensi dalam satu masa dan antar periode pemerintahan, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang memerlukan perkuatan implementasi dan pembiayaan pembangunan. Selain itu kolaborasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan disertai manajemen pembangunan berbasis resiko menjadi salah satu kunci terwujudnya misi kestinambungan pembangunan ini.

Nilai penting yang harus selalu dijunjung dalam pencapaian misi adalah kedaulatan rakyat, dimana segala manfaat yang didapatkan dalam pembangunan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat akan menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum, yang tentu akan memudahkan proses pembangunan. Selain itu perwujudan hak yang sama antar generasi dalam implementasi

pembangunan berkelanjutan, akan membawa Provinsi Jambi tidak hanya sebagai daerah yang maju dan berdaya saing, namun juga akan menjadikan Provinsi Jambi menjadi daerah yang nyaman dengan masyarakat yang sejahtera dan bahagia lebih lama.



Gambar 4-2 Alur perwujudan transformasi Provinsi Jambi

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

5.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan dengan kerangka kerja pembangunan lima tahunan berikut ini disusun sebagai upaya pencapaian visi daerah. Pentahapan per lima tahun yang disusun ini, selain mempedomani tahapan dan tematik pembangunan dalam RPJP Nasional Tahun 2025 – 2045, juga disesuaikan dengan karakteristik dan visi daerah.

5.1.1 Arah Kebijakan Periode 2025 - 2029

Secara keseluruhan arah kebijakan pembangunan pada tahap pertama periode RPJPD ini difokuskan pada upaya perkuatan fondasi transformasi dengan tidak meninggalkan upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang harus segera ditangani. Arah kebijakan pada periode ini difokuskan pada:

1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.
2. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan primer serta mengembangkan program komunikasi, Informasi dan edukasi untuk mencapai kemandirian kesehatan
4. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
5. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya
6. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
7. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan

8. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas
9. Dukungan kebijakan untuk upaya perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan
10. Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting
11. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat
12. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan
13. Percepatan wajib belajar 13 tahun
14. Peningkatan kualitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran
15. Peningkatan budaya literasi melalui peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi sosial bagi terwujud masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter
16. Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan yang merata dan berkeadilan, peningkatan efektivitas pemberian subsidi pendidikan, serta peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran untuk membentuk manusia produktif.
17. Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
18. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.
19. Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan menengah
20. Penguatan kurikulum pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah)
21. Penguatan pembelajaran berbasis digital melalui peningkatan kapasitas pendidik, peserta didik dan orang tua, serta penerapan pedagogi modern.
22. Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
23. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.

24. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
25. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
26. Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan
27. Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics).
28. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK
29. Revitalisasi pendidikan nonformal serta penguatan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan berbasis komunitas, dan life skills
30. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal dan rentan dengan memanfaatkan sistem regsosek agar tepat sasaran, tepat guna dan efisien
31. Pemenuhan dan penyiapan sarana prasarana dan SDM pengawas ketenagakerjaan yang berkompeten, profesional dan adaptif teknologi
32. Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
33. Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
34. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
35. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.

36. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.
37. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak
38. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
39. Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
40. Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
41. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/stockyard yang modern terintegrasi)
42. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
43. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, terutama pada metropolitan Jambi.
44. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan

- kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (antara lain layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dan sebagainya)
45. Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.
 46. Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.
 47. Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jambi.
 48. Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jambi.
 49. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.
 50. City beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.
 51. Penguatan Kelembagaan, Destinasi dan Promosi pariwisata yang berdaya saing berbasis Teknologi Infomasi
 52. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.
 53. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
 54. Penguatan pengelolaan jalan provinsi
 55. Mendorong Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Jambi untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas:
 - Rengat-Jambi;
 - Jambi-Sekayu-Pangkalan Balai-Palembang;

- Jambi-Muarasabak;
 - Jambi-Muarabulian;
 - Muarabulian-Sarolangun-Bangko; dan
 - Muarabulian-Muaratebo-Muarabungo.
56. Mendorong Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara
 57. Mendorong Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah
 58. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.
 59. Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.
 60. Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.
 61. Hilirisasi sumberdaya alam unggulan
 62. Penyiapan Infrastruktur dan SDM Industri dan penguatan ekosistem Industrialisasi
 63. Pengelolaan Sumber Daya Pertanian yang berkualitas dan pengembangan teknologi tepat guna
 64. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan sebagai sumber ekonomi dan digitalisasi pertanian serta pembangunan teknologi pertanian yang berkualitas
 65. Peningkatan keragaman wisata, penguatan kelembagaan, destinasi dan promosi pariwisata yang berdaya saing berbasis teknologi infomasi
 66. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual, penumbuhan start up kreatif dan digital, serta penguatan kelembagaan ekonomi kreatif
 67. Meningkatkan pertumbuhan Koperasi modern dan UKM naik kelas serta meningkatkan nilai tambah produk melalui industrialisasi KUKM
 68. Peningkatan produktivitas BUMD.

69. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.
70. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.
71. penataan kelembagaan dan regulasi dalam peningkatan kualitas pemuda dan olahraga
72. penciptaan lapangan kerja menengah ke atas di sektor-sektor produktif (termasuk lapangan kerja hijau, biru dan digital)
73. Penguatan pelatihan re-skilling dan up-skilling serta integrasi soft skills dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi

74. Penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja, termasuk tenaga kerja rentan
75. Percepatan penyediaan informasi pasar kerja yang mutakhir, kredibel, mudah diakses dan dengan jangkauan luas
76. Pendayagunaan dan pengelolaan SDA yang berkualitas
77. mendorong penggunaan kendaraan listrik dan penyiapan infrastruktur pendukungnya
78. Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.
79. Penyiapan kebijakan dan kelembagaan
80. akuntabel berbasis digital
81. Pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga dan bisnis
82. mendorong inovasi daerah dan produktivitas tenaga kerja
83. menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor
84. perluasan lapangan kerja menengah ke atas di sektor-sektor produktif (termasuk lapangan kerja hijau, biru dan digital)
85. Mengoptimalkan pendapatan asli daerah
86. Penerapan ekonomi hijau dan optimalisasi pemanfaatan persetujuan perhutanan sosial
87. Pemenuhan akses digital di seluruh wilayah
88. Peningkatan potensi pemuda dalam pengembangan teknologi, kemajuan kebudayaan, peningkatan inovasi dan kreatifitas
89. Mengembangkan kebijakan perancangan Ekosistem inovasi
90. Melanjutkan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung
91. Penyiapan sarana prasarana perhubungan
92. perwujudan PKN dan kawasan strategis
93. Penyediaan angkutan massal
94. Pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga dan bisnis
95. Akselerasi Industri produk jadi
96. Penetapan upah Provinsi berbasis produktivitas dan berkeadilan

97. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing serta terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar
98. Peningkatan pendapatan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)
99. Pelestarian dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan
100. menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan di seluruh wilayah dengan dukungan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas
101. Pemanfaatan digitalisasi
102. Penguatan integrasi antarmoda transportasi darat, laut dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas penumpang
103. Peningkatan angkutan massal
104. Peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur Teknologi Informasi untuk peningkatan layanan publik
105. Peningkatan kualitas ASN berbasis merit
106. Regulasi adaptif
107. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
108. Peningkatan kualitas pengelolaan Diklat
109. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital
110. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
111. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
112. Mendorong inovasi daerah dalam pelayanan data kependudukan

113. Penerapan manajemen resiko perencanaan dan pengendalian pembangunan

114. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif

Dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban umum, kerukunan hidup dan budaya toleransi masyarakat pada tahap pertama RPJPD ini kebijakan diarahkan pada **peningkatan kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik tepat fungsi, peningkatan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta penuntasan pemenuhan pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat**. Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) yang tepat fungsi akan berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam konteks menjaga stabilitas dan keamanan suatu negara. Kesbangpol memiliki peran utama dalam merancang, mengembangkan, dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang berfokus pada penyelarasan hubungan antarwarga dan kelompok dalam masyarakat. Dengan memastikan Kesbangpol berfungsi dengan tepat dan efektif dalam mengelola dinamika sosial, keselarasan ini dapat berkontribusi pada ketenteraman dan ketertiban masyarakat secara keseluruhan.

Ketenteraman dan ketertiban masyarakat akan terwujud jika ada koordinasi dan sinergi antara Kesbangpol dan aparat keamanan. Oleh karena itu, optimalisasi peran-peran dari institusi pemberi pelayanan dasar ketenteraman seperti polisi, tentara, Satpol PP dan lain-lain, perlu dilakukan. Kerjasama dan koordinasi antara berbagai pihak ini sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Dengan demikian, pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat terpenuhi.

Dalam rangka membentuk keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif dan berkebudayaan maju, kebijakan diarahkan pada:

1. Inventarisasi, pelindungan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan

Kebudayaan merupakan produk dari sebuah peradaban yang mencakup arsitektur sejarah, bahasa, benda-benda tradisional, nilai-nilai tradisi, dan lain-lain. Peran kebudayaan dalam pembangunan sangat signifikan dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kebudayaan bukan hanya menjadi cermin identitas suatu bangsa, tetapi juga memainkan peran penting dalam mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.

Oleh karena itu, sebagai kelompok masyarakat yang sudah lama berinteraksi dengan lingkungan alamnya dan menghasilkan ragam kebudayaan yang cukup luas, perlu bagi pemerintah untuk berupaya menginventarisir, dan menyelamatkan serta memanfaatkan objek kebudayaan tersebut.

2. Optimalisasi nilai budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter

Arus globalisasi dapat saja berpotensi menyebabkan terkikisnya identitas anak bangsa. Identitas tersebut yang selama ini tercermin dari nilai-nilai budaya yang dianut bisa jadi hilang akibat sistem pendidikan yang sedikit demi sedikit meniadakan unsur nilai dan budaya dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, seyogyanya peran keluarga sebagai 'lembaga' pendidikan dini harus ditingkatkan lagi dalam menanamkan nilai-nilai budaya sehingga SDM yang dihasilkan adalah SDM yang berkarakter.

Dalam hal memantapkan ketahanan ekologi yang mencakup energi, air pangan dan lingkungan secara luas, kebijakan diarahkan pada:

1. Pemenuhan kebutuhan listrik publik, industri dan transportasi

Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja atau membuat perubahan. Dewasa ini energi yang berbentuk listrik semakin mendominasi dalam setiap aktivitas kehidupan. Energi yang selama ini lebih banyak bersumber dari energi fosil, sedikit demi sedikit terkonversi menjadi energi yang bersumber dari

listrik. Dengan demikian kebutuhan energi listrik semakin meningkat baik untuk aktivitas keseharian masyarakat, industri, maupun transportasi (moda transportasi listrik). Oleh karena itu, kebijakan pembangunan energi diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat, industri dan transportasi.

2. Peningkatan sumber produksi pangan dan perikanan serta stabilitas pasokan dan harga pangan.

Peningkatan pertumbuhan penduduk yang kurang dapat diimbangi oleh pertumbuhan bahan pangan menuntut adanya upaya untuk mencari sumber-sumber pangan alternatif. Diversifikasi bahan pangan terutama yang berasal dari pangan lokal, oleh karena itu, menjadi salah satu strategi penambahan jumlah sumber pangan. Dalam mewujudkan hal ini, tidak hanya pangan alternatif yang diperlukan, tapi juga sosialisasi perlunya beradaptasi dengan jenis-jenis pangan atau sumber karbohidrat baru. Selain itu, ketersediaan, akses, stabilitas pasokan dan harga serta kualitas konsumsi pangan juga harus diupayakan pemerintah. Terkait dengan tugas pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan, pemerintah juga harus mengidentifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan dan kerawanan pangan

3. Perlindungan dan pemulihan kawasan hutan

Perlindungan dan pemulihan kawasan hutan merupakan upaya penting untuk melestarikan ekosistem hutan, mencegah degradasi lahan, dan mendukung keberlanjutan sumber daya alam. Perlindungan dan pemulihan kawasan hutan membutuhkan upaya lintas sektor, partisipasi aktif dari berbagai pihak, dan implementasi kebijakan yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memastikan bahwa hutan berperan sebagai penyangga lingkungan, penyimpan karbon, dan habitat berbagai spesies yang mendukung kehidupan di Bumi.

4. Pengelolaan lahan basah secara berkelanjutan (mangrove dan gambut)

Pengelolaan lahan basah yang berkelanjutan menjadi kunci penting dalam melestarikan keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan ekosistem, serta memenuhi kebutuhan manusia secara berkelanjutan. Lahan basah, seperti rawa, payo, gambut dan mangrove, memiliki peran ekologis, sosial, dan ekonomis yang sangat penting. Pengelolaan lahan basah yang berkelanjutan membutuhkan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan mendukung kesejahteraan manusia

5. Penguatan pengelolaan sungai secara terpadu dan konservasi non vegetatif (sumur resapan, kolam retensi dan bangunan penangkap air lainnya)

Air merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kehidupan. Namun demikian, dalam situasi tertentu air dalam jumlah yang tidak terkendali dapat menjadi bencana alam yang berdampak pada kerusakan dan kerugian yang signifikan. Banjir yang seringkali terjadi akibat meluapnya air sungai dan genangan air hujan sering berdampak pada kerugian yang bukan hanya finansial tapi juga kerusakan ekosistem dan lingkungan. Oleh karena itu, penguatan pengelolaan sungai secara terpadu dan konservasi non-vegetatif merupakan langkah penting untuk memastikan keberlanjutan ekosistem sungai dan melindungi daerah sekitarnya.

Penguatan pengelolaan sungai secara terpadu dan konservasi non-vegetatif memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Implementasi kebijakan yang berkelanjutan, pemantauan yang baik, serta partisipasi aktif dari masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam melindungi dan menjaga keberlanjutan sungai dan lingkungannya.

Di lain pihak, penguatan lembaga pengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan langkah krusial dalam menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya air, konservasi lingkungan, dan

pengembangan wilayah sekitar sungai. Penguatan lembaga pengelola DAS memerlukan pendekatan holistik, partisipatif, dan berkelanjutan. Kolaborasi antar semua pemangku kepentingan dan implementasi kebijakan yang tepat dapat membantu mencapai tujuan keberlanjutan pengelolaan DAS.

Guna menjamin ketersediaan air bagi kehidupan masyarakat, perlu ditingkatkan sistem jaringan sumberdaya air. Sistem ini mencakup berbagai elemen yang saling terhubung untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya air dengan efisien dan berkelanjutan

6. Pemenuhan kebutuhan pelayanan bencana terkait logistik dan SDM

Pemenuhan kebutuhan pelayanan bencana terkait logistik dan SDM (Sumber Daya Manusia) sangat penting dalam rangka menangani dan merespons situasi bencana. Beberapa hal yang dapat dilakukan dalam rangka upaya tersebut antara lain pemetaan risiko dan persiapan logistik, merencanakan sistem distribusi dan transportasi yang efisien untuk mengirimkan bantuan logistik ke lokasi bencana sesegera mungkin, memanfaatkan teknologi seperti sistem informasi geografis (SIG), sensor, dan pelacakan inventaris untuk memonitor dan mengelola distribusi logistik secara efektif, menjalin kerjasama dengan perusahaan logistik dan distributor swasta untuk memastikan ketersediaan sumber daya dan layanan logistik yang dibutuhkan, melakukan simulasi dan latihan reguler untuk menguji kehandalan sistem logistik, mempersiapkan personel, dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.

Implementasi dari upaya tersebut tidak lepas dari dukungan sumberdaya manusia yang handal. Dalam mempersiapkan sumberdaya manusia tersebut, perlu dipersiapkan seperangkat sistem pendidikan dan pelatihan bagi SDM yang terlibat langsung dalam penanganan bencana maupun kurikulum tanggap bencana dan perubahan iklim dalam sistem pendidikan umum agar masyarakat lebih tanggap terhadap bencana. Pada sisi lain, bobot

dari diklat dan kurikulum tersebut harus dielaborasi sedemikian rupa yang meningkatkan pemahaman seluruh elemen masyarakat tentang sebab-sebab timbulnya bencana sehingga kapasitas pencegahan dan penanggulangan bencana pun meningkat.

Pentingnya pemenuhan kebutuhan logistik dan SDM tidak hanya terkait dengan respons akut terhadap bencana tetapi juga dengan fase pemulihan jangka panjang. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan sektor swasta, akan membantu memastikan bahwa sumber daya logistik dan SDM dapat digunakan secara efektif dalam situasi bencana.

7. Identifikasi karakteristik dan potensi kebencanaan sektor pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat penting karena bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Berdasarkan karakteristiknya, sektor ini adalah sektor yang terdampak langsung ataupun tak langsung oleh berbagai jenis bencana, baik itu bencana alam ataupun bencana perubahan iklim. Dampak tidak langsung atau potensi kebencanaan terhadap sektor ini perlu dipetakan lebih jauh sehingga antisipasinya dapat disiapkan sejak dini. Selain pada sektor pertanian yang umumnya terdapat pada kawasan non pesisir, perubahan iklim juga sangat berdampak pada kawasan pesisir. Kenaikan permukaan air laut, terganggunya ekosistem laut dan pantai, erosi pantai, dan meningkatnya intensitas badai, dapat menyebabkan perubahan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Oleh karena itu, identifikasi potensi dampak dari perubahan iklim pada kawasan pesisir dapat membantu menyiapkan strategi untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi situasi yang tidak menguntungkan tersebut.

8. Akselerasi pencapaian TPB dan penurunan emisi GRK

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) memerlukan akselerasi langkah-langkah konkrit dan terkoordinasi

di berbagai sektor. Penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip TPB terintegrasi dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah. Hal ini melibatkan penyusunan dan implementasi rencana pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional, regional, dan lokal. Meskipun demikian, pencapaian TPB bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi melibatkan semua pemangku kepentingan. Dengan adopsi dan implementasi strategi ini, akselerasi pencapaian TPB dapat diwujudkan untuk menciptakan dunia yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan adil.

Bencana perubahan iklim dapat disebabkan oleh banyak faktor. Usia bumi yang sudah semakin tua dengan sejumlah problematikanya telah bermuara pada kondisi-kondisi yang mulai kurang menguntungkan bagi kehidupan makhluk hidup yang ada. Emisi gas rumah kaca merupakan salah satu yang berkontribusi pada terjadinya perubahan iklim. Kebijakan yang berkaitan dengan upaya mengurangi emisi gas rumah kaca antara lain mempercepat transisi ke energi terbarukan dan mengoptimalkan potensi EBT yang ada serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Meningkatkan efisiensi energi di berbagai sektor, termasuk industri, transportasi, dan bangunan. Ini melibatkan penggunaan teknologi yang lebih efisien dan praktik-praktik yang ramah lingkungan. Menerapkan kebijakan konservasi lahan dan hutan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi lahan, serta meningkatkan penyerapan karbon oleh tumbuhan. Mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti transportasi umum, sepeda, dan mobil listrik untuk mengurangi emisi transportasi.

Akselerasi pencapaian TPB dan penurunan emisi GRK memerlukan komitmen serius dari seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan. Koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas internasional akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini.

9. Pengendalian Zona Lindung

Pengendalian zona lindung (zona perlindungan) merujuk pada serangkaian tindakan dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan memelihara kelestarian kawasan tertentu yang dianggap penting untuk konservasi alam, keanekaragaman hayati, dan fungsi ekosistem. Zona lindung dapat mencakup berbagai tipe kawasan, seperti taman nasional, hutan lindung, cagar alam, dan zona perlindungan lainnya

10. Peningkatan konektivitas wilayah dengan pusat pertumbuhan yang didukung dengan pengembangan EBT dan infrastruktur pendukung

Peningkatan konektivitas wilayah dengan pusat pertumbuhan dan infrastruktur pendukungnya merupakan strategi penting dalam memajukan pembangunan regional dan meningkatkan daya saing ekonomi. Peningkatan konektivitas wilayah tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting untuk mencapai tujuan ini.

Salah satu upaya untuk mewujudkan adanya konektivitas antar kawasan adalah dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung antara lain jalur transportasi, pelabuhan dan bandara, dan infrastruktur energi. Selain itu diperlukan perencanaan wilayah secara terpadu yang mempertimbangkan hubungan antara pusat pertumbuhan dan wilayah-wilayah di sekitarnya.

11. Pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar secara merata di seluruh wilayah

Keberlanjutan pembangunan sangat bergantung pada apakah seluruh elemen masyarakat dapat merasakan manfaat dari proses pembangunan yang terindikasi dari terpenuhinya pelayanan dasar secara merata di seluruh wilayah. Dalam menjamin pemerataan distribusi dan akses layanan tersebut diperlukan perencanaan yang komprehensif dan terpadu oleh pihak-pihak terkait mulai

dari identifikasi persoalan akses dan layanan, implementasi, sampai dengan monitoring dan evaluasi.

5.1.2 Arah Kebijakan Periode 2030 – 2034

Tahap kedua periode RPJPD ini difokuskan pada upaya akselerasi transformasi, dimana kebijakan diarahkan kepada:

1. Penguatan sumberdaya manusia dan peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur kesehatan dan pendidikan secara berkelanjutan

Meskipun dalam lima tahun pertama, kebijakan di bidang kesehatan telah diarahkan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia kesehatan, perubahan dinamika persoalan kesehatan dan teknologi yang terus berkembang mengharuskan adanya upaya penguatan sumberdaya manusia yang berkesinambungan. Penyelenggaraan diklat-diklat kesehatan harus kontinyu dengan muatan berbagai pengetahuan dan keterampilan terbaru.

Infrastruktur kesehatan mencakup berbagai elemen yang mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan promosi kesehatan di suatu wilayah. Infrastruktur ini mencakup fasilitas fisik, sumber daya manusia, teknologi, dan sistem manajemen yang bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung penyediaan pelayanan kesehatan yang efektif. Beberapa komponen utama dari infrastruktur kesehatan antara lain:

- Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) sebagai penyedia layanan kesehatan primer yang menyediakan layanan kesehatan dasar dan Rumah Sakit sebagai penyedia layanan kesehatan tingkat lanjut (fasilitas bedah, dokter spesialis, dll).
- Tenaga Kesehatan, yaitu dokter dan perawat yang merupakan profesional kesehatan yang melayani kebutuhan medis dan perawatan, serta tenaga kesehatan masyarakat yang merupakan ahli kesehatan yang fokus pada upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit di tingkat komunitas.

- Teknologi Kesehatan, antara lain peralatan Medis (peralatan diagnostik, peralatan bedah, dan peralatan medis lainnya), obat-obatan, dan sistem Informasi Kesehatan(Teknologi informasi yang mendukung manajemen data pasien, pelacakan penyakit, dan pelaporan kesehatan populasi).
- Pendidikan dan Pelatihan. Institusi Pendidikan Kesehatan (Sekolah kedokteran, sekolah perawat, dan lembaga pendidikan lainnya untuk melatih tenaga kesehatan) dan program Pelatihan (Pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kesehatan).
- Sistem Manajemen Kesehatan., yaitu manajemen Administrasi (Sistem administrasi dan manajemen yang mendukung operasional fasilitas kesehatan) dan Sistem Pelaporan dan Monitoring (Sistem untuk melacak dan melaporkan data kesehatan masyarakat).

2. Penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas

Konsep pembangunan manusia yang inklusif menekankan pada keadilan, kesetaraan, dan partisipasi seluruh masyarakat dalam proses pembangunan. Pembangunan manusia yang inklusif tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan hak asasi manusia. Dalam lima tahun kedua, kebijakan pembangunan bidang ekonomi salah satunya diarahkan untuk menguatkan pembangunan manusia yang inklusif dan akselerasi pembangunan SDM yang berkualitas. SDM pelaku pembangunan dituntut untuk selalu mengupdate skills dan kompetensi untuk dapat melakukan percepatan pembangunan di segala sektor. Peran pemerintah dalam hal ini adalah menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang berkaitan dengan itu.

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat melalui penguatan literasi dan pemerataan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial

Berkaitan dengan program pembangunan sumber daya manusia, penguatan literasi merupakan salah satu strategi cerdas dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Penguatan literasi memberikan SDM kemampuan untuk mengakses, memahami, dan mengevaluasi informasi dengan lebih baik sehingga dapat berpikir dengan kritis dalam membuat setiap keputusan.

Literasi tidak hanya mencakup kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga keterampilan berbicara dan mendengar. Peningkatan literasi dapat membantu meningkatkan keterampilan komunikasi seseorang. SDM yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik dapat lebih efektif berinteraksi dengan orang lain di berbagai konteks, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya akan dihasilkan SDM yang memiliki inovasi dan kreativitas tinggi sehingga berdaya saing global.

Perpustakaan sebagai salah satu akses sumber literasi memiliki peran penting dalam memberikan layanan literasi pada seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan layanan akan meningkatkan pemerataan akses literasi bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

4. Penguatan keahlian dan kompetensi baru, pendidikan kewirausahaan, ekosistem kemitraan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

Jika pada lima tahun pertama dilakukan revitalisasi pendidikan non formal dan sosialisasi pendidikan sepanjang hayat, maka pada lima tahun kedua, pembangunan pendidikan diarahkan untuk menguatkan keahlian dan memperkenalkan kompetensi baru (sesuai trend teknologi dan kompetensi yang berkembang). Kewirausahaan (entrepreneurship) merupakan alternatif penting di tengah tingginya tingkat persaingan dalam

pasar kerja. Kompetensi kewirausahaan akan diintegrasikan dalam kurikulum diklat yang difasilitasi oleh pemerintah.

Kemitraan antara dunia usaha dan dunia industri merupakan strategi yang harus ditumbuhkembangkan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan. Kemitraan antara dunia usaha dan industri memungkinkan pertukaran pengetahuan dan teknologi. Perusahaan dapat bekerja sama dengan industri untuk mengembangkan solusi inovatif dan teknologi baru yang mendorong kemajuan sektor industri. Kemitraan dapat meningkatkan efisiensi produksi dengan memanfaatkan keahlian dan sumber daya yang dimiliki oleh pihak industri dan usaha. Kolaborasi ini dapat mengoptimalkan rantai pasok dan proses produksi. Kerjasama antara dunia usaha dan industri dapat menciptakan peluang kerja baru. Peningkatan kegiatan produksi dan inovasi akan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Dengan bekerjasama, perusahaan dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Kemitraan ini memungkinkan peningkatan skala produksi, keahlian bersama, dan akses ke sumber daya yang mungkin sulit diakses secara individu.

5. Percepatan penguatan skema layanan dan pendataan terpadu

Berkaitan dengan peningkatan kualitas pemberian layanan sosial yang dioperasionalkan pada lima tahun pertama, pada lima tahun kedua, pembangunan diarahkan untuk menguatkan berbagai skema layanan yang sudah dikembangkan pada periode sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan pada seluruh lapisan masyarakat ataupun ketenagakerjaan. Selain itu, untuk mencapai pemerataan akses tersebut diperlukan sistem pendataan yang terpadu sehingga dapat diketahui klaster-klaster masyarakat yang berkaitan dengan klasifikasi layanan yang

dengan ini layanan dapat diakses dengan mudah bagi setiap lapisan masyarakat sesuai daya jangkauannya.

6. Peningkatan Kualitas sarana prasarana dan SDM pengawas ketenagakerjaan

Inisiasi penyiapan SDM pengawas yang berkompeten pada lima tahun pertama dilanjutkan dengan peningkatan kualitas SDM pengawas agar memiliki skill dan kompetensi yang terkini. Selain itu, dalam rangka mendukung kinerja SDM ketenagakerjaan diperlukan sarana dan prasarana yang berkualitas.

7. Peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan penduduk rentan lainnya

Salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan sosial pada masyarakat adalah dengan menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Di lain pihak, keberagaman masyarakat baik dari status sosial kemasyarakatan maupun potensi kerentanan mengharuskan pemerintah memberikan perhatian lebih/spesifik pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu seperti kelompok penduduk rentan. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan mengupayakan peningkatan lingkungan yang inklusif dan kondusif bagi anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan kelompok rentan lainnya.

8. Hilirisasi Sumberdaya Alam dan Penguatan ekosistem industri yang berkelanjutan

Pembangunan bidang ekonomi dalam lima tahun kedua terutama sekali diarahkan untuk menuntaskan kebijakan pembangunan periode sebelumnya. Hilirisasi sumber daya alam unggulan masih merupakan prioritas pembangunan ekonomi lima tahun kedua. Berkembangnya teknologi dan inovasi masih membuka peluang untuk meningkatkan nilai tambah produk melalui jenis hilirisasi yang berbeda (terbaru). Selain itu, berbagai kegiatan eksplorasi potensi sumberdaya alam boleh jadi

memberikan peluang ditemukannya sumber daya alam baru yang sama sekali belum tersentuh untuk diolah.

Selanjutnya, konsep ekosistem industri yang dibangun pada lima tahun pertama harus terintegrasi dengan konsep pembangunan berkelanjutan sehingga pada lima tahun kedua, kebijakan diarahkan untuk mengintegrasikan konsep keberlanjutan dalam ekosistem industri yang sudah dibangun.

9. Pengembangan kawasan industri/hilirisasi di wilayah timur Provinsi Jambi

Wilayah timur Provinsi Jambi merupakan wilayah yang cukup berpotensi untuk pengembangan kawasan industri/hilirisasi produk dan sumberdaya. Hal ini terindikasi dari adanya sejumlah faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri. Faktor-faktor tersebut antara lain letaknya yang dekat dengan pelabuhan laut, daya dukung infrastruktur transportasi yang menjamin konektivitas dengan wilayah lainnya, luasnya sebaran wilayah perkebunan dan sumberdaya alam lainnya. Wilayah ini juga telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jambi Tahun 2023 – 2043 sebagai kawasan strategis provinsi dari aspek ekonomi, yang salah satunya adalah pengembangan kawasan Ujung Jabung sebagai kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan. Jenis industri yang dikembangkan akan disesuaikan komoditas unggulan Provinsi Jambi, pemenuhan kebutuhan lokal, regional, dan global serta dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan.

10. Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam produksi pertanian

Salah satu peluang dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian adalah penggunaan teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna memiliki karakteristik tidak rumit, mudah diaplikasikan, dan relatif tidak mahal sehingga berpeluang untuk diaplikasikan dalam skala luas oleh petani kecil. Jika pada lima tahun pertama telah dilakukan inventarisasi dan pengembangan teknologi tepat guna, pada lima tahun kedua, kebijakan

diarahkan untuk penerapan teknologi tersebut ke seluruh lapisan petani disesuaikan dengan situasi lahan dan kondisi serta pengetahuan petani. Meskipun demikian, identifikasi dan inventarisasi teknologi-teknologi terbaru yang dapat dikemas dalam teknologi tepat guna, harus tetap dijalankan mengingat teknologi dan inovasi yang terus berkembang.

11. Mewujudkan Jambi sebagai destinasi unggulan regional yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi serta peningkatan keterpaduan pariwisata dengan sektor pembangunan lainnya

Menindaklanjuti kebijakan lima tahun pertama terkait upaya inventarisasi ragam potensi wisata baik wisata alam maupun wisata buatan, kebijakan pembangunan lima tahun kedua diarahkan untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan potensi wisata yang telah ada sehingga tiap-tiap destinasi wisata memiliki nilai tambah yang tinggi. Lebih jauh lagi, dalam lima tahun kedua pengembangan destinasi wisata diarahkan untuk menjadikan Provinsi Jambi sebagai destinasi unggulan regional.

Keterpaduan antara sektor wisata dengan sektor pembangunan lainnya merupakan strategi yang penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Integrasi antar-sektor tersebut dapat menciptakan sinergi positif dan memberikan dampak yang lebih luas bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan di atas, salah satu upaya yang harus dikerjakan adalah memadukan antara sektor wisata dengan sektor pembangunan lainnya seperti sektor ekonomi dan infrastruktur.

12. Peningkatan produk bernilai tambah tinggi berbasis seni budaya Jambi, serta peningkatan partisipasi pada rantai pasok nasional dan global

Melanjutkan kebijakan pada lima tahun pertama dimana pembangunan diarahkan untuk menguatkan ekonomi kreatif berbasis seni budaya, pada lima tahun kedua kebijakan diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah dari produk-produk ekonomi kreatif yang dihasilkan. Hal ini disebabkan produk-

produk berbasis seni budaya seringkali memiliki target pasar yang relatif sempit dan terbatas sehingga sebagai kompensasinya produk tersebut perlu dikemas kedalam bentuk yang memiliki nilai universal. Dengan meningkatnya nilai tambah dari produk yang dihasilkan, diharapkan tingkat partisipasi pemerintah dan/atau pelaku ekonomi kreatif akan meningkat dalam rantai pasok nasional bahkan global.

13. Mendorong Koperasi dan UKM menghasilkan produk yang masuk rantai pasok ekspor

Melanjutkan kebijakan lima tahun pertama yaitu mendorong pertumbuhan koperasi modern dan UKM naik kelas, kebijakan lima tahun kedua diarahkan untuk mendorong koperasi-koperasi dan UKM untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan berkualifikasi dalam memasuki rantai pasok ekspor. Untuk dapat memasuki rantai pasok ekspor, produk harus memenuhi sejumlah kualifikasi dan standar tertentu. Persyaratan ini dapat bervariasi tergantung pada jenis produk, tujuan ekspor, dan regulasi yang berlaku di negara-negara penerima.

14. Penguatan daya saing pusat-pusat pertumbuhan ekonomi

Penguatan daya saing pusat-pusat pertumbuhan ekonomi merupakan suatu upaya strategis untuk mendorong perkembangan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, seperti kota atau wilayah yang menjadi fokus pembangunan, dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa strategi untuk memperkuat daya saing pusat-pusat pertumbuhan ekonomi antara lain : pembangunan infrastruktur (transportasi, teknologi dan komunikasi, energi dan listrik), pengembangan SDM, pengembangan ekonomi sektor unggulan, pengembangan usaha kecil dan menengah, keberlanjutan lingkungan, partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan, pengelolaan risiko, dan promosi ekonomi digital.

Melalui penerapan strategi-strategi ini, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat daya saingnya, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penting untuk memastikan bahwa strategi ini diimplementasikan secara terintegrasi dan melibatkan partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan

15. Digitalisasi di semua sektor

Setelah pada lima tahun pertama, kebijakan diarahkan untuk memenuhi akses digital di semua wilayah, pada lima tahun berikutnya, kebijakan diarahkan untuk mewujudkan digitalisasi di semua sektor. Digitalisasi sudah merupakan trend dalam dunia global yang menjamin efisiensi dalam operasional layanan dan pembangunan. Teknologi ini memungkinkan lebih akuratnya pekerjaan karena lebih banyak dikerjakan oleh sistem secara otomatis sehingga produktivitaspun meningkat. Selain itu, digitalisasi akan memudahkan komunikasi dengan dunia global, mendapatkan akses informasi dan akses ke pasar global, fleksibilitas kerja, hemat biaya operasional, dan peningkatan daya saing.

Dengan berbagai manfaat tersebut, digitalisasi di semua sektor menjadi suatu kebutuhan strategis untuk memastikan bahwa organisasi dapat bertahan dan tumbuh di era teknologi informasi yang terus berkembang.

16. Pengembangan kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda berbasis digitalisasi teknologi serta penataan sistem pembinaan pemuda dan olahraga yang terintegrasi dan berkesinambungan

Pengembangan kewirausahaan, kepemimpinan, dan kepeloporan pemuda berbasis digitalisasi teknologi merupakan aspek penting dalam menghadapi tantangan dan peluang era digital. Guna mewujudkannya, kebijakan berkaitan dengan penyediaan akses pendidikan digital yang berkualitas untuk pemuda, termasuk keterampilan teknologi, kewirausahaan

digital, dan literasi digital menjadi fokus pada periode ini. Ini mencakup pelatihan dalam pengembangan aplikasi, pengelolaan data, dan pemahaman teknologi terkini. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga mendukung pembentukan inkubator dan ruang kolaborasi digital di mana pemuda dapat berbagi ide, berkolaborasi, dan mengembangkan proyek digital. Demikian pula halnya dengan kewirausahaan di kalangan pemuda dengan memberikan dukungan untuk memulai dan mengembangkan bisnis digital. Ini dapat melibatkan program pelatihan, pembiayaan start-up, dan bimbingan dari para pengusaha berpengalaman.

Berkaitan dengan hal di atas, dibutuhkan suatu sistem pembinaan pemuda dan olah raga yang mencakup infrastruktur dan kelembagaan yang saling terintegrasi dan berkesinambungan.

17. Inovasi untuk mendukung Ketahanan Pangan, air, dan Energi

Di tengah situasi pemanasan global dan perubahan iklim, krisis pangan, air dan energi merupakan ancaman yang harus diwaspadai sehingga perlu dipikirkan antisipasinya sedini mungkin. Dalam rangka mengantisipasi diperlukan adanya penguatan pada sektor-sektor yang terkait. Proses penguatan tersebut membutuhkan Inovasi agar diperoleh lompatan-lompatan yang dapat mewujudkan tujuan tersebut dalam waktu yang lebih cepat. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah diarahkan untuk mencari berbagai inovasi dan teknologi yang berkaitan dengan strategi dan upaya mengantisipasi ancaman krisis pangan, energi sehingga ketahanan pangan, air, dan energi dapat tercapai.

18. Penerapan teknologi pengurangan risiko Dampak Perubahan Iklim

Penerapan teknologi pengurangan risiko dampak perubahan iklim memiliki peran krusial dalam menghadapi tantangan yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Teknologi ini

tidak hanya dapat membantu mengurangi risiko bencana, tetapi juga meningkatkan ketahanan komunitas dan mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan.

Penerapan teknologi ini harus didukung oleh regulasi yang memadai, kapasitas institusional yang memadai, dan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan. Keterlibatan masyarakat, pembuat kebijakan, dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan solusi teknologi pengurangan risiko dampak perubahan iklim

19. Penataan Ruang PKL (pusat kegiatan lokal) dan Penyediaan Angkutan Masal

Penataan ruang pusat kegiatan lokal adalah suatu pendekatan dalam perencanaan dan pengelolaan ruang yang ditujukan untuk merancang, mengorganisir, dan memanfaatkan pusat kegiatan di suatu wilayah atau kawasan. Hal ini mencakup desain ruang fisik, penggunaan lahan, dan fasilitas yang mendukung kegiatan masyarakat, bisnis, dan budaya di suatu pusat perkotaan atau pusat kegiatan lokal. Selain itu, perancangan dan pengembangan PKL merupakan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah daerah. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan PKL adalah zonasi fungsional, desain arsitektur, aksesibilitas dan transportasi, fasilitas publik, keberlanjutan lingkungan, partisipasi masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan konservasi warisan budaya. Seyogyanya dalam penataan ruang PKL juga melibatkan masyarakat dan pihak swasta agar dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan mendukung kehidupan masyarakat lokal.

Transportasi merupakan bagian terpenting dalam suatu perencanaan tata ruang. Konektivitas antar wilayah sangat ditentukan oleh kelancaran transportasi. Dalam situasi lalu lintas dengan tingkat kemacetan yang terus meningkat, pemikiran adanya transportasi massal merupakan alternatif utama sebagai solusi untuk mengurangi masalah lalu lintas.

Oleh karena itu, merencanakan tata ruang ke depan perlu mempertimbangkan rancangan infrastruktur bagi alat-alat transportasi masal.

20. Perlindungan dan pengendalian, pemanfaatan sumber daya pesisir sesuai dengan potensi

Perlindungan, pengendalian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir yang sesuai dengan potensi merupakan suatu pendekatan holistik yang memperhatikan keseimbangan antara pelestarian lingkungan, keberlanjutan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan adalah : pemetaan dan zonasi, konservasi sumberdaya alam, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan ruang pesisir, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.

Penerapan pendekatan ini harus mempertimbangkan konteks lokal, dinamika sosial, dan kebutuhan masyarakat setempat. Penting untuk menciptakan keseimbangan antara pelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya ekonomi, dan kesejahteraan sosial untuk mencapai pengelolaan sumber daya pesisir yang berkelanjutan.

21. Pembangunan interkoneksi pengurangan kesenjangan antar wilayah dan pendapatan

Pembangunan interkoneksi untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan pendapatan adalah suatu pendekatan yang sangat penting dalam menciptakan kesetaraan dan mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk membangun interkoneksi yang efektif antara lain: infrastruktur transportasi, infrastruktur telekomunikasi, energi dan listrik, pusat perekonomian dan konsentrasi industri, pemberdayaan Sumber Daya Manusia, pengembangan kawasan perbatasan, pengembangan pariwisata berkelanjutan, dan tata kelola yang baik:

Pembangunan interkoneksi yang baik merupakan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Melalui integrasi infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial, kesenjangan antar wilayah dan pendapatan dapat dikurangi, dan pembangunan yang berkelanjutan dapat terwujud.

22. Penyelenggaraan Diklat Kolaboratif

Penyelenggaraan diklat kolaboratif atau pelatihan yang melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak memiliki sejumlah manfaat positif, baik bagi peserta diklat maupun bagi organisasi atau lembaga penyelenggara. Diklat kolaboratif memungkinkan peserta untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam melalui berbagai sudut pandang. Kolaborasi memungkinkan pertukaran ide dan pengetahuan antar peserta, mengenai tantangan dan solusi yang dihadapi di berbagai konteks. Selain itu, peserta diklat dapat mengembangkan keterampilan kolaboratif, seperti kemampuan berkomunikasi efektif, bekerja sama dalam tim, dan membangun hubungan interpersonal yang baik. Ini sangat penting dalam lingkungan kerja yang modern yang sering menekankan kerja tim dan kolaborasi.

Kolaborasi dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta dalam proses belajar dan dapat membawa bersama peserta dengan berbagai latar belakang, pengalaman, dan keahlian. Ini menciptakan lingkungan yang kaya dan memungkinkan pembelajaran dari variasi perspektif yang berbeda. Pada sisi lain, kolaborasi membuka peluang untuk memperluas jaringan profesional. Peserta diklat dapat membangun hubungan dengan sesama peserta, instruktur, atau ahli di bidangnya, yang dapat bermanfaat untuk pertukaran informasi dan peluang kolaborasi di masa depan.

Kolaborasi membantu menciptakan lingkungan yang lebih fleksibel dan adaptatif. Organisasi dapat merespons perubahan dengan lebih cepat karena memiliki jaringan dukungan yang luas.

23. Regulasi berbasis teknologi informatif

Regulasi dengan memanfaatkan teknologi informasi mencakup penerapan teknologi informasi (TI) dalam penyusunan, implementasi, dan penegakan regulasi. Pemanfaatan TI dalam regulasi dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Contoh cara regulasi dapat dimanfaatkan dengan teknologi informasi antara lain : penerapan sistem e-government, penggunaan sistem manajemen regulasi berbasis TI, penggunaan teknologi blockchain, pendokumentasian elektronik, analisis data dan kecerdasan buatan (AI), sistem pelaporan dan pengaduan online, dan lain-lain.

24. Mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim

Mitigasi terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan suatu langkah yang krusial untuk melindungi manusia, lingkungan, dan aset-aset vital dari dampak-dampak negatif yang dapat disebabkan oleh bencana alam dan perubahan iklim. Strategi dan tindakan mitigasi yang akan dilakukan adalah pemetaan risiko dan zonasi bahaya, pembangunan infrastruktur tahan bencana, *early warning system*, pengelolaan vegetasi dan pesisir, penataan ruang dan tata guna lahan yang baik.

Mitigasi bencana dan perubahan iklim merupakan suatu upaya jangka panjang yang memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan penerapan tindakan-tindakan ini, diharapkan dapat mengurangi risiko dan meningkatkan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Dalam upaya memantapkan ketenteraman dan ketertiban umum, kesinambungan kebijakan terkait ketentraman dan ketertiban masyarakat harus selalu ditingkatkan. Meskipun pada lima tahun pertama, upaya-upaya terkait telah mulai dilakukan, pada lima tahun kedua ini upaya peningkatan tetap dilakukan mengingat dinamika

sosial yang terjadi di masyarakat selalu berubah demikian pula dengan potensi sumber-sumber kekacauan dan kejahatan.

Salah satu strategi dalam upaya meningkatkan ketentraman masyarakat tersebut adalah dengan mewujudkan kelembagaan yang kolaboratif, proporsional dan kompeten. Lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pengendalian ketentraman dan ketertiban masyarakat seyogyanya berkolaborasi dalam mencegah dan menanggulangi berbagai potensi yang menimbulkan gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Sementara untuk mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif dan berkebudayaan maju, kebijakan jangka menengah tahap kedua yang akan dilakukan adalah **penguatan lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dapat melaksanakan keberfungsian sosial**. Keluarga memiliki banyak fungsi sosial yang penting dalam membentuk dan memelihara hubungan antaranggota keluarga serta berkontribusi pada pembentukan individu di dalam masyarakat. Fungsi-fungsi tersebut antara lain : Reproduksi dan Pewarisan Budaya, perawatan dan perlindungan, fungsi proteksi dan keamanan, dan fungsi pembentukan identitas serta kepribadian. Dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial tersebut, sebuah keluarga tidak lepas dari interaksinya dengan lingkungan pendukung yaitu faktor-faktor di luar rumah tangga tersebut yang mempengaruhi atau memberikan dampak pada dinamika, kesejahteraan, dan fungsi keluarga. Faktor-faktor ini dapat berasal dari masyarakat sekitar, lingkungan sosial, kebijakan pemerintah, dan perubahan dalam keadaan ekonomi. Oleh karena itu, penguatan faktor-faktor tersebut pada akhirnya akan meningkatkan keberfungsian sosial dari sebuah keluarga.

Selanjutnya untuk mewujudkan kemandirian pangan, kebijakan akan diarahkan pada pengelolaan dan perlindungan sumber produksi pangan. Pangan dan perikanan merupakan bahan yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan pangan pun semakin meningkat. Pada sisi lain, laju produksi pangan tidak

mampu mengimbangi kebutuhan sehingga pemerintah terpaksa mengimpor sebagian bahan pangan. Berkurangnya luasan areal produksi pangan akibat konversi lahan menjadi areal infrastruktur dan masih belum maksimalnya produktivitas tanaman pangan, merupakan tantangan yang harus diselesaikan. Salah satu upaya guna menekan laju penurunan produksi adalah dengan diversifikasi bahan pangan. Terdapat sejumlah bahan pangan potensial (penghasil karbohidrat) alternatif beras, patut dipertimbangkan agar ketahanan pangan tercapai. Tanaman-tanaman penghasil pangan tersebut umumnya merupakan tanaman-tanaman yang selama ini terabaikan dan tidak termanfaatkan (*neglected and underutilized*). Terkait dengan upaya pemanfaatan tanaman tersebut, diperlukan suatu upaya pengelolaan mengingat status terabaikan berpotensi mengarah pada erosi genetik. Selain itu, diversifikasi yang ada harus dipertahankan karena merupakan plasma nutfah yang tidak hanya penting dalam kedudukannya di suatu ekosistem, namun juga merupakan bahan dari program pemuliaan.

Ketersediaan pangan dalam suatu kerangka ketahanan pangan merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan demi tercapainya ketentraman dan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Ketahanan pangan dicirikan dengan adanya akses yang merata terhadap seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ketersediaan pangan sebagaimana diungkap sebelumnya, sangat bergantung pada tingkat produksi pangan yang variabel penentunya antara lain adalah luasan tanam (jumlah petani yg menanam komoditas pangan). Kurangnya jaminan pasar dan harga yang tidak menguntungkan serta berkurangnya luasan lahan menyebabkan tidak stabilnya pasokan. Oleh karena itu, diperlukan upaya kebijakan peningkatan ketersediaan pangan dan akses pangan melalui peningkatan stabilitas pasokan dan peningkatan harga.

5.1.3 Arah Kebijakan Periode 2035 - 2039

Akselerasi transformasi yang telah dilakukan pada periode sebelumnya mengantarkan Provinsi pada periode ketiga RPJPD dengan kebijakan yang mengarah pada ekspansi global. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Kesehatan

Sumberdaya manusia kesehatan memainkan peran penting dalam upaya mewujudkan kualitas layanan kesehatan yang prima serta kemandirian kesehatan bagi masyarakat. Upaya peningkatan kualitas SDM kesehatan hanya dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan bagi tenaga-tenaga kesehatan serta masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pembangunan lima tahun ke tiga diarahkan untuk meningkatkan proses pendidikan bagi tenaga kesehatan (perbaikan kualitas diklat) serta mengembangkan sistem pendidikan kesehatan bagi masyarakat. Sistem pendidikan kesehatan bagi masyarakat mencakup berbagai metode dan cara menyebarluaskan pengetahuan dan informasi tentang kesehatan sehingga masyarakat dapat melakukan cara hidup sehat, upaya pencegahan penyakit, dan penanganan dasar terhadap gejala-gejala penyakit.

b. Pendidikan

Pentingnya Sumberdaya manusia dalam segala sektor pembangunan menuntut adanya upaya peningkatan kualitas yang berkesinambungan. Dinamisnya tantangan pembangunan dalam setiap pergeseran masa mengharuskan pemerintah mengambil langkah-langkah penguatan terhadap program pengembangan sumberdaya manusia yang ditujukan untuk menguatkan daya saing dan meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia. Meningkatnya daya saing dan produktivitas SDM akan menentukan kelanjutan program pembangunan yang pada akhirnya akan menentukan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

Pada sisi yang berbeda, kemampuan literasi, luasnya pengetahuan dan wawasan serta keterampilan berpikir dalam

pengambilan keputusan dan menyelesaikan persoalan merupakan ciri dari sumberdaya manusia yang handal. Salah satu sasaran pembangunan pendidikan adalah mewujudkan sumberdaya manusia dengan karakteristik tersebut. Guna mendukung hal tersebut, perpustakaan sebagai salah satu infrastruktur pendidikan yang hingga saat ini masih memainkan peran penting dalam pembangunan SDM, harus dilengkapi dengan berbagai instrumen pendukung yang terbangun dengan teknologi digital. Digitalisasi layanan perpustakaan diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas layanan dan peran perpustakaan dalam sistem pendidikan nasional.

Berkaitan dengan pemerataan akses pendidikan, selain terus meningkatkan kualitas, pembangunan lima tahun ketiga ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pembiayaan pendidikan dengan harapan bahwa biaya pendidikan yang harus dikeluarkan masyarakat akan lebih murah sehingga pada akhirnya pendidikan dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai lapisan.

c. Sosial dan Tenaga Kerja

Kelompok masyarakat rentan adalah kelompok yang memiliki risiko tinggi mengalami ketidaksetaraan, ketidakamanan ekonomi, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya dan layanan. Kelompok ini sering kali membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dan lembaga-lembaga pengembangan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Meskipun demikian, kelompok-kelompok ini tetap diharapkan memiliki kemandirian secara sosial ekonomi. Beberapa strategi yang diupayakan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat rentan dalam pembangunan lima tahun ketiga antara lain menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum yang sesuai, penguatan pemberdayaan perempuan, lansia dan disabilitas, mendorong pembentukan kelompok usaha bersama atau koperasi, memudahkan akses ke sumberdaya keuangan. merancang program sosial dan perlindungan, serta mendorong keterlibatan pihak swasta. Melalui kombinasi

langkah-langkah ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan di mana kelompok masyarakat rentan dapat mengembangkan kemandirian ekonomi mereka dengan lebih efektif.

Seiring dengan implementasi program diatas, pembangunan juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan merancang lingkungan yang ramah bagi kelompok-kelompok rentan tertentu seperti taman-taman khusus lansia dan anak-anak.

Dilain pihak, pada bidang ketenagakerjaan, pemerintah akan memfasilitasi pengembangan karir dan kualitas tenaga kerja dengan memberikan fasilitas untuk mobilitas tenaga kerja terutama ketika ingin menembus pasar kerja global. Demikian pula dengan perlindungan bagi tenaga kerja, diperlukan penguatan sistem perlindungan adaptif bagi tenaga kerja termasuk bagi tenaga kerja rentan. Termasuk dalam bentuk perlindungan adalah pemberian upah yang berkeadilan misalnya berbasis produktivitas.

Pada sisi lain, sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di bidang pengawasan ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan perusahaan dan pekerja terhadap peraturan ketenagakerjaan. Integrasi teknologi dalam aktivitas pengawasan terhadap tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan kualitas pekerjaan pengawasan.

d. Ekonomi

1. Akselerasi Industri produk jadi dan peningkatan daya saing industri dan produk hilirisasi

Akselerasi industri produk jadi merupakan strategi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing dalam produksi barang jadi atau produk siap pakai. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam percepatan industri produk jadi adalah mendorong inovasi teknologi, penelitian dan pengembangan, kemitraan industri, standardisasi dan sertifikasi, diversifikasi produk, rehabilitasi manufaktur, dan lain-lain.

Pada periode pembangunan sebelumnya, telah dilakukan upaya hilirisasi produk sumber daya alam. Dalam konteks

peningkatan nilai tambah, daya saing industri dan produk hilirisasi tersebut perlu ditingkatkan karena dapat meningkatkan produktivitas ekonomi suatu wilayah. Selain nilai tambah yang tinggi, upaya peningkatan daya saing dapat berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru, diversifikasi ekonomi, mendorong inovasi dan pengembangan teknologi, meningkatkan daya saing ekspor negara, meningkatkan reputasi dan daya saing global suatu negara, dapat meningkatkan standar hidup masyarakat.

Penguatan daya saing industri maupun produk hilirisasi merupakan upaya untuk membuat suatu sektor industri lebih efisien, inovatif, dan kompetitif di pasar global. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk memperkuat daya saing industri antara lain : mendorong inovasi baik produk maupun prosesnya, mendorong riset dan pengembangan kolaboratif (dengan perguruan tinggi), memperbaiki infrastruktur pendukung, efisiensi proses dan adopsi teknologi digital, kemitraan, pengembangan pasar, dan lain-lain. Melalui penerapan strategi-strategi ini, suatu industri dapat memperkuat posisinya dalam pasar, meningkatkan daya saing, dan menciptakan fondasi untuk pertumbuhan jangka panjang. Kesenambungan dalam peningkatan daya saing perlu dijaga agar dapat menjawab dinamika pasar yang terus berubah.

2. Terwujudnya Jambi sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan tingkat Asean (Asia)

Provinsi Jambi merupakan daerah yang memiliki keragaman potensi wisata yang cukup tinggi sedangkan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu, pada periode pembangunan sebelumnya, kebijakan diarahkan untuk menjadikan Jambi sebagai destinasi unggulan nasional yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi. Pada lima tahun ketiga, kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kualitas destinasi wisata yang ada dengan tujuan menjadi destinasi pariwisata unggulan tingkat ASEAN bahkan Asia.

Optimalisasi berbagai infrastruktur sambil terus mengeksplorasi potensi sumber wisata baru, dan integrasi teknologi informasi berbasis digital ke dalam sistem manajemennya, diharapkan dapat meningkatkan nilai jual dan promosi wisata ke target yang lebih luas.

3. peningkatan daya saing industri berbasis hak kekayaan budaya dan intelektual

Industri berbasis hak kekayaan budaya dan intelektual (HKBI) merujuk pada sektor ekonomi yang mengandalkan dan menghasilkan nilai tambah dari aset intelektual dan kekayaan budaya. Ini mencakup perlindungan dan eksploitasi komersial dari hak-hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri, yang terkait dengan produk atau layanan yang memiliki nilai kreatif atau intelektual. Provinsi Jambi dikenal sebagai wilayah dengan keanekaragaman budaya yang cukup tinggi mulai dari adat istiadat serta karya seni dari penduduk asli. Selain memiliki potensi wisata, kekayaan budaya tersebut juga memiliki potensi industri seperti kuliner, desain batik, dan lain-lain. Terkait dengan potensi ini, kebijakan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan daya saing industri yang berbasis kekayaan budaya dan intelektual. Perlindungan hukum dalam kerangka HAKI merupakan salah satu upaya awal untuk meningkatkan giat industri berbasis ragam budaya lokal Jambi.

4. Peningkatan diversifikasi produk KUKM berkualitas ekspor

Setelah pada periode pembangunan sebelumnya, kebijakan diarahkan untuk mewujudkan produk KUKM berkualitas ekspor, pada periode lima tahun ketiga, kebijakan diarahkan untuk melakukan upaya diversifikasi produk KUKM berkualitas ekspor. Diversifikasi produk adalah strategi bisnis yang bertujuan untuk mengembangkan berbagai produk atau layanan baru untuk ditawarkan kepada pelanggan. Tujuan dari diversifikasi produk dapat mencakup beberapa aspek yang dapat memberikan manfaat bagi kelompok usaha. Diversifikasi

produk dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dari suatu kelompok usaha. Selain itu, diversifikasi juga dapat memfasilitasi perluasan pangsa pasar, meningkatkan keuntungan dan nilai tambah, mengurangi tekanan persaingan, dan optimalisasi sumberdaya.

5. Peningkatan efisiensi, produktivitas, modernisasi dan nilai tambah sektor pertanian melalui implementasi teknologi

Telah diketahui bahwa efisiensi dan efektivitas dari suatu proses produksi sangat bergantung pada kinerja proses itu sendiri yang mana sangat ditentukan oleh elemen-elemen dan infrastruktur pendukungnya. Selain sumberdaya manusia sebagai pelaku, bahan baku, teknik proses, dan kualitas alat bantu proses merupakan elemen-elemen dimaksud. Selanjutnya, Kinerja proses yang efektif dengan penggunaan bahan baku yang efisien pada akhirnya akan menghasilkan nilai tambah dari produk yang dihasilkan. Mekanisme ini lazim berlaku pada semua sektor produksi termasuk sektor pertanian. Oleh karena itu, modernisasi alat bantu proses dan implementasi teknologi terkini diasumsikan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian. Terkait dengan hal tersebut, kebijakan pembangunan lima tahun ketiga diarahkan untuk meningkatkan modernisasi dan implementasi updated teknologi sehingga nilai tambah dan kuantitas produksi pun meningkat.

6. Instrumen kebijakan ekonomi hijau dan penerapan ekonomi biru yang komprehensif

Instrumen kebijakan ekonomi hijau mencakup berbagai alat dan tindakan yang digunakan oleh pemerintah dan lembaga keuangan untuk mendorong praktik dan investasi yang ramah lingkungan. Tujuannya adalah untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sedangkan ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut dan kelautan secara

berkelanjutan. Istilah "biru" dalam ekonomi biru merujuk pada warna laut yang melibatkan ekosistem dan potensi sumber daya laut. Konsep ini menekankan pengelolaan laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pelestarian lingkungan yang efektif. Penerapan ekonomi biru yang komprehensif dan instrumen kebijakan ekonomi hijau merupakan arah kebijakan pada lima tahun ketiga. Strategi yang dilakukan meliputi tata guna lahan, pemulihan dan peningkatan produktivitas lahan berkelanjutan, kapasitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan melalui peningkatan akses terhadap modal pembangunan dan penghidupan (*livelihood capitals*), serta pemanfaatan jasa lingkungan, serta konektivitas dan rantai nilai berkelanjutan.

7. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru

Dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi di Provinsi Jambi, kebijakan lima tahun ketiga diarahkan untuk merancang dan mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru. Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru merupakan strategi untuk merangsang perkembangan ekonomi di wilayah tertentu. Proses ini melibatkan serangkaian langkah yang dirancang untuk menggerakkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi di suatu daerah. Beberapa strategi yang dapat digunakan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru antara lain : analisis potensi wilayah, pengembangan infrastruktur, promosi investasi, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan pendidikan, pemberdayaan wirausaha lokal, pengembangan sektor unggulan, mendorong sektor pariwisata dan kebudayaan, dan pendekatan berbasis komunitas.

8. Penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga berbasis listrik

Penggunaan kendaraan dan peralatan rumah tangga berbasis listrik memiliki beberapa urgensi yang signifikan, baik dari perspektif lingkungan, kesehatan, maupun ekonomi. Beberapa

pertimbangan mengapa hal ini menjadi urgent antara lain: kendaraan berbahan bakar listrik, terutama jika listriknya berasal dari sumber energi bersih seperti energi terbarukan, dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan ini merupakan langkah penting dalam mengatasi perubahan iklim dan meminimalkan dampak negatifnya, diversifikasi sumber energi, bebas polusi udara, efisiensi energi dan biaya operasional yang lebih rendah.

Penerapan kendaraan berbahan bakar listrik menjadi suatu langkah penting dalam mengarahkan transportasi menuju solusi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Meskipun masih ada beberapa tantangan dan hambatan, perkembangan teknologi dan dukungan dari berbagai pihak dapat membantu mempercepat adopsi kendaraan berbahan bakar listrik. Setelah pada periode sebelumnya, fokus kebijakan diarahkan untuk membangun infrastruktur pendukung kendaraan listrik, pada lima tahun ketiga ini, kebijakan diarahkan untuk secara masif mendorong penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga berbasis listrik.

e. Bidang Iptek dan Inovasi

Pada bidang ini kebijakan diarahkan pada Penguatan teknologi tepat guna melalui riset, inovasi dan SDM terampil guna mengoptimalkan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Teknologi tepat guna merupakan salah satu elemen pendukung dalam upaya peningkatan kuantitas produksi pertanian ataupun industri kecil. Kapasitas usaha dan modal pelaku usaha pertanian dan industri kecil (UKM) mengharuskan aplikasi berbagai teknologi tepat guna secara meluas agar target produksi dapat ditingkatkan. Jika pada periode pembangunan sebelumnya, integrasi teknologi tepat guna dalam sistem produksi pertanian telah diperluas, pada lima tahun ketiga ini pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas teknologi tepat guna melalui riset dan inovasi sehingga kinerja teknologi tepat guna yang digunakan menjadi lebih efektif dan

efisien. Selain itu, pada periode ini, pembangunan diarahkan juga untuk penguatan kualitas dan keterampilan SDM sehingga SDM pelaku usaha pertanian ataupun usaha kecil lainnya lebih familiar dan adaptif dengan kehadiran teknologi baru.

f. TATA RUANG WILAYAH

Kebijakan pembangunan pada lima tahun ketiga berkaitan dengan tata ruang adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perhubungan . Infra struktur perhubungan yang baik mendukung pergerakan barang dan jasa, memfasilitasi distribusi produk, dan memungkinkan aktivitas ekonomi. Ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau negara. Infrastruktur perhubungan yang baik dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah dan bahkan antarnegara. Ini membuka peluang untuk kerjasama ekonomi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sarana perhubungan, seperti jalan raya, jembatan, bandara, dan pelabuhan, memfasilitasi mobilitas masyarakat. Ini memberikan aksesibilitas yang lebih baik terhadap berbagai layanan dan peluang di berbagai daerah.

Infrastruktur perhubungan yang baik menjadi faktor kunci dalam pengembangan sektor pariwisata. Aksesibilitas yang mudah ke destinasi wisata meningkatkan daya tarik dan memberikan kontribusi positif pada perekonomian lokal. Sarana perhubungan yang efisien dapat mengurangi biaya logistik, termasuk biaya transportasi dan distribusi. Ini membuat kegiatan bisnis menjadi lebih efisien dan kompetitif. Sarana dan prasarana perhubungan menjadi kunci dalam pembangunan wilayah. Pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara dapat menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan daya saing suatu wilayah.

Infrastruktur perhubungan yang baik memberikan sinyal positif kepada investor dan dapat meningkatkan kepercayaan dalam perekonomian suatu wilayah. Hal ini dapat mendorong

investasi dan pertumbuhan sektor bisnis. Sarana dan prasarana perhubungan mendukung pergerakan bahan baku dan produk akhir, memfasilitasi distribusi dan produksi industri. Ini penting untuk meningkatkan daya saing industri nasional atau regional

g. Tata Kelola Pemerintahan

1. Peningkatan, pemanfaatan, dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber pendanaan non pemerintah

Perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber pendanaan non-pemerintah dapat memiliki dampak positif terhadap berbagai aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Umumnya sektor yang memanfaatkan sumber pendanaan non pemerintah hanya terbatas pada sektor infrastruktur. Sejumlah investasi telah dialirkan ke proyek-proyek pembangunan infrastruktur seperti bangunan gedung dan jalan. Sebab, jika pembangunan hanya mengandalkan dana dari pemerintah, proses pembangunan akan berjalan lambat. Dengan adanya investasi dari pihak swasta, percepatan pembangunan dapat terwujud. Oleh karena itu, kontribusi investasi pihak swasta terhadap pembangunan daerah harus dapat diperluas bukan hanya pada sektor infrastruktur saja, namun juga sektor lainnya seperti pendidikan dan sektor lain yang berkaitan dengan pembangunan sumberdaya manusia. Kebijakan pembangunan lima tahun ketiga salah satunya diarahkan untuk meningkatkan peran swasta dan memperluas jangkauan investasi ke sektor-sektor lain selain infrastruktur.

2. Penyelenggaraan Diklat yang Adaptif dan kompetitif

Pendidikan dan pelatihan merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam hal ini pegawai pemerintah atau ASN. Berkaitan dengan hal itu, kebijakan lima tahun ketiga diarahkan untuk mendorong penyelenggaraan diklat yang bersifat adaptif dan kompetitif. Penyelenggaraan diklat yang adaptif dan kompetitif merujuk

pada suatu pendekatan dalam pelaksanaan pelatihan atau diklat yang bersifat responsif terhadap perubahan kondisi atau kebutuhan di lingkungan sekitarnya, serta memastikan bahwa peserta diklat memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dan kompetitif di lingkungan kerja.

3. Percepatan penerapan teknologi pelayanan data kependudukan

Setelah pada periode pembangunan sebelumnya kebijakan diarahkan untuk membangun infrastruktur teknologi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang bertugas pada bagian pelayanan data kependudukan, maka pada lima tahun ketiga, kebijakan diarahkan untuk mengupayakan percepatan implementasi teknologi pelayanan data kependudukan

4. Regulasi Adaptif

Setelah pada periode pembangunan sebelumnya kebijakan diarahkan untuk membangun regulasi berbasis teknologi informasi, pada lima tahun ketiga ini, kebijakan diarahkan untuk mendorong agar terwujud regulasi yang adaptif. Regulasi adaptif mengacu pada pendekatan dalam pembuatan kebijakan atau regulasi yang dirancang untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi atau tantangan yang terjadi seiring waktu. Pendekatan ini mencerminkan pengakuan bahwa lingkungan dan konteks sosial, ekonomi, atau lingkungan hukum dapat berubah, dan aturan atau kebijakan yang fleksibel dan responsif diperlukan untuk tetap relevan dan efektif. Regulasi adaptif dicirikan dengan hal-hal seperti fleksibilitas, mekanisme evaluasi berkelanjutan, keterlibatan pihak pemangku kepentingan, responsif terhadap perubahan lingkungan, dan dukungan teknologi dan inovasi.

5. Mewujudkan kondisi dinamis melalui penegakan peraturan daerah yang transparan , akuntabel dan berkeadilan

Salah satu arah kebijakan pembangunan lima tahun ketiga adalah mewujudkan kondisi dinamis melalui penegakan peraturan daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan

merupakan suatu upaya untuk menciptakan lingkungan hukum dan tata kelola yang mendukung perkembangan yang berkelanjutan dan inklusif. Poin-poin penting dalam mewujudkan kondisi tersebut adalah transparansi baik dalam informasi publik, partisipasi publik dan dalam pengambilan keputusan; akuntabilitas (mekanisme pengawasan, pelaporan kinerja, dan pertanggungjawaban hukum); berkeadilan; kolaborasi dan kemitraan; aplikasi teknologi informasi. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa peraturan daerah tidak hanya efektif dalam menciptakan kondisi yang dinamis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan keadilan yang mendasari tata kelola yang baik

h. Budaya Dan Keluarga

1. Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan yang berkarakter untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

Salah satu arah kebijakan pembangunan lima tahun ketiga adalah pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan yang berkarakter dapat menjadi sumber daya potensial untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Budaya memiliki peran yang penting dalam membentuk identitas, memperkaya kehidupan sosial, dan menciptakan nilai-nilai positif dalam suatu masyarakat. Berikut adalah beberapa cara pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan yang berkarakter dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu pengembangan pariwisata budaya, industri kreatif dan seni, ekonomi kreatif berbasis lokal, pemberdayaan komunitas Lokal, festival budaya dan acara kebudayaan, dan pengembangan produk berbasis kebudayaan.

Pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melibatkan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Memastikan bahwa pemanfaatan ini dilakukan dengan keberlanjutan dan menghormati nilai-nilai budaya setempat akan memberikan

dampak positif yang lebih signifikan pada kesejahteraan masyarakat.

2. Kehidupan masyarakat yang berkualitas, berdaya dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif

Arah kebijakan lainnya adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, berdaya, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif. Hal ini melibatkan serangkaian upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar, meningkatkan kualitas hidup, dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat agar dapat ikut serta dalam proses pembangunan. Beberapa aspek kunci yang dapat mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang berkualitas dan inklusif antara lain pendidikan untuk semua, layanan kesehatan yang merata, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur yang mendukung, pengentasan kemiskinan, partisipasi masyarakat, pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan, peningkatan kualitas hidup, dan keamanan dan perlindungan. Pentingnya memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan memiliki pendekatan inklusif, menghormati keberagaman, dan memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang rentan. Ini akan membantu menciptakan kondisi di mana semua warga dapat menikmati kehidupan yang berkualitas dan berdaya.

i. Energi, Pangan Dan Lingkungan

1. Kedaulatan menuju kemandirian pangan serta penguatan pangan lokal

Kedaulatan pangan dan penguatan pangan lokal merupakan aspek penting dalam upaya mencapai kemandirian pangan suatu negara. Kedaulatan pangan mengacu pada kemampuan suatu negara untuk menyediakan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas bagi penduduknya, sementara penguatan pangan lokal menekankan pada pengembangan dan pemberdayaan sistem pangan di tingkat lokal. Beberapa

strategi dan aspek penting dalam mencapai kedaulatan pangan dan penguatan pangan lokal antara lain : mendorong diversifikasi pertanian, pemberdayaan petani lokal (akses dan modal), pengembangan infrastruktur pertanian, pola konsumsi lokal, penggunaan teknologi tepat guna pertanian, membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil, penguatan sistem pasar lokal,

Mencapai kedaulatan pangan dan penguatan pangan lokal memerlukan pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan petani. Melalui upaya bersama ini, diharapkan dapat diciptakan sistem pangan yang lebih berkelanjutan, adil, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk secara lokal. Oleh karena itu, arah kebijakan lima tahun ketiga ini adalah mengupayakan terwujudnya kedaulatan menuju kemandirian pangan serta penguatan pangan lokal

2. Modernisasi sistem irigasi untuk mendorong efisiensi penggunaan air irigasi

Air merupakan faktor lingkungan yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dengan demikian, air menjadi faktor pembatas bagi produksi pertanian. Ditengah kondisi perubahan atau anomali iklim, diperlukan sistem pengendalian dan pengelolaan air yang optimal sehingga ketersediaan air terjamin saat dibutuhkan. Salah satu upaya mengoptimalkan pengendalian dan pemanfaatan air adalah dengan mengoptimalkan sistem irigasi. Modernisasi sistem irigasi merupakan langkah kritis untuk mendorong efisiensi penggunaan air dalam pertanian. Sistem irigasi yang efisien dapat meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi pemborosan air, dan mendukung keberlanjutan lingkungan.

Beberapa alternatif modernisasi sistem irigasi antara lain penggunaan teknologi sensor, sistem irigasi tetes dan sprinkler, pemantauan dan pengendalian otomatis, irigasi

berbasis data dan analitik, pengelolaan sumber daya air, dan pendekatan irigasi terpadu. Kebijakan pembangunan terkait pengelolaan air untuk pertanian pada lima tahun ketiga diarahkan pada modernisasi sistem irigasi untuk mencapai efisiensi penggunaan air irigasi.

3. Penguatan tim kesehatan dalam bencana (TGC & DMT) untuk Lebih produktif dan Inovatif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan pelayanan bencana

Sumberdaya manusia dibalik pelayanan kesehatan selama masa bencana merupakan penentu kualitas layanan yang diperoleh oleh masyarakat korban bencana. Kapasitas dan kompetensi misalnya tim gerak cepat (TGC) dan *Disaster Medical Team (DMT)* harus dievaluasi secara periodik seiring dengan berkembangnya metode penanganan korban bencana. Berkaitan dengan hal itu, pemerintah akan melakukan penguatan terhadap tim kesehatan dalam bencana agar lebih tangguh dan inovatif serta berkemampuan, dalam melakukan pelayanan kesehatan saat bencana.

Pada sisi lain, jumlah korban dalam suatu kejadian bencana bergantung pada tingkat adaptasi masyarakat terhadap peristiwa bencana tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan upaya untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi perubahan dan bencana serta mampu melakukan pencegahan dan penanganan darurat bencana. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan sosialisasi informasi mengenai jenis-jenis dan karakteristik bencana baik melalui pelatihan terorganisir maupun melalui media sosial berbasis online.

4. Pengurangan pencemaran lingkungan

Kebijakan pengurangan pencemaran lingkungan merupakan langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk mengurangi dan mencegah dampak negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk industri, pertanian,

transportasi, dan perilaku rumah tangga. Beberapa kebijakan yang umumnya diadopsi untuk mengurangi pencemaran lingkungan antara lain : regulasi lingkungan, pajak lingkungan, insentif ekonomi, pemantauan dan penegakan hukum, penerapan energi bersih, sertifikasi Lingkungan, pengelolaan limbah terpadu, dan peningkatan efisiensi energi.

5. Integrasi sistem pangan

Salah satu upaya untuk menyelesaikan persoalan pemenuhan kebutuhan pangan dan pencapaian ketahanan pangan adalah dengan integrasi sistem pangan. Integrasi sistem pangan adalah pendekatan holistik untuk mengelola seluruh rantai nilai pangan mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi dengan mempertimbangkan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk menciptakan sistem pangan yang efisien, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. beberapa aspek penting dari integrasi sistem pangan antara lain produksi pertanian yang terintegrasi, sistem distribusi dan rantai pasok yang efisien, teknologi informasi dan komunikasi, keamanan pangan dan pelacakan produk, pengelolaan limbah dan lingkungan, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi, kebijakan publik dan regulasi.

Integrasi sistem pangan bukan hanya tentang mengelola satu bagian dari rantai nilai pangan, tetapi tentang memahami hubungan yang kompleks antara berbagai elemen dalam sistem dan mencari solusi holistik untuk meningkatkan keberlanjutan dan efisiensi.

6. Pengendalian Zona Lindung

Pengendalian zona lindung adalah serangkaian tindakan dan kebijakan yang diimplementasikan untuk melindungi dan mengelola zona-zona lindung dengan tujuan melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan fungsi ekosistem, dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut. Zona lindung biasanya didefinisikan sebagai area

yang memiliki nilai ekologis tinggi dan penting untuk konservasi alam. Beberapa strategi yang digunakan dalam pengendalian zona lindung antara lain : penetapan batas dan zonasi, menerapkan sistem pengawasan dan patroli yang efektif, mengatur pemanfaatan sumber daya alam, edukasi dan partisipasi masyarakat, melakukan rehabilitasi ekosistem yang rusak, menetapkan aturan hukum dan regulasi yang ketat, mengelola sumber daya air dan tanah, menciptakan alternatif ekonomi bagi masyarakat setempat, kerjasama antar pemerintah dan pihak pemangku kepentingan, dan monitoring dan evaluasi.

Pengendalian zona lindung memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan konservasi dan keberlanjutan.

7. Reforestasi dan pemanfaatan ekosistem mangrove

Reforestasi dan pemanfaatan ekosistem mangrove adalah upaya yang penting untuk melestarikan lingkungan, menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir, serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat setempat. Mangrove adalah hutan yang tumbuh di wilayah pesisir yang dipengaruhi oleh air laut. Beberapa strategi untuk reforestasi dan pemanfaatan ekosistem mangrove antara lain identifikasi lokasi yang tepat, pemilihan jenis mangrove yang tepat, Produksi dan pengadaan bibit mangrove, melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan reforestasi mangrove, rehabilitasi ekosistem mangrove, monitoring pertumbuhan, pengembangan ekonomi berkelanjutan, dan restorasi ekosistem pesisir.

Melalui kombinasi strategi ini, kebijakan reforestasi dan pemanfaatan ekosistem mangrove pada periode pembangunan lima tahun ketiga dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan mitigasi perubahan iklim

8. Fasilitasi peningkatan usaha ekonomi produktif lembaga pengelola DAS

Peningkatan usaha ekonomi produktif oleh lembaga pengelola Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan langkah penting untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan ekonomi. DAS memiliki peran krusial dalam menjaga fungsi ekosistem, memelihara ketersediaan air, dan mendukung kehidupan manusia. Beberapa strategi fasilitasi yang dapat diterapkan oleh lembaga pengelola DAS untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif antara lain: mendorong pengembangan agrowisata dan ekowisata berkelanjutan di sekitar DAS, memberdayakan petani dan peternak di sekitar DAS, membantu dalam pengembangan pasar lokal untuk produk pertanian dan hasil-hasil alam dari sekitar DAS, mendukung kegiatan pengelolaan hutan yang berkelanjutan menyelenggarakan program pelatihan keterampilan dan pendidikan untuk masyarakat sekitar DAS, membantu masyarakat sekitar DAS dalam mendapatkan akses ke pembiayaan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif, membangun rantai pasok terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari petani hingga distributor dan konsumen, dan mendorong penggunaan teknologi yang inovatif dan berkelanjutan.

5.1.4 Arah Kebijakan Periode 2040-2045

Periode terakhir pada RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2045 diarahkan untuk perwujudan Jambi yang maju, sejahtera dan berkelanjutan dalam rangka mendukung perwujudan Indonesia Emas. Pada pembangunan lima tahun ke-empat ini kebijakan diarahkan untuk mewujudkan kapasitas infrastruktur kesehatan berskala nasional dan global seiring dengan terwujudnya kemandirian kesehatan masyarakat. Kapasitas infrastruktur kesehatan sangat menentukan kualitas dan cakupan layanan kesehatan terhadap masyarakat. Misalnya peningkatan kelas atau tipe rumah sakit yang

ditentukan oleh kriteria kelengkapan infrastruktur tertentu, seperti jumlah tenaga medis dengan kualifikasi tertentu dan kelengkapan peralatan medis. Diharapkan status RSUD Raden Mattaher dapat berubah menjadi RSUP dengan ditingkatkannya kapasitas infrastruktur rumah sakit. Selain itu, pada periode pembangunan sebelumnya telah dijalankan berbagai program edukasi masyarakat yang berkaitan dengan upaya-upaya pencegahan penyakit dan cara penanganan dasar dari suatu kondisi darurat akibat suatu penyakit sehingga terwujud kemandirian masyarakat. Selain itu, pada lima tahun keempat ini, kebijakan diarahkan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang menyeluruh (mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan pemerataan akses), kuat, profesional dan berdaya saing untuk kesehatan semesta .

Dibidang pendidikan kebijakan pembangunan lima tahun keempat diarahkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sejahtera, adaptif, berahlak mulia, berbudaya maju, unggul dan berdaya saing. Dengan meningkatnya daya saing dan produktivitas sumberdaya manusia sebagaimana telah diupayakan pada periode pembangunan sebelumnya akan menghasilkan sumberdaya manusia yang sejahtera dan lebih adaptif terhadap perubahan masa. Selain itu, pembangunan sumberdaya manusia yang inklusif dengan kompetensi yang mengikuti perkembangan teknologi diasumsikan telah menghasilkan sumberdaya manusia yang berbudaya maju, unggul dan berdaya saing. Oleh karena itu, diharapkan pada tahun-tahun terakhir akan terwujud sumberdaya manusia sebagaimana diharapkan.

Dalam upaya meningkatkan perlindungan sosial dan ketenagakerjaan kebijakan diarahkan pada hal-hal berikut:

- 1. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem yang adaptif dan terintegrasi untuk memperkuat penentuan target perlindungan sosial.**

Pembangunan lima tahun keempat diarahkan untuk merancang sistem adaptif dan terintegrasi guna menuntaskan kemiskinan. Penuntasan kemiskinan melalui satu sistem yang

adaptif dan terintegrasi memerlukan pendekatan yang holistik dan beragam untuk mengatasi berbagai dimensi kemiskinan. Beberapa elemen kunci dalam merancang sistem yang adaptif dan terintegrasi untuk penuntasan kemiskinan antara lain pemahaman terhadap akar permasalahan, kolaborasi antarsektor dan pemangku kepentingan, sistem pendukung keputusan berbasis data, program pemberdayaan ekonomi, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, jaringan pengaman sosial, infrastruktur dan akses pelayanan dasar, adaptasi terhadap perubahan iklim, monitoring dan evaluasi berkelanjutan:

Penting untuk menciptakan sistem yang fleksibel, responsif, dan berkelanjutan agar dapat mengatasi tantangan dan perubahan yang terjadi seiring waktu

2. Mewujudkan Perlindungan ketenagakerjaan yang berkeadilan

Mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan yang berkeadilan merupakan suatu upaya untuk memastikan bahwa hak-hak dan kesejahteraan para pekerja dihormati dan terlindungi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang menjamin hak-hak dasar para pekerja, seperti upah layak, jam kerja yang manusiawi, perlindungan terhadap diskriminasi, dan hak untuk berserikat. Selain itu, undang-undang ketenagakerjaan harus diterapkan secara konsisten dan adil oleh pemerintah dan pengusaha. Pendidikan dan pelatihan tentang hak-hak ketenagakerjaan perlu diberikan kepada para pekerja agar mereka dapat memahami hak-hak mereka dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka sendiri. Upaya perlindungan ketenagakerjaan juga harus memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Tempat kerja yang aman dan sehat merupakan hak dasar bagi semua pekerja. Penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan praktik ketenagakerjaan guna

memastikan bahwa standar yang ditetapkan terpenuhi dan adanya perbaikan yang berkelanjutan.

Mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan yang berkeadilan memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait dan upaya bersama untuk menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran hak-hak pekerja serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan di tempat kerja.

3. Inovasi pembiayaan untuk memperkuat dan memperluas cakupan integrasi perlindungan sosial yang berkesinambungan,

Terkait dengan upaya peningkatan perlindungan sosial yang berkesinambungan bagi tenaga kerja dan kelompok rentan, diperlukan inovasi pembiayaan. Inovasi pembiayaan dalam konteks memperkuat dan memperluas cakupan integrasi perlindungan sosial yang berkesinambungan adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas dan ketahanan sistem perlindungan sosial. Beberapa strategi inovatif yang akan diimplementasikan meliputi pendekatan Multi-Sumber Pembiayaan (sumber-sumber pembiayaan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, sektor swasta, dll), pembiayaan berbasis risiko, pendekatan berbasis teknologi (aplikasi digital), pembiayaan berbasis kinerja, pembiayaan berkelanjutan melalui investasi sosial dan keuangan berkelanjutan, pendekatan pembiayaan inklusif, pembiayaan prakerja dan pendidikan keterampilan, kemitraan dengan sektor swasta, pembiayaan berbasis komunitas:

Inovasi dalam pembiayaan perlindungan sosial perlu bersifat kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dinamika ekonomi dan sosial setempat. Dengan merancang strategi pembiayaan yang inovatif, dapat menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih tangguh dan berkesinambungan.

Transformasi ekonomi pada periode ini diwujudkan melalui pelaksanaan arah kebijakan berikut:

1. Perluasan pemasaran produk hilirisasi

Pada periode pembangunan sebelumnya telah diupayakan hilirisasi produk sumberdaya alam yang dilanjutkan dengan peningkatan daya saing dari produk-produk hilirisasi tersebut, pada lima tahun keempat ini kebijakan diarahkan untuk perluasan pasar dari produk-produk hilirisasi tersebut. Perluasan pemasaran produk hilirisasi adalah strategi untuk meningkatkan jangkauan dan penetrasi pasar produk yang telah mengalami proses hilirisasi, yakni diolah lebih lanjut atau ditingkatkan nilai tambahnya.

Beberapa alternatif upaya perluasan pasar antara lain dengan cara: analisis pasar, bangun brand yang kuat untuk produk hilirisasi (*Branding*), perluasan saluran distribusi, membentuk kemitraan dengan pihak-pihak yang dapat mendukung perluasan pemasaran, meningkatkan kualitas dan inovasi produk, pertimbangkan ekspansi ke pasar internasional (penetrasi ekspor), dan sertifikasi dan label produk.

2. Pembangunan Hilirisasi sektor pertanian melalui penguatan kelembagaan, regulasi serta pembiayaan ekonomi berkelanjutan sebagai instrumen pendanaan inovatif

Hilirisasi sektor pertanian melibatkan pengolahan lebih lanjut produk pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing. Penguatan kelembagaan, regulasi, dan pembiayaan ekonomi berkelanjutan dapat menjadi instrumen pendanaan inovatif yang mendukung upaya hilirisasi tersebut. Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menguatkan kelembagaan, regulasi serta pembiayaan ekonomi berkelanjutan antara lain : penguatan kelembagaan melalui koperasi pertanian, dan pelatihan dan pendidikan. Regulasi yang Mendukung seperti kebijakan insentif, standar kualitas dan keamanan pangan. Pembiayaan ekonomi berkelanjutan seperti pendanaan berbasis masyarakat, investasi berkelanjutan dan

skema keuangan inovatif. Pengembangan pasar dan promosi seperti promosi produk, pasar berbasis nilai dan pendekatan pemasaran berkelanjutan.

Dengan menggabungkan penguatan kelembagaan, regulasi yang mendukung, dan pembiayaan ekonomi berkelanjutan, sektor pertanian dapat meraih manfaat dari hilirisasi dengan cara yang berkelanjutan dan inklusif. Ini dapat menciptakan dampak positif pada ekonomi lokal, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan petani.

3. Terwujudnya Jambi Sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan tingkat Dunia

Kebijakan pembangunan lima tahun keempat juga diarahkan untuk mewujudkan status Jambi sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan tingkat dunia setelah pada periode pembangunan sebelumnya kebijakan diarahkan untuk menjadi destinasi pariwisata tingkat ASEAN dan Asia.

4. Pengembangan ekonomi kreatif dan digital yang didukung rantai pasok yang inklusif dan berkelanjutan

Pengembangan ekonomi kreatif dan digital yang didukung oleh rantai pasok yang inklusif dan berkelanjutan adalah strategi penting dalam memperkuat sektor ekonomi di era digital saat ini. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut antara lain pemberdayaan kreativitas dan inovasi, pengembangan Infrastruktur digital, inklusi digital (akses yg merata), pengembangan rantai pasok yang berkelanjutan, kemitraan dan kolaborasi, pendanaan dan investasi, regulasi yang mendukung, pengembangan keterampilan dan kapasitas, serta promosi dan pemasaran.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan ekonomi kreatif dan digital dapat berkembang secara inklusif dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak secara merata dan memanfaatkan potensi teknologi digital untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan.

5. KUKM (Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah) tangguh, mandiri, dan berdaya saing

Kebijakan pembangunan lima tahun keempat diarahkan salah satunya untuk mewujudkan KUKM tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Konsep KUKM yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing mencerminkan upaya untuk memperkuat sektor KUKM agar dapat bertahan, tumbuh, dan bersaing secara efektif di lingkungan bisnis yang dinamis. Beberapa upaya untuk mewujudkan hal tersebut antara lain : penguatan kelembagaan, adopsi inovasi dan teknologi, pendanaan dan kredit, pengembangan kapasitas, mengembangkan pasar, kemitraan strategis, pemberdayaan perempuan dan masyarakat lokal, peningkatan akses ke teknologi keuangan (*Fintech*), serta monitoring dan Evaluasi Kinerja:

Melalui pendekatan holistik yang mencakup berbagai aspek tersebut, KUKM dapat diharapkan menjadi lebih tangguh, mandiri, dan mampu bersaing dalam era bisnis yang berubah cepat. Dukungan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

6. Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing serta terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar

Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing, serta menjaga keberlangsungan mekanisme pasar adalah langkah-langkah yang penting dalam membangun ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Hal ini merupakan salah satu arah kebijakan di periode pembangunan lima tahun ke empat. Berkaitan dengan itu, beberapa strategi yang dapat membantu mencapai tujuan tersebut antara lain : regulasi yang jelas dan stabil, pemberdayaan inovasi (insentif fiskal), mengkonstruksi infrastruktur yang handal, tidak diskriminasi dan transparansi, perlindungan hak kekayaan intelektual (guna mendorong inovasi), promosi persaingan sehat, kewirausahaan dan dukungan usaha kecil menengah (UKM), keberlanjutan lingkungan,

Melalui implementasi langkah-langkah ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, sambil menjaga integritas dan keberlangsungan mekanisme pasar.

7. Peningkatan pendapatan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)

Peningkatan pendapatan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) merupakan salah satu arah kebijakan di periode lima tahun keempat. Upaya ini melibatkan sejumlah strategi dan tindakan yang dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan nilai tambah dari kegiatan perhutanan sosial. Beberapa langkah diambil untuk mencapai peningkatan pendapatan dalam konteks KUPS antara lain: diversifikasi produk dan layanan, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas, kemitraan untuk mengakses ke pasar, pembiayaan dan investasi, pemberdayaan komunitas, inovasi teknologi, kolaborasi dan jaringan, pengembangan pariwisata berkelanjutan,

Melalui pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, KUPS dapat meningkatkan pendapatan mereka sambil menjaga keberlanjutan hutan dan memberikan manfaat bagi anggota komunitas lokal.

8. Menjadi daerah percontohan penerapan ekonomi hijau dan optimalisasi penerapan ekonomi biru

Arah kebijakan ekonomi selanjutnya adalah mengubah sebuah daerah menjadi daerah percontohan penerapan ekonomi hijau dan optimalisasi ekonomi biru. Merealisasikan kebijakan tersebut melibatkan serangkaian langkah-langkah strategis dan integratif. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan ini antara lain : 1) merumuskan kebijakan dan regulasi yang mendukung praktik ekonomi hijau dan biru, termasuk insentif fiskal, pajak berbasis lingkungan, dan regulasi yang mendukung energi terbarukan dan sumber daya laut. 2). Mengembangkan infrastruktur berkelanjutan, seperti

jaringan transportasi publik yang efisien dan jalur sepeda, infrastruktur energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang inovatif. 3). Mendorong investasi dan pengembangan energi terbarukan, seperti panel surya, tenaga angin, dan bioenergi. 4). Menerapkan praktik optimalisasi ekonomi biru, termasuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan konservasi ekosistem laut. 5). Pemberdayaan Komunitas Lokal, dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan untuk memastikan partisipasi yang inklusif. 6). Mendorong riset dan pengembangan teknologi bersih yang mendukung efisiensi sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan. 7). Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat tentang manfaat dan praktik ekonomi hijau dan biru. 10). Penegakan Hukum dan Sanksi bagi pelanggaran terhadap regulasi lingkungan dan praktik ekonomi berkelanjutan.

Dengan pendekatan holistik dan berkelanjutan, daerah dapat menjadi contoh bagi wilayah lain dalam menerapkan ekonomi hijau dan biru, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

9. Pelestarian dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan

Pelestarian dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan tantangan penting dalam upaya membangun ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan ini antara lain pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, konservasi dan perlindungan kawasan ekosistem penting, peningkatan efisiensi energi, inovasi dalam pertanian berkelanjutan, manajemen Air yang berkelanjutan, promosi ekowisata, pengembangan produk berkelanjutan, dan kemitraan dengan komunitas lokal.

Melalui kombinasi strategi ini, masyarakat dapat memperoleh manfaat dari sumber daya alam sambil menjaga keberlanjutan dan meningkatkan nilai tambah ekonomi secara

berkelanjutan. Pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, bisnis, dan masyarakat, harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ini secara efektif.

10. Menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan di seluruh wilayah dengan dukungan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas

Kebijakan lima tahun ke empat ini diarahkan untuk menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah dengan dukungan tata kelola kelembagaan yang andal. Mewujudkan hal itu, langkah-langkah yang dilakukan antara lain : perencanaan terpadu, investasi berkelanjutan, pengembangan energi terbarukan, penggunaan teknologi terbaru, pemeliharaan rutin dan inovasi, pembangunan konektivitas digital, partisipasi masyarakat, tata kelola kelembagaan yang efektif

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan mampu menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta pelayanan dasar yang berkualitas di seluruh wilayah dengan tata kelola kelembagaan yang andal.

11. Menciptakan keunggulan kompetitif industri berbasis kawasan

Kebijakan pembangunan selanjutnya diarahkan untuk menciptakan keunggulan kompetitif industri berbasis kawasan. Mewujudkan hal ini melibatkan sejumlah strategi dan pendekatan yang dapat meningkatkan daya saing suatu kawasan atau kluster industri. Beberapa langkah yang diambil untuk menciptakan keunggulan kompetitif dalam industri berbasis kawasan antara lain : analisis ekosistem industri, kolaborasi strategis, infrastruktur yang mendukung, pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, pengelolaan tenaga

kerja berkualitas, inovasi berkelanjutan, ketahanan terhadap perubahan iklim, pengembangan pasar dan pemasaran, pembangunan kapasitas kelembagaan, serta kebijakan dan insentif pemerintah.

Menciptakan keunggulan kompetitif dalam industri berbasis kawasan membutuhkan integrasi strategis dari berbagai elemen tersebut. Dengan menciptakan ekosistem yang kondusif dan mendukung, kawasan industri dapat memperkuat daya saingnya dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam rangka mengintegrasikan ekonomi daerah dan global, kebijakan diarahkan pada penguatan integrasi antarmoda transportasi darat, laut dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas penumpang. Kebijakan pemerintah pada lima tahun keempat diarahkan juga untuk menguatkan integrasi antar moda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas penumpang. Transportasi merupakan salah satu sarana untuk menjamin interkoneksi antar wilayah yang berkaitan dengan mobilitas barang dan manusia sehingga pada akhirnya sangat menentukan produktivitas ekonomi suatu wilayah. Pada sisi lain, transportasi juga merupakan akses bagi siapapun untuk mendapatkan layanan baik itu kesehatan, ataupun pendidikan. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan sarana transportasi yang memadai dan terintegrasi baik itu darat, laut, dan udara akan menentukan kualitas kehidupan masyarakat.

Sementara untuk menjaga stabilitas ekonomi makro pada periode ke empat ini, arah kebijakan yang dijalankan adalah peningkatan sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah. Sinergi pendanaan antara pemerintah dan non-pemerintah (swasta, LSM, dan lainnya) merupakan strategi penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan sinergi pendanaan tersebut dengan demikian menjadi salah satu arah kebijakan pada pembangunan lima

tahun keempat. Terdapat beberapa pendekatan dalam mewujudkan sinergi tersebut antara lain mendorong dan memfasilitasi kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta serta menyusun regulasi dan kebijakan yang mendukung investasi swasta dalam proyek-proyek infrastruktur dan pelayanan publik, mendorong perusahaan swasta untuk berpartisipasi dalam inisiatif CSR yang mendukung program-program pembangunan pemerintah serta membuat insentif fiskal atau kebijakan untuk mendorong perusahaan berkontribusi pada kegiatan sosial dan pembangunan berkelanjutan, melibatkan LSM dan organisasi masyarakat sipil untuk berkolaborasi dalam proyek-proyek pembangunan, dan menyediakan insentif keuangan seperti kredit pajak dan fasilitas pembiayaan murah kepada pihak swasta yang berinvestasi dalam proyek-proyek berkelanjutan.

Peningkatan sinergi pendanaan antara pemerintah dan non-pemerintah memerlukan kerja sama yang erat antara kedua sektor tersebut. Dengan pendekatan yang terkoordinasi, potensi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan pelayanan dasar yang berkualitas dapat ditingkatkan secara signifikan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang berintegritas dan adaptif pada periode ke empat, kebijakan diarahkan pada hal-hal berikut:

1. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan
2. pelayanan publik berbasis teknologi informasi
3. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
4. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
5. penerapan manajemen resiko perencanaan dan pengendalian pembangunan
6. regulasi berbasis teknologi informatif

7. terwujudnya kelembagaan yang kredibel dan SDM ASN yang sejahtera
8. Mendorong inovasi daerah dalam pelayanan data kependudukan
9. Penyelenggaraan diklat indispensabilitas dan rialitas
10. Optimalisasi pemanfaatan TIK di seluruh sektor
11. Terwujudnya integrasi data kependudukan
12. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif

Upaya menjaga kerukunan hidup dan budaya toleransi masyarakat pada periode ini dilakukan melalui pembentukan regulasi dan tata kelola trantibumlinmas yang berintegritas dan adaptif. Untuk menciptakan regulasi dan tata kelola trantibumlinmas (tranformasi birokrasi, hukum, dan tata kelola pemerintahan yang mencakup keamanan dan ketertiban masyarakat, serta lingkungan dan administrasi kependudukan) yang berintegritas dan adaptif, beberapa prinsip dalam regulasi dan tata kelola antara lain: keterbukaan dan transparansi, partisipasi publik, akuntabilitas, adaptabilitas dan fleksibilitas, koordinasi antar instansi, dan pengembangan sumberdaya manusia.

Penerapan regulasi dan tata kelola trantibumlinmas yang berintegritas dan adaptif memerlukan komitmen tinggi dari pemerintah dan keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan. Kesenambungan dalam peningkatan dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan serta tuntutan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan trantibumlinmas.

Berkaitan dengan upaya memantapkan ketahanan sosial budaya, kebijakan periode ke empat diarahkan pada:

1. Terwujudnya kebudayaan yang berkarakter, adaptif dan berdaya saing

Arah kebijakan pembangunan budaya adalah mewujudkan kebudayaan yang berkarakter, adaptif, dan berdaya saing dimana hal ini merupakan aspek penting dalam menghadapi perubahan zaman, tantangan global, dan dinamika masyarakat. Beberapa ciri dan prinsip kebudayaan yang dapat

memastikan karakter, adaptabilitas, dan daya saing antara lain: nilai-nilai integritas dan etika, pembelajaran dan inovasi, keterbukaan terhadap perubahan, adaptif terhadap diversitas, dan adaptabilitas terhadap teknologi.

2. Menciptakan ketahanan keluarga dan masyarakat yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan secara inklusif

Kebijakan pembangunan berikutnya diarahkan untuk mewujudkan ketahanan keluarga dan masyarakat yang mampu berpartisipasi dalam pembangunan secara inklusif. Untuk itu diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain : pemberdayaan ekonomi, pendidikan inklusif, kesehatan dan Gizi, akses terhadap air bersih dan sanitasi, partisipasi masyarakat (dalam hal perencanaan, perlindungan sosial, pengembangan keterampilan sosial, pemberdayaan perempuan. Penting untuk diingat bahwa pendekatan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks setempat. Keterlibatan aktif dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan adalah kunci utama untuk menciptakan ketahanan keluarga dan masyarakat yang inklusif dan berdaya saing.

Dalam hal perwujudan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan, kebijakan diarahkan pada hal-hal berikut:

1. Sistem tata kelola pangan akuatik yang terintegrasi hulu hilir

Berkaitan dengan pembentukan sumberdaya manusia berkualitas, pemenuhan kebutuhan gizi merupakan determinan utama yang salah satunya dapat dipenuhi melalui pangan akuatik. Sistem pangan akuatik adalah semua aktivitas yang terkait dengan produksi, pengolahan, distribusi, dan konsumsi makanan yang berasal dari sumber daya air, seperti ikan, udang, rumput laut, dan lain-lain. Kebijakan pemerintah terkait pangan akuatik diarahkan untuk mewujudkan sistem tata kelola pangan akuatik yang terintegrasi hulu-hilir. Sistem tata kelola ini merupakan

pendekatan holistik untuk mengelola sumber daya pangan dari tahap produksi (hulu) hingga konsumsi (hilir) di sektor perikanan dan akuakultur. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memastikan keberlanjutan, efisiensi, dan inklusivitas dalam rantai nilai pangan akuatik. Beberapa komponen utama dalam sistem tata kelola pangan akuatik yang terintegrasi hulu-hilir antara lain perencanaan dan pengelolaan wilayah akuatik, keamanan pangan dan mutu produk, manajemen sumber daya alam, pemberdayaan petani dan nelayan, kolaborasi antar pemangku kepentingan, manajemen limbah dan lingkungan, pasar dan distribusi yang efisien.

Penerapan sistem tata kelola pangan akuatik yang terintegrasi hulu-hilir memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan dan penerapan praktik-praktik berkelanjutan di setiap tahapan rantai nilai. Dengan demikian, dapat menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor pangan akuatik.

2. Kemandirian pangan yang tahan bencana dan perubahan iklim

Kebijakan pangan pada lima tahun keempat ini juga diarahkan untuk mencapai kemandirian pangan yang tahan bencana dan perubahan iklim. Mewujudkan hal tersebut melibatkan strategi dan tindakan holistik yang memperhitungkan ketahanan pangan, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta penanggulangan risiko bencana. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mencapai kemandirian pangan yang tahan bencana dan perubahan iklim antara lain : diversifikasi pangan, infrastruktur pertanian yang tahan bencana(sistem irigasi dan drainase), praktik pertanian berkelanjutan (pertanian organik dan ramah lingkungan), pengelolaan air yang efisien, keberlanjutan Perikanan dan Akuakultur, pemberdayaan petani dan nelayan, kebijakan dan regulasi yang mendukung, pengelolaan risiko bencana, partisipasi masyarakat dan kemitraan.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta sistem pertanian dan pangan yang tangguh, berkelanjutan, dan mampu bertahan terhadap perubahan iklim dan bencana alam, sehingga mencapai kemandirian pangan yang tahan bencana dan perubahan iklim

3. Terbentuknya Tim Manajemen bencana yang kuat dan tangguh di Provinsi Jambi .

Arah kebijakan selanjutnya adalah mewujudkan tim manajemen bencana yang kuat dan tangguh di Provinsi Jambi. Pembentukan Tim Manajemen Bencana yang kuat dan tangguh di Provinsi Jambi merupakan langkah kunci untuk memastikan kesiapan dan respons yang efektif dalam menghadapi bencana. Berikut beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam membentuk tim manajemen bencana yang kuat di Provinsi Jambi : penyusunan rencana manajemen bencana, pembentukan tim manajemen bencana (mekanisme seleksi), peningkatan kapasitas SDM anggota tim, sistem komunikasi yang efektif, perencanaan strategi penanggulangan (rencana evakuasi dan tempat pengungsian), kerjasama dan kemitraan (forum koordinasi bencana), Sistem pemantauan dan peringatan dini, logistik dan penyediaan bantuan darurat, perencanaan pemulihan pasca bencana, serta sosialisasi dan edukasi masyarakat.

Penting untuk menyesuaikan panduan ini dengan konteks spesifik Provinsi Jambi dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan pembentukan Tim Manajemen Bencana yang kuat dan tangguh, Provinsi Jambi dapat lebih siap dalam menghadapi dan merespons bencana dengan cepat dan efektif

4. Terwujudnya SDM yang adaptif terhadap perubahan iklim

Kebijakan pembangunan selanjutnya diarahkan untuk mewujudkan SDM yang adaptif terhadap perubahan iklim. Untuk mencapai terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang adaptif terhadap perubahan iklim, dibutuhkan serangkaian strategi dan langkah-langkah yang berfokus pada peningkatan kapasitas,

kesadaran, dan kemampuan adaptasi individu dan komunitas. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain pendidikan dan pelatihan, kampanye kesadaran masyarakat, pengembangan keterampilan adaptasi, penguatan Keterlibatan Komunitas (forum partisipatif), pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, inovasi teknologi adaptasi, sistem peringatan dini dan evakuasi, dan kebijakan yang mendukung adaptasi.

5. Mewujudkan *Climate Smart Agriculture*, pertanian konservasi dan pertanian regeneratif

Arah kebijakan lainnya terhadap pangan adalah mewujudkan *climate smart agriculture*, pertanian konservasi dan pertanian regeneratif. Mewujudkan *Climate Smart Agriculture* (pertanian cerdas terhadap perubahan iklim), pertanian konservasi, dan pertanian regeneratif adalah langkah-langkah penting untuk memitigasi dampak perubahan iklim, meningkatkan ketahanan pangan, dan mendukung keberlanjutan lingkungan. Secara garis besar, strategi yang digunakan dalam mewujudkannya adalah dengan mengembangkan teknologi dan inovasi di bidang budidaya pertanian yang menginkorporasikan teknik-teknik pengelolaan air yang efektif dan efisien, minimalisasi penggunaan bahan kimia(pupuk dan pestisida), rekayasa dan reklamasi lahan, serta rekayasa tanaman toleran terhadap cekaman. Langkah selanjutnya adalah sosialisasi teknologi tersebut ke pelaku-pelaku usaha tani dalam bentuk pelatihan-pelatihan.

Penerapan strategi-strategi ini bersifat holistik dan memerlukan kolaborasi erat antara berbagai pihak terkait. Dengan menerapkan pendekatan-pendekatan ini, pertanian dapat menjadi lebih berkelanjutan, adaptif terhadap perubahan iklim, dan mendukung ketahanan pangan jangka panjang.

6. Sumberdaya hayati yang dimanfaatkan sebagai sumber pangan dan farmakologi.

Kebijakan selanjutnya diarahkan untuk mendorong pemanfaatan sumberdaya hayati sebagai sumber pangan dan farmakologi. Dalam upaya mencapai ketahanan pangan, pemanfaatan pangan-

pangan alternatif memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Berbagai spesies yang selama ini terabaikan (*neglected*) dan belum termanfaatkan (*underutilized*) memiliki potensi cukup besar sebagai bahan pangan pendamping beras. Jambi dengan tingkat keragaman lingkungan ekogeografis yang luas secara teoretis memiliki keragaman sumberdaya hayati yang luas pula, sehingga berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut baik sebagai sumber pangan maupun untuk kepentingan lain seperti farmakologi atau fitofarmaka.

Dalam mewujudkan hal itu, perlu dilakukan upaya eksplorasi terarah guna mengidentifikasi potensinya untuk selanjutnya disusun rencana pengembangan dan pemanfaatannya. Dengan kolaborasi dan kemitraan program ini akan dapat terwujud.

7. Penurunan emisi GRK menuju pencapaian net zero emission

Arah kebijakan pembangunan selanjutnya adalah mengupayakan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju pencapaian *net zero emission*. Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju pencapaian net zero emission merupakan suatu tantangan global yang memerlukan upaya bersama dari pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga internasional. Beberapa strategi untuk mencapai penurunan emisi GRK dan menuju *net zero emission* antara lain transisi ke energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, konservasi dan rehabilitasi hutan, pertanian berkelanjutan, teknologi *Carbon Capture and Storage* (CCS), pengembangan transportasi berkelanjutan, kebijakan Pajak Karbon, pendidikan dan kesadaran publik, dan lain-lain.

Penting untuk dicatat bahwa pencapaian *net zero emission* memerlukan tindakan konkret, konsistensi dalam implementasi kebijakan, serta kolaborasi lintas sektor dan lintas negara. Dengan upaya bersama, komitmen global, dan penerapan strategi-strategi ini, masyarakat dapat meredakan dampak perubahan iklim dan menuju keberlanjutan yang lebih baik.

8. Optimalisasi pengelolaan kawasan sumber daya pesisir yang terpadu

Optimalisasi pengelolaan kawasan sumber daya pesisir yang terpadu memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek-aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Berikut adalah beberapa langkah yang diambil untuk mencapai pengelolaan kawasan sumber daya pesisir yang terpadu antara lain : identifikasi dan pemetaan sumber daya, zonasi dan perencanaan ruang, pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan ekosistem pesisir, pengelolaan limbah dan pencemaran, adaptasi terhadap perubahan iklim, promosi ekowisata dan pariwisata berkelanjutan, dan pengembangan infrastruktur berkelanjutan. Menerapkan langkah-langkah ini memerlukan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah, masyarakat lokal, sektor swasta, dan pihak terkait lainnya. Dengan pendekatan yang terpadu, kawasan sumber daya pesisir dapat dikelola secara berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat setempat

9. Peningkatan pelestarian pengelolaan DAS

Peningkatan pelestarian dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan suatu langkah penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem air dan memastikan ketersediaan air yang cukup bagi kebutuhan manusia dan lingkungan. Pelestarian dan pengelolaan DAS dilakukan melalui pendekatan berikut: penyusunan perencanaan terpadu, konservasi hutan dan lahan, praktik pertanian berkelanjutan, pencegahan dan pengendalian erosi, pengelolaan Air dan DAS, pengelolaan limbah, penanaman vegetasi penyangga, pembentukan lembaga pengelola DAS, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta monitoring dan evaluasi.

Peningkatan pelestarian dan pengelolaan DAS memerlukan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan dan penerapan berbagai strategi yang holistik. Dengan demikian, keberlanjutan DAS dapat terjamin untuk mendukung kehidupan manusia dan ekosistem air yang seimbang

5.2 Sasaran Pokok

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

5.2.1.1 Pemerataan Akses dan Kualitas Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan tingkat produktivitas sumberdaya manusia yang pada akhirnya akan juga menentukan produktivitas suatu negara. Pembangunan kesehatan bertujuan agar seluruh masyarakat dapat hidup sehat, pada seluruh siklus kehidupan di seluruh wilayah. Pemerataan akses dan kualitas kesehatan merupakan tujuan penting dalam sistem kesehatan suatu wilayah. Pemerataan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas tanpa dipengaruhi faktor-faktor seperti status ekonomi, geografis, atau kelompok sosial tertentu. Upaya pemerataan akses dan kualitas kesehatan yang akan dilakukan mencakup:

1. Akses Fisik

- Fasilitas Kesehatan: ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata baik secara kualitas maupun kuantitas di seluruh wilayah, termasuk di daerah pedesaan.
- Aksesibilitas Transportasi: terjaminnya aksesibilitas dan transportasi yang memadai ke pusat-pusat fasilitas kesehatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

2. Akses Finansial:

- Jaminan Kesehatan: Implementasi program jaminan kesehatan atau skema pembayaran yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.
- Biaya Pelayanan: Memastikan bahwa biaya pelayanan kesehatan tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.

3 Pelayanan Kesehatan Primer:

- Promosi Kesehatan: Mendorong program promosi kesehatan dan pencegahan penyakit di tingkat primer untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.
 - Pelayanan Pemeriksaan dan Pengobatan Awal: Memberikan akses mudah terhadap pelayanan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan awal di tingkat fasilitas kesehatan primer.
4. Tenaga Kesehatan:
- Distribusi Tenaga Kesehatan: Memastikan distribusi yang merata dari tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, di seluruh wilayah.
 - Pelatihan dan Pendidikan: Memberikan pelatihan dan pendidikan yang cukup untuk tenaga kesehatan di semua wilayah.
5. Teknologi Informasi:
- Pemanfaatan Teknologi: Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, termasuk layanan jarak jauh (telemedicine).
6. Partisipasi Masyarakat:
- Partisipasi Aktif: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait layanan kesehatan di tingkat lokal.
 - Pendidikan Kesehatan Masyarakat: Memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang kesehatan dan pencegahan penyakit.

Infrastruktur kesehatan yang baik dan terintegrasi adalah kunci dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang efektif dan merata bagi masyarakat. Keberhasilan sistem kesehatan bergantung pada ketersediaan dan fungsionalitas infrastruktur ini. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur (*upgrading*) ini harus dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan selama kurun waktu 20

tahun mendatang mengingat masalah-masalah kesehatan masyarakat yang selalu dinamis serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang seiring dengan pergeseran zaman.

5.2.1.2 Pemerataan Akses dan Kualitas Pendidikan

Pergeseran tatanan kehidupan manusia akibat globalisasi membawa konsekuensi pada harus meningkatnya kualitas sumber daya manusia untuk menghadapi perubahan situasi. Salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Manusia yang dihasilkan dari proses pendidikan sangat bergantung dari corak dan jenis pendidikan yang dijalankan. Corak dan jenis pendidikan akan bergantung pada kebijakan pemerintah, peran masyarakat dan peran praktisi pendidikan. Namun demikian keterlibatan pemerintah merupakan determinan karena pada hakekatnya kebijakan pemerintah menjadi dominan dalam menjalankan proses pendidikan.

Pendidikan merupakan hak yang harus didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia, bukan kelompok atau bahkan kalangan tertentu yang dapat menikmati pendidikan. TAP MPR No. IV/MPR/1999 mengamanahkan, antara lain: 1) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan secara berarti, 2) meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga dan seni. Sejalan dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”, dan pasal 11, ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa

diskriminasi”. UUD 1945 mengamanahkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Pembangunan Pendidikan merupakan salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, politik dan budaya. Selain pembangunan pendidikan tersebut, pemerataan akses terhadap pendidikan itu sendiri menjadi sangat krusial agar sumberdaya pelaksana pembangunan yang berkualitas dapat terdistribusi di berbagai pelosok wilayah dalam suatu provinsi.

Pemerataan pendidikan terindikasi dari adanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan secara merata bagi seluruh anggota masyarakat. Hal ini mengharuskan pemerintah selalu berupaya dalam memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat dalam mendapatkan pendidikan. Pemerataan pendidikan mencakup dua aspek penting yaitu *equality* dan *equity*. *Equality* atau persamaan mengandung arti persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, sedangkan *equity* bermakna keadilan dalam memperoleh kesempatan yang sama diantara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemerataan pendidikan identik dengan sebuah kesempatan yang dimiliki oleh rakyat, hanya saja akses terhadap pendidikan masih belum dapat dikatakan adil jika antarkelompok belum bisa menikmati pendidikan secara sama.

Secara konsepsional, konsep pemerataan itu terdiri dari pemerataan aktif dan pemerataan pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah, sedangkan pemerataan aktif bermakna kesamaan dalam memberikan kesempatan kepada murid murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-tingginya. Dalam pemahaman hal seperti ini pemerataan memiliki makna yang luas, dari penyediaan fasilitas secara fisik yang berupa sekolah sekolah yang telah terpenuhi di setiap daerah dan penyediaan fasilitas secara kualitas yang ada di sekolah sekolah tersebut berupa potensi

tenaga pendidikan atau pengajar yang berkualitas, baik dan profesional.

5.2.1.3 Perlindungan Sosial dan Ketenagakerjaan yang Adaptif dan Berkeadilan

Perlindungan sosial merupakan sebuah konsep luas yang selalu berkembang seiring dengan perjalanan zaman. Melalui kebijakan perlindungan sosial, pemerintah negara-negara di dunia berusaha menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses atas layanan sosial bagi seluruh penduduknya. Cakupan dalam kebijakan pendekatan perlindungan sosial diantaranya meliputi penjaminan keamanan pendapatan pokok, yang dapat berbentuk bantuan dan jaminan sosial, seperti dana pensiun bagi penduduk usia lanjut serta penyandang disabilitas, tunjangan bantuan penghasilan, jaminan pekerjaan, serta layanan bagi para pengangguran dan penduduk miskin.

Kebijakan perlindungan sosial juga mencakup penyediaan akses universal akan pelayanan sosial yang terjangkau dalam bidang kesehatan, pendidikan, pelayanan dasar seperti akses terhadap air dan sanitasi, ketahanan pangan, perumahan, dan layanan lainnya. Konsep perlindungan sosial secara tradisional lebih berfokus kepada program perlindungan jangka pendek, seperti mekanisme perlindungan bagi masyarakat atas dampak guncangan seperti yang diakibatkan oleh bencana alam, pengangguran, hingga kematian. Fokus perlindungan sosial yang terbatas pada mitigasi kemiskinan jangka pendek tersebut seringkali dikritik sebagai sistem intervensi kebijakan yang cenderung memakan banyak anggaran serta dapat menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk lebih mandiri. Oleh karena itu, secara bertahap perlindungan sosial berevolusi menjadi sistem yang lebih berfokus kepada tindakan preventif dan promotif dalam jangka panjang.

Pendekatan konsep perlindungan sosial ini berfokus pada penyebab-penyebab kemiskinan dan berusaha untuk mengatasi batasan-batasan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh

penduduk rentan. Perlindungan sosial dipandang memiliki komponen yang lebih luas, diantaranya mencakup komponen perlindungan, pencegahan, serta promosi. Komponen perlindungan terdiri dari berbagai kebijakan yang bertujuan memastikan tingkat kesejahteraan minimal untuk masyarakat yang kesusahan. Komponen pencegahan memuat berbagai kebijakan yang bertujuan mencegah masyarakat yang tergolong rentan untuk jatuh dibawah standar kesejahteraan yang ditentukan. Komponen promosi mencakup kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kerentanan setiap individu di masa mendatang. Lebih jauh, perlindungan sosial juga dipandang memiliki peran transformatif, dimana

perlindungan sosial diharapkan dapat meningkatkan status dan membuka lebih banyak peluang penghidupan bagi kelompok masyarakat yang termarginalkan.

Dinamisnya sistem perlindungan Sosial dari masa ke masa menuntut adanya adaptasi terhadap tuntutan situasi dan kondisi terkini. Dengan demikian, perlindungan sosial dan Ketenagakerjaan yang Adaptif dan Berkeadilan merujuk pada suatu sistem kebijakan dan praktik yang dirancang untuk memberikan jaminan sosial, keamanan ekonomi, dan keadilan kepada pekerja serta masyarakat dalam menghadapi perubahan lingkungan ekonomi, sosial, dan teknologi. Beberapa karakteristik dari konsep perlindungan sosial yang adaptif dan berkeadilan adalah sebagai berikut.

- Adaptif:

Perlindungan sosial yang adaptif mencerminkan kemampuan sistem untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam dunia kerja dan masyarakat. Ini termasuk kemampuan untuk menanggapi perkembangan ekonomi, teknologi, dan dinamika pasar tenaga kerja.

- Berkeadilan:

Aspek berkeadilan dalam perlindungan sosial dan ketenagakerjaan menekankan pentingnya pemerataan akses dan

manfaat. Sistem ini berusaha untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan.

- **Jaminan Sosial:**

Jaminan sosial mencakup berbagai bentuk dukungan, seperti asuransi kesehatan, asuransi ketenagakerjaan, asuransi pengangguran, dan program kesejahteraan lainnya. Tujuannya adalah memberikan keamanan ekonomi dan perlindungan bagi pekerja dan keluarga mereka.

- **Pemberdayaan Pekerja:**

Perlindungan sosial yang adaptif dan berkeadilan juga mencakup elemen pemberdayaan pekerja. Hal ini termasuk memberikan akses pendidikan dan pelatihan yang memungkinkan pekerja untuk meningkatkan keterampilan mereka dan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar kerja.

- **Fleksibilitas:**

Sistem ini harus fleksibel dalam mengakomodasi berbagai bentuk pekerjaan, termasuk pekerja informal dan kontraktor independen. Dengan mengakui keberagaman dalam bentuk-bentuk pekerjaan, perlindungan sosial dapat mencakup seluruh spektrum pekerjaan.

- **Responsif terhadap Krisis:**

Sistem perlindungan sosial yang adaptif harus dapat merespons krisis ekonomi, bencana alam, atau situasi darurat lainnya. Ini termasuk mekanisme untuk memberikan bantuan dan dukungan cepat kepada mereka yang terdampak.

- **Kepastian dan Keadilan dalam Pemutusan Hubungan Kerja:**

Perlindungan ketenagakerjaan yang berkeadilan mencakup ketentuan-ketentuan yang adil dalam pemutusan hubungan kerja, termasuk pemberian kompensasi yang wajar dan hak-hak lainnya bagi pekerja yang di-PHK.

- **Inklusif dan Merata:**

Sistem ini harus inklusif dan merata, memastikan bahwa semua pekerja, tanpa memandang jenis pekerjaan atau tingkat

pendapatan, memiliki akses yang sama terhadap jaminan sosial dan perlindungan ketenagakerjaan.

- Kolaborasi Stakeholder:

Implementasi perlindungan sosial dan ketenagakerjaan yang adaptif dan berkeadilan melibatkan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini mendukung perancangan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Perlindungan Sosial dan Ketenagakerjaan yang Adaptif dan Berkeadilan memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, adil, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Diharapkan 20 tahun mendatang seluruh penduduk Provinsi Jambi, tanpa terkecuali, memiliki akses yang adil dan merata terhadap perlindungan sosial. Ini mencakup program-program kesehatan, pendidikan, asuransi sosial, dan bantuan sosial lainnya yang dirancang untuk memberikan dukungan finansial dan sosial kepada mereka yang membutuhkannya. Sistem ketenagakerjaan di Provinsi Jambi harus mampu beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan teknologi. Ini mencakup investasi dalam pelatihan dan pendidikan untuk mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan, serta kebijakan yang mendukung fleksibilitas kerja dan inklusi pekerja informal.

Selanjutnya, semua pekerja, termasuk pekerja informal, mendapatkan upah yang adil dan diberikan kondisi kerja yang aman. Keadilan upah dan kondisi kerja yang layak menjadi prinsip dasar dalam sistem ketenagakerjaan yang ideal. Selain itu, perlindungan sosial dan kebijakan ketenagakerjaan dirancang untuk mengakomodasi dan melibatkan pekerja informal, dan kelompok marginal lainnya. Ini mencakup akses yang setara terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan lainnya.

Proses pengambilan keputusan terbuka, partisipatif, dan inklusif, melibatkan masyarakat, pekerja, dan berbagai pemangku kepentingan

lainnya. Keterlibatan aktif dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam kebijakan yang diimplementasikan.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang Efektif yang bertanggung jawab secara sosial, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat setempat dan memberikan dampak positif pada lingkungan sekitarnya. Berikutnya, sistem pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan untuk mempersiapkan tenaga kerja Provinsi Jambi menghadapi tuntutan ekonomi dan teknologi di masa depan.

5.2.1.4 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Ilmu pengetahuan boleh jadi telah ada sejak dimulainya perkembangan peradaban manusia. Ilmu dan pengetahuan pada awalnya hadir sebagai pemuas atas naluri keingintahuan manusia atas segala pertanyaan tentang eksistensi alam semesta beserta isinya. Seiring dengan berkembangnya jumlah populasi manusia, mulai terjadi adanya kompetisi terhadap sumber-sumber pemuas kebutuhan pokok manusia sehingga terjadi pergeseran dari *receptive mind* menjadi *inquiring mind* dimana ilmu pengetahuan dikembangkan dengan tujuan mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan manusia terutama sekali yang berkaitan dengan semakin terbatasnya sumber-sumber pemuas kebutuhan manusia, seperti pangan dan lain sebagainya.

Sejarah kebudayaan manusia telah mencatat bagaimana ilmu pengetahuan telah berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan mulai dari penyediaan bahan pangan sampai dengan pembangunan wilayah. Kontribusi tersebut terus berlanjut hingga saat ini bahkan iptek telah menyentuh hampir semua lini kehidupan manusia.

Tingkat adopsi teknologi antar negara ataupun antar wilayah dalam suatu negara sangat bervariasi bergantung pada karakteristik wilayah (potensi ekonomi dan alokasi anggaran) termasuk sumber daya manusianya. Adopsi suatu teknologi memerlukan infrastruktur yang tentu saja membutuhkan biaya. Dengan demikian antara

keberhasilan pembangunan suatu wilayah dan tingkat adopsi teknologi merupakan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Proses pembangunan membutuhkan adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan pada sisi lain tingkat adopsi teknologi harus menjadi bagian dari rencana pembangunan karena adopsi teknologi membutuhkan infrastruktur yang tentu saja berbiaya.

Pada sisi lain, adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi akan dapat melahirkan inovasi. Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan diperlukan berbagai inovasi. Inovasi merujuk pada konsep atau proses pengembangan dan penerapan ide, produk, atau pendekatan baru yang memiliki nilai tambah atau manfaat. Inovasi melibatkan perubahan yang signifikan dalam cara-cara berpikir, bekerja, atau berinteraksi, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, atau menciptakan nilai baru. Beberapa karakteristik dari suatu inovasi antara lain : **kebaruan (Novelty)**, inovasi melibatkan sesuatu yang baru atau berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Ini bisa mencakup ide baru, produk baru, proses baru, atau pendekatan baru untuk memecahkan masalah. Selanjutnya adalah **penerapan (Implementation)**, inovasi tidak hanya tentang memiliki ide-ide baru, tetapi juga tentang menerapkan ide-ide tersebut dalam praktek. Proses penerapan ini dapat melibatkan pengembangan, uji coba, dan pengintegrasian ide atau produk baru ke dalam lingkungan yang sudah ada. **Nilai Tambah (Value Addition)**: Inovasi bertujuan untuk memberikan nilai tambah, baik dalam bentuk peningkatan kualitas, efisiensi, atau penciptaan sesuatu yang baru yang dianggap bernilai oleh pengguna atau pelanggan. Karakteristik berikutnya adalah **perubahan atau transformasi**, inovasi seringkali membawa perubahan yang signifikan dalam cara kita melakukan sesuatu. Ini bisa melibatkan transformasi dalam proses bisnis, model bisnis, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Tingkat adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi yang diiringi dengan implementasi berbagai inovasi pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas ekonomi. Produktivitas ekonomi

merujuk pada seberapa efisien suatu negara, wilayah, atau perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk menghasilkan barang dan jasa. Secara lebih spesifik, produktivitas ekonomi diukur dengan membandingkan output (hasil produksi) yang dihasilkan dengan input (sumber daya seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku) yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Produktivitas ekonomi memberikan gambaran tentang efisiensi ekonomi suatu entitas.

Berdasarkan uraian diatas, adanya keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta produktivitas ekonomi, mengharuskan adanya rencana program yang terintegrasi dalam kerangka rencana pembangunan jangka panjang daerah. Adopsi ilmu pengetahuan teknologi perlu terprogram disebabkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Diharapkan dalam kurun waktu 20 tahun mendatang adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi di Provinsi Jambi mampu meningkatkan daya saing Provinsi Jambi. Adopsi IPTEK akan dilakukan melalui pemenuhan hal-hal berikut:

- Infrastruktur Teknologi: Ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet, telekomunikasi, dan fasilitas teknologi informasi, dapat mencerminkan sejauh mana suatu daerah mengadopsi teknologi.
- Penelitian dan Pengembangan (R&D): Jumlah dan kualitas kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan dalam daerah dapat menjadi indikator adopsi IPTek. Hal ini mencakup investasi dalam riset, keberhasilan proyek inovatif, dan kolaborasi dengan lembaga penelitian.
- Paten dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Jumlah paten dan hak kekayaan intelektual yang diajukan dan diterima dapat mencerminkan tingkat inovasi dalam suatu daerah. Peningkatan jumlah ini menunjukkan adopsi teknologi baru dan penciptaan nilai intelektual.

- Pendidikan dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia: Tingkat pendidikan dan kualifikasi tenaga kerja daerah dapat mencerminkan kemampuan untuk mengadopsi dan mengintegrasikan teknologi. Pendidikan yang tinggi dan keterampilan yang relevan dapat meningkatkan kapasitas inovatif.
- Kemitraan dan Kolaborasi: Jumlah dan jenis kemitraan antara sektor publik, swasta, dan akademis dapat mencerminkan sejauh mana inovasi diintegrasikan dalam strategi pembangunan daerah.
- Penyebaran Teknologi: Sejauh mana teknologi baru disebarkan dan diadopsi oleh masyarakat dan sektor bisnis. Ini dapat diukur melalui peningkatan penggunaan teknologi dalam sektor-sektor kunci seperti pertanian, manufaktur, dan layanan.
- Industri Kreatif dan Start-up: Pertumbuhan dan keberhasilan industri kreatif serta perkembangan start-up dapat mencerminkan adopsi dan penerapan inovasi di dalam daerah.
- Efisiensi Proses Bisnis:
- Perubahan positif dalam efisiensi operasional dan proses bisnis di berbagai sektor dapat menjadi indikator adopsi teknologi dan inovasi.
- Lingkungan Inovatif: Ketersediaan inkubator bisnis, pusat riset, dan program dukungan inovasi lainnya dapat menciptakan lingkungan yang mendukung adopsi teknologi dan inovasi.

Pemantauan dan evaluasi rutin terhadap indikator-indikator ini dapat membantu pemerintah daerah, lembaga riset, dan pihak terkait untuk mengidentifikasi keberhasilan, hambatan, dan peluang dalam upaya meningkatkan adopsi IPTEK dan inovasi dalam pembangunan daerah.

5.2.1.5 Penerapan Ekonomi Hijau

Indonesia merupakan salah satu kawasan di Asia Tenggara yang termasuk dalam kategori negara sedang berkembang. Dalam perkembangannya tersebut, pemerintah tengah gencar melaksanakan pembangunan nasional yang bersifat multidimensional atau mencakup berbagai aspek. Namun, dalam perkembangannya antara kegiatan ekonomi dan lingkungan terjadi ketidakseimbangan. Pembangunan ekonomi cenderung mengarah kepada eksploitasi terhadap sumber daya alam. Lingkungan yang semakin rusak sedikit demi sedikit mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat dunia.

Ekonomi hijau adalah pendekatan dalam pengembangan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep ini menekankan pada integrasi prinsip-prinsip keberlanjutan, efisiensi sumber daya, dan perlindungan lingkungan dalam aktivitas ekonomi. Ekonomi hijau berusaha untuk mencapai keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Konsep ekonomi hijau muncul sebagai tanggapan terhadap berbagai tantangan dan permasalahan lingkungan yang semakin nyata dan mendesak. Beberapa latar belakang utama yang mendorong perkembangan konsep ekonomi hijau melibatkan isu-isu global terkait lingkungan dan keberlanjutan antara lain :

- **Perubahan Iklim:**

Peningkatan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim global menjadi salah satu ancaman terbesar bagi keberlanjutan planet ini. Konsep ekonomi hijau muncul sebagai upaya untuk mengurangi dampak ekonomi terhadap perubahan iklim dan mempromosikan pola produksi dan konsumsi yang ramah lingkungan.

- **Pencemaran Lingkungan:**

Peningkatan aktivitas industri dan konsumsi manusia telah menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah. Konsep ekonomi hijau mencoba untuk mengurangi dampak negatif ini melalui

penggunaan teknologi bersih, manajemen limbah yang lebih baik, dan praktik-produksi berkelanjutan.

- **Kerusakan Ekosistem:**

Deforestasi, kehilangan keanekaragaman hayati, dan kerusakan ekosistem lainnya menjadi masalah serius yang mempengaruhi keseimbangan ekologis. Ekonomi hijau muncul sebagai upaya untuk melestarikan dan memulihkan ekosistem melalui praktik-praktik pembangunan berkelanjutan.

- **Krisis Sumber Daya Alam:**

Pemanfaatan sumber daya alam secara tidak berkelanjutan telah menyebabkan kekurangan sumber daya, termasuk energi fosil, air bersih, dan bahan tambang. Konsep ekonomi hijau mencoba untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya terbatas dan mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efisien.

- **Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi:**

Pembangunan ekonomi konvensional sering kali menyebabkan ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Ekonomi hijau menekankan inklusivitas sosial, yaitu pembangunan yang memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat, serta memastikan keadilan dalam distribusi sumber daya.

- **Peningkatan Kesadaran Masyarakat:**

Kesadaran masyarakat akan dampak negatif aktivitas ekonomi terhadap lingkungan semakin meningkat. Tuntutan masyarakat akan produk dan layanan yang ramah lingkungan mendorong perubahan dalam proses produksi atau cara suatu produk dihasilkan.

- **Pentingnya Pembangunan Berkelanjutan:**

Adanya pemahaman bahwa model pembangunan tradisional yang hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa memperhitungkan aspek lingkungan dan sosial tidak dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Ekonomi hijau menyatukan konsep pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan keseimbangan antara tiga dimensi keberlanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan).

Konsep ekonomi hijau mencoba untuk mengubah paradigma ekonomi tradisional yang seringkali mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. Dengan mengintegrasikan keberlanjutan, efisiensi sumber daya, dan perlindungan lingkungan dalam proses ekonomi, diharapkan dapat diciptakan model pembangunan yang lebih berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang.

Adapun karakteristik dari ekonomi hijau adalah keberlanjutan (Sustainability) dimana ekonomi hijau berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang dapat dipertahankan jangka panjang tanpa merusak lingkungan atau mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Konsep ini mengakui bahwa sumber daya alam yang terbatas harus dikelola dengan bijak untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan di masa depan. Selanjutnya adalah efisiensi sumber daya dimana konsep ini menekankan penggunaan sumber daya secara efisien untuk mengurangi limbah dan emisi. Penerapan teknologi yang ramah lingkungan, desain produk yang berkelanjutan, dan proses produksi yang efisien adalah beberapa aspek dari efisiensi sumber daya dalam ekonomi hijau. Pengembangan berkelanjutan juga merupakan ciri dari ekonomi hijau dimana mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Ini mencakup pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, penggunaan energi terbarukan, dan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang mendukung keberlanjutan.

Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dimana konsep ini menekankan pada pengurangan emisi gas rumah kaca melalui penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, dan kebijakan lingkungan yang bertujuan mengurangi dampak perubahan iklim.

Inklusivitas Sosial adalah ciri ekonomi hijau yang juga mempertimbangkan aspek sosial, dengan fokus pada inklusivitas dan keadilan. Pembangunan ekonomi harus memberikan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat dan mengurangi ketidaksetaraan.

Ekonomi hijau menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan lingkungan dan

pembangunan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dianggap sebagai kunci keberhasilan implementasi konsep ekonomi hijau.

Konsep ekonomi hijau berusaha untuk menciptakan ekonomi yang seimbang antara keberlanjutan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Hal ini merupakan respon terhadap tantangan lingkungan global dan aspirasi untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi negara Indonesia khususnya Provinsi Jambi. Oleh karena itu, konsep ekonomi hijau harus segera diintegrasikan dalam rencana pembangunan daerah Provinsi Jambi dengan harapan dalam 20 tahun mendatang, secara bertahap akan tercapai keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dalam setiap aktivitas pembangunan.

5.2.1.6 Transformasi Digital

Transformasi digital telah menjadi fenomena universal yang melanda berbagai sektor kehidupan. Gelombang besar transformasi ini turut membawa dampak signifikan dan turut memimpin arah perkembangan zaman. **Transformasi Digital** adalah suatu proses pemanfaatan teknologi digital untuk membawa perubahan secara signifikan di berbagai aspek kehidupan sehingga kebutuhan dapat segera terpenuhi dengan lebih cepat, mudah, dan juga praktis. Dalam melaksanakan transformasi digital, Provinsi Jambi akan melakukan hal-hal berikut.

- **Adopsi Teknologi Baru:**
Penerapan teknologi baru, seperti cloud computing, kecerdasan buatan, analisis data, dan *Internet of Things (IoT)*, untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kemampuan organisasi/institusi.
- **Penggunaan Data dan Analitika:**
Pemanfaatan data dalam proses pengambilan keputusan. Analisis data digunakan untuk mendapatkan wawasan atau informasi, membuat prediksi, dan mengoptimalkan operasional.

- **Perubahan Proses Bisnis:**
Merevitalisasi dan memodernisasi proses bisnis agar lebih efisien dan responsif. Automatisasi proses manual menjadi bagian integral dari transformasi ini.
- **Kepemimpinan dan Budaya Organisasi:**
Transformasi digital memerlukan dukungan dan komitmen dari tingkat kepemimpinan hingga tingkat pekerja operasional. Budaya organisasi yang mendukung inovasi, keberanian mengambil risiko, dan pembelajaran terus-menerus menjadi penentu proses transformasi tersebut.
- **Kolaborasi dan Keterbukaan:**
Mendorong kolaborasi antara departemen dan kelompok kerja dengan menggunakan platform kolaboratif dan komunikasi digital. Meningkatkan keterbukaan dan berbagi informasi di seluruh organisasi.
- **Keamanan Informasi:**
Memastikan perlindungan data dan keamanan informasi dengan mengadopsi praktik keamanan siber yang kuat. Ini menjadi semakin penting dengan meningkatnya kompleksitas dan seringnya ancaman siber.
- **Pembangunan Kapabilitas SDM:**
Pengembangan keterampilan dan pengetahuan SDM agar dapat memanfaatkan teknologi baru dengan efektif. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia menjadi aspek penting dari transformasi digital.

Transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga melibatkan perubahan budaya dan proses organisasi atau tata kelola. Organisasi ataupun institusi perlu memastikan bahwa karyawan/aparat sipil memiliki keterampilan yang sesuai, dan mereka harus menerapkan perubahan budaya yang mendukung pengadopsian teknologi baru. Transformasi digital memiliki dampak besar pada berbagai sektor, termasuk bisnis, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Tujuan akhirnya adalah

meningkatkan efisiensi, inovasi, dan daya saing dalam menghadapi era digital yang terus berkembang. Oleh karena itu, transformasi digital harus terintegrasi dalam platform rencana pembangunan jangka panjang daerah sebagai sasaran yang akan dicapai dalam 20 tahun mendatang. Secara bertahap proses transformasi digital akan berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur pendukungnya, semakin lanjut tahap transformasi seyogyanya laju adopsi dan responsivitas terhadap perkembangan teknologi baru akan semakin meningkat yang pada akhirnya akan tergambar dari efisiensi proses yang semakin juga semakin meningkat.

5.2.1.7 Integrasi Ekonomi Daerah dan Global

Integrasi ekonomi daerah dan global mengacu pada proses dan fenomena di mana berbagai wilayah atau negara bekerja sama dan saling terhubung dalam konteks ekonomi. Ini melibatkan pertukaran barang, jasa, modal, informasi, dan faktor-faktor produksi antar wilayah atau negara. Ada beberapa dimensi integrasi ekonomi, baik di tingkat regional maupun global. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari integrasi ekonomi daerah dan global.

Adanya pasar bersama (*common market*) merupakan aspek penting dari integrasi sebagaimana dimaksud. Terbentuknya pasar bersama di suatu wilayah ekonomi daerah memungkinkan aliran bebas barang, jasa, dan faktor produksi antara negara-negara anggotanya. Ini menciptakan pasar tunggal yang memperlancar perdagangan dan investasi di dalam wilayah tersebut. Integrasi lebih lanjut yaitu melalui uni ekonomi (*economic union*) yang mencakup koordinasi kebijakan ekonomi antara negara-negara atau daerah-daerah anggota, termasuk harmonisasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor-sektor kunci lainnya.

Selanjutnya, koordinasi kebijakan ekonomi antar negara anggota diperlukan untuk mencapai tujuan bersama, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan peningkatan kesejahteraan. Setiap daerah/negara harus mengalokasikan investasi dalam proyek infrastruktur bersama, seperti jaringan transportasi dan

energi, untuk memfasilitasi pergerakan barang dan jasa di seluruh wilayah ekonomi daerah.

Dalam membangun kawasan yang didalamnya ada integrasi antara daerah dengan negara lain, salah satu kesepakatan yang harus dibentuk adalah reduksi atau penghapusan tarif dan hambatan perdagangan lainnya antar negara untuk meningkatkan aliran perdagangan internasional. Demikian pula dengan peningkatan investasi langsung satu negara ke negara lain untuk meningkatkan kolaborasi bisnis dan transfer teknologi.

Adanya integrasi ekonomi daerah dan negara lain (global) dapat memunculkan pergerakan faktor produksi atau mobilitas yang lebih besar dari faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal di antara negara-negara, serta dapat meningkatkan alokasi sumber daya secara efisien. Integrasi ekonomi, baik di tingkat regional maupun global, dapat memberikan manfaat seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan efisiensi, dan pengurangan ketidaksetaraan. Namun, juga dapat menciptakan tantangan seperti ketidakpastian ekonomi global, persaingan yang meningkat, dan dampak sosial yang mungkin tidak merata

5.2.1.8 Perkotaan dan Kawasan Strategis Provinsi sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Perkotaan mengacu pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, struktur pembangunan yang kompleks, dan fungsi-fungsi ekonomi, sosial, dan politik yang beragam. Perkotaan seringkali menjadi pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, budaya, dan administrasi di suatu wilayah. Pembentukan kota dan perkembangan kawasan perkotaan sering dihubungkan dengan urbanisasi, yaitu migrasi penduduk dari pedesaan ke kota untuk mencari pekerjaan dan peluang kehidupan yang lebih baik. Karakteristik perkotaan antara lain kepadatan penduduk yang lebih tinggi, infrastruktur yang lebih kompleks, jaringan transportasi yang lengkap, keanekaragaman ekonomi dan pekerjaan, dan ketersediaan layanan publik dan sosial yang lebih baik .

Kota juga dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan sehingga dengan adanya pusat pertumbuhan tersebut dapat memberikan kontribusi atau pengaruh bagi daerah disekitarnya.

Pusat pertumbuhan (*growth of pole*) dapat dibedakan menjadi dua pengertian berdasarkan fungsional dan geografis. Dalam pengertian fungsional, pusat pertumbuhan merupakan titik konsentrasi atau pemusatan gabungan suatu usaha industri dengan hubungan unsur-unsur yang selaras dan berkaitan dan dapat membantu menumbuhkan kegiatan ekonomi ke dalam dan ke luar atau daerah dibelakangnya. Secara geografis, pusat pertumbuhan diartikan sebagai titik dengan banyak kegiatan serta fasilitas yang memberikan kemudahan dan menjadi daya tarik sehingga membuat usaha yang ada tertarik untuk melakukan kegiatan di pusat tersebut serta penduduk yang dapat dengan mudah menggunakan fasilitas yang ada. Namun, tidak setiap kota merupakan pusat pertumbuhan sehingga akan ada beberapa kemungkinan bahwa tidak banyak terjadi kegiatan atau hubungan antara usaha-usaha tersebut.

Pusat pertumbuhan menjadi suatu hal yang dapat mendorong perkembangan ekonomi di wilayah pinggiran kota atau sekitar kota. Pusat pertumbuhan memiliki dampak akan terjadinya sebagian penduduk yang berpindah dari luar pusat pertumbuhan karena pusat pertumbuhan memiliki daya tarik serta daya tolak dari daerah disekitar pusat pertumbuhan.

Pengembangan kawasan strategis provinsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas hidup penduduk, dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jambi maupun tingkat regional. Untuk itu, kawasan strategis dan perkotaan yang telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jambi dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang, secara bertahap akan diwujudkan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga mendorong kota-kota di wilayah provinsi Jambi untuk seluruhnya dapat berperan sebagai pusat pertumbuhan. Diharapkan dalam 20 tahun mendatang, jumlah kota dan kawasan strategis yang berperan sebagai pusat

pertumbuhan akan semakin banyak. Semakin banyak wilayah-wilayah pusat pertumbuhan akan semakin cepat tercapai pemerataan pembangunan.

5.2.1.9 Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Berintegritas dan Adaptif

Tata kelola pemerintahan daerah yang berintegritas merujuk pada prinsip-prinsip dan praktik-praktik yang mendorong kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam tindakan dan keputusan pemerintah daerah. Untuk itu, prinsip tata kelola pemerintahan daerah berintegritas berikut ini akan terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi:

- **Kejujuran dan Etika:**
Mendorong integritas di antara pejabat pemerintah dan staf melalui praktik-praktik yang transparan, terbuka, dan beretika.
- **Transparansi Informasi:**
Menyediakan akses publik yang lebih besar terhadap informasi pemerintah, kebijakan, dan keputusan untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.
- **Pencegahan Korupsi:**
Mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan korupsi, seperti pengelolaan keuangan yang baik, audit yang ketat, dan sistem pengawasan yang efektif.
- **Partisipasi Masyarakat:**
Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pemerintah, sehingga mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan.
- **Penegakan Peraturan Daerah secara Adil:**
Menjamin penegakan Peraturan Daerah yang adil dan tanpa diskriminasi, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran etika dan hukum.
- **Sistem Pengaduan Masyarakat:**

Membangun sistem yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan perilaku yang tidak etis atau tindakan korupsi dalam pemerintahan daerah.

- **Pengelolaan Keuangan yang Transparan:**
Menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, termasuk penyusunan laporan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
- **Peningkatan kapasitas Aparat Pemerintahan:**
Memberdayakan aparat pemerintahan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan etika, serta menetapkan standar perilaku yang tinggi.

Pada sisi lain, selain berintegritas tata kelola pemerintahan daerah haruslah adaptif. Tata kelola pemerintahan daerah yang adaptif dicirikan dengan kemampuan suatu pemerintah daerah untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan dinamika yang terjadi di dalam dan di sekitarnya. Dalam penerapannya, Pemerintah Provinsi Jambi secara berkesinambungan akan melakukan hal-hal berikut:

- **Responsif terhadap Perubahan Sosial dan Ekonomi:**
Kemampuan untuk mengidentifikasi dan merespons perubahan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat setempat.
- **Penggunaan Teknologi Informasi:**
Adopsi teknologi informasi terkini untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan publik.
- **Fleksibilitas Kebijakan:**
Kemampuan untuk mengubah dan menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang sudah ada agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan kondisi.
- **Pemberdayaan Masyarakat untuk Inovasi:**
Mendorong inovasi melalui partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembuatan keputusan.
- **Pengelolaan Krisis dan Bencana:**

Pengembangan rencana darurat dan kemampuan untuk mengelola krisis atau bencana dengan efektif.

- **Kolaborasi dengan Pihak Eksternal:**
Membangun kerja sama yang baik dengan pihak eksternal, termasuk sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan komunitas internasional untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- **Pembangunan Kapabilitas SDM:**
Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia yang mencakup peningkatan keterampilan dan pengetahuan untuk menghadapi perubahan dan tuntutan baru.

Dengan memadukan integritas dan adaptabilitas, Pemerintah Jambi dapat menciptakan lingkungan yang stabil, beretika, dan mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

5.2.1.10 Keamanan dan Ketertiban Umum, Kerukunan Hidup serta Budaya Toleransi Masyarakat

Dalam rangka menjadikan Provinsi Jambi sebagai daerah tujuan investasi utama, maka salah satu kondisi yang diperlukan adalah keamanan dan ketertiban umum. Salah satu indikator yang menggambarkan keamanan tersebut adalah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Keamanan dan ketertiban umum tidak bisa terlepas dari kerukunan hidup dan budaya toleransi yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, ketiganya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Kerukunan hidup dan budaya toleransi masyarakat merupakan suatu kondisi di mana anggota masyarakat dari berbagai latar belakang, suku, agama, ras, dan kelompok lainnya dapat hidup bersama secara harmonis, saling menghormati, dan menerima perbedaan satu sama lain. Ini melibatkan sikap terbuka, penghargaan, dan kerja sama antarindividu dan kelompok dalam masyarakat.

Membangun kerukunan merupakan usaha yang tidak pernah berakhir. Selama manusia hidup, perbedaan akan selalu ada sehingga potensi konflik juga akan selalu terbuka lebar. Hal produktif yang penting untuk dilakukan adalah melakukan usaha dalam bentuk apa pun agar keragaman itu bisa menjadi orkestra kehidupan yang harmonis. Jika tidak ada usaha secara serius, kehidupan tidak lagi diwarnai dengan keindahan sebagaimana orkestra.

Membangun kerukunan jelas bukan pekerjaan sederhana dan mudah. Dibutuhkan usaha dan kerja keras karena jejak sejarah Indonesia menunjukkan betapa kerukunan itu harus diperjuangkan. Ada egoisme, perasaan lebih unggul, dan hal-hal lain yang mengganggu sehingga membangun kerjasama yang merupakan modal untuk mewujudkan kerukunan tidak selalu mudah untuk diwujudkan. Landasan terwujudnya kerukunan adalah toleransi. Toleransi itu memiliki dua fungsi, yaitu "mengemukakan pandangan dan menerima pandangan dalam batas-batas tertentu, namun tidak merusak keyakinan agama masing-masing". Toleransi secara istilah adalah sikap membolehkan atau membiarkan ketidaksepakatan dan tidak menolak pendapat, sikap, ataupun gaya hidup yang berbeda dengan pendapat, sikap, dan gaya hidup sendiri. Sikap toleran pada tataran implementasi tidak hanya dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan aspek spiritual dan moral yang berbeda, tetapi juga harus dilakukan terhadap aspek yang luas, termasuk aspek ideologi dan politik. Wacana toleransi biasanya ditemukan dalam etika perbedaan pendapat. Salah satu etika berbeda pendapat adalah tidak memaksakan kehendak dalam bentuk-bentuk dan cara-cara yang merugikan pihak lain

Toleransi yang menjadi bagian dari kesadaran warga masyarakat berimplikasi pada sikap saling menghormati, menghargai, dan memahami satu sama lain. Toleransi yang dikelola secara baik merupakan modal penting untuk membangun kerukunan nasional. Kerukunan nasional menjadi aspek determinan dalam pembangunan nasional. Sulit melakukan pembangunan nasional jika konflik sering terjadi di masyarakat.

Pemahaman dan kesadaran toleransi tidak bisa tumbuh secara natural. Dibutuhkan berbagai upaya, baik secara konseptual maupun praktis, untuk menjadikan toleransi sebagai bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemerintah perlu merancang strategi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Peningkatan pemahaman dan kesadaran toleransi harus dilakukan secara berkesinambungan dalam tahapan pembangunan daerah.

Kerukunan hidup dan toleransi masyarakat mencerminkan kondisi positif di dalam suatu komunitas yang memungkinkan anggotanya hidup bersama secara harmonis, menghormati perbedaan, dan memahami keberagaman sebagai sumber kekayaan. Dalam upaya mewujudkan kondisi tersebut, beberapa aspek berikut akan didorong selama periode RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045:

- **Tingkat Keharmonisan Masyarakat:**
Tingkat hubungan positif antarindividu dan kelompok dalam masyarakat. Ini dapat tercermin dalam tingkat kebersamaan, saling menghargai, dan kerjasama antarwarga.
- **Toleransi Terhadap Perbedaan:**
Sikap masyarakat terhadap perbedaan, baik itu perbedaan agama, budaya, suku, ras, gender, maupun perbedaan lainnya. Tingkat toleransi dapat diukur melalui survei, wawancara, atau observasi perilaku masyarakat.
- **Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat:**
Tingkat partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan dan keputusan yang memengaruhi mereka. Partisipasi masyarakat dapat mencerminkan tingkat keterlibatan dan rasa memiliki terhadap kehidupan masyarakat.
- **Rasa Aman dan Kesejahteraan:**
Tingkat rasa aman dan kesejahteraan di masyarakat. Masyarakat yang merasa aman cenderung lebih terbuka terhadap perbedaan dan lebih mungkin untuk mencapai kerukunan hidup.

- **Kesepahaman Antarkelompok:**
Tingkat kesepahaman dan pengertian antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Ini melibatkan pemahaman tentang nilai-nilai, kepercayaan, dan kebiasaan kelompok lain.
- **Tidak Adanya Diskriminasi dan Stereotip:**
Minimnya tindakan diskriminasi dan stereotip terhadap kelompok-kelompok tertentu. Ini mencerminkan tingkat keadilan dan kesetaraan di dalam masyarakat.
- **Edukasi tentang Toleransi:**
Tingkat akses dan partisipasi dalam pendidikan tentang toleransi dan keragaman budaya. Edukasi ini dapat melibatkan program-program sekolah, pelatihan masyarakat, dan kampanye publik.
- **Pemberitaan Media yang Positif:**
Kondisi pemberitaan media terhadap kerukunan hidup dan toleransi masyarakat. Media yang memberikan liputan positif dan objektif terhadap perbedaan dapat membentuk persepsi masyarakat.
- **Perlindungan Hak Asasi Manusia:**
Tingkat perlindungan hak asasi manusia di masyarakat. Ini mencakup perlindungan hak-hak individu dan kelompok serta penanganan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.
- **Penanganan Konflik dengan Damai:**
Kemampuan masyarakat untuk menangani konflik atau ketegangan dengan cara damai dan membangun solusi yang adil dan berkelanjutan.
- **Komitmen Pemimpin dan Lembaga Masyarakat:**
Tingkat komitmen pemimpin lokal dan lembaga masyarakat terhadap kerukunan hidup dan toleransi. Ini melibatkan adopsi kebijakan yang mendukung kerukunan hidup dan aksi nyata untuk mewujudkannya.

Pemantauan dan evaluasi terhadap aspek-aspek di atas dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu masyarakat telah mencapai kerukunan hidup dan toleransi, serta mengidentifikasi area

yang perlu diperbaiki untuk mendukung kerukunan yang berkelanjutan.

5.2.1.11 Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Stabilitas ekonomi makro daerah merujuk pada kondisi di mana ekonomi suatu wilayah, daerah, atau kawasan tetap dalam keadaan yang relatif stabil dari segi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan faktor-faktor ekonomi makro lainnya. Stabilitas ekonomi makro menjadi tujuan yang penting bagi pemerintah daerah atau otoritas lokal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Guna menjaga stabilitas ekonomi makro daerah, selama periode RPJPD Tahun 2025 akan dijaga pertumbuhan Ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan karena stagnasi atau pertumbuhan yang terlalu cepat dapat menciptakan ketidakstabilan. Selain itu, mempertahankan tingkat inflasi yang terkendali juga akan terus dilakukan salah satunya melalui stabilisasi harga, karena inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli masyarakat dan merugikan stabilitas ekonomi.

Tingkat Pengangguran juga akan diupayakan secara terus menerus rendah melalui penciptaan dan perluasan lapangan pekerjaan. Kondisi pasar tenaga kerja yang sehat, dengan keterlibatan masyarakat dalam pekerjaan yang produktif dan upah yang adil juga secara bertahap akan diwujudkan. Investasi yang baik dalam pembangunan infrastruktur juga menjadi bagian dari strategi untuk menjaga stabilitas ekonomi makro daerah, karena dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pengendalian utang daerah adalah faktor kunci dalam mencapai dan mempertahankan stabilitas ekonomi makro. Untuk itu utang daerah harus dilakukan dengan pertimbangan yang rasional, karena dapat menimbulkan risiko keuangan daerah yang serius.

Resiliensi Ekonomi daerah terhadap ketidakpastian eksternal juga akan dilakukan secara terus menerus, karena perubahan kondisi ekonomi global atau peristiwa tak terduga selalu mengancam perjalanan menjaga stabilitas ekonomi selama 20 tahun kedepan..

Melalui pemantauan dan kebijakan yang bijaksana, pemerintah daerah dapat berkontribusi pada pencapaian dan pemeliharaan stabilitas ekonomi makro yang akan mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

5.2.1.12 Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender dan Masyarakat Inklusif dan Berkebudayaan Maju

Keluarga merupakan institusi terkecil yang bertanggung jawab atas pertumbuhan dan perkembangan serta pendidikan anak. Kualitas sebuah keluarga merupakan determinan atas terbentuknya individu yang tangguh, berkompeten, dan berkarakteristik mulia. Selain pendidikan, keluarga juga merupakan sumber perlindungan atas gangguan dari luar. Keluarga yang berkualitas merujuk pada keluarga yang memiliki hubungan yang sehat, saling mendukung, dan mampu memberikan lingkungan yang positif bagi anggotanya. Seorang individu akan tumbuh dengan karakter-karakter spesifik seperti inklusivitas dan bermoral baik sangat ditentukan oleh kualitas keluarga yang membesarkannya.

Kesenjangan gender mengacu pada konsep di mana semua individu, tanpa memandang jenis kelamin mereka, memiliki hak yang sama, kesempatan yang sama, dan akses yang sama terhadap sumber daya, perlakuan, dan pengambilan keputusan di semua aspek kehidupan. Setiap individu tanpa memandang jenis kelamin merupakan potensi sumberdaya manusia yang mampu berkontribusi sama dalam pembangunan. Oleh karena itu, disamping sebagai hak sebagai individu, kesetaraan merupakan potensi percepatan pembangunan ketika setiap elemen dapat berkontribusi sesuai kompetensinya tanpa memandang gender.

Arah pembangunan jangka panjang dalam hal ini adalah mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif dan berkebudayaan maju. Terwujudnya keluarga berkualitas dilihat dari berbagai aspek kehidupan keluarga antara lain : komunikasi efektif, keseimbangan pekerjaan dan keluarga, hubungan emosional yang sehat, partisipasi aktif orang tua dalam

pendidikan anak, partisipasi dalam kegiatan bersama, pemeliharaan kesehatan dan gaya hidup, keseimbangan antara kemandirian dan ketergantungan, fleksibilitas dan adaptabilitas (adaptif terhadap tantangan), toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, kualitas interaksi orang tua-anak. Sedangkan indikator bagi terwujudnya kesetaraan gender antara lain : partisipasi dalam pengambilan keputusan, akses dan partisipasi dalam pendidikan, akses dan partisipasi dalam dunia kerja, partisipasi dalam kegiatan politik, pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan dan pelatihan.

Masyarakat inklusif dan berkebudayaan maju memiliki beberapa ciri yang mencerminkan nilai-nilai kesetaraan, keberagaman, serta perkembangan budaya dan sosial. Berikut adalah beberapa ciri masyarakat inklusif dan berkebudayaan maju: kesetaraan dan keadilan, keterlibatan dan partisipasi, pendidikan dan akses informasi, peran perempuan dan pemberdayaan gender, keanekaragaman budaya dan etnis, keberlanjutan dan kesejahteraan, keterbukaan terhadap inovasi dan teknologi, keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia, toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, infrastruktur inklusif, rasa kepedulian dan solidaritas , serta pendidikan kesadaran dan etika:

5.2.1.13 Lingkungan Hidup Berkualitas

Pemeliharaan dan peningkatan kualitas lingkungan memberikan kontribusi signifikan terhadap berbagai aspek pembangunan yang berkelanjutan, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lingkungan hidup yang berkualitas mengacu pada kondisi lingkungan yang mendukung keberlanjutan, kesehatan, dan kesejahteraan bagi semua makhluk hidup. Lingkungan hidup yang berkualitas memastikan bahwa unsur-unsur ekosistem, sumber daya alam, dan keberlanjutan lingkungan dipertahankan dan dijaga. Aspek-aspek yang dijaga dan ditingkatkan dalam RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 adalah:

- Keberagaman Hayati:

Adanya keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk ragam spesies tumbuhan dan hewan serta ekosistem yang seimbang. Keberagaman hayati mendukung keberlanjutan ekosistem dan menjaga keseimbangan ekologis. Selain itu, keragaman hayati merupakan modal dasar pembangunan dalam berbagai bidang terutama sekali pembangunan pertanian.

- **Kualitas Udara yang Baik**, merupakan udara bersih dan bebas dari polusi yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Kualitas udara yang baik mencakup rendahnya kadar polutan seperti partikulat, ozon, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida.
- **Air Bersih dan Bebas Pencemaran:**
Ketersediaan air bersih yang cukup dan air yang bebas dari pencemaran. Air yang berkualitas mendukung kehidupan akuatik, pertanian, dan kebutuhan manusia tanpa membahayakan kesehatan.
- **Pemanfaatan Sumber Daya yang Berkelanjutan:**
Pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk hutan, energi, dan mineral. Pengelolaan yang bijak terhadap sumber daya alam dapat mendukung keberlanjutan jangka panjang.
- **Manajemen Limbah yang Efektif:**
Praktik manajemen limbah yang efektif untuk mengurangi, mendaur ulang, dan mengolah limbah secara aman sehingga tidak merusak lingkungan dan kesehatan manusia.
- **Tingkat poluasi suara dan cahaya yang rendah:**
Lingkungan yang tidak terpapar oleh tingkat kebisingan dan cahaya berlebihan yang dapat mengganggu makhluk hidup, termasuk manusia dan hewan.
- **Keberlanjutan Energi:**
Pemanfaatan sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti energi terbarukan (surya, angin, air) untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

- **Pertanian dan Pangan Berkelanjutan:**
Sistem pertanian yang berkelanjutan, meminimalkan penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang dapat mencemari tanah dan air. Sistem ini juga mendukung ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas.
- **Kesadaran dan Pendidikan Lingkungan:**
Kesadaran masyarakat dan pendidikan lingkungan yang tinggi. Pemahaman akan pentingnya menjaga lingkungan dan praktik hidup berkelanjutan dapat membantu memelihara kualitas lingkungan.

Lingkungan hidup yang berkualitas esensial untuk menjaga kehidupan dan kesejahteraan umat manusia serta keberlanjutan planet ini. Masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta berperan penting dalam menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan agar dapat dinikmati oleh generasi saat ini dan masa depan.

Lingkungan hidup yang berkualitas bukan hanya mendukung keberhasilan pembangunan dalam jangka pendek, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat untuk kelangsungan hidup dan keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, integrasi aspek lingkungan dalam kebijakan pembangunan menjadi krusial untuk mencapai pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan.

5.2.1.14 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Energi merupakan elemen yang sangat penting dan tidak bisa terpisahkan dalam konsep kehidupan. Energi dengan bentuknya yang bervariasi adalah sumber penggerak seluruh aktivitas yang ada di alam semesta ini. Dalam konteks kehidupan bernegara ketersediaan energi yang dikelola dengan baik, dalam kondisi kuantitas dan kualitas yang cukup bagi masyarakat merupakan salah satu penentu utama kesejahteraan masyarakat suatu bangsa. Menjadi kewajiban pemerintah suatu negara untuk menyediakan dan mengelola berbagai sumber energi bagi kehidupan masyarakatnya. Oleh sebab itu, salah

satu arah pembangunan daerah adalah mencapai suatu keadaan yang berketahanan energi.

Energi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi dapat dimiliki oleh benda mati maupun makhluk hidup. Sumber energi bagi benda mati dapat bersumber dari energi matahari, listrik, angin, air, geothermal, dan lain-lain. Sedangkan energi bagi manusia bersumber dari makanan atau bahan organik yang beberapa komponennya antara lain karbohidrat, protein, lemak, dan lain-lain. Kualitas manusia dalam melakukan kerja boleh jadi bergantung pada ketersediaan pangan dengan komposisi yang cukup. Oleh karena itu, membangun masyarakat yang berproduktivitas tinggi tidak lepas dari bagaimana menjamin kecukupan bahan pangan dengan komposisi gizi yang cukup. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban pemerintah baik nasional maupun daerah untuk mengupayakan kondisi ketahanan dan kemandirian pangan.

Berketahanan energi merujuk pada kemampuan suatu sistem untuk menjaga ketenagalistrikan dan pasokan energi yang andal dan terus menerus di tengah tantangan dan gangguan. Sistem yang berketahanan energi mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan dalam pasokan, permintaan, dan situasi eksternal seperti bencana alam atau krisis energi. Beberapa elemen kunci dari ketahanan energi meliputi diversifikasi sumber energi, efisiensi energi, infrastruktur yang kuat, dan rencana tanggap darurat. Pada sisi lain, kemandirian pangan merujuk pada kemampuan suatu negara, wilayah, atau masyarakat untuk memproduksi dan menyediakan cukup makanan untuk memenuhi kebutuhan lokal tanpa bergantung pada impor makanan dari luar. Kemandirian pangan bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan yang memadai dan stabil di tingkat lokal, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangan dasar tanpa terlalu terpengaruh oleh fluktuasi harga global atau krisis pasokan. Faktor-faktor yang mendukung kemandirian pangan melibatkan pertanian lokal yang berkelanjutan, kebijakan pertanian yang baik, dan dukungan untuk petani lokal.

Upaya untuk mewujudkan ketahanan energi di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

- **Diversifikasi Sumber Energi:**
Tingkat diversifikasi sumber energi di daerah tersebut. Daerah yang berketahanan energi cenderung memiliki sumber energi yang bervariasi, termasuk energi terbarukan dan non-terbarukan.
- **Efisiensi Energi:**
Tingkat efisiensi penggunaan energi dalam infrastruktur dan proses-proses produksi di daerah tersebut. Upaya untuk meningkatkan efisiensi energi dapat mengurangi kebutuhan energi total.
- **Pemanfaatan Energi Terbarukan:**
Proporsi energi terbarukan dalam total konsumsi energi daerah. Pemanfaatan energi terbarukan, seperti energi surya, angin, dan hidro, merupakan tanda ketahanan terhadap fluktuasi harga energi dan perubahan iklim.
- **Kemandirian Energi:**
Kemampuan daerah untuk memproduksi sebagian besar atau seluruh kebutuhannya sendiri, sehingga tidak terlalu bergantung pada impor energi dari luar.
- **Kapasitas Infrastruktur Energi:**
Kondisi dan kapasitas infrastruktur energi di daerah tersebut, termasuk jaringan distribusi, penyimpanan energi, dan fasilitas produksi energi.
- **Inovasi Energi:**
Tingkat inovasi dan adopsi teknologi energi baru di daerah tersebut. Daerah yang berketahanan energi cenderung mengadopsi teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
- **Kebijakan Energi:**
Adopsi dan implementasi kebijakan energi yang mendukung pengelolaan dan penggunaan energi yang berkelanjutan. Ini termasuk kebijakan peningkatan efisiensi, penggunaan energi terbarukan, dan perlindungan lingkungan.

- **Ketersediaan Energi:**
Ketersediaan energi yang stabil dan andal di daerah tersebut. Ketahanan energi juga mencakup kemampuan untuk mengatasi gangguan atau kekurangan pasokan energi.
- **Efek Lingkungan:**
Dampak lingkungan dari produksi dan penggunaan energi di daerah tersebut. Daerah yang berketahanan energi berusaha meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- **Keterlibatan Masyarakat:**
Partisipasi dan pemahaman masyarakat mengenai keberlanjutan energi. Masyarakat yang terlibat dapat mendukung inisiatif dan praktik-praktik yang berkelanjutan.
- **Kemitraan dan Kolaborasi:**
Tingkat kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengelola dan meningkatkan ketahanan energi daerah.

Pada sisi lain, kemandirian pangan mencakup sejumlah variabel yang memberikan gambaran tentang kemampuan suatu daerah atau negara untuk memproduksi dan menyediakan cukup pangan untuk memenuhi kebutuhan lokal tanpa terlalu bergantung pada impor. Hal-hal berikut ini menjadi fokus dalam mewujudkan kemandirian pangan di Provinsi Jambi:

- **Produksi Pangan Lokal dan Rasio Ketersediaan Pangan Lokal terhadap Kebutuhan Konsumsi:**
Volume produksi pangan lokal (khususnya beras), hortikultura, ternak, dan produk perikanan. Kenaikan produksi lokal menunjukkan kemampuan daerah untuk menyediakan pangan secara mandiri. Perbandingan antara jumlah pangan yang diproduksi secara lokal dengan kebutuhan konsumsi penduduk dapat memberikan gambaran sejauh mana daerah tersebut memenuhi kebutuhan pangan lokalnya.
- **Diversifikasi sumber dan produk Pangan:**

Diversifikasi produk pangan yang dihasilkan, mencakup buah-buahan, sayuran, daging, ikan, dan produk olahan lainnya. Diversifikasi ini meningkatkan ketahanan pangan melalui keberagaman sumber dan produk pangan yang tersedia.

- **Efisiensi Produksi Pangan:**
Efisiensi dalam proses produksi pangan, mencakup penggunaan input seperti air, pupuk, dan pestisida. Efisiensi ini dapat membantu memastikan bahwa sumber daya digunakan secara berkelanjutan.
- **Ketergantungan pada Impor Pangan:**
Semakin rendah tingkat ketergantungan, semakin mandiri suatu daerah dalam pemenuhan kebutuhan pangan.
- **Keberlanjutan Pertanian:**
Praktik pertanian berkelanjutan, yang melibatkan penggunaan praktik-praktik yang mendukung keseimbangan ekosistem dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- **Ketersediaan Air untuk Pertanian:**
Ketersediaan air untuk keperluan pertanian, mengingat air merupakan faktor penting dalam produksi pangan.
- **Pertumbuhan Produksi Pangan:**
Tingkat pertumbuhan produksi pangan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang stabil atau meningkat menunjukkan kemajuan dalam mencapai kemandirian pangan.
- **Akses Pangan dan Gizi Masyarakat:**
Akses masyarakat terhadap pangan yang memadai dan gizi yang baik. Tingkat kemandirian pangan juga dapat diukur dari tingkat kelaparan dan masalah gizi di suatu daerah.
- **Dukungan Kebijakan Pangan:**
Ketersediaan dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendukung produksi pangan lokal dan mencapai kemandirian pangan.

- Pendidikan dan Keterampilan Pertanian:

Tingkat pendidikan dan keterampilan dalam sektor pertanian, karena ini dapat meningkatkan efisiensi produksi dan keberlanjutan pertanian.

5.2.1.15 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim merujuk pada kemampuan suatu komunitas, wilayah, atau sistem untuk menghadapi, menahan dampak, beradaptasi, dan pulih dari bencana alam serta perubahan iklim. Resiliensi ini melibatkan upaya untuk mengurangi risiko dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas untuk merespons dan beradaptasi terhadap situasi yang sulit. Sebagai daerah yang memiliki potensi kerawanan bencana, manajemen bencana menjadi satu hal yang penting dilakukan di Provinsi Jambi. Pengurangan risiko bencana perlu bergeser pada peningkatan resiliensi atau daya pulih penduduk.

Proses tersebut berlanjut melalui pelestarian dan pemulihan struktur serta fungsi dasar yang penting dalam usaha pulih kembali. Resiliensi memfokuskan investasi pada peningkatan kemampuan suatu wilayah secara keseluruhan untuk mendukung masyarakat tetap kuat dalam berbagai keadaan. Penilaian resiliensi wilayah terhadap bencana penting dilakukan untuk mengetahui kesiapan yang ada yang digunakan sebagai dasar perumusan arahan adaptasi dan mitigasi lanjutan. Resiliensi menjadi titik kunci untuk mengembalikan kondisi masyarakat setelah terpapar bencana.

Setidaknya ada tiga faktor yang harus terus menjadi perhatian dalam meningkatkan resiliensi terhadap bencana di Provinsi Jambi, yaitu tingkat risiko bencana, kerawanan bencana, dan status kerentanan masyarakat. Upaya membangun indeks resiliensi tak cukup dengan melihat banyaknya kejadian bencana atau fakta tentang sistem pembiayaan bencana. Resiliensi bencana dibangun melalui proses yang berkesinambungan antara kesiapsiagaan dan kerentanan.

Resiliensi di bidang sosial, memungkinkan individu dan komunitas untuk beradaptasi dengan keadaan ekstrem serta mengurangi dampaknya melalui interaksi antarindividu ataupun individu dengan komunitas. Faktor sosial disusun oleh persentase usia lanjut usia, akses transportasi, kemampuan berbahasa lokal, dan persentase penyandang disabilitas. Faktor lain yang berpengaruh terhadap resiliensi bencana suatu wilayah adalah kondisi ekonomi. Salah satu penggerak terbesar dalam pemulihan pascabencana berasal dari perekonomian. Parameter penyusunnya adalah persentase pekerja, tingkat kesenjangan ekonomi wilayah, kepemilikan rumah, dan pendapatan per kapita.

Di lain pihak, perubahan iklim merupakan suatu bentuk bencana yang tidak hanya berdampak langsung pada kualitas kehidupan manusia namun juga berdampak kepada produksi pertanian. Perubahan iklim telah berdampak pada fluktuasi hasil pertanian yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas berbagai aspek mulai dari ekonomi, sosial dan politik. Resiliensi terhadap perubahan iklim merujuk pada kemampuan suatu sistem, komunitas, atau wilayah untuk beradaptasi dan bertahan menghadapi dampak perubahan iklim, serta pulih secara efektif setelah mengalami peristiwa ekstrim yang disebabkan oleh perubahan iklim. Resiliensi ini melibatkan upaya untuk mengurangi kerentanan terhadap dampak perubahan iklim dan meningkatkan kapasitas untuk menyikapi tantangan yang muncul. Indikator tercapainya resiliensi terhadap perubahan iklim mencakup berbagai aspek yang mencerminkan kemampuan suatu sistem atau komunitas dalam menghadapi dan menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim. Berikut tahapan yang akan dilakukan untuk meningkatkan tingkat resiliensi terhadap perubahan iklim di Provinsi Jambi:

- Analisis Risiko Perubahan Iklim:
Evaluasi risiko dan rentang ancaman yang dihadapi oleh suatu wilayah atau komunitas akibat perubahan iklim. Indikator ini

mencakup identifikasi potensi dampak ekstrem, seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan suhu.

- **Infrastruktur yang Tangguh Terhadap Perubahan Iklim:**
Ketersediaan dan keandalan infrastruktur yang dapat menahan dampak perubahan iklim, seperti bangunan tahan gempa, sistem drainase yang efektif, dan jaringan transportasi yang tahan terhadap cuaca ekstrem.
- **Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan:**
Praktik-praktik pengelolaan air yang berkelanjutan untuk mengatasi perubahan pola curah hujan dan meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan atau banjir.
- **Peningkatan Kapasitas Masyarakat:**
Peningkatan kapasitas masyarakat dalam merespons perubahan iklim, termasuk tingkat kesadaran, pengetahuan, dan keterlibatan dalam inisiatif resiliensi.
- **Ketersediaan Sistem Peringatan Dini:**
Sistem peringatan dini yang efektif untuk memberikan informasi cepat dan akurat terkait dengan peristiwa cuaca ekstrem atau bencana terkait iklim.
- **Praktik Pertanian yang Adaptif:**
Penerapan praktik pertanian yang adaptif, seperti penanaman varietas tanaman yang tahan terhadap perubahan iklim dan pengelolaan tanah yang berkelanjutan.
- **Kebijakan dan Regulasi Terkait Perubahan Iklim:**
Kebijakan dan regulasi pemerintah yang mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, termasuk langkah-langkah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
- **Pengelolaan Hutan dan Ekosistem yang Berkelanjutan:**
Praktik pengelolaan hutan dan ekosistem yang berkelanjutan untuk mempertahankan fungsi ekologis dan melindungi dari risiko perubahan iklim.
- **Dukungan Teknologi dan Inovasi:**

Pemanfaatan teknologi dan inovasi yang mendukung resiliensi terhadap perubahan iklim, termasuk solusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dapat meningkatkan pemahaman dan tanggapan masyarakat terhadap perubahan iklim.

- **Ketersediaan Dana dan Investasi:**
Ketersediaan dana dan investasi untuk mendukung proyek-proyek yang bertujuan meningkatkan resiliensi terhadap perubahan iklim, termasuk investasi dalam infrastruktur dan teknologi ramah lingkungan.
- **Kemitraan dan Kolaborasi:**
Kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga internasional, dan masyarakat sipil untuk merancang dan melaksanakan program resiliensi.
- **Penurunan Risiko Bencana:**
Penurunan risiko bencana melalui langkah-langkah mitigasi yang bertujuan untuk mengurangi dampak perubahan iklim dan memperkecil risiko terhadap bencana alam yang terkait.
- **Monitoring dan Evaluasi:**
Sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk mengukur kemajuan dan efektivitas implementasi langkah-langkah resiliensi terhadap perubahan iklim.

5.2.1.16 Ketimpangan antar Wilayah dan Pendapatan Berkurang

Ketimpangan pendapatan dan ketimpangan wilayah merujuk pada perbedaan atau disparitas yang signifikan dalam distribusi pendapatan atau perkembangan ekonomi di antara individu, rumah tangga, atau wilayah-wilayah tertentu di suatu negara. Kedua hal ini memiliki dampak yang signifikan terhadap ketidaksetaraan ekonomi dan pembangunan regional.

Ketimpangan pendapatan disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan dalam tingkat pendidikan, keterampilan, akses terhadap peluang ekonomi, serta ketidaksetaraan dalam distribusi

aset dan peluang. Sedangkan ketimpangan wilayah atau pembangunan yang tidak merata mengacu pada disparitas dalam tingkat perkembangan ekonomi, infrastruktur, dan akses terhadap sumber daya antara berbagai wilayah di suatu negara atau daerah. Dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab ketimpangan wilayah dan pendapat dan dampaknya terhadap social dan ekonomi, maka akan dilakukan distribusi sumber daya, investasi pemerintah, dan akses terhadap pasar.

Pemerintah dapat berusaha untuk mengatasi ketimpangan pendapatan dan wilayah melalui kebijakan dan program pembangunan yang bertujuan untuk meratakan pembangunan ekonomi, meningkatkan akses terhadap sumber daya, dan menciptakan peluang yang lebih seimbang di seluruh wilayah negara atau daerah.

5.2.1.17 Daya Saing Infrastruktur Daerah

Kualitas dan kelengkapan infrastruktur merupakan faktor penentu dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik dan handal memainkan peran kunci dalam menggerakkan aktivitas ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan menarik investasi. Daya saing infrastruktur daerah merujuk pada kemampuan suatu wilayah atau daerah untuk menyediakan dan mempertahankan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing ekonomi secara keseluruhan.

Daya saing infrastruktur daerah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan atraksi investasi. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait seringkali berfokus pada pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan mendukung untuk meningkatkan daya saing suatu wilayah. Infrastruktur yang baik dan berdaya saing dapat meningkatkan keberlanjutan ekonomi, kualitas hidup, serta daya tarik untuk investasi dan pengembangan wilayah. Berikut beberapa infrastruktur daerah yang akan dipenuhi

dan ditingkatkan dalam rangka meningkatkan daya saing infrastruktur daerah:

- Jaringan Transportasi:

Ketersediaan jaringan transportasi yang efisien, termasuk jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara. Indikator ini mencakup kecepatan dan aksesibilitas transportasi dalam dan keluar wilayah.

- Listrik dan Energi:

Ketersediaan listrik yang stabil dan terjangkau, serta investasi dalam sumber energi yang berkelanjutan. Indikator ini mencakup kapasitas dan keandalan pasokan energi.

- Telekomunikasi dan Infrastruktur Digital:

Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang canggih, termasuk akses internet cepat, jaringan seluler yang luas, dan teknologi informasi yang mendukung. Indikator ini mencakup konektivitas digital dan akses terhadap teknologi informasi.

- Air Bersih dan Sanitasi:

Ketersediaan air bersih yang cukup dan sistem sanitasi yang efektif. Indikator ini mencakup ketersediaan air bersih, kualitas air, dan akses terhadap sistem sanitasi.

- Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan:

Ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Indikator ini mencakup jumlah dan kualitas sekolah, rumah sakit, dan pusat kesehatan.

- Ketersediaan Tanah dan Perencanaan Tata Ruang:

Ketersediaan tanah yang sesuai untuk pengembangan ekonomi dan perencanaan tata ruang yang baik. Indikator ini mencakup zonasi dan regulasi tata ruang.

- Pengelolaan Limbah dan Lingkungan:

Sistem pengelolaan limbah yang efektif dan dukungan terhadap praktik ramah lingkungan. Indikator ini mencakup pengelolaan limbah padat, daur ulang, dan upaya pelestarian lingkungan.

- Keselamatan dan Keamanan:

Keamanan wilayah dan infrastruktur, termasuk sistem pemadam kebakaran, kepolisian, dan keamanan publik. Indikator ini mencakup tingkat kejahatan, insiden kecelakaan, dan keamanan infrastruktur kritis.

- **Pertanian dan Irigasi:**

Dukungan terhadap sektor pertanian, termasuk infrastruktur irigasi, pasokan air, dan akses ke pasar. Indikator ini mencakup produktivitas pertanian dan dukungan untuk pertanian berkelanjutan.

- **Keberlanjutan Energi dan Sumber Daya Alam:**

Pemanfaatan energi yang berkelanjutan dan keberlanjutan penggunaan sumber daya alam. Indikator ini mencakup penggunaan energi terbarukan dan praktik berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

- **Kemitraan dan Kolaborasi:**

Kolaborasi antara sektor publik dan swasta, serta kemitraan antarwilayah untuk mendukung pengembangan infrastruktur yang berdaya saing. Indikator ini mencakup ketersediaan investasi dan dukungan dari pihak eksternal.

- **Kesiapan Terhadap Perubahan Iklim:**

Infrastruktur yang tahan terhadap perubahan iklim dan kebijakan yang mendukung adaptasi dan mitigasi. Indikator ini mencakup perencanaan untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

5.3 Arah Kebijakan Transformasi

Dalam rangka pelaksanaan transformasi di Provinsi Jambi sekaligus mendukung transformasi Indonesia, maka kebijakan transformasi Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2045 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5-1 Arah kebijakan transformasi sosial

No	RPJP Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Tranformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Transformasi Sosial	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	v	v			Bagian transformasi sosial di kab/kota
		Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	v	v	v	v	Bagian transformasi sosial di kab/kota
		Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan primer serta mengembangkan program komunikasi, Informasi dan edukasi untuk mencapai kemandirian kesehatan	v				Bagian transformasi sosial di kab/kota
		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	v				Bagian transformasi sosial di kab/kota khususnya kesehatan primer
		Penguatan sumber daya kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat untuk kemandirian		v			Bagian transformasi sosial di kab/kota
		mewujudkan kapasitas infrastruktur kesehatan berskala nasional dan global seiring dengan terwujudnya kemandirian kesehatan masyarakat.				v	Bagian transformasi sosial di kab/kota khususnya infrastruktur kesehatan berskala nasional

No	RPJP Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Tranformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	v	v			Bagian transformasi sosial di kab/kota
		Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	v	v	v	v	Bagian transformasi sosial di kab/kota
		Terwujudnya Pelayanan Kesehatan yang Menyeluruh, Kuat, profesional dan berdaya saing untuk kesehatan semesta .				v	Bagian transformasi sosial di kab/kota
		Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.	v	v	v	v	Bagian transformasi sosial di kab/kota
		Peningkatan pendidikan kesehatan dan informasi kesehatan dalam mendukung upaya kesehatan masyarakat yang mandiri			v		Bagian transformasi sosial di kab/kota
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas	v	v			Bagian transformasi sosial di kab/kota
		penguatan Sumber Daya Manusia kesehatan yang kompeten dan peningkatan sarana prasarana sesuai standar untuk mendukung pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat		v			Bagian transformasi sosial di kab/kota
		Peningkatan Kualitas SDM kesehatan sehingga mampu berdaya saing dalam memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Jambi			v		Bagian transformasi sosial di kab/kota

No	RPJP Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Tranformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Dukungan kebijakan untuk upaya perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan	v				Bagian transformasi sosial di kab/kota
		Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .	v	v	v	v	Bagian transformasi sosial di kab/kota
		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	v	v	v	v	Bagian transformasi sosial di kab/kota
		Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	v				Bagian transformasi sosial di kab/kota
		Percepatan wajib belajar 13 tahun	v				Bagian transformasi sosial di kab/kota
		Peningkatan layanan melalui digitalisasi perpustakaan			v		Bagian transformasi sosial di kab/kota
		Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat melalui penguatan literasi dan pemerataan pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial		v			Bagian transformasi sosial di kab/kota
		penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat			v		Bagian transformasi sosial di kab/kota

No	RPJP Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Tranformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		mewujudkan SDM yang sejahtera, adaptif, berahlak mulia, berbudaya maju, unggul dan berdaya saing				v	Bagian transformasi sosial di kab/kota
		Peningkatan kualitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran	v				Bagian transformasi sosial di kab/kota
		Peningkatan budaya literasi melalui peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi sosial bagi terwujud masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter	v				Bagian transformasi sosial di kab/kota
		penuntasan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan pendidikan yang merata dan berkeadilan, peningkatan efektivitas pemberian subsidi pendidikan, serta peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran untuk membentuk manusia produktif	v				Bagian transformasi sosial di kab/kota
		Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	v	v			Bagian transformasi sosial di kab/kota
		Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	v	v			Bagian transformasi sosial di kab/kota khususnya pada tingkat pendidikan usia dini dan pendidikan dasar

No	RPJP Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Tranformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas		v			Bagian transformasi sosial di kab/kota
		Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan menengah	v	v			Bagian transformasi sosial di kab/kota khususnya pada tingkat pendidikan usia dini dan pendidikan dasar
		Penguatan kurikulum pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	v				Bagian transformasi sosial di kab/kota khususnya pada tingkat pendidikan usia dini dan pendidikan dasar
		penguatan pembelajaran berbasis digital melalui peningkatan kapasitas pendidik, peserta didik dan orang tua, serta penerapan pedagogi modern.	v				Bagian transformasi sosial di kab/kota khususnya pada tingkat pendidikan usia dini dan pendidikan dasar
		Penguatan keahlian dan kompetensi baru, pendidikan kewirausahaan, ekosistem kemitraan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)		v			-
		Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	v				Bagian transformasi sosial di kab/kota khususnya pada tingkat pendidikan usia dini dan pendidikan dasar

No	RPJP Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Tranformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	v	v	v	v	Bagian transformasi sosial di kab/kota khususnya pada tingkat pendidikan usia dini dan pendidikan dasar
		Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	v	v	v	v	Bagian transformasi sosial di kab/kota khususnya pada tingkat pendidikan usia dini dan pendidikan dasar
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	v				Bagian transformasi sosial di kab/kota khususnya pada tingkat pendidikan usia dini dan pendidikan dasar
		Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan	v				Bagian transformasi sosial di kab/kota khususnya pada tingkat pendidikan usia dini dan pendidikan dasar
		Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>).	v	v	v	v	-
		Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK	v	v			-

No	RPJP Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Tranformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Revitalisasi pendidikan nonformal serta penguatan pendidikan sepanjang hayat, pendidikan berbasis komunitas, dan life skills	v				-
		Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal dan rentan dengan memanfaatkan sistem regsossek agar tepat sasaran, tepat guna dan efisien	v	v	v	v	Bagian transformasi sosial di kab/kota
		Pemenuhan dan penyiapan sarana prasarana dan SDM pengawas ketenagakerjaan yang berkompeten, profesional dan adaptif teknologi	v				

Tabel 5-2 Arah kebijakan transformasi ekonomi

No	RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Tranformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Transformasi Ekonomi	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	v	v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	v	v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital <i>marketplace/platform</i> .	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota

No	RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	v	v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Pengelolaan Sumber Daya Pertanian yang berkualitas dan pengembangan teknologi tepat guna	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Pengembangan <i>closed loop model</i> pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market</i> , bank, dan asuransi pertanian.	v	v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.			v		Bagian transformasi ekonomi di Kab. Tanjabbar dan Tanjabtim
		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	v	v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	v	v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota

No	RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi <i>monitoring</i> , penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.		v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	v				
		Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	v	v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah yang dikembangkan pada kawasan strategis industri Bengkulu-Muaraenim-Palembang-Jambi (klaster industri hilirisasi batu bara, industri hilirisasi <i>bioproduct</i> , dan pembangkitan energi listrik).		v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi)	v	v	v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota

No	RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan <i>grid</i> tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i> ; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	v	v	v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, terutama pada metropolitan Jambi.	v	v	v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)	v	v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota

No	RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Tranformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	v	v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan.	v	v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan.			v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan.	v	v	v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jambi.	v	v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan, terutama pada metropolitan Jambi.	v	v	v		Bagian transformasi ekonomi di Kab/Kota (PKN dan PKW)

No	RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Tranformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	v	v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di Kota Jambi, kab. Batang Hari, Kab. Tanjabbar, Kab. Tanjabtim, Kab. Sarolangun
		<i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity kota</i> , sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i> , terutama pada kawasan perkotaan.	v		v		Bagian transformasi ekonomi di Kota Jambi dan Kota Sei. Penuh
		Penguatan Kelembagaan, Destinasi dan Promosi pariwisata yang berdaya saing berbasis Teknologi Infomasi	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	v	v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	v	v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Pengembangan <i>multi-infrastructure backbone & maritime backbone</i> , yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Sumatra.		v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota

No	RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Tranformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penguatan pengelolaan jalan provinsi	v	v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Mendorong Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera pada wilayah Jambi untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, terutama pada ruas: - Rengat-Jambi; - Jambi-Sekayu-Pangkalan Balai-Palembang; - Jambi-Muarasabak; - Jambi-Muarabulian; - Muarabulian-Sarolangun-Bangko; dan - Muarabulian-Muaratebo-Muarabungo.	v	v	v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		mendorong Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan, terutama pada jalan arteri/tol lingkaran Jambi.		v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		mendorong Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan <i>dry port</i> untuk KA logistik), terutama pada ruas Palembang-Jambi dan Pekanbaru-Jambi.			v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota

No	RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Tranformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Mendorong Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara	v	v			Bagian transformasi ekonomi di Kota Jambi, Kab. Bungo dan Kab. Kerinci
		Mendorong Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah	v	v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di Kota Jambi, Kab. Bungo dan Kab. Kerinci
		Penguatan Teknologi Tepat Guna melalui riset, inovasi dan SDM terampil guna mengoptimalkan pengembangan ekonomi berkelanjutan			v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	v	v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon.	v	v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Penerapan Teknologi Tepat Guna		v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Peningkatan produk bernilai tambah tinggi berbasis seni budaya Jambi, serta peningkatan partisipasi pada rantai pasok nasional dan global			v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota

No	RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Tranformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Mendorong Koperasi dan UKM menghasilkan produk yang masuk rantai pasok ekspor		v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.	v	v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Meningkatkan pertumbuhan Koperasi modern dan UKM naik kelas serta meningkatkan nilai tambah produk melalui industrialisasi KUKM	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Peningkatan produktivitas BUMD.	v	v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.	v	v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota

No	RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.	v	v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota

No	RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Tranformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau <i>digital skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.					Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Hilirisasi sumberdaya alam unggulan	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Penyiapan Infrastruktur dan SDM Industri	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Penguatan ekosistem Industrialisasi	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Pengelolaan Sumber Daya Pertanian yang berkualitas dan pengembangan teknologi tepat guna	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota

No	RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan keragaman wisata	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual, penumbuhan start up kreatif dan digital, serta penguatan kelembagaan ekonomi kreatif	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Meningkatkan pertumbuhan Koperasi modern dan UKM naik kelas serta meningkatkan nilai tambah produk melalui industrialisasi KUKM	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		peningkatan potensi pemuda dalam pengembangan teknologi, kemajuan kebudayaan, peningkatan inovasi dan kreatifitas	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		penataan kelembagaan dan regulasi dalam peningkatan kualitas pemuda dan olahraga	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		penciptaan lapangan kerja menengah ke atas di sektor-sektor produktif (termasuk lapangan kerja hijau, biru dan digital)	v	v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota

No	RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Tranformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penguatan pelatihan re-skilling dan up-skilling serta integrasi soft skills dengan prinsip pembelajaran sepanjang hayat dan memanfaatkan teknologi	v	v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Penguatan sistem perlindungan adaptif bagi ternaga kerja, termasuk tenaga kerja rentan	v	v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Percepatan penyediaan informasi pasar kerja yang mutakhir, kredibel, mudah diakses dan dengan jangkauan luas	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		pengembangan kawasan sentra produksi pangan sebagai sumber ekonomi dan proses digitasi pertanian serta pembangunan teknologi pertanian yang berkualitas	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Optimalisasi pemanfaatan persetujuan perhutanan sosial	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		penerapan ekonomi hijau	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Pendayagunaan dan pengelolaan SDA yang berkualitas	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota

No	RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		mendorong penggunaan kendaraan listrik dan penyiapan infrastruktur pendukungnya	v	v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		pemenuhan akses digital di seluruh wilayah	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		melanjutkan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung	v	v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Penyiapan kebijakan dan kelembagaan	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		akuntabel berbasis digital	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga dan bisnis	v	v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Mengembangkan kebijakan perancangan Ekosistem inovasi	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		mendorong inovasi daerah dan produktivitas tenaga kerja	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		mengoptimalkan pendapatan asli daerah	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota

No	RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor	v		v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		melanjutkan hilirisasi sumber daya alam unggulan		v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Penguatan Ekosistem industri yang berkelanjutan		v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Penguatan kompleksitas Produk Industri		v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		mewujudkan Jambi sebagai destinasi unggulan regional yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi		v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Peningkatan keterpaduan pariwisata dengan sektor pembangunan lainnya		v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		pengembangan kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda berbasis digitasi teknologi		v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		penataan sistem pembinaan pemuda dan olahraga yang terintegrasi dan berkesinambungan		v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota

No	RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Tranformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		perluasan lapangan kerja menengah ke atas di sektor-sektor produktif (termasuk lapangan kerja hijau, biru dan digital)	v	v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Lanjutan pengembangan kawasan sentra produksi pangan sebagai sumber ekonomi dan proses digitasi pertanian serta pembangunan teknologi pertanian yang berkualitas		v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Optimalisasi teknik pengelolaan persetujuan perhutanan sosial melalui pengembangan komoditi unggulan		v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		optimalisasi penerapan ekonomi hijau		v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Penerapan Sumber Daya Alam dan Pembangunan yang berwawasan lingkungan		v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		pengembangan kawasan industri/hilirisasi di wilayah timur Provinsi Jambi		v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Digitalisasi di semua sektor		v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Penyiapan sarana prasarana perhubungan		v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota

No	RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Tranformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		perwujudan PKN dan kawasan strategis		v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota (PKN dan KSP)
		Penyediaan angkutan massal		v			Bagian transformasi ekonomi di Kab/Kota (PKN dan PKW)
		Pemenuhan kebutuhan listrik rumah tangga dan bisnis	v	v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		penguatan infrastruktur teknologi		v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		percepatan peningkatan produktivitas		v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		optimaliasi PAD dan sumber pendanaan non pemerintah		v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		peningkatan daya saing produk hilirisasi			v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Akselerasi Industri produk jadi	v	v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Penguatan Daya Saing Indutri			v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota

No	RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Tranformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Mewujudkan Jambi sebagai destinasi unggulan nasional yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi			v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Terwujudnya Jambi sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan tingkat Asean (Asia)			v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		peningkatan daya saing industri berbasis hak kekayaan budaya dan intelektual			v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Peningkatan diversifikasi produk KUKM berkualitas ekspor			v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		peningkatan kualitas SDM pemuda yang adaptif dan berdaya saing global			v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		peningkatan kualitas SDM pemuda dan olahraga yang adaptif dan berdaya saing global			v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Peningkatan efisiensi, modernisasi dan nilai tambah sektor pertanian			v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Peningkatan produktivitas yg berkelanjutan melalui implementasi teknologi			v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota

No	RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Tranformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		instrumen kebijakan ekonomi hijau dan penerapan ekonomi biru yang komprehensif			v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Pengembangan Sumber Daya Alam mengutamakan aspek keselamatan dan keamanan sistem			v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		pemanfaatan energi baru dan terbarukan			v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga berbasis listrik			v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Pemanfaatan digitalisasi			v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Peningkatan sarana prasarana perhubungan			v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Efisiensi jaringan angkutan pelayaran dan penerbangan sebagai tulang punggung konektivitas dan rantai nilai yang terpadu secara domestik dan terhubung secara global			v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Pemenuhan kebutuhan listrik publik, industri dan transportasi			v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Implementasi kemajuan teknologi untuk Peningkatan produktivitas sumber daya secara berkelanjutan			v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		penerapan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi			v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota

No	RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		peningkatan, pemanfaatan, dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber pendanaan non pemerintah			v		Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Perluasan pemasaran produk hilirisasi				v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Perluasan skala ekspansi industri				v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Pembangunan Hilirisasi sektor pertanian melalui penguatan kelembagaan, regulasi serta pembiayaan ekonomi berkelanjutan sebagai instrumen pendanaan inovatif				v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		mewujudkan Jambi sebagai destinasi unggulan Asia yang berkelanjutan dan bernilai tambah tinggi				v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Terwujudnya Jambi Sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan tingkat Dunia				v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		pengembangan hub ekonomi kreatif dan digital yang didukung rantai pasok yang inklusif dan berkelanjutan				v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		KUKM tangguh, mandiri, dan berdaya saing				v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		mewujudkan pemuda tangguh dan mandiri secara ekonomi				v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota

No	RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		terwujudnya pemuda tangguh dan olahraga maju				v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Fasilitasi mobilitas pekerja termasuk untuk mengisi pasar kerja global			v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Penetapan upah Provinsi berbasis produktivitas dan berkeadilan	v	v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing serta terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar	v				Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Peningkatan pendapatan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS)	v	v			Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		menjadi daerah percontohan penerapan ekonomi hijau dan optimalisasi penerapan ekonomi biru			v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Pelestarian dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam yang berkelanjutan	v	v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota

No	RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Tranformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan di seluruh wilayah dengan dukungan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekon0mi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas	v	v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Optimalisasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan			v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		penggunaan kendaraan listrik dan peralatan rumah tangga berbasis listrik secara luas		v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Pemanfaatan digitalisasi	v	v	v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota
		Penguatan integrasi antarmoda transportasi darat, laut dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas penumpang	v	v			Bagian transformasi ekonomi di Kab/Kota (PKN dan PKW)
		Peningkatan angkutan massal	v	v			Bagian transformasi ekonomi di Kab/Kota (PKN dan PKW)
		peningkatan sinergi pendanaan pemerintah dan non pemerintah			v	v	Bagian transformasi ekonomi di kab/kota

Tabel 5-3 Arah kebijakan transformasi tata kelola pemerintahan

No	RPJP Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Tranformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Transformasi Tata Kelola pemerintahan	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	v	v	v	v	Bagian transformasi tata kelola pemerintah di kab/kota
		peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	v	v	v	v	Bagian transformasi tata kelola pemerintah di kab/kota
		Peningkatan kualitas pengelolaan Diklat	v				Bagian transformasi tata kelola pemerintah di kab/kota
		peningkatan kualitas ASN berbasis merit	v				Bagian transformasi tata kelola pemerintah di kab/kota
		Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	v	v			Bagian transformasi tata kelola pemerintah di kab/kota
		Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	v	v	v	v	Bagian transformasi tata kelola pemerintah di kab/kota

No	RPJP Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Tranformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	v	v	v	v	Bagian transformasi tata kelola pemerintah di kab/kota
		penerapan manajemen resiko perencanaan dan pengendalian pembangunan	v	v	v	v	Bagian transformasi tata kelola pemerintah di kab/kota
		regulasi berbasis teknologi informatif		v	v	v	Bagian transformasi tata kelola pemerintah di kab/kota
		terwujudnya kelembagaan yang kolaboratif, proporsional dan berkompeten		v			Bagian transformasi tata kelola pemerintah di kab/kota
		terwujudnya kelembagaan yang adaptif, SDM ASN yang kompetitif			v		Bagian transformasi tata kelola pemerintah di kab/kota
		terwujudnya kelembagaan yang kredibel dan SDM ASN yang sejahtera				v	Bagian transformasi tata kelola pemerintah di kab/kota
		Pemenuhan dan penguatan infrastruktur dan SDM TIK	v				Bagian transformasi tata kelola pemerintah di kab/kota
		Mendorong inovasi daerah dalam pelayanan data kependudukan	v	v	v	v	Bagian transformasi tata kelola pemerintah di kab/kota
		Penyelenggaraan Diklat yang kolaboratif		v			Bagian transformasi tata kelola pemerintah di kab/kota

No	RPJP Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Tranformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas		v			Bagian transformasi tata kelola pemerintah di kab/kota
		Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pelayanan publik		v			Bagian transformasi tata kelola pemerintah di kab/kota
		Penyelenggaraan Diklat yang Adaptif dan kompetitif			v		Bagian transformasi tata kelola pemerintah di kab/kota
		Pengembangan pemanfaatan TIK di seluruh sektor			v		Bagian transformasi tata kelola pemerintah di kab/kota
		Percepatan penerapan teknologi pelayanan data kependudukan			v		Bagian transformasi tata kelola pemerintah di kab/kota
		Penyelenggaraan diklat indispensabilitas dan rialitas				v	Bagian transformasi tata kelola pemerintah di kab/kota
		Optimalisasi pemanfaatan TIK di seluruh sektor				v	Bagian transformasi tata kelola pemerintah di kab/kota
		Terwujudnya integrasi data kependudukan				v	Bagian transformasi tata kelola pemerintah di kab/kota
		Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif	v	v	v	v	Bagian transformasi tata kelola pemerintah di kab/kota

No	RPJP Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045		Periode Pelaksanaan RPJMD				Keterangan
	Transformasi	Arah Kebijakan Tranformasi	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	v				Bagian transformasi tata kelola pemerintah di kab/kota

5.4 Indikator Utama Pembangunan

Indikator utama pembangunan daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Adapun sasaran pokok dan indikator utama pembangunan jangka panjang Provinsi Jambi Tahun 2025 – 2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5-4 Sasaran pokok dan indikator utama pembangunan

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045	Baseline 2025	Target Akhir Periode RPJMD			
					I	II	III	IV
1	Terwujudnya Provinsi Jambi sebagai daerah produktif	1 Pemerataan akses dan kualitas kesehatan	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	74,14	75,45	76,77	78,08	79,39
			2. kesehatan ibu dan anak a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	107	84	61	38	15

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045	Baseline 2025	Target Akhir Periode RPJMD			
					I	II	III	IV
			b) Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	11,38	9,25	7,13	5
			3. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)					
			a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	91	93,25	95,5	97,75	100
			b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment succes rate) (%)	91	93,25	95,5	97,75	100
		2 Pemerataan akses dan kualitas pendidikan	4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	89	91,63	94,25	96,88	99,5
			5. hasil pembelajaran:					
			a) Rata-rata nilai PISA - persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
			a) literasi membaca	9,09-18,18	18,18 - 27,27	27,27 - 36,36	45,45 - 54,54	63,64 - 72,73
			b) numerasi	0,00 - 2,00	9,09-18,18	18,18 - 27,27	27,27 - 36,36	45,45 - 54,54

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045	Baseline 2025	Target Akhir Periode RPJMD			
					I	II	III	IV
			- persentase SMA/SMK yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: a) literasi membaca b) numerasi	25,45 – 27,45 13,57 – 15,57	35,415 25,065	45,38 36,56	55,345 48,055	65,31 – 67,31 59,55 – 61,55
			b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,25	9,9325	10,615	11,2975	11,98 -12,03
			c) Harapan lama sekolah	13,32-13,32	13,6775	14,035	14,3925	14,75-14,78
			6. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	10,21	10,26	10,30	10,35	10,21-11,39
			7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	57,2	61,65	66,1	70,55	75
		3 Perlindungan Sosial dan ketenagakerjaan yang adaptif dan berkeadilan	8. Tingkat kemiskinan (%)	7,45 -7,52	6,46	5,48	4,49	3,5 - 5,5
			9. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan provinsi (%)	29,94	42,815	55,69	68,565	81,44

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045	Baseline 2025	Target Akhir Periode RPJMD			
					I	II	III	IV
			10. Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	27	34,75	42,5	50,25	58
2	Terwujudnya Provinsi Jambi sebagai Provinsi "hijau" yang maju	4 Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi	11. Rasio PDRB Industri pengolahan (%)	9,86 - 9,91	10,71	11,56	12,41	13,22-13,31
			12. pengembangan pariwisata					
			a) Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum (%)	1,21	1,42	1,64	1,85	2,06
			b) Jumlah tamu wisatawan mancanegara (hotel berbintang) (ribu orang)	5,66	7,78	9,91	12,03	14,15
			13. Distribusi PDRB sektor tersier (%)	35,32	35,5	35,8	36,0	36,25
			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
			a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%) - Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	11,46	12,75	14,03	15,32	16,6
			- proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	3,45	4,84	6,23	7,61	9
			b) Rasio kewirausahaan provinsi	5,19	6,89	8,60	10,30	12

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045	Baseline 2025	Target Akhir Periode RPJMD			
					I	II	III	IV
			c) rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	1,22	2,54	3,86	5,18	6,5
			d) return on aset (ROA) BUMD (%)	3,37	3,54	3,71	3,88	4,05
			15. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,25 - 4,39	3,81	3,38	2,94	2,5 -3,1
			16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	54,8	57,4	60	62,6	65,2
			17. Tingkat Penguasaan IPTEK					
			a) Pengeluaran Iptek dan inovasi (persen APBD)	0,32	0,35	0,38	0,41	0,45
			b) peringkat Indeks Inovasi Daerah (peringkat)	27	25	23	20	18
		5 Penerapan ekonomi hijau	18. Tingkat penerapan ekonomi hijau					
			a) Indeks Ekonomi Hijau	73,61	78,41	83,21	88,00	92,8
			b) Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)	30,62	44,58	58,55	72,51	86,47
		6 Transformasi digital	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,9	6,25	6,6	6,95	7,3
		7 Integrasi ekonomi daerah dan global	20. Koefisien Variasi harga antar wilayah tingkat provinsi	7,78	7,075	6,37	5,665	4,96

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045	Baseline 2025	Target Akhir Periode RPJMD			
					I	II	III	IV
		8 Perkotaan dan perdesaan serta kawasan strategis provinsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	21. pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	19,1	17,55	16	14,45	12,9
			22. Ekspor barang dan jasa (% PDRB)	17,9	18,95	20	21,05	22,1
			23. Kota maju, inklusif dan berkelanjutan					
			a) Kontribusi PDRB PKN terhadap PDRB Provinsi (%)	13,9	14	14,2	14,3	14,5
			b) Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, terjangkau dan Berkelanjutan (%)	68,84	76,63	84,42	92,21	100
3	Terwujudnya Provinsi Jambi sebagai daerah tujuan investasi utama	9 Tata kelola pemerintahan daerah yang tangguh, berintegritas dan adaptif	c) Persentase desa mandiri (%)	18,11	28,39	37,86	47,32	53,63
			24. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	2,19 (2022)	3,5	3,9	4,5	5
			25. Indeks pelayanan publik	4,04 (2022)	4,29	4,5	4,77	5
			26. Anti korupsi					
			a) indeks integritas provinsi (hasil SPI)	73,97	77,755	81,54	85,325	89,11
			27. Pembangunan Hukum:					
			a) Indeks Reformasi Hukum	41,15	47,5	53,95	60,05	67,15
			b) Persentase Perda yang ditegakan	100	100	100	100	100

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045	Baseline 2025	Target Akhir Periode RPJMD			
					I	II	III	IV
			28. Persentase implementasi kerjasama daerah dari kerjasama yang dibangun	100	100	100	100	100
		10 Keamanan dan ketertiban umum, Kerukunan hidup serta budaya toleransi masyarakat	29. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	65,56	69,905	74,25	78,595	82,94
			30. Kerukunan dan toleransi: a) Indeks Demokrasi Indonesia b) Indeks kerukunan Umat Beragama (IKUB)	sedang 65,81-65,92	sedang 67,40 -67,79	sedang 68,99 - 69,67	tinggi 70,58 - 71,54	tinggi 72,18-73,42
		11 Stabilitas ekonomi makro daerah	31. Rasio Penerimaan Daerah terhadap PDRB (%) a) PAD terhadap pendapatan daerah (%) b) pajak Daerah terhadap PAD (%) c) retribusi Daerah terhadap PAD (%) d) Rasio pajak Daerah terhadap PDRB (%)	 44,64 86,77 0,87 1,2	 45,50 86,85 0,90 1,425	 46,60 86,93 0,94 1,65	 47,90 87,00 1,03 1,875	 48,8 87,44 1,2 2,1
			32. Tingkat Inflasi (%)	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	3 ± 1	2,5 ± 1
			33. pendalaman/intermediasi sektor keuangan:					

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045	Baseline 2025	Target Akhir Periode RPJMD			
					I	II	III	IV
			a) total dana pihak ketiga/PDRB (%)	18,5	27,875	37,25	46,625	56
			b) Jumlah peserta dana pensiun provinsi/jumlah angkatan kerja provinsi (%)	0,09	0,12	0,16	0,19	0,22
			c) nilai transaksi saham provinsi berupa nilai rata-rata tahunan	2.219,83 (angka bersifat sementara)	5.312	8.545	11.224	14.126,16 (angka bersifat sementara)
			d) total kredit/PDRB (%)	18	27	36	45	54
			34. Tingkat inklusi keuangan provinsi (%)	91,35	93,2675	95,185	97,1025	99,02
		12 Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif dan berkebudayaan maju	35. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	54,81-54,83	57,52-57,73	60,21-60,84	63,54-64,01	66,98-67,53
			36. Keluarga berkualitas: a) Pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk serta penduduk tumbuh seimbang - Angka Kelahiran total (<i>Total Fertility Rate</i> /TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,23	2,17	2,13	2,08	2,05

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045	Baseline 2025	Target Akhir Periode RPJMD			
					I	II	III	IV
			- Angka Prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	66,74	70,21	73,86	77,7	81,73
			- Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	8,66	7,46	6,45	5,6	4,88
			- Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific fertility Rate/ASFR 15-19)	26,12	24,49	22,97	21,56	20,25
			b) Pembangunan keluarga berkualitas:					
			- Indeks pembangunan Kualitas Keluarga	72,41-72,42	73,25 - 73,42	74,5 - 74,82	75,48 - 74,01	77,52-77,63
			- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	64,3	68,7	73,1	77,6	82
			37. Indeks Ketimpangan gender (IKG)	0,5	0,45-0,42	0,4 - 0,38	0,35 - 0,30	0,25-0,23
		13 Lingkungan Hidup berkualitas	38. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman hayati Daerah	0,562	0,5925	0,623	0,6535	0,684
			39. kualitas Lingkungan Hidup a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,29	73,70	74,1	74,51	74,91

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045	Baseline 2025	Target Akhir Periode RPJMD			
					I	II	III	IV
			b) Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman	12	21,5	31	40,5	50
			c) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	16,56 (2022)	33,67	50,78	67,89	85
			d) Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	24,89	43,67	62,45	81,22	100
		14 Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan	40. ketahanan energi, air dan pangan					
			a) ketahanan energi - konsumsi listrik perkapita (Kwh)	1.060	1565	2070	2575	3.080
			- intensitas energi primer	111	105,75	100,5	95,25	90
			b) prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>prevalence of undernourishment</i>) (%)	12,14	9,73	7,32	4,91	2,5
			c) ketahanan air - akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	34,66	50,995	67,33	83,665	100
			- kapasitas air baku (m3/detik)	0,29	1,445	2,6	3,755	4,91

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2045	Baseline 2025	Target Akhir Periode RPJMD			
					I	II	III	IV
		15 Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	41. Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDRB (%)					
			- Indeks Resiko Bencana Provinsi	133,49	127,315	121,14	114,965	108,79-87,70
			42. Persentase penurunan emisi GRK (%)					
		16 Ketimpangan antar wilayah dan pendapatan berkurang	a) Kumulatif	20,63	26,605	32,58	38,555	44,53
			b) tahunan	36,51	47,9875	59,465	70,9425	82,42
			43. Rasio Gini	0,337 - 0,341	0,332 - 0,339	0,32 - 0,335	0,315 - 0,33	0,31 - 0,326
		17 Daya saing infrastruktur daerah	44. Indeks Williamson	0,365	0,355	0,350	0,345	0,34
			45. Indeks daya saing infrastruktur	2,5	2,79	3,08	3,36	3,65

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 merupakan pedoman dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Jambi, serta terpadu dan searah dengan pembangunan nasional dalam periode 2025 - 2045. Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Provinsi Jambi ini tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen dan dukungan DPRD Provinsi Jambi, serta kerja sama dengan perguruan tinggi dan masyarakat sipil. Pelaksanaan RPJPD Provinsi Jambi juga ditentukan kemitraan dengan pihak swasta. Dalam penerapan RPJPD ini diperlukan pemahaman dan pelaksanaan oleh seluruh komponen pemangku kepentingan. Selanjutnya dokumen RPJPD akan menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama dua puluh tahun menuju Provinsi Jambi yang **Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.**

Seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJPD beserta implementasi jangka menengah dan tahunannya agar rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sesuai dengan perannya seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama dua puluh (20) tahun yang tertuang dalam dokumen RPJPD ini. Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas.

Pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang daerah perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun non

pemerintah secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Selain itu, pengendalian secara kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan juga harus dilakukan untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan tersebut. Pengendalian dimulai dari tahapan perencanaan hingga pelaksanaan dengan menerapkan manajemen resiko, serta perlu didukung oleh regulasi dan kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif sehingga pelaksanaannya berjalan efektif.

Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045.

6.1.1 Manajemen Resiko pembangunan

6.1.1.1 Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian berkala dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Ruang lingkup pengendalian terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Pengendalian perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain prioritas pembangunan daerah serta menjamin ketersediaan anggaran baik dari pemerintah maupun non pemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan tahunan. Pengendalian jangka menengah mencakup:

- Penjabaran RPJPD Provinsi dalam RPJMD Provinsi, maupun penjabaran RPJMD Provinsi dalam RPJMD Kabupaten/ kota dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.
- Penetapan indikator keberhasilan
- Konsistensi perencanaan dan penganggaran
- Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya

Pengendalian tahunan mencakup:

- penjabaran RPJMD Provinsi dalam RKPD Provinsi dan penjabaran RKPD Provinsi dalam RKPD Kabupaten/Kota serta Renja Perangkat Daerah
- Penetapan indikator keberhasilan
- Kesiapan *readiness criteria* prioritas pembangunan
- Konsistensi perencanaan dan penganggaran
- Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya

b. Pengendalian pelaksanaan

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan rencana tahunan. Monitoring dan evaluasi tersebut mencakup:

- Monitoring kegiatan
- Monitoring mitigasi risiko pembangunan
- Evaluasi pencapaian sasaran pembangunan
- Evaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan.

6.1.1.2 Kerangka Regulasi

Pengendalian pembangunan daerah harus didukung oleh tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan dan manajemen kinerja. Selain itu dibutuhkan pula kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif, serta mampu mengoordinasi pengendalian lintas Perangkat Daerah dan lintas pemerintahan.

6.1.2 Sistem Insentif

Guna mendorong partisipasi aktif semua pemangku pembangunan perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif untuk pemangku pembangunan dari unsur pemerintah diintegrasikan dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/ kota terhadap pencapaian pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator makro daerah, pencapaian indikator-

indikator kinerja utama, dan pencapaian program/kegiatan prioritas. Sedangkan bagi pemangku pembangunan nonpemerintah, sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

6.1.3 Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif. Komunikasi publik RPJPD Provinsi Jambi Tahun 2025-2045 berinsip “tidak ada yang tertinggal” dan partisipasi yang bermakna, dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat dan objektif. Komunikasi publik melibatkan empat pemangku kepentingan utama, yaitu Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan masyarakat. Komunikasi dengan Pemerintah Pusat dilakukan melalui rapat konsultasi dengan K/L guna mendapatkan masukan dan dukungan terhadap prioritas daerah. Komunikasi kepada Perangkat Daerah dilakukan melalui rapat koordinasi untuk menerima masukan dari Perangkat Daerah. Komunikasi dengan Pemerintah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Sedangkan komunikasi dengan masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik atau dukungan.

6.1.4 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, perubahan kebijakan nasional dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan untuk pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, target RPJPD dapat dimutakhirkan dalam RPJMD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

6.2 Pembiayaan Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan Jambi yang maju, sejahtera dan berkelanjutan tentu saja memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (a) penguatan perencanaan pembiayaan melalui pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak; (b) pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan dan yang mendukung kerjasama ekonomi lainnya; (c) penguatan an perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerjasama pemerintah dan adan usaha; (d) penerapan skema-skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi; (e) optimalisasi pemanfaatan aset.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik dilakukan melalui: (a) pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang; (b) inovasi produk pembiayaan syariah; (c) inovasi pembiayaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pembiayaan hijau, biru dan sirkular; (d) produk pembiayaan berbasis transaksi seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun bursa tematik lainnya; (e) penguatan bauran pendanaan melalui pemanfaatan dana bersifat katalitik seperti filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non publik dalam pembangunan daerah.

Peningkata kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik perlu diikuti dengan manajemen investasi yang berkualitas sehingga kapasitas pembiayaan yang dapat digunakan secara optimal. Beberapa langkah penguatan manajemen investasi publik tersebut mencakup: (a) penajaman identifikasi investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (b) penyempurnaan proses penyiapan dan penilaian proyek investasi publik; (c) penyelarasan prioritas investasi publik skala nasional dan daerah; (d) pelibatan swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (e)

penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan dan organisasi serta kapasitas sumberdaya manusia manajemen investasi publik; dan (f) penguatan transparansi dan akuntabilitas atas seluruh aspek investasi publik.